

“Pengorganisasian (penggalangan) rakyat, pada akhirnya, tiada lain adalah menggerakkan, membangkitkan ‘**kehendak untuk bertindak dan tindakan untuk melakukan perubahan,**’ suatu *praxis*... Tindakanlah yang membuat sesuatu yang pada mulanya nampak sepele dan kecil menjadi sesuatu yang besar dan bermakna, membuat sesuatu yang semula nampak mustahil menjadi mungkin. Ibarat mukjizat Musa membelah laut.”

FINAL

■ Analisis Sosial ■ 17+

ISBN: 978-602-0857-65-7



9 786020 857657

KERJASAMA PENERBITAN:

HuMa *PerDikAm* involvement

MEMBELAH LAUT

PANDUAN PENDIDIKAN DASAR PENGORGANISASIAN RAKYAT

FINAL

MEMBELAH LAUT

insist

ROEM TOPATIMASANG
DONY HENDRO CAHYONO

FINAL

MEMBELAH LAUT

PANDUAN PENDIDIKAN DASAR PENGORGANISASIAN RAKYAT

ROEM TOPATIMASANG
DONY HENDRO CAHYONO

FINAL

KERJASAMA PENERBITAN:

HuMa *PerDikAn*  involvement
insist
PRESS

Topatimasang, Roem & Dony Hendro Cahyono (2018),
Membelah Laut: Panduan Pendidikan Dasar Pengorganisasian Rakyat.
Yogyakarta: INSISTPress.

©Komite INVOLVEMENT
Cetakan pertama, Agustus 2018

PERPUSTAKAAN NASIONAL, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-0857-65-7

1. Gerakan & Perubahan Sosial 2. Organisasi Masyarakat 3. Panduan Pendidikan
I. JUDUL

xxvi+ 260 halaman
17 x 24 cm, sampul kertas

Kerjasama penerbitan:

HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat & Ekologi),
PerDikAn (Perkauman Pendidik untuk Keadilan), dan
INVOLVEMENT (Indonesian Volunteers for Social Movement).

Pemerika bahasa & aksara: Achmad Choirudin

Foto-foto: Beta Pettawaranie

Gambar-gambar: Mail Sukribo, Donald Bason, Donito

Rancang sampul & komputografi: Rumah Pakem

INSISTPress
Jalan Raya Kaliurang Km.18
Sambirejo, Pakembinangun,
Sleman, Yogyakarta 55582

+62 85102594244

press@insist.or.id

INSISTPress

+62 274 895390

insistpress.com

@insistpress

PENGHARGAAN & TERIMA KASIH

Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, beragam ras, suku, bentuk sumberdaya, dan corak kehidupan. Sambung menyambung dengan beragam keanekaragaman cara hidup, corak mata pencaharian, dan rupa-rupa bentuk pemanfaatan alam. Itulah Indonesia, negeri yang masyhur dengan keragaman, kaya dengan kebhinekaan. Alam yang terbentang, menjadi ruang hidup dan ruang belajar kehidupan, dimana setiap jengkalnya menjadi sekolah, setiap hal yang ada menjadi ilmu, dan setiap makhluknya menjadi guru. Sekolah, Ilmu, dan Guru, tiga hal dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting hingga pada masanya, kepada tiga hal inilah penghargaan dan terima kasih harus kami ucapkan.

Terutama untuk rekan-rekan pegiat masyarakat yang sohor dengan sebutan *community organiser*. Dari merekalah buku ini tersusun sebagai kompilasi pengalaman. Penghargaan dan terima kasih pada segenap keluarga Indonesian Volunteer for Social Movement (INVOLVEMENT) di Indonesia dan Timor Lorosaè: rekan-rekan Pengelola Sekolah Rakyat Madivun di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara; Sekolah Banjar di Bali; Sekolah Kampung di Pulau Buaya, Sorong, Papua Barat; Sekolah Transformasi Sosial (STS) Mitra Aksi di Jambi, STS Kaliboto di Karanganyar, Jawa Tengah; STS Inninawa dan Sekolah Rakyat (SR) Tanete Institute (TANI) di Sulawesi Selatan; STS Perdikan dan angkatan Sekolah Perempuan di Sleman, Yogyakarta; SR Butuni di Kepulauan Buton, Escolae Ukun Rasik An di Los Palos, Timor Leste; dan para pendidik yang tak pernah letih mengembangkan pendidikan populer dalam rangka membangun kesadaran kritis, membangun hal-hal yang diyakini sebagian orang mustahil menjadi kenyataan.

Kepada rekan-rekan pegiat keadilan di HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) dan seluruh jaringan anggotanya, yang pada 2017 lalu berkolaborasi menyelenggarakan sekolah para pegiat gerakan sosial bersama-sama selama 35 hari. Salah satu hasilnya adalah kompilasi pengalaman terstruktur dalam buku ini. Selama beberapa tahun terakhir, HuMa dan jaringannya telah menjadi salah satu proponent nasional advokasi isu perhutanan sosial yang telah melahirkan beberapa kebijakan publik penting, antara lain, pengakuan resmi dan penyerahan kembali kawasan hutan ulayat tradisional kepada kesatuan hukum masyarakat tempatan yang memang memiliki hak asal-usul atas kawasan tersebut. Dalam rangka implementasi kebijakan itulah kemudian

ditemukan bahwa banyak dari proses advokasi selama ini sering terlalu terpusat di aras kampanye dan lobi, sehingga kerja-kerja pengorganisasian di tingkat akar rumput sering tidak tergarap dengan baik, bahkan tak jarang sangat artifisial. Padahal, salah satu kaidah asas advokasi adalah bahwa suatu kebijakan publik yang berhasil diperjuangkan, idealnya lahir dari suatu proses dialog kritis di komunitas basis sebagai subjek utamanya. Buku ini adalah salah satu hasil dari program pendidikan khusus untuk memperkuat kembali landasan dasar pengorganisasian komunitas basis bagi para pelaku advokasi kebijakan. Untuk itu, terima kasih Kepada Dahniar Andriani, selaku Direktur HuMa, yang tekun memfasilitasi diskusi antar tim perancang program pendidikan ini: Rikardo Simarmata, Andik Herdiyanto, Agung Wibowo, Tandiono Bawor Purbaya, Yustisia Rahman, dan Bung Bimantara 'Boim' Aji Wardana. Dengan merekalah para penyusun buku ini berproses dan terlibat saling melengkapi, berdebat, dan merancang pola-pola yang paling relevan dengan metode dan kebutuhan belajar para peserta, juga mengusahakan dukungan dana agar buku ini terbit untuk pembaca yang lebih luas.

Buku ini juga dirakit dari sejumlah pengalaman praktik pengorganisasian oleh jaringan South East Asia Popular Communication Programme (SEAPCP). Terima kasih kepada tim inti jaringan regional ini: Tan Jo Ham, di Malaysia, Myo Minh di Burma, Wattana di Cambodia, Mana Nella dan Maung Nuno di Timor Lorosae, Son di Vietnam, Lawan Sarovat di Thailand, serta Nani Zulminarni dan Made Suarnatha di Indonesia. Juga penghargaan untuk segenap alumni sekolah INVOLVEMENT yang menyumbangkan waktu dalam proses pendidikan dengan menggunakan metode yang tersaji dalam rancangan buku ini, terutama pada Lany Verayanti dari Padang, I Gde Sugiarta dari Ubud, Dogie Irawan dari Kerinci, Efreem Silubun dari Kei Besar, Anies Sofwan dari Wonosobo, dan Bung Asfriyanto dari Bulukumba.

Pun, tidak bisa kami lupakan para Wali Amanah, anggota Dewan Presidium INSIST, anggota Dewan Pendidikan INSIST, Anggota Komite Akademik dan para guru Sekolah INVOLVEMENT: Noer Fauzi Rachman, Toto Rahardjo, Zoemrotin Susilo, Tini S. Hadad, Prof. M. Baiquni, Ahmad Mahmudi, Hira Jamthani, Hambali, Melky Baran, Rahadi, I Putu Ardana, Puthut EA, dan Saleh Abdullah. Kepada rekan-rekan di Sekretariat Konfederasi INSIST dan INSISTPress, yang juga berperan sebagai komite pelaksana sekolah INVOLVEMENT: Cak Anwar, ndan Ndin Choirudin, Mas Parjono, Bung Anton, Bung Satrio Kusumo, dan Novitasari.

Buku ini pada dasarnya karya bersama mereka semua, yang dengan rendah hati tetapi percaya diri, penuh dengan gelora tetapi tidak haus ketenaran, lebih mengedepankan komitmen pada pendidikan dan pengorganisasian rakyat, setia pada proses dan tak terburu-buru meraih hasil. Sekalipun tersaji dari kompilasi pengalaman berbagai orang, namun tata urutan, metode penyajian, dan tanggungjawab isi buku secara keseluruhan tetaplah pada para penyusun buku ini. ❖

Pengorganisasian Masyarakat? Pengorganisasian Rakyat?

Ini adalah dua istilah yang mungkin mulai lagi sering dan acapkali terdengar, terutama dalam perbincangan tentang gerakan sosial. Tetapi, apakah sebenarnya pengorganisasian masyarakat itu? Apa makna dan tujuan sejatinya? Bentuknya seperti apa?

Saat ini, pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya muncul pada kalangan awam, melainkan juga pada mereka yang selama ini mengaku sebagai ‘pendamping’ ataupun ‘pemberdaya’ masyarakat. Masih cukup banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak terlalu paham apa arti dan makna sejati dari pengorganisasian masyarakat.

Perlu disadari, pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting yang menjadi landasan melakukan advokasi kebijakan publik. Proses-proses pengorganisasian masyarakat adalah kerja-kerja militan yang berlangsung di aras ‘akar rumput’ yang menentang perbedaan kelas dengan berbagai bias dan implikasinya, baik dalam anggapan dasar maupun dalam praktik kesehariannya. Sikap egalitarian dan keyakinan pada keadilan sosial adalah kunci dasar dalam kerja-kerja pengorganisasian masyarakat. Karena pada dasarnya, kerja-kerja pengorganisasian secara material tidak menguntungkan pelakunya, yakni sang pengorganisir itu sendiri. Kerja-kerja pengorganisasian justru merupakan proses untuk mempermudah warga masyarakat mencapai tujuan-tujuan mereka sebagai pelaku dan penerima manfaat utama yang dihasilkan dari proses tersebut.

Buku ini merupakan kumpulan hasil belajar dalam bentuk panduan praktis melaksanakan pendidikan bagi mereka yang ingin melakukan kerja-kerja pengorganisasian masyarakat sebagai bagian dari gerakan perubahan sosial. Buku ini diolah kembali dari berbagai berkas-berkas lama bahan-bahan pendidikan dan pelatihan pengorganisasian masyarakat dan analisis sosial oleh para fasilitator pendidikan rakyat jaringan INSIST (Indonesian Society for Social Transformation) pada dasawarsa 1980 sampai 1990-an. Ketika Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat (HuMa) bekerjasama dengan

PerDikAn (Perkauman Pendidik untuk Keadilan) --salah satu organisasi anggota INSIST-- pada November 2017 sampai Maret 2018, menyelenggarakan pendidikan khusus bagi para pengorganisir dari beberapa organisasi yang bergerak dalam isu perhutanan sosial yang dikoordinasikan secara nasional oleh HuMa, berkas-berkas lama yang terserak itu digunakan kembali. Hal ini terutama dimaksudkan agar peserta pendidikan khusus tersebut memahami pengertian dasar dan proses-proses pengorganisasian rakyat yang tidak banyak lagi dikaji dan dikembangkan di kalangan organisasi-organisasi nonpemerintah dan gerakan sosial di Indonesia, terutama sejak 'reformasi' sistem politik nasional pada tahun 1998. Karena, dalam kenyataannya memang, sejak awal dasawarsa 2000-an, sebagian besar organisasi-organisasi nonpemerintah dan gerakan sosial di negeri ini lebih memusatkan perhatian mereka pada kerja-kerja advokasi kebijakan dan kampanye pendapat umum, meninggalkan kerja-kerja pengorganisasian yang melelahkan dan tidak terkenal di tingkat akar rumput yang justru seharusnya menjadi landas-pijak mereka melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan dan kampanye pendapat umum.

Karena itu, kami berprakarsa menyusun kembali berkas-berkas lama pendidikan pengorganisasian dan analisis sosial tersebut, menambahkan beberapa bahan baru, lalu menerbitkannya menjadi buku yang ada di tangan Anda sekarang. Kami berharap buku ini dapat menjadi salah satu acuan dasar bagi mereka yang benar-benar ingin mengabdikan dirinya pada proses-proses pengorganisasian rakyat yang sesungguhnya, suatu proses panjang membangun kekuatan komunitas basis melakukan tindakan-tindakan perubahan sosial, bukan terutama untuk menunjang keberhasilan program atau proyek suatu organisasi atau lembaga 'perantara', organisasi atau lembaganya sang pengorganisir, apalagi untuk tujuan mencari makan dan ketenaran pribadi sang pengorganisir sendiri.

Jakarta, April 2018

DAHNIAR ANDRIANI
Direktur Perkumpulan HuMa

DAFTAR ISI

PENGANTAR		v - vi
PENDAHULUAN		
Membelah Laut: Penggalangan Menuju Pembebasan		ix - xix
PETUNJUK		
Cara Menggunakan Kitab Ini		xx -xxv
Susunan Isi Kitab		xxv
FONDASI	TITIK-TOLAK PENGORGANISASIAN RAKYAT: CARA PANDANG MASALAH SOSIAL	
	■ Sebab-sebab Masalah Sosial	4 - 12
	■ Pilihan Tindakan Pemecahan Masalah Sosial	13 - 19
	■ Pilihan Arah Perubahan Sosial	20 - 23
	■ Anggapan Dasar Filsafat, Teori, dan Praktik	24 - 41
TIANG	ALASAN & PENGERTIAN PENGORGANISASIAN RAKYAT	
	■ Mengapa Rakyat Perlu Mengorganisir Diri?	46 - 69
	■ Kaidah Asas, Tujuan, dan Unsur-unsur Pokok	72 - 79
DINDING	KEMAMPUAN DASAR PENGORGANISIR RAKYAT	
	■ Analisis Sosial (1): Sistem & Struktur	84 - 114
	■ Analisis Sosial (2): Hubungan Kuasa & Kepentingan	115 -129
ATAP	CITRA DIRI PENGORGANISIR RAKYAT	
	■ Sang Pengorganisir: Siapa & Dari Mana?	134 - 173
	■ Ciri Kepribadian & Kepemimpinan	174 - 183
PAGAR	STRATEGI & TAKTIK PENGORGANISIAN RAKYAT	
	■ Simulasi Tiga Konteks	188 - 213
	■ Contoh Nyata: Pemetaan sebagai Alat Pengorganisasian	214 - 253
	BAHAN BACAAN & TAYANGAN	254 - 260

FINAL

MEMBELAH LAUT Penggalangan Menuju Pembebasan

FINAL

Inilah peristiwa akbar yang dituturkan dalam tiga kitab suci dari satu sumber yang sama: Taurat, Injil, dan Alquran. Inilah kisah para budak Ibrani yang berjuang melawan kezaliman salah satu tiran terbesar dalam sejarah peradaban: para Fira'un. Penguasa Mesir Purba itu menyatakan diri sebagai penjelmaan Tuhan di muka bumi. Karena itu, merasa berkuasa mutlak untuk berbuat sesuka hati terhadap siapa dan apa saja, termasuk memperisteri ibu kandung sendiri, karena menganggapnya sebagai harta warisan dari para ayah mereka. Tak boleh ada yang menentang kehendak mereka. Bala tentara besar yang sangat kejam akan siap melaksanakan apa pun titah mereka. Rakyat Mesir pun menjadi hamba sahaya yang serba melayani nafsu angkara para Fira'un. Tetapi, penduduk Mesir yang paling menderita adalah orang-orang Ibrani yang diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak belian yang diperjual-belikan, dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, kasar, dan kotor. Mereka dihinakan seperti binatang atau lebih buruk dari hewan piaraan.

Demikianlah, alkisah, sampai tiba suatu saat terlahir seorang anak lelaki di antara para budak Ibrani tersebut. Namanya: Musa. Tumbuh dewasa sebagai seorang peragu sekaligus penanya dan pendebat yang nyinyir, yang suka menyendiri di pucuk-pucuk bukit di luar kota, akhirnya Musa memenangkan 'suara nurani' nya (menurut kitab suci: wahyu atau ilham ilahi) untuk melakukan tindakan nyata melawan penindasan Sang Penguasa Mesir. Tidak hanya berkeluh-kesah dan meratap, terkadang menyumpah, Musa lalu mengajak kaumnya menggalang kekuatan bersama, bersatu-padu, menentang kezaliman atas diri mereka. Ia akhirnya berhasil meyakinkan mereka untuk berjuang membebaskan diri dari cengkeraman sang tiran.

Tetapi, kekuatan Fira'un sangatlah digdaya dan para budak Ibrani itu tak mampu menghadapi bala tentara yang sangat terlatih dan berperlengkapan lengkap. Tatkala mereka hampir tiba di puncak keputusan, Musa kembali mendengarkan bisikan hatinya bahwa ia harus memimpin kaumnya keluar dari Tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah ke Gurun Sinai.

Rencana itu mendapat tentangan keras, bahkan cemoohan dan pengkhianatan dari orang-orang Ibrani sendiri. Bagaimana mungkin? Menyeberangi laut hanya dengan berjalan kaki? Tetapi, Musa bersikeras dan membawa mereka yang percaya ke tepi Laut Merah dan... terjadilah apa yang kemudian kita ketahui sekarang sebagai 'mukjizat': Musa meletakkan tongkatnya ke atas permukaan air laut, laut pun terbelah dua, menyisakan satu lorong panjang kering ke daratan Gurun Sinai di seberangnya. Musa beserta seluruh pengikutnya pun melenggang sepanjang lorong kering itu menyeberangi Laut Merah ke 'tanah yang dijanjikan': ranah kebebasan, alam kemerdekaan! Saat orang terakhir dalam barisan panjang itu menjejakkan kakinya di tepian Sinai, laut yang terbelah itu kembali menutup seperti semula. Bala tentara Fira'un yang mengejar mereka pun tertahan di tepian Iskandariyah tanpa bisa berbuat apa-apa.

Inilah kisah indah tentang perjuangan sekelompok orang tertindas yang bersatu padu berjuang ke arah pembebasan diri mereka. Semangat mereka telah menciptakan suatu 'keajaiban', membuat sesuatu yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata: membelah laut! Inilah yang mengilhami seorang penggerak rakyat zaman modern, Marthin Luther King Jr., menggerakkan kaum kulit hitam Amerika Serikat melakukan pawai panjang (*long march*) ke Washington D.C. Mereka akhirnya berhasil meraih cita-cita perjuangan: diakui dan diperlakukan sebagai warga negara yang setara dengan kaum kulit putih. Dalam pidato bersejarah bertajuk 'Membelah Laut' (*Parting the Water*), yang mengawali salah satu gerakan hak-hak sipil terbesar abad-XX, King jelas-jelas mengutip kisah Musa dan para pengikutnya.

Sejujurnya, saya bukanlah seorang beriman yang saleh seperti King sang Spendeta, apalagi Musa sang nabi. Tetapi, hal ini tidak menghalangi saya (atau bahkan mereka yang sama sekali 'tidak beragama' sekali pun) untuk belajar khusyuk dari hikmah kisah-kisah 'hijrah' (*exodus*) serupa dalam kitab-kitab suci itu. Seperti Musa, Yesus juga berjuang menyatukan murid-murid dan para pengikutnya berbaris pergi menyaksikan mukjizat kebangkitannya di Golgotha, pertanda pembebasan mereka. Juga, Muhammad, yang memimpin para sahabat dan kelompok kecilnya berbaris pergi membangun satu masyarakat dan peradaban baru di Madinah, awal kemerdekaan mereka. Sama khusyuknya ketika saya menikmati kisah menggetarkan Siddhartha Gautama yang menuntun para pengikutnya pergi meninggalkan kemewahan palsu di istana kerajaan ayahnya. Atau, cerita seorang Gandhi yang melakukan perjalanan keliling India, menghimpun jutaan kawula negeri itu melakukan boikot garam dan kain buatan pabrik di Manchester, Inggris. Atau, keteguhan seorang Abdul Ghaffar (Badshah) Khan memimpin suku Pashtun membangun masyarakat mereka sendiri dengan prinsip ketat antikekerasan, tanpa harus mencederai orang lain, bahkan terhadap lawan dan musuh sekalipun yang justru memaksakan kekerasan kepada mereka.

Mereka semua adalah para 'penggalang' (*organisers*) rakyat tertindas menuju pembebasan dan kemerdekaan. Mereka mirip, namun berbeda dengan para ksatria (seperti Julius Caesar, Ken Arok, Lord Cromwell, Napoleon Bonaparte, Phoolan Devi, Tjoet Nyak Din, atau Soedirman) dan dengan para pemimpin politik sekaligus pejuang revolusioner (seperti Simon Bolivar, Vladimir Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Soekarno, atau Ayatollah Khomeini). Para ksatria dan pejuang itu juga menggalang rakyat berjuang untuk pembebasan diri mereka, tetapi sekaligus suatu pertarungan dan perebutan kekuasaan politik dan ideologi (partai atau negara). Adapun Musa, Yesus, Muhammad, Siddhartha, Gandhi, dan Badshah Khan, menggalang rakyat lebih untuk mempertahankan martabat, keyakinan-keyakinan, dan hak-hak mereka sebagai suatu kaum yang tidak selalu mesti terhimpun dan terwujud dalam suatu partai politik atau negara, sehingga tidak pula perlu melakukan penaklukan atau penguasaan balik terhadap pihak-pihak yang menindas hak-hak dan mengekang kemerdekaan mereka selama ini.

Mereka bahkan melakukannya tanpa pamrih pribadi. Meskipun tetap menyadari keterbatasan manusiawi mereka, namun mereka tetap taat asas pada prinsip dan tujuan penggalangan rakyat yang sebenarnya. Bahkan, pada saatnya, mereka berendah hati menyerahkan kekuasaan dan kepemimpinan kepada rakyat yang digalangnya untuk melanjutkan usaha yang telah mereka rintis. Lalu, pada saat yang sudah seharusnya, mereka mundur diri secara terhormat menjadi 'orang

biasa' lagi, atau melanjutkan kerja yang sama di tempat lain. Demikian yang pernah dilakukan oleh orang-orang seperti Che Guevara, Julius Nyerere, dan Nelson Mandela. Merekalah orang-orang yang disebut oleh filsuf Cina Purba, Lao Tze, sebagai para penggalang rakyat yang, ketika perjuangannya telah mencapai hasil, rakyat yang digalangnya berkata: "Kami semualah yang menyelesaikan sendiri pekerjaan ini."

Berjuang merebut kekuasaan memang berbeda sama sekali dengan berjuang merebut kedaulatan, harkat kemanusiaan dan harga diri. 'Berkuasa' atas orang lain jelas berbeda dengan 'berdaulat' atas diri sendiri. Jadi, sebenarnya, apa yang kita sebut sebagai penggalang atau pengorganisir rakyat (*people organiser*) adalah berbeda dengan para pahlawan atau para pemimpin politik. Pada mulanya, mereka mungkin atau justru adalah 'orang biasa' saja seperti kita juga yang, bersama-sama dengan kaumnya, menentukan pilihan sadar dan bebas untuk mencapai daulat penuh memutuskan dan mengatur diri sendiri. Bahwa rakyat atau kaum yang digalangnya itu kemudian menahbiskan mereka menjadi pahlawan, pemimpin, bahkan penguasa baru —seperti yang pernah dialami oleh pendiri dan pemimpin serikat buruh bebas *Solidarichnoz* (Setia Kawan) di Polandia, Lech Walesa— adalah soal lain. Bahwa ketika mereka telah menjadi pemimpin dan penguasa, lalu terjebak dalam perangkap kekuasaan yang memabukkan dan membuat lupa diri (suatu ironi yang memang sangat sering terjadi dalam sejarah), itu adalah soal lain berikutnya lagi. Yang penting adalah niat (visi) awal perjuangannya yang tanpa 'nafsu kekuasaan', apalagi pembalasan dendam, tetapi 'semangat pembebasan', menjadi orang dan kaum merdeka tanpa harus mengorbankan kemerdekaan pihak lain.

Maka, menggalang atau mengorganisir rakyat pertama sekali adalah suatu gerakan membangun suatu tatanan nilai, keyakinan, kepercayaan, sikap, dan cara hidup merdeka dan berdaulat atas diri sendiri yang —sekali lagi— terutama bukan untuk merebut kekuasaan dan kemudian berkuasa, apalagi untuk menguasai orang lain. Ibarat membangun satu rumah, inilah landas pijak (fondasi) yang paling fundamental, bagian paling mendasar yang tanpanya akan mustahil mendirikan suatu bangunan rumah yang kokoh di atasnya.

Karena itu, penggalangan rakyat (*people organising*), pertama dan terutama sekali, adalah 'gerakan budaya', harus terbebas dari kehendak serba kuasa dan nafsu megalomania. Suatu gerakan kebudayaan semacam itu tidak selamanya sama dan sebangun (identik) dengan gerakan berskala besar mencakup wilayah

luas. Bahkan, tidak selamanya harus merupakan gerakan serempak beberapa kelompok kaum dalam satu wilayah tertentu. Gerakan penggalangan rakyat bisa saja —bahkan memang harus dimulai— hanya pada satu kelompok kecil orang, berapa pun jumlahnya. Juga tidak selamanya harus dimulai dari sekelompok besar orang yang memiliki ikatan kesamaan identitas sosial budaya (suku, kebangsaan atau agama), tetapi bisa saja dimulai dari mereka yang hanya dipersatukan oleh ikatan kesamaan tuntutan dan kehendak (kepentingan, minat, pekerjaan, atau malah ‘nasib’) saja. Jumlah orang dan sebaran tempat bukanlah hal terpenting di awal prakarsa penggalangan rakyat sebagai suatu gerakan kebudayaan.

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan kebudayaan yang kini mendunia, yang bersifat keagamaan (seperti gerakan Musa, Yesus, Muhammad, dan Siddhartha) maupun yang sekuler (seperti gerakan Koperasinya Thomas More, Komune Parisnya Proudhon dan kawan-kawan, serta Swadeshinya Gandhi), justru berawal dari tindakan-tindakan bersama sejumlah kecil orang saja di suatu tempat tertentu. Pada mulanya, bahkan merupakan suatu gerakan minoritas tertindas yang disepelekan oleh kelompok mayoritas dan dinistakan oleh kaum elite penguasa. Kalaupun gerakan-gerakan kebudayaan semacam itu tidak membawa dampak atau pengaruh mendunia, namun setidaknya telah berhasil menciptakan suatu tanda diri (identitas) baru budaya dan sosial yang unik dan bermartabat. Dalam hal inilah, kita patut menaruh hormat pada gerakan-gerakan lokal tetapi monumental dan fenomenal, bahkan menjadi legenda, seperti yang telah dilakukan oleh Geronimo, Sandino, Malcolm X, Chico Mendes, dan Surontiko Samin. Juga pada gerakan-gerakan kolektif yang lebih mutakhir seperti Chipko di India, Zapatista di Meksiko, bahkan juga Kibbutz di Israel. Dalam bentuk gerakan-gerakan kolektif semacam itu, gerakan kebudayaan tersebut sekaligus menjadi suatu ‘gerakan sosial’ oleh semua orang yang terlibat di dalamnya, seringkali tanpa perlu ada seorang pemimpin tunggal, tetapi kepemimpinan bersama dalam suatu dewan atau lembaga permusyawaratan.

Dengan kata lain, gerakan penggalangan rakyat harus selalu bermula pada sekelompok orang dan tempat yang jelas dan khas, terancang secara sadar dan bersengaja untuk tujuan jangka-panjang, sebagai suatu proses yang sebenarnya tak pernah selesai dan selalu bermula kembali (*a commencement*). Sehingga, bukanlah suatu gerakan khalayak sesaat tanpa titik tolak dan jati diri yang jelas (*anonymous and sporadic crowd*). Pada saat gerakan itu mulai membesar dan meluas, mulai diteladani oleh kelompok-kelompok lain di tempat-tempat yang berbeda atau, dengan kata lain, telah muncul sebagai suatu gerakan sosial dalam artian yang sesungguhnya, maka mulailah terjadi himpunan-himpunan perkauman yang mandiri dan otonom: memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri, mengelola

sumberdaya mereka sendiri, mengatur tata hidup dan pemerintahan mereka sendiri, tanpa perlu atau harus mengorbankan kemandirian dan otonomi kelompok atau kaum lainnya. Himpunan-himpunan perkauman yang swadaya, swatantra, swakelola, dan swapraja (*zelf-besturende volksgemeenschappen*) semacam itu saling berhubungan satu sama lain secara organik dan fungsional atas dasar asas saling menghormati, saling memberi manfaat dan menerima maslahat bersama.

Singkatnya, apa yang sesungguhnya disebut oleh Antonio Gramsci sebagai ‘masyarakat warga’ (*civil society*), terbentuk pertama kali dalam satuan-satuan sosial terkecil setempat sebagai intinya, kemudian menyebar luas dan berkembang menjadi himpunan-himpunan perkauman yang lebih besar, tetapi tetap mempertahankan keunikan dan otonominya masing-masing. Seperti kata Gramsci, menggalang rakyat ke arah pembentukan suatu masyarakat warga yang kuat memang berbeda, bahkan sebenarnya berlawanan, dengan membangun ‘masyarakat politik’ (*political society*) atau ‘negara’ (*state*) yang menguasai, memiliki, dan memaksakan suatu kekuasaan atas warganya sendiri, atau kepada warga lain yang, pada gilirannya, melahirkan paham penjajahan (kolonialisme). Menyuarakan semboyan menggelejar ‘menggalang rakyat ke arah terciptanya masyarakat warga,’ tetapi membayangkannya sebagai suatu proses untuk ‘merebut kekuasaan politik pemerintahan,’ atau ‘dalam rangka membangun suatu negara yang kuat,’ adalah suatu rancu-pikir, suatu *contradictio in terminum*. ‘Membangun masyarakat,’ jelas berbeda dengan ‘membangun negara.’

Namun, penggalangan rakyat sebagai suatu gerakan kebudayaan, sekaligus gerakan sosial, tidak berarti tak dapat menjelma menjadi suatu ‘gerakan politik,’ tetapi tanpa harus menjadi ‘masyarakat politik’ dalam pengertian Gramscian tadi. Dalam pengertian itu, politik dipahami sebagai kedaulatan suatu kaum mengatur diri mereka sendiri dan membagi kemaslahatan bersama dengan kaum lainnya melalui pembangunan tatanan yang telah disepakati bersama. Jadi, bukan kekuasaan untuk mengatur orang lain, apalagi dengan cara-cara memaksa atau cara apa pun demi penguasaan itu sendiri, seperti yang jamak diartikan selama ini. Jika politik kita maknakan demikian, maka perjuangan satu kaum mempertahankan (karena kaum lain, yakni masyarakat politik atau negara, memang selalu berusaha merebut dan menguasainya) atau merebut kembali kedaulatan mereka yang pernah dirampas oleh kaum lain (jadi, bukan merampas kedaulatan kaum lain itu), jelas adalah juga suatu perjuangan politik. Sebutlah ini sebagai ‘politik masyarakat warga’ (*the politics of civil society*), karena melakukan perjuangan dan gerakan politik (jelasnya: ‘berpolitik’) memang tidak selamanya berarti ‘berpartai politik’ atau ‘bernegara’.

Bisa jadi, memang, dalam upaya mempertahankan dan/atau merebut kembali kedaulatannya, suatu masyarakat warga akhirnya dihadapkan pada pilihan mempertahankan dan/atau merebutnya kembali dengan kekuatan senjata, karena lawan mereka juga menggunakan kekuatan yang sama, bahkan sering jauh lebih canggih. Maka berubahlah penggalangan rakyat yang semula adalah gerakan kebudayaan, gerakan sosial dan gerakan politik, menjadi ‘gerakan bersenjata’ atau ‘gerakan militer’.

Lantas, apakah masih layak menyebutnya sebagai masyarakat warga?

Ya, jika gerakan bersenjata itu —setelah berhasil mencapai tujuan utamanya mempertahankan atau merebut kembali kedaulatan kaumnya— kemudian mampu membuktikan diri tidak berubah menjadi kekuatan militer penguasa baru untuk merebut kedaulatan kaum lain. Lebih terpuji lagi jika secara sukarela kemudian membubarkan diri dan kembali menjadi warga sipil biasa.

Tetapi, apakah itu mungkin? Bukankah sejarah selama ini membuktikan bahwa ketika suatu pemberontakan rakyat bersenjata mencapai kemenangan, mereka (terutama para pemimpinnya) selalu saja lupa diri, berubah menjadi tentara penguasa baru yang seringkali lebih kejam ketimbang rezim yang digantikannya?

Pesimisme (bahkan sinisme) seperti itu pernah dijawab oleh Front Sandinista, gerakan revolusioner masyarakat warga di Nikaragua. Ketika berhasil mencapai kemenangan pada tahun 1979, merebut kembali kedaulatan rakyat Nikaragua dari diktator militer Jenderal Antonio Somoza, mereka membubarkan pasukan milisi mereka (umumnya para petani dan buruh miskin yang dipersenjatai) untuk kembali menjadi warga sipil biasa. Bahkan, sebagai ‘penguasa’ baru, mereka menghapuskan hukuman mati bagi para pengikut Somoza, termasuk para algojo pembantai dari dinas rahasia dan pasukan khusus pengawal pribadi sang diktator. Sandinista —diambil dari nama Sandino, pemimpin gerakan petani legendaris Amerika Latin— telah membuktikan diri sebagai gerakan revolusioner modern yang pertama, sejak Revolusi Prancis pada 1789, yang mencapai kemenangan tanpa pelaksanaan hukuman mati, pancung leher atau regu tembak. Salah seorang pendiri dan pemimpin utamanya, Tomas Borge, mengumumkan: “Pembalasan dendam kita adalah pemberian maaf!” Persis seperti yang diucapkan dan dilakukan oleh Nelson Mandela dengan Kongres Nasional Afrika (ANC)-nya, setelah berhasil merebut kembali kedaulatan warga kulit hitam Afrika Selatan dari rezim apartheid Partai Nasional.

Lagipula, “Apa pula salahnya kami mempertahankan diri, kedaulatan dan hak-hak kami, dengan menggunakan senjata? Mengapa kalian tidak mempertanyakan mereka yang juga menggunakan senjata merebut kedaulatan dan menindas hak-

hak kami selama ini?” sanggah Commandante Marcos, pemimpin sayap bersenjata gerakan petani Zapatista di Meksiko. Orang yang selalu bertopeng dan tidak jelas nama sebenarnya ini —ada yang menyatakan bahwa Sang Komandan sebenarnya bukan satu orang, tetapi beberapa orang secara bergantian mengenakan topeng saat tampil di depan umum sebagai cara untuk mengelabui pemerintah dan tentara Meksiko— menyatakan jaminannya: “Jika kami nanti berhasil memperoleh kembali kedaulatan dan hak-hak kami, kami tidak akan melukai siapa pun. Tidak akan ada pembalasan dendam. Kami akan menguburkan semua senjata kami, kembali menjadi petani biasa seperti apa adanya kami selama ini.”

Walhasil, kerja penggalangan rakyat adalah suatu pekerjaan yang sangat majemuk (kompleks), berjangka panjang, dan melelahkan. Itu mungkin sebab tidak banyak orang berminat melakukan pekerjaan ini secara bersungguh-sungguh dan ‘habis-habisan’ (*in totality*). Bahkan di kalangan banyak organisasi nonpemerintah (ORNOP) yang selama ini dianggap (paling) mewakili gerakan masyarakat warga, lebih banyak yang bergerak pada aras yang lebih memungkinkan mereka hadir di pusat-pusat keramaian dan kekuasaan, yang lebih menjanjikan meraih ketenaran pribadi, ketimbang benar-benar hidup dan bekerja langsung di tengah rakyat jelata awam di tempat-tempat kusam dan pengap, yang jauh dan terpencil, yang umumnya tanpa kecukupan sarana dan prasarana, yang nyaris tak terliput oleh pemberitaan media massa. Seringkali, para pegiat (aktivis) ORNOP itu mengaku melakukan pengorganisasian rakyat, tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah sekadar ‘pengerahan’ (mobilisasi) khalayak melakukan tindakan-tindakan yang dirancang oleh para pegiat ORNOP itu sendiri.

Padahal, pengerahan massa semacam itu hanyalah salah satu bagian terkecil dari keseluruhan proses penggalangan rakyat yang sesungguhnya. Lebih mengesankan lagi, ada banyak kasus di kalangan para pegiat ORNOP selama ini yang --segera setelah suatu tindakan pengerahan massa terjadi-- malah tidak melakukan apa-apa lagi, membiarkan rakyat kebingungan sendirian, hanya bergerak jika sang pegiat ORNOP datang lagi ‘mengerahkan’ dan ‘memimpin’ mereka. Faktanya, kian banyak ORNOP tumbuh dimana-mana dan semakin kuat sebagai suatu organisasi, bahkan semakin membesar sebagai suatu lembaga (institusi), tetapi tidak banyak lembaga-lembaga rakyat awam yang mereka kerahkan selama ini bertumbuh menjadi suatu organisasi yang kuat, mandiri, berdaulat, dan otonom. Apa yang terjadi adalah banyak pegiat ORNOP yang paling gegap gempita mengaku sebagai penggalang rakyat dengan retorika ‘pemberdayaan’ (*empowerment*), sebenarnya

‘memberdayakan’ atau ‘memperkuat dan memperbesar diri dan lembaga mereka sendiri’.

Kerancuan semacam itu terjadi bukan terutama karena mereka tidak mengetahui bagaimana melakukan penggalangan rakyat yang sesungguhnya. Pengalaman menunjukkan, kerancuan itu lebih terutama karena memang ada pemahaman yang keliru dan kabur mengenai apa sebenarnya prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan asas dari penggalangan rakyat. Sebagian besar atau hampir semua pegiat ORNOP selama ini, memang berasal dari kalangan terpelajar dan lapisan kelas menengah, umumnya para pegiat atau mantan pegiat mahasiswa. Mereka selalu cenderung melihat diri mereka sebagai ‘kelompok terpilih untuk memimpin’ rakyat. Bisa dimaklumi kalau mereka sangat gampang terjebak oleh apa yang disebut oleh salah seorang pegiat senior ORNOP dan pengamat gerakan sosial di Indonesia, Mansour Fakhri, sebagai ‘kemencengan’ (*bias*) akan kedudukan diri mereka sebagai ‘pemimpin’, ‘pembela’ atau bahkan ‘penyelamat’ rakyat. Pemahaman yang memiuh (*distorted*) inilah yang membuat mereka melakukan proses-proses penggalangan rakyat dengan cara-cara pengerahan massa besar serba sesaat (*sporadis*), namun tanpa meletakkan dasar-dasar kelembagaan yang kuat dan berakar di tengah rakyat. Kembali pada amsal membangun rumah, fondasi (pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan tujuan-tujuan asas) yang lemah akan membuat tegakan tiang (*strategi*), dinding (*metode dan media*), kerangka atap dan atap (*teknik, perangkat kerja*) dan pagar (*kelengkapan, sumberdaya pendukung*) dari bangunan tersebut menjadi ringkih.

Harus diakui bahwa berbagai kelemahan mendasar tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari kemencengan pemahaman dan kemampuan teknis metodologis dalam tubuh ORNOP sendiri. Konteks dan situasi sosial politik, ekonomi, dan budaya selama tiga dasawarsa (1966-1998) pemerintahan militer ‘Orde Baru’ di Indonesia —yang sangat monolitik, serba terpusat, dan sangat mengekang kebebasan tumbuh-kembangnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga rakyat yang kuat, mandiri, dan otonom— juga turut membuat para pegiat ORNOP sering terpaksa harus menempuh cara-cara pengerahan massa yang kadangkala memang merupakan pilihan taktis terbaik dan efektif saat itu. Namun, perubahan-perubahan politik yang terjadi sejak 1998 telah menciptakan suatu keadaan yang lebih memungkinkan dilaksanakannya proses-proses penggalangan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya. Undang-Undang Nomor 2 dan 3/1999 tentang Partai Politik dan Pemilihan umum, kini memungkinkan partai-partai politik baru didirikan dan bergerak bebas sampai ke desa-desa, membentuk organisasi-organisasi massanya tanpa campur-tangan birokrasi pemerintah lagi. Juga

Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah, atau paling mutakhir Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, kini memungkinkan dibentuknya organisasi-organisasi rakyat swatantra dan swapraja sampai ke tingkat desa.

Semua perubahan itu dengan sendirinya membawa akibat bagi cara-cara penggalangan rakyat yang lazim ditempuh selama ini, termasuk oleh ORNOP. Perubahan-perubahan itu memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi rakyat tempatan —terutama yang memiliki basis keanggotaan yang jelas (*membership based organisation*)— akan semakin berperan besar di masa mendatang, bukan lagi organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga perantara (*intermediaries*) yang menjadi ‘pelaku utama’ proses-proses penggalangan rakyat, seperti kebanyakan ORNOP selama ini.

Itu berarti, ada tuntutan untuk memperbaharui dan mengubah ORNOP menjadi organisasi atau lembaga berbasis keanggotaan rakyat setempat, bukan lagi sekadar ‘organisasi atau lembaganya para pegiat’ saja. Atau, menggalang rakyat membentuk organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga otonom dan independen yang dikelola dan dikendalikan sendiri oleh rakyat setempat, sehingga ORNOP hanya berperan sebagai suatu ‘satuan pendukung’ (*supporting system*) terhadap organisasi atau lembaga-lembaga rakyat tersebut. Jika tidak, peran strategis ORNOP selama ini — yang diperolehnya justru karena pembatasan ketat tidak berfungsinya partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa di masa lalu— akan semakin berkurang dan bisa saja kehilangan relevansi sama sekali. Dengan kata lain, para pegiat ORNOP semakin dituntut untuk menguasai kemampuan melakukan penggalangan rakyat langsung di landasan pijaknya di tingkat lokal. Karena itu pula, mereka dituntut untuk memahami benar prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan asas penggalangan rakyat sebagai suatu gerakan kebudayaan, gerakan sosial, dan gerakan politik sekaligus, yang selalu bermula dari sekelompok tertentu orang dan tempat yang jelas.

Demikianlah yang terjadi dalam sejarah. Musa memulainya dari minoritas budak Ibrani di Mesir. Yesus memulainya dari sekelompok kecil murid-muridnya yang percaya di Lembah Yordan, Muhammad memulainya dari segelintir orang yang disingkirkan oleh kaumnya di Mekah. Siddhartha memulainya dari para pelayannya sendiri. Gandhi memulainya dari kaum Harijan yang terhina. Mereka semua mengubah dunia dengan tindakan-tindakan nyata yang semula tampak biasa saja, bahkan pada mulanya dihina dan disepelekan. Karena penggalangan rakyat, pada akhirnya, tiada lain adalah ‘kehendak untuk bertindak dan tindakan untuk melakukan perubahan,’ suatu *praxis*, tidak hanya asyik merenung, memikirkan, dan mengurai-rangkaikan apa yang terjadi di dunia ini oleh tindakan-tindakan

orang lain. Seperti kata seorang lelaki yang terlahir dari satu keluarga penganut ajaran Musa (beberapa abad kemudian di Trier, satu kampung udik di tepian Sungai Raya Rhein di Jerman) bahwa: “*Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an sie zu verändern*” (Para pemikir hanya menafsirkan dunia dalam berbagai cara, tetapi yang terpenting adalah [bertindak] mengubah dunia)!

Tindakanlah yang membuat sesuatu yang pada mulanya tampak sepele dan kecil menjadi sesuatu yang besar dan bermakna, membuat sesuatu yang semula tampak mustahil menjadi mungkin.

Ya, ibarat ‘mukjizat’ Musa membelah laut! ■

KALIURANG, Juni 2018.

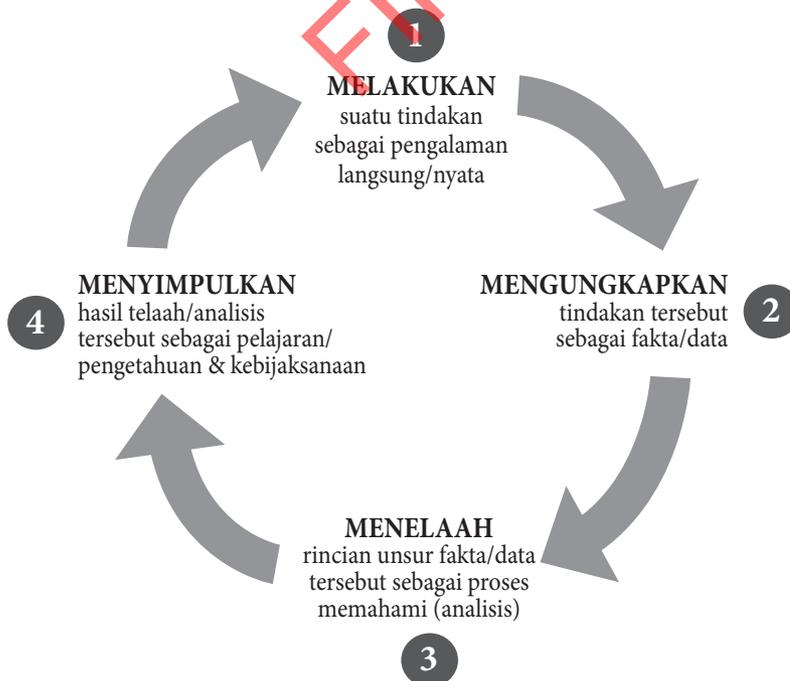
FINAL



CARA MENGGUNAKAN KITAB INI

Sebagai panduan pendidikan, kitab ini memang bukan kitab yang lazim. Sebagian besar isinya adalah petunjuk praktis dan teknis bagi seorang fasilitator yang akan menggunakannya, misalnya, untuk keperluan pelatihan. Karena itu, harap jangan dibaca sebagai layaknya buku biasa. Beberapa bahan bacaan (uraian teori, senarai kasus, lembar fakta dan informasi) yang tersedia dalam kitab ini bukanlah materi pokok yang akan diajarkan, tetapi lebih sebagai bahan rujukan, baik bagi fasilitator maupun bagi peserta pendidikan. Inti kitab ini adalah justru pada uraian proses yang akan dilakukan oleh fasilitator.

Agar taat asas dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar proses pengorganisasian rakyat itu sendiri, kitab ini memang sengaja disusun berdasarkan kaidah-kaidah pendidikan partisipatoris, sehingga fasilitator hanyalah berfungsi dan bertindak mengolah proses belajar para peserta pendidikan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri atau pengalaman orang lain. Kaidah pendidikan ini dijabarkan dalam satu kerangka kerja yang disebut sebagai 'daur belajar dari pengalaman tertata-polakan' (*structured experiential learning cycle*). Secara skematis, dapat digambarkan dalam empat urutan langkah sebagai berikut:



Pada saat pendidikan, proses ini mungkin hanya bisa berlangsung satu daur lengkap saja (langkah-1 sampai langkah-4). Tetapi setelah masa pendidikan, yakni dalam kehidupan sehari-hari yang sesungguhnya, para peserta diharapkan menerapkan proses yang sama, melakukan tindakan baru berdasarkan kesimpulan (pelajaran/pengetahuan) yang mereka peroleh, kemudian mengungkapkan, menjabarkan dan menyimpulkan lagi tindakan-tindakan baru tersebut. Demikian seterusnya, sehingga proses ini sebenarnya merupakan proses yang tidak pernah selesai, berlangsung seumur hidup (*life long education*), suatu proses aksi-refleksi terus-menerus.

Uraian proses dalam kitab panduan ini disusun mengikuti kerangka kerja logis tersebut. Setiap satuan acara (*session*) kegiatan dalam panduan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

■ JUDUL

Tema inti satuan acara, misalnya: Titik tolak Pengorganisasian Rakyat (Acara-1).

■ TUJUAN

Sasaran hasil yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi pada para peserta, berupa pembentukan sikap, pengetahuan, atau ketrampilan teknis tertentu. Anda harus membaca dan memahami benar rumusan tujuan ini sebelum melaksanakan prosesnya.

■ POKOK BAHASAN

Uraian rinci tema satuan acara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

■ WAKTU

Jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh proses (di sini digunakan satuan waktu dua jam efektif per satuan acara atau *session*).

■ METODE & MEDIA

Jenis dan bentuk media yang dirancang atau dipilih untuk melaksanakan prosesnya. Dalam kitab ini memang sengaja dirancang dan dipilihkan berbagai jenis dan bentuk media simulatif dan kreatif (antara lain: permainan, bermain peran, kaji kasus, penayangan video, grafis) yang sudah terbukti mampu memenuhi kaidah-kaidah asas pendidikan partisipatoris, yang melibatkan fasilitator dan peserta dalam proses saling belajar bersama, selain memang lebih menarik ketimbang ceramah atau kuliah yang monoton dan membosankan.

Pada setiap satuan acara, bisa saja hanya digunakan satu jenis media tertentu, tetapi juga bisa gabungan beberapa media sekaligus. Tetapi, jika



Anda perhatikan, media apa pun yang digunakan, inti prosesnya adalah melalui diskusi antarpeserta, baik diskusi kelas maupun diskusi kelompok.

■ BAHAN & PERALATAN

Bahan-bahan ini adalah sejumlah bahan tertulis, baik sebagai bahan bacaan, lembar kasus, lembar fakta atau lembar kerja. Anda harus cermat membaca uraian prosesnya agar mengetahui bagaimana caranya menggunakan bahan-bahan tersebut: untuk apa, mengapa, dan pada saat kapan atau langkah ke berapa dalam keseluruhan proses?) Semua bahan tertulis (Lembar Kasus, Lembar Fakta, Bahan Bacaan) itu sengaja ditempatkan di bagian akhir setiap satuan acara, sesudah uraian Proses, agar mudah difotokopi utuh secara terpisah untuk dibagikan kepada peserta.

Adapun peralatan yang diperlukan untuk memperlancar proses adalah perangkat teknis yang umum digunakan selama ini. Yang selalu pasti harus tersedia pada setiap satuan acara adalah papan tulis besar, kertas plano, potongan-potongan kertas *metaplan*, dan spidol.

■ PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

Inilah inti kitab ini, terdiri dari urutan langkah per langkah dan pertanyaan-pertanyaan pokok (dengan **cetakan huruf tebal**) pada setiap atau beberapa langkah tertentu yang harus diajukan oleh fasilitator kepada para peserta. Pertanyaan-pertanyaan pokok (kunci) itulah yang akan menuntun fasilitator dan peserta menjalani daur proses secara runtut dan sistematis.

Sebagai suatu panduan, kitab ini juga harap Anda perlakukan benar-benar sebagai 'panduan' saja, bukan 'kitab suci' yang tidak boleh diubah. Sebagai fasilitator, justru Anda sangat diharapkan untuk mengembangkan dan memperkaya panduan ini sekreatif mungkin, sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar pendidikan partisipatoris yang dianut oleh kitab ini. Anda bisa saja mengubah media yang lebih sesuai dan memang tersedia di tempat Anda (misalnya, jangan memaksakan harus pakai video kalau tak ada peralatannya). Anda juga bisa mengubah beberapa bahan agar lebih kontekstual dengan realitas peserta (misalnya, cerita atau kasus yang ada di kitab ini Anda ganti dengan cerita atau kasus lokal yang serupa, atau bahkan mengubahnya menjadi komik atau sosiodrama kalau ternyata banyak peserta yang tidak bisa baca-tulis). Anda juga bisa mempersingkat atau memperpanjang waktu setiap satuan acara (jangan kaku, ikuti irama proses peserta), dan masih banyak lagi lainnya. Untuk itu, perhatikanlah catatan-catatan khusus yang ada pada langkah-langkah tertentu dalam uraian proses.

Pilihan tema-tema satuan acara dalam panduan ini memang sengaja diurutkan sedemikian rupa, mulai dari tema-tema paling elementer untuk membentuk sikap dan pengetahuan atau wawasan (Pengertian Dasar, Analisis Sosial) sampai tema-tema yang bersifat teknis

praktis untuk membentuk keterampilan (Strategi, Metoda dan Media, Teknik Pengorganisasian). Dengan demikian, kitab ini bisa menjadi satu panduan lengkap tentang dasar-dasar pengorganisasian rakyat.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencakup keseluruhan tema (pokok-pokok bahasan) tersebut biasanya paling sedikit antara 5-6 hari efektif, jika setiap hari dilaksanakan 8 jam efektif (tidak ada acara malam hari). Artinya, total 40-48 jam efektif. Harap maklum, ini adalah jadwal minimal. Karena, sebenarnya, suatu proses pendidikan pengorganisasian rakyat yang ideal membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dan panjang. Untuk membentuk seorang pengorganisir rakyat yang benar-benar siap dan tangguh, dibutuhkan bukan hanya proses pendidikan di dalam ruang kelas, tetapi juga proses praktik langsung di 'ruang kehidupan' yang sesungguhnya, yakni di tengah warga masyarakat di mana mereka nantinya akan melakukan proses-proses pengorganisasian. Berdasarkan pengalaman selama ini, perlu waktu paling sedikit 1 (satu) bulan penuh. Bahkan, pernah ada yang dilaksanakan sampai 9 (sembilan) bulan penuh (tiga bulan dalam kelas dan enam bulan praktik langsung di lapangan), yakni program Indonesian Volunteers for Social Movement (INVOLVEMENT) angkatan pertama (1999) sampai angkatan ketiga (2002).

Dengan kata lain, kitab panduan ini, pada dasarnya lebih merupakan suatu 'kurikulum minimal', terutama bagi mereka yang memiliki kendala keterbatasan waktu dan sumberdaya untuk menyelenggaraan proses pendidikan yang ideal. Sehingga, panduan ini harus dianggap dan diperlakukan lebih sebagai bahan 'pendidikan awal' untuk memperkenalkan wawasan dan pengetahuan dasar konseptual mengenai pengorganisasian rakyat, belum sampai rinci ke tingkat kemampuan dan keterampilan praktis melaksanakannya. Hal ini perlu dijelaskan, agar pengguna kitab panduan ini tidak berharap berlebihan ingin menghasilkan seorang pengorganisir rakyat hanya dengan proses pendidikan tak lebih dari seminggu.

Sebagai kurikulum minimal, kitab panduan ini memang sengaja dirancang hanya mencakup pokok-pokok bahasan inti dari kerja-kerja pengorganisasian rakyat. Karena itu, tetap tersedia peluang bagi para penggunanya untuk mengembangkan atau mengubah-sesukannya dengan keperluan khas masing-masing. Sekali lagi, tak ada rumus baku yang berlaku umum dalam hal pengorganisasian rakyat, karena itu anda juga dituntut untuk kreatif mungkin mengembangkan dan memperkaya tema-tema tersebut. Sebagian besar kasus yang dijadikan bahan dalam panduan ini adalah kasus yang khas dari beberapa tempat dan waktu tertentu, sehingga anda bisa mengubah atau menggantinya dengan kasus lain yang lebih sesuai dengan waktu dan tempat di mana proses pendidikan diselenggarakan.

Hal penting lain yang harus anda perhatikan adalah jumlah peserta. Prinsipnya, semakin kecil jumlah peserta, semakin baik, karena memungkinkan proses berlangsung lebih intensif dan semua peserta memperoleh kesempatan yang sama besar. Ingat, ini bukanlah satu proses pelatihan yang sekadar memberi informasi atau pengetahuan tambahan kepada peserta, tetapi sekaligus juga suatu proses pembentukan sikap, prilaku dan komitmen mereka. Ini memerlukan suatu proses interaksi yang tidak jarang menyentuh aspek-aspek budaya dan



kejiwaan peserta. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa proses yang efektif biasanya dengan jumlah peserta paling banyak 15-20 orang saja. Kalaupun terpaksa, mungkin masih bisa diterima sampai 25 orang. Lebih dari jumlah itu akan membuat kelas terlalu besar dan anda sendiri akan kelelahan (dan karena itu, dianjurkan agar sebaiknya Anda bekerja sebagai suatu “tim fasilitator”, bersama 1-2 orang fasilitator lainnya). Kurang dari itu akan membuat kelas terlalu kecil sehingga mungkin ada beberapa proses yang membutuhkan dinamika kelompok tinggi (seperti permainan atau simulasi) akan sulit atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan. Usahakan komposisi peserta juga tidak homogen, termasuk dari segi perimbangan gender. Pengalaman juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap berbagai masalah setempat, yang sangat penting dipertimbangkan dalam proses-proses pengorganisasian, tetapi sering tidak mendapat perhatian sepatutnya dari kaum lelaki. Banyak contoh kasus juga memperlihatkan bahwa pengorganisir perempuan malah bisa lebih tangguh dan ‘tahan banting’ dibanding lelaki.

Hal lain tentang peserta ini adalah sumber rekrutmennya. Kalau pendidikan dilakukan di daerah di tempat Anda (atau organisasi Anda) sudah bekerja selama ini, mungkin tidak terlalu sulit melakukan rekrutmen peserta. Sedikit banyak anda sudah kenal baik orang-orang di sana, bahkan mungkin sejak awal Anda sudah menandai mereka yang potensial untuk dididik dan dikembangkan sebagai seorang pengorganisir. Sebaiknya memang ada semacam ‘survei’ awal tentang hal ini, jangan asal undang siapa saja yang berminat.

Ada satu kesalahan umum yang sangat sering terjadi selama ini, yaitu kecenderungan untuk memilih mereka yang tampak aktif, pintar omong, punya latar pendidikan resmi cukup baik, tampak lebih terpelajar, dan ‘ditokohkan’ oleh warga setempat. Semua itu bisa menjebak, dan sudah terbukti di banyak tempat, bahwa mereka kemudian tidak bisa berfungsi sama sekali sebagai seorang pengorganisir. Ada banyak contoh kasus juga yang memperlihatkan bahwa orang biasa saja, tampak tidak menonjol dan tidak suka menonjolkan diri (justru ini adalah salah satu kualitas pribadi terpenting seorang pengorganisir rakyat), berpendidikan resmi tidak terlalu tinggi (misalnya, hanya tamat SD atau SMP), tidak terlalu fasih bicara, ternyata kemudian mampu menjadi seorang pengorganisir yang handal, penuh dedikasi pada pekerjaan, bahkan tanpa pamrih apa pun.

Yang mendasar dan sangat penting adalah apa sesungguhnya kaitan pendidikan yang akan diselenggarakan dengan keseluruhan proses kehidupan dan penghidupan warga masyarakat yang akan diajak mengorganisir diri mereka?

Seringkali, satu kegiatan pendidikan (terutama pelatihan-pelatihan serba singkat) adalah hanya untuk pelatihan itu saja. Sehebat apa pun penyelenggaraannya, hasilnya akan sulit dibuktikan tanpa keterkaitannya yang jelas dengan kenyataan hidup masyarakatnya. Karena, proses pendidikan (apalagi pelatihan serba singkat) bukanlah obat untuk menyembuhkan semua penyakit, bukan segala-galanya. Banyak kegiatan pelatihan selama ini bahkan hanya melahirkan persoalan baru bagi masyarakatnya, hanya menghasilkan sampah.

Terakhir, kitab panduan ini memang hanyalah panduan. Sekali lagi, jangan sungkan mengubah dan menyesuaikannya. Ingat, sebagai fasilitator, Anda bukan guru atau

penceramah, tetapi lebih sebagai pemandu proses di mana peserta akan belajar bersama melalui diskusi antarmereka, dan dengan anda juga. Sehingga, anda sendiri sebenarnya sekaligus juga adalah peserta yang bisa saja justru belajar dari pengalaman dan pendapat peserta lainnya. Karena itu, baca, pahami dengan baik setiap langkah pada uraian proses pada setiap satuan acara dalam panduan ini. Jangan membatasi diri, cobalah secara kreatif mengembangkan dan per kaya proses yang terurai dalam panduan ini. ❖

SUSUNAN ISI KITAB

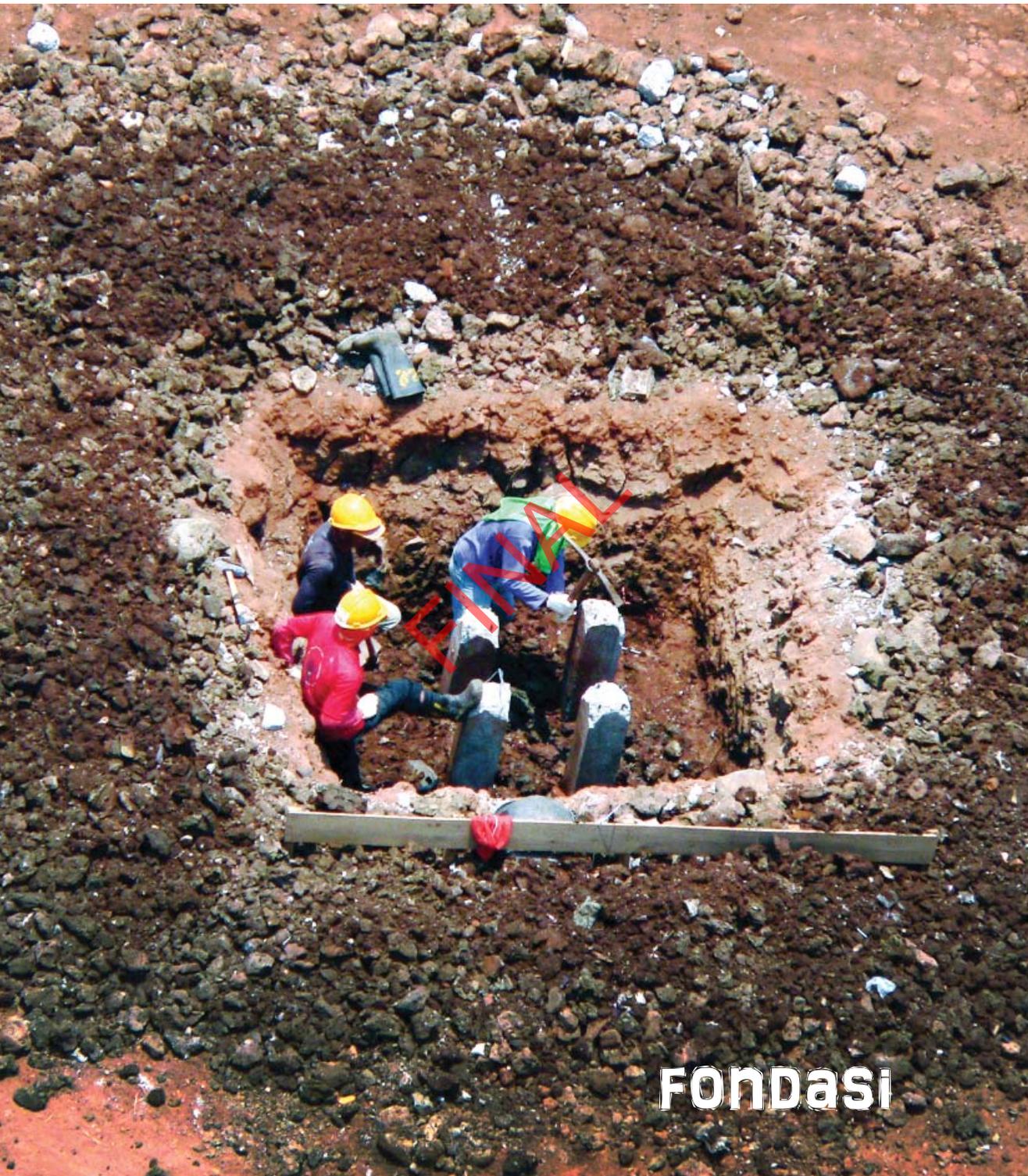
Sekali lagi, proses atau kerja pengorganisasian (baca: membangun organisasi) rakyat bisa diibaratkan seperti ‘membangun rumah’. Agar benar-benar kokoh, proses pembangunannya mutlak harus dimulai dari meletakkan landasan (fondasi)-nya sebagai langkah pertama yang paling mendasar. Barulah sesudah itu menyusul pembuatan unsur atau komponen lainnya (tiang, dinding, atap, pagar, dan seterusnya).

Maka, menggunakan amsal ‘membangun rumah’ tersebut, isi kitab ini disusun menurut urutan proses dan metafora pembangunan satu rumah (atau bangunan pada umumnya). Bagian pertama berisi uraian tentang fondasi (titik tolak atau landas pijak, kerangka pikir, dan kemampuan dasar) kerja-kerja pengorganisasian rakyat. Bagian-bagian berikutnya barulah tentang tiang (strategi, pendekatan), dinding (metode dan media), atap (teknik, kiat, perangkat kerja), dan pagar (kelengkapan lainnya, sumberdaya pendukung).

Susunan isi tersebut sekaligus menggambarkan urutan tertib penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau pelatihan tentang pengorganisasian rakyat. Meskipun, dalam praktiknya, cara teknis pelaksanaannya bisa saja diubah-sesuaikan dengan latar belakang peserta, keadaan, waktu, dan tempat penyelenggaraan. ❖



FINAL



FONDASI

FINAL

TITIK TOLAK PENGORGANISASIAN RAKYAT CARA PANDANG MASALAH SOSIAL

Kerja-kerja pengorganisasian rakyat terutama sekali digerakkan oleh pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang penuh ketimpangan dan kesenjangan. Pemahaman itulah yang menimbulkan kehendak bertindak untuk melakukan perubahan. Tetapi, perubahan sosial tidak akan pernah bisa terjadi dalam sekejap. Ketimpangan dan kesenjangan terbentuk melalui proses-proses sosial yang panjang (*socially and historically constructed*). Sehingga, juga dibutuhkan proses-proses sosial tandingan dalam waktu yang paling tidak sama panjangnya untuk mengubahnya (*socially and historically deconstructed*).

Padahal, sebagai suatu realitas sejarah dan sosial, ketimpangan dan kesenjangan juga terus berkembang, bertambah atau berkurang, berubah-ubah bentuk, tampil dalam wajah dan wujud baru, terkadang malah tersamarkan, sehingga kian tidak mudah pula mengetahui dan memahaminya. Mereka yang berkepentingan, selalu berusaha untuk melanggengkannya. Hanya jika mengetahui anggapan-anggapan dasar dan imbasan-imbasan pemikiran yang melandasi lahirnya ketimpangan dan kesenjangan sosial, seorang pengorganisir rakyat akan tetap tanggap menghadapinya, sekaligus tetap mawas diri untuk tidak terjebak atau terkecoh.

Bagian pertama dari panduan ini akan membedah sumber dan akar pemikiran sosial yang mendasari anggapan-anggapan dasar perbedaan-perbedaan mendasar tersebut secara runtut. Ini sangat penting dipahami oleh seorang pengorganisir rakyat, agar mereka tidak terjebak menjadi sekadar seorang 'pengrajin sosial'.

ACARA-1

SEBAB-SEBAB MASALAH SOSIAL

TUJUAN

- Peserta mengenal adanya berbagai pendekatan atau cara pandang terhadap suatu masalah (peristiwa atau gejala) sosial.
- Peserta mampu mengidentifikasi sebab-sebab utama suatu masalah sosial menurut beberapa cara pandang yang berbeda tersebut.
- Peserta mampu mengidentifikasi sumber-sumber dan proses pembentukan berbagai cara pandang yang berbeda tersebut.

POKOK BAHASAN

- Pendekatan (cara pandang) peristiwa atau gejala sosial.
- Identifikasi sebab-sebab utama masalah sosial menurut beberapa pendekatan (cara pandang) yang berbeda.
- Sumber-sumber dan proses pembentukan berbagai cara pandang yang berbeda terhadap masalah sosial.

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/*session*)

METODE & MEDIA

- Telaah Fakta
- Diskusi dan Kerja Kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Lembar Fakta
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), kertas perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Bagikan Lembar Fakta #1 (*Kemiskinan Penduduk: Dibalik Angka-Angka*) dan Bahan Bacaan #1 (*Penjelasan Ringkas Indeks Rasio Gini*) yang telah disiapkan. Jelaskan secara singkat data dalam semua lembar-lembar infografis tersebut. Buka kesempatan peserta menanyakan hal-hal yang belum jelas (jika ada).

 *Catatan*

- Lembar Fakta yang disediakan di sini adalah infografis data agregat nasional tentang beberapa aspek kemiskinan penduduk yang selama ini kurang ditonjolkan dan jarang dipahami oleh awam (*Gini Ratio Index, Transient Poverty, Regional Disparity*) yang lebih menjelaskan banyak hal di sebalik angka-angka (sekedar jumlah dan persebaran) kemiskinan.
- Lebih bagus lagi jika Anda bisa mendapatkan data pada tingkat lokal (provinsi, kabupaten) asal daerah

peserta atau tempat pendidikan diselenggarakan, agar masalah atau isunya lebih akrab (*familiar*) dengan mereka. Sajikan dalam bentuk infografis seperti Lembar Fakta yang disediakan di sini, agar lebih mudah dipahami. Akan lebih bagus lagi jika dilengkapi dengan bahan-bahan visual (foto-foto, peta, grafika) atau audiovisual (video ringkas) yang memang sesuai.

3. Setelah Anda yakin bahwa semua peserta memang telah memahami data tersebut (bahwa kemiskinan memang masih merupakan salah satu masalah sosial nyata dan penting sampai saat ini, baik di tingkat nasional maupun lokal), langsung ajukan pertanyaan kunci:
 - **Apa sebab-sebab utama atau pokok orang miskin? Mengapa masih ada masalah kemiskinan di tengah masyarakat kita?**
4. Bagi seluruh peserta dalam beberapa kelompok sama besar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Minta mereka membahas dan mendaftar sebanyak mungkin sebab-sebab utama kemiskinan (orang menjadi dan tetap miskin) yang mereka ketahui dan yakini. Jelaskan bahwa jawaban mereka harus dituliskan pada lembar-lembar kertas tempel (*metaplan*) yang sudah disediakan, dengan syarat: satu potongan kertas untuk satu jawaban yang ditulis secara singkat dan padat! (beri contohnya jika perlu).
5. Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran. Caranya: setiap kelompok menempelkan potongan-potongan kertas jawaban mereka di papan tulis sambil mereka menjelaskan singkat setiap jawaban tersebut.

6. Setelah semua kelompok selesai presentasi, ajak mereka semua mengelompokkan potongan-potongan kertas jawaban tersebut dalam satu tabel kategorisasi yang sudah disiapkan pada selembar kertas lebar, sebagai berikut (sebagai contoh):

CARA PANDANG MASALAH SOSIAL (contoh isu: KEMISKINAN)				
	FAKTOR ALAM & SUPRAALAM	FAKTOR MANUSIA & SUMBERDAYA	FAKTOR SISTEM & STRUKTUR	FAKTOR KESADARAN & PENGETAHUAN
SEBAB- SEBAB POKOK	Nasib, takdir	Orangnya malas	Kebijakan tidak memihak	Dinabobokan dengan janji2 (PHP)
	Lahan bandus	Tidak ada modal	Peraturan tidak adil	Fakta/data dimanipulasi
	Bencana Alam	Kurang gizi	Korupsi aparat	Ajaran agama/ adat (sabar, nrimo)
	??	Pendapatan rendah	Lahan dirampas	??
	dan seterusnya....	??	??	??
		dan seterusnya....	dan seterusnya....	dan seterusnya....

Catatan

- Berdasarkan pengalaman selama ini, jawaban terhadap pertanyaan 'mengapa orang miskin?', biasanya selalu terbagi dalam empat kategori tersebut:
 - **FAKTOR ALAM & SUPRAALAM** (di luar kendali manusia, *force majeure*)
 - **FAKTOR MANUSIA & SUMBERDAYA** (pada diri orang miskin itu sendiri)
 - **FAKTOR SISTEM & STRUKTUR** (tatanan hukum, politik, dan ekonomi)
 - **FAKTOR KESADARAN & PENGETAHUAN** (tatanan nilai, ajaran, kepercayaan, warisan sejarah)
- Semua penyebab yang diidentifikasi oleh peserta dapat dikelompokkan dalam salah satu dari empat kategori tersebut. Karena itu, lebih baik siapkan format besar tabelnya dalam kertas lebar

dan tempel di dinding atau papan tulis, sehingga akan memudahkan Anda dan peserta melakukan proses pengelompokan secara bersama-sama.

- Jika masih ada kertas jawaban yang sulit dimasukkan dalam salah satu kategori tersebut, tempel saja dulu di luar tabel untuk kemudian nanti diklarifikasi kembali setelah semua kertas jawabannya sudah selesai. Tapi, menurut pengalaman selama ini, sepanjang klarifikasinya memang jelas, tidak akan ada jawaban yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kategori tersebut.

7. Bagi kembali semua peserta dalam empat kelompok sama besar sesuai dengan empat kategorisasi cara pandang yang sudah teridentifikasi, sehingga akan ada Kelompok-1 (Faktor Alam & Supraalam), Kelompok-2 (Faktor Manusia & Sumberdaya; Kelompok-3 (Faktor Sistem & Struktur), dan Kelompok-4 (Faktor Kesadaran & Pengetahuan).
8. Minta setiap kelompok, sesuai dengan kategori cara pandang masing-masing kelompok, untuk menjawab pertanyaan:

- **Bagaimana sampai cara pandang demikian terbentuk selama ini dalam masyarakat kita? Melalui cara, proses, atau media apa?**
- **Siapa yang selama ini menjadi sumber-sumber utama pembentuk masing-masing cara pandang tersebut?**

Tegaskan bahwa:

- setiap kelompok menjawab hanya untuk kategori kelompoknya masing-masing, tidak untuk semua (empat) kategori yang ada.
 - cara menjawabnya adalah sama seperti pada langkah sebelumnya: menulis jawabannya pada lembar potongan kertas yang tersedia, hanya satu jawaban pada setiap lembar!
9. Presentasi hasil diskusi kelompok. Tiap kelompok menempelkan lembar-lembar kertas jawaban mereka pada tabel kertas lebar yang sudah disiapkan, sehingga akan tampak sebagai berikut (contoh):

CARA PANDANG MASALAH SOSIAL (contoh isu: KEMISKINAN)				
	FAKTOR ALAM & SUPRA-ALAM	FAKTOR MANUSIA & SUMBERDAYA	FAKTOR SISTEM & STRUKTUR	FAKTOR KESADARAN & PENGETAHUAN
PROSES & SUMBER PEMBENTUKAN CARA PANDANG	Melalui pengajian	Melalui pengajian	Baca dari buku2	Baca dari buku2
	Diajarkan di sekolah	Diajarkan di sekolah	Diskusi2 di Kampus	Diskusi2 di LSM
	Diajarkan orangtua	Siaran TV	TV (Acara ILC)	??
	??	??	??	??
	??	??	??	??
	dan seterusnya....	dan seterusnya....	dan seterusnya....	dan seterusnya....

10. Ajak semua peserta menganalisis jawaban-jawaban tersebut:

- **Adakah persamaan proses dan sumber pembentukan cara pandang di antara empat kategori tersebut? Jika ada, mengapa sampai hasilnya berbeda?**

Catatan

■ Jika waktu memang masih memungkinkan, minta beberapa peserta menceritakan contoh-contoh nyata bagaimana proses-proses pembentukan cara pandang yang berbeda-beda itu selama ini berlangsung di masyarakat, baik yang pernah mereka sendiri alami langsung maupun yang pernah mereka saksikan. Tekankan agar mereka menceritakannya lebih rinci, misalnya: biasanya pada acara-acara apa saja itu terjadi, menggunakan media apa saja, siapa yang menyelenggarakannya, sudah

berapa lama berlangsung?, dan seterusnya.

■ Berbagi cerita dan pengalaman nyata ini penting untuk membuat peserta lebih memahami proses-proses pembentukan cara pandang masalah sosial di tengah masyarakat, dan bahwa cara pandang masalah sosial adalah hasil bentukan, bukan sesuatu yang terbentuk begitu saja dengan sendirinya.

11. Rangkuman atau kesimpulan umum bersama tentang:

- Beberapa pendekatan (cara-pandang) yang berbeda dalam melihat dan memahami suatu masalah sosial (dalam hal ini masalah kemiskinan sebagai contoh).
 - Sebab-sebab masalah sosial menurut berbagai cara pandang yang berbeda tersebut dan proses-proses serta sumber-sumber yang membentuknya.
 - Pendekatan (cara pandang) yang berbeda tersebut akan menentukan pula pendekatan atau cara pengorganisasian rakyat yang akan dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi (akan dibahas pada acara-acara selanjutnya).
8. Tutup acara pertama ini dengan penjelasan singkat bahwa hasil diskusi (tabel kertas lebar) itu akan menjadi bahan (titik tolak) acara-acara selanjutnya. Karena itu, minta peserta menempelkannya pada dinding agar terlihat setiap saat pada acara-acara selanjutnya. Lebih bagus lagi jika ada peserta bersedia sebagai relawan untuk menyalinnya dalam komputer, dicetak, dan dibagikan kepada semua peserta sebagai bacaan acuan setiap saat dibutuhkan selama proses pendidikan, sekaligus sebagai berkas rangkuman pokok bahasan acara ini. (Atau, bisakah Anda sepakati dengan peserta untuk menugaskan satu orang atau satu tim khusus untuk mengerjakannya?). ❖

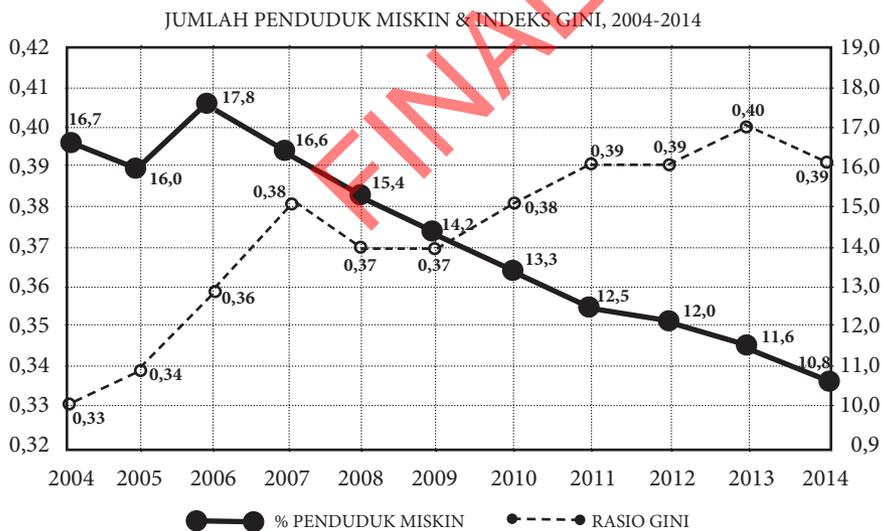
KEMISKINAN PENDUDUK DI BALIK ANGKA-ANGKA



Selama beberapa dasawarsa, bahkan sejak masa-masa akhir rezim Orde Baru pada tahun 1990-an, pemerintah selalu mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah berhasil dikurangi secara bertahap. Data statistik terus disiarkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk di negeri ini terus menurun dari tahun ke tahun. Namun, meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan memang terus berkurang, namun persoalan-persoalan mendasar tentang ketidakmerataan dan kesementaraan dari keadaan kemiskinan tersebut masih tetap bermasalah. Inilah yang jarang disiarkan dan, karena itu, jarang diketahui oleh mayoritas warga negara.

Berikut adalah kutipan data resmi dari pemerintah sendiri (dirangkul dari beberapa dokumen BAPPENAS, BPS, dan UNDP, berbagai tahun).

1 ■ KESENJANGAN TETAP LEBAR



KESIMPULAN: Persentase (angka nisbi) penduduk miskin memang cenderung terus menurun, namun jumlah (angka mutlak)nya tetap saja masih besar. Persentase terakhir tahun 2014 menunjukkan angka 10,8% dari total penduduk (sekitar 250 juta jiwa). Terdengar sedikit, tetapi itu berarti sekitar 25 juta jiwa! Selain itu, kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya cenderung terus meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh Angka-Angka Banding (Rasio) Gini (garis putus-putus pada grafik) dalam rentang waktu yang sama (2004-2014). Dengan kata lain, dalam ungkapan yang lebih populer: “Yang kaya tambah kaya, yang miskin makin miskin.” (Tentang Rasio Gini, lihat Bahan Bacaan #1 yang dilampirkan pada lembar kerja ini).



2 ■ KESENJANGAN ANTARWILAYAH & ANTARSEKTOR

PETA PERSEBARAN PENDUDUK MISKIN, 2002 & 2012

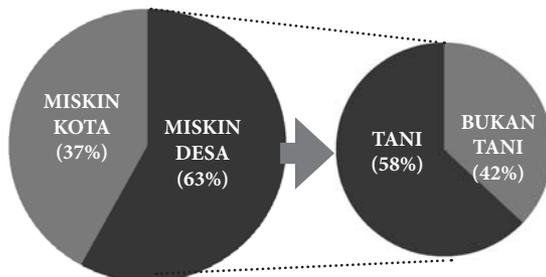


KETERANGAN:

Makin gelap warnanya, makin besar jumlah penduduknya yang masih di bawah garis kemiskinan.

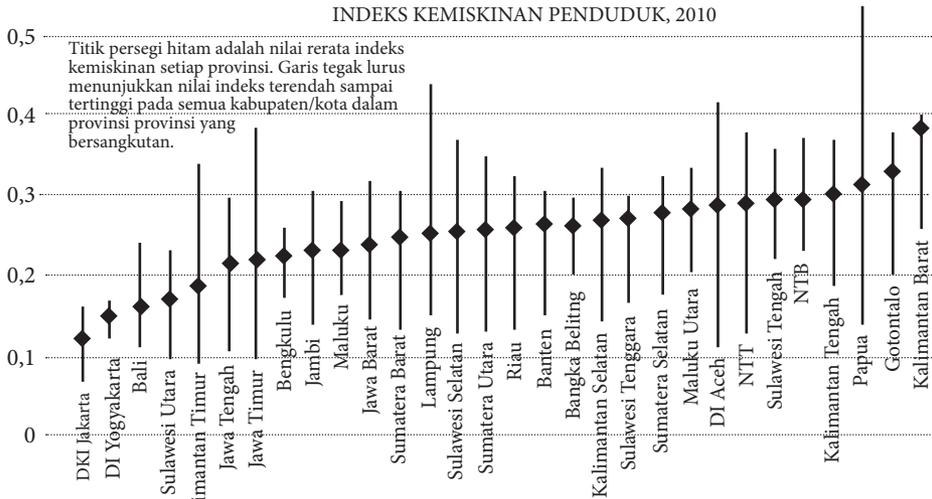
KESIMPULAN: Kesenjangan ternyata tidak terjadi pada tingkat keluarga (rumah tangga) penduduk saja, tetapi juga antarwilayah atau daerah (provinsi dan kabupaten). Kesenjangan antarwilayah (*regional disparities*) selama sepuluh tahun (2002-2012) menunjukkan bahwa daerah miskin dan paling miskin (Papua, Papua Barat, NTT, NTB, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi) tetap memegang ‘rekor’ daerah paling miskin. Singkatnya, peta kemiskinan relatif tetap alias praktis tidak banyak berubah.

Demikian pula antarwilayah perdesaan dibanding dengan wilayah perkotaan. Tercatat, sekitar 63% dari penduduk miskin berada di wilayah perdesaan, dan 58% dari mereka adalah yang bekerja atau bermata-pencarian di sektor pertanian.





3 ■ KESENJANGAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT



KESIMPULAN: Di banyak daerah, kesenjangan antara yang paling miskin dengan yang paling kaya masih sangat lebar (makin panjang garis tegak lurus), misal: Kalimantan Timur, Jawa Timur, Lampung, Aceh, dan Papua.

4 ■ KEMISKINAN 'BOLAK-BALIK'

PERTUKARAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN, 2008 & 2009

		2009			
		MISKIN	HAMPIR MISKIN	TIDAK MISKIN LAGI	JUMLAH
2008	MISKIN	46,71	20,28	33,01	100,0
	HAMPIR MISKIN	22,32	21,53	56,15	100,0
	TIDAK MISKIN LAGI	6,37	7,65	86,98	100,0

KESIMPULAN: Pengurangan jumlah orang miskin, ternyata tidak bersifat tetap (statis), terus berubah oleh berbagai faktor. Antara 2008-2009, misalnya, sekitar 53,29% penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan, tetapi pada saat yang sama terdapat sekitar 27,69% penduduk yang sebelumnya tidak miskin, malah terjerembab masuk ke bawah garis kemiskinan. Ini yang dikenal sebagai 'kemiskinan bolak-balik' (*transient poverty*).





PENJELASAN RINGKAS TENTANG INDEKS (RASIO) GINI

■ Angka Banding (Rasio) Gini —juga dikenal sebagai Koefisien Gini atau Indeks Gini— adalah suatu persamaan matematika yang dikembangkan oleh pakar statistik Italia, Corrado Gini (dalam buku *Variabilità e mutabilità*, terbit pertama kali tahun 1912). Karena paling banyak digunakan, Koefisien Gini sudah menjadi semacam ukuran baku internasional untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di satu negara atau wilayah.

■ Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilainya 0 berarti terjadi pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Makin tinggi angkanya mendekati 1, berarti makin lebar senjang pendapatan yang terjadi antar berbagai kelompok pendapatan dalam masyarakat.

■ Skala Baku Indeks Gini:

0 = pendapatan merata sempurna

0 - 0,4 = ketimpangan pendapatan rendah

0,4 - 0,5 = ketimpangan pendapatan sedang

0,5 - 1 = ketimpangan pendapatan tinggi (tidak merata sempurna, terpusat pada satu golongan atau lapisan tertentu)

■ Rumus Dasar Koefisien Gini:

$$1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

■ Contoh sederhana terapan hasil perhitungan Rasio Gini:

1 dari 5 ANAK HIDUP DALAM KEMISKINAN



Disarikan dari beberapa sumber buku teks, antara lain:

Wolf, Frauke (1997), *Lorenzkurvendisparität: Neuere Entwicklungen, Erweiterungen un Anwendungen*. Frankfurt: Peter Lang GmbH; dan Yitzhaki, Shlomo & Edna Schechtman (2012), *The Gini Methodology: A Primer on A Statistical Methodology*. New York: Springer.

ACARA-2

PILIHAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL

TUJUAN

- Peserta memahami implikasi logis dari perbedaan cara pandang terhadap sebab-sebab pokok masalah sosial dalam pilihan tindakan pemecahan masalah tersebut.
- Peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan (kegiatan) pemecahan masalah sosial dan hasilnya sesuai dengan sebab-sebab pokok permasalahannya menurut berbagai cara pandang yang berbeda.

POKOK BAHASAN

- Bentuk-bentuk tindakan (kegiatan) pemecahan masalah sosial sesuai dengan sebab-sebab pokok permasalahannya menurut cara pandang yang berbeda.
- Tujuan (hasil yang diinginkan) dari bentuk-bentuk tindakan (kegiatan pemecahan) masalah tersebut menurut cara pandang yang berbeda.

WAKTU

- 2 jam efektif (1 satuan acara/session)

METODE & MEDIA

- Diskusi dan kerja kelompok
- Tempelan kertas lebar hasil acara sebelumnya

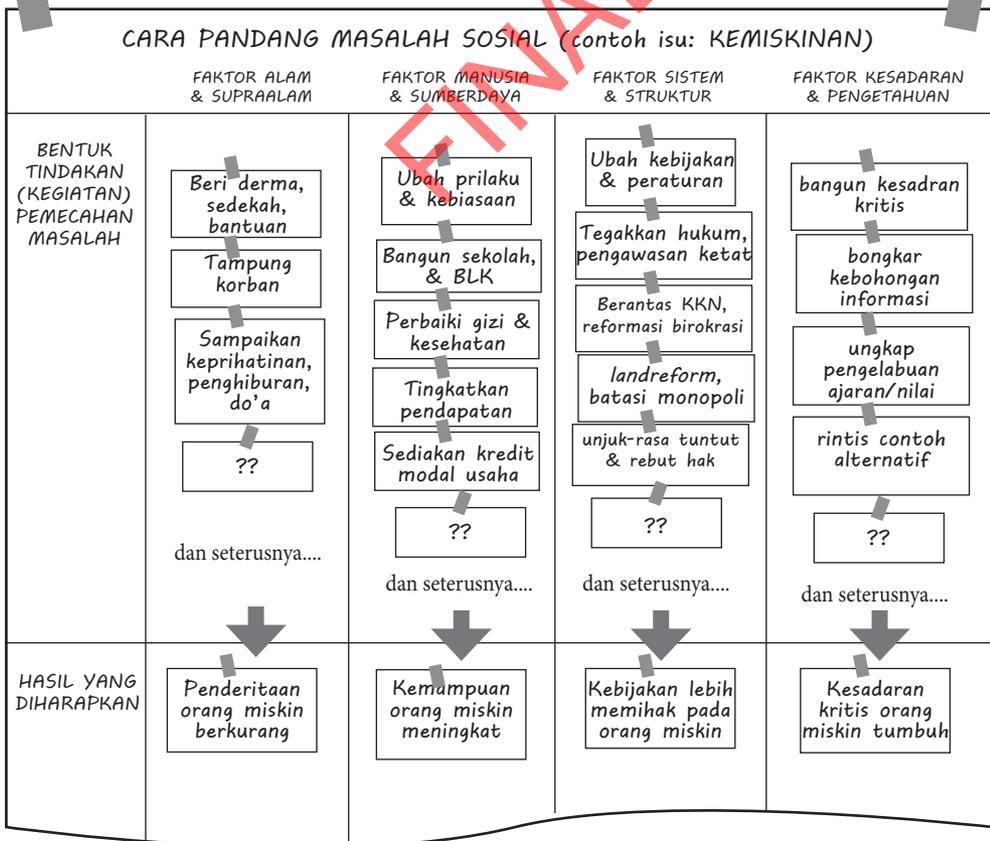
BAHAN & PERALATAN

- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Ingatkan kembali peserta pada hasil (rangkuman, kesimpulan) dari acara sebelumnya. Minta mereka mengacu (melihat kembali) pada tempelan kertas lebar di dinding, atau pada salinan (fotokopi) rekaman hasil dari acara sebelumnya tersebut (jika sudah dicetak dan dibagikan).

3. Bagi kembali seluruh peserta dalam empat kelompok sesuai dengan empat kategori penyebab masalah yang sudah dibahas pada acara sebelumnya: Kelompok-1 (Faktor Alam & Supraalam); Kelompok-2 (Faktor Manusia & Sumberdaya); Kelompok-3 (Faktor Sistem & Struktur); dan Kelompok-4 (Faktor Kesadaran & Budaya).
4. Minta tiap kelompok membahas dan menjawab seperti acara sebelumnya (tulis jawaban pada lembar potongan-potongan kertas yang sudah disediakan, hanya satu jawaban satu pada satu lembar kertas):
 - Tindakan-tindakan atau bentuk kegiatan pemecahan apa saja terhadap masalah sosial tersebut yang logis (masuk akal, 'memang nyambung') dengan sebab-sebab pokok permasalahannya yang sudah teridentifikasi?
 - Apa hasil yang diharapkan dari pilihan tindakan-tindakan pemecahan masalah tersebut?
5. Presentasi hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok menempelkan potongan kertas jawabannya langsung pada kolom yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Sehingga, hasilnya akan tampak sebagai berikut (sebagai contoh):



6. Selama presentasi tiap kelompok, lakukan pembahasan (klarifikasi dan analisis) terhadap setiap pilihan tindakan (bentuk kegiatan) yang mereka rumuskan:

- **Apakah memang logis ('nyambung') dengan sebab pokok permasalahannya?**

Jika ada jawaban mereka yang tidak 'nyambung', pertanyakan secara kritis:

- **Mengapa sampai demikian? Apakah karena mereka masih tidak paham, atautkah karena asal menjawab saja tanpa argumen sama sekali? Bagaimana proses diskusinya dalam kelompok, ada analisis mendalam atau hanya sekedar 'membuat daftar' saja memenuhi tugas kelompok?**

Catatan

- Membahas secara kritis tiap jawaban peserta ini adalah tahap sangat penting sebagai bagian dari proses penyadaran dan pemahaman, latihan dasar untuk berpikir taat asas (*consistent*) dan padu (*coherent*). Karena, berdasarkan pengalaman selama ini, banyak orang sering menjawab 'asal-asalan, ibarat 'kepala ke kiri, mata ke kanan' (*inconsistency, incoherency*). Misalnya: Kelompok-1 (Faktor Alam & Supraalam) menjawab perlu 'ubah kesadaran dan prilaku' atau 'perlu advokasi kebijakan'. Jawaban ini jelas tidak logis dengan sebab pokok permasalahan bagian mereka, karena ini adalah jawaban semestinya dari Kelompok-2 (Faktor Manusia & Sumberdaya) dan Kelompok-3 (Faktor Sistem & Struktur).
- Karena itu, tegaskan pada peserta bahwa jawaban yang diminta dari mereka bukan jawaban 'yang seharusnya menurut mereka', tapi 'yang sesuai dengan sebab permasalahan yang telah teridentifikasi dan terkategoriikan', terlepas dari apakah mereka setuju (sependapat) dengan sebab tersebut atau tidak. Singkatnya, bukan jawaban subjektif (pribadi) mereka, tapi jawaban objektif menurut kerangka dari acara sebelumnya. Tegaskan, ini hanyalah proses simulasi untuk memahami, bukan proses praktik yang sesungguhnya.

7. Rangkuman atau kesimpulan umum bersama tentang:

- Implikasi logis pilihan tindakan pemecahan suatu masalah sosial dan hasilnya berdasarkan cara pandang tentang sebab pokok permasalahannya.
- Konsistensi antara pikiran tentang sebab masalah dengan pilihan tindakan pemecahan masalah dan hasilnya yang diharapkan dari tindakan tersebut.

8. Tutup acara dengan penjelasan seperti acara sebelumnya: hasil diskusi (tabel kertas lebar) itu akan menjadi bahan (titik tolak) acara-acara selanjutnya. ❖

ACARA-3

JENIS PERAN & PELAKU TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL

TUJUAN

- Peserta memahami implikasi logis pilihan tindakan pemecahan suatu masalah sosial dan hasilnya terhadap jenis pelaku langsung yang dibutuhkan (sesuai) untuk melaksanakan tindakan tersebut menurut berbagai cara pandang yang berbeda.

POKOK BAHASAN

- Jenis pelaku langsung yang dibutuhkan (sesuai) melaksanakan pilihan tindakan pemecahan masalah sosial berdasarkan sebab pokok permasalahannya menurut berbagai cara pandang yang berbeda.

WAKTU

- 2 jam efektif (1 satuan acara/session)

METODE & MEDIA

- Diskusi dan kerja kelompok
- Tempelan kertas lebar hasil acara sebelumnya

BAHAN & PERALATAN

- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Ingatkan kembali peserta pada hasil (rangkuman, kesimpulan) dari acara sebelumnya. Minta mereka mengacu (melihat kembali) pada tempelan kertas lebar di dinding, atau pada salinan (fotokopi) rekaman hasil dari acara sebelumnya tersebut (jika sudah dicetak dan dibagikan).
3. Agar tetap berkesinambungan, minta semua peserta kembali ke dalam kelompok terakhir (acara sebelumnya), untuk membahas dan menjawab pertanyaan:

- Berdasarkan rumusan sebab permasalahan dan pilihan tindakan pemecahannya pada setiap kelompok (kategori), maka jenis pelaku langsung yang bagaimana yang sesuai untuk melaksanakan tindakan tersebut, terutama di tingkat praktis di lapangan (lokal) di mana masalah sosial (kemiskinan) tersebut terjadi?
 - Apa saja peran utama yang harus dijalankannya?
4. Presentasi hasil diskusi kelompok, masih tetap dengan cara yang sama dengan acara sebelumnya: menempelkan lembaran jawaban pada kolom tabel sesuai kategori masing-masing, sehingga hasil akhirnya akan tampak sebagai berikut (contoh):

CARA PANDANG MASALAH SOSIAL (contoh isu: KEMISKINAN)				
	FAKTOR ALAM & SUPRAALAM	FAKTOR MANUSIA & SUMBERDAYA	FAKTOR SISTEM & STRUKTUR	FAKTOR KESADARAN & PENGETAHUAN
PERAN & PELAKU TINDAKAN	PERAN: Meringankan derita korban	PERAN: Memecahkan masalah dan kendala teknis	PERAN: Membangkitkan & mengerahkan tindakan massa	PERAN: Mengajak dialog & analisis kritis, merintis contoh alternatif
	PELAKU: *Dermawan *Relawan *Kemanusiaan *Pekerja Sosial	PELAKU: *Pakar Teknis & Rekayasa *Penyuluh Lapangan	PELAKU: *Pelobi politik *Juru Kampanye *Pegiat Penggerak Aksi	PELAKU: *Pendidik rakyat *Penggerak tindak kolektif di akar-rumput

Catatan

- Sama seperti pada acara sebelumnya, pembahasan secara kritis tiap jawaban peserta ini adalah tahap sangat penting sebagai bagian dari proses penyadaran dan pemahaman, latihan dasar untuk berpikir taat asas (*consistent*) dan tertib-padu (*coherent*).
- Jika waktu memang memungkinkan, ajak peserta untuk membahas lebih dalam tentang beberapa penggunaan istilah yang saling jumbuh dan rancu selama ini. Misalnya: apa beda antara 'penyuluh', 'pendamping', 'penggerak',

dan seterusnya. Termasuk beberapa istilah tentang bentuk-bentuk kegiatan atau peran yang dijalankan, seperti 'sosialisasi', 'fasilitasi', dan semacamnya. Bahkan, jika perlu, sampai ke rincian tentang pihak-pihak mana saja yang paling sering menggunakan semua peristilahan tersebut dan apa maksudnya, atau bagaimana sebenarnya praktik nyatanya di lapangan selama ini?

5. Ajak peserta untuk membuat satu ikhtisar peta contoh para pihak (organisasi, lembaga; pemerintah maupun nonpemerintah; juga swasta) yang termasuk dalam setiap kategori yang berbeda tersebut. Buat ini dalam satu lembar tersendiri (tidak dalam format tabel kertas lebar yang sudah ada). Sehingga, hasil akhirnya berupa satu matriks sebagai berikut (contoh):

CONTOH PELAKU MENURUT FOKUS PANDANGAN MEREKA

	FAKTOR ALAM & SUPRAALAM	FAKTOR MANUSIA & SUMBERDAYA	FAKTOR SISTEM & STRUKTUR	FAKTOR KESADARAN & PENGETAHUAN
LOKAL (desa, kabupaten, provinsi)	PEMERINTAH: Dinas Sosial	PEMERINTAH: Dinas Pertanian	PEMERINTAH: ??	PEMERINTAH: ??
	ORNOP: Panti Asuhan	ORNOP: ??	ORNOP: LBH ? ??	ORNOP: ?? ??
	SWASTA: CSR Perusahaan	SWASTA: ??	SWASTA: ??	SWASTA: ??
NASIONAL	PEMERINTAH: ??			
	ORNOP: ??			
	SWASTA: ??			
INTER-NASIONAL	dan seterusnya....	dan seterusnya....	dan seterusnya....	dan seterusnya....

 Catatan

- Pembagian kelompok peserta pada bagian ini bisa saja tetap pada kelompok yang sudah ada (menurut empat kategori faktor yang sudah diidentifikasi) seperti sebelumnya. Namun, bisa juga diacak ulang menurut jenis pelaku yang akan diidentifikasi dengan dua kemungkinan permutatif: [1] menurut tingkatannya; atau [2] menurut klasifikasi organisasi atau lembaganya. Jelasnya:

* Kelompok-1, mengidentifikasi semua

jenis organisasi' lembaga pelaku **pada tingkat lokal;**

* Kelompok-2, mengidentifikasi semua jenis organisasi' lembaga pelaku **pada tingkat nasional;**

* Kelompok-3, mengidentifikasi semua jenis organisasi' lembaga pelaku **pada tingkat internasional.**

Atau:



Catatan

- * Kelompok-1, mengidentifikasi semua **lembaga pemerintah** pada semua tingkatan (lokal, nasional, internasional);
- * Kelompok-2, mengidentifikasi semua **lembaga non-pemerintah** pada semua tingkatan (lokal, nasional, internasional);
- * Kelompok-3, mengidentifikasi semua **lembaga swasta** pada semua tingkatan (lokal, nasional, internasional).
 - Tegaskan pada peserta bahwa tugas kali ini bukan sekedar menyusun 'daftar organisasi/lembaga'-nya, tetapi juga mendapatkan informasi dasar yang memadai tentang organisasi/lembaga

tersebut, terutama tentang visi/misinya, bentuk-bentuk program atau kegiatannya, dan strategi pendekatan atau metoda yang mereka gunakan dalam pelaksanaan programnya.

- Dalam rangka memperoleh informasi dasar yang cukup itu, waktu diskusi kelompok dapat diperpanjang, misalnya untuk keperluan mencari informasi tersebut dari berbagai sumber yang mungkin (misalnya: *searching* di internet, dan sebagainya).

6. Presentasi hasil diskusi kelompok. Fokuskan pembahasannya pada kecukupan informasi tiap organisasi/lembaga pelaku yang diidentifikasi oleh setiap kelompok, terutama pada unsur-unsur yang memang bisa menjelaskan visi dan misi, program dan kegiatan, serta metode pelaksanaan program organisasi/lembaga yang bersangkutan, sehingga pengelompokannya pada salah satu dari empat kategori dasar yang ada memang benar-benar tepat. Jika ada informasi yang masih meragukan, minta klarifikasi sumbernya (dari mana mereka mendapatkannya?) untuk menilai apakah informasinya memang bisa dipercaya.
7. Rangkuman atau kesimpulan umum bersama tentang:
 - Jenis pelaku dan peran yang sesuai pada setiap kategori cara pandang tentang sebab-sebab pokok masalah sosial dan tindakan-tindakan pemecahannya.
 - Konsistensi antara pikiran tentang sebab masalah dan pilihan tindakan pemecahannya dengan peran dan jenis pelakunya.
 - Konsistensi antara pikiran tentang sebab masalah dan pilihan tindakan pemecahannya dengan peran dan jenis pelakunya.
6. Tutup acara dengan penjelasan seperti acara sebelumnya: hasil diskusi (tabel kertas lebar) itu akan menjadi bahan (titik-tolak) acara-acara selanjutnya. ❖

ACARA-4

PILIHAN ARAH PERUBAHAN SOSIAL

TUJUAN

- Peserta memahami tujuan dan arah (cita-cita) tatanan sosial dari setiap kategori cara pandang masalah sosial.

POKOK BAHASAN

- Cita-cita tatanan sosial & arah perubahannya

WAKTU

- 2 jam efektif (1 satuan acara/*session*)

METODE & MEDIA

- Diskusi dan kerja kelompok
- Tempelan kertas lebar hasil acara sebelumnya

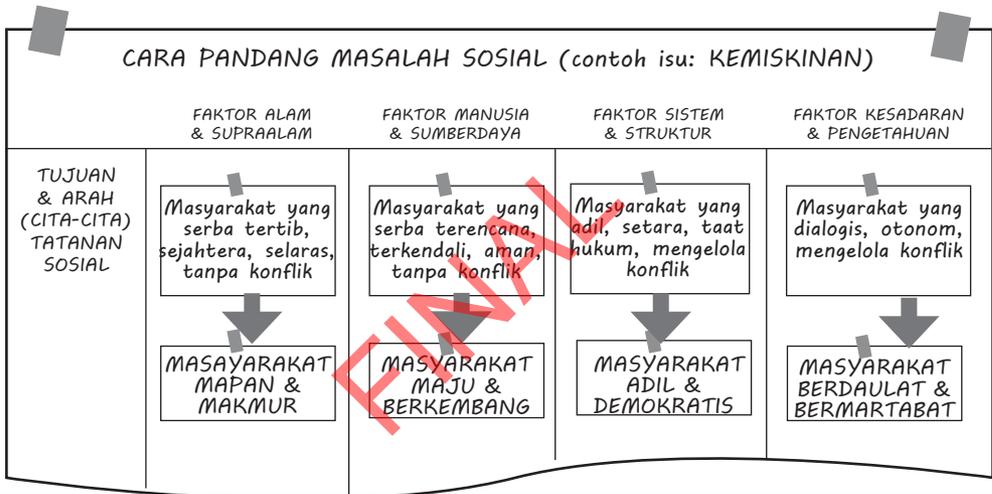
BAHAN & PERALATAN

- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

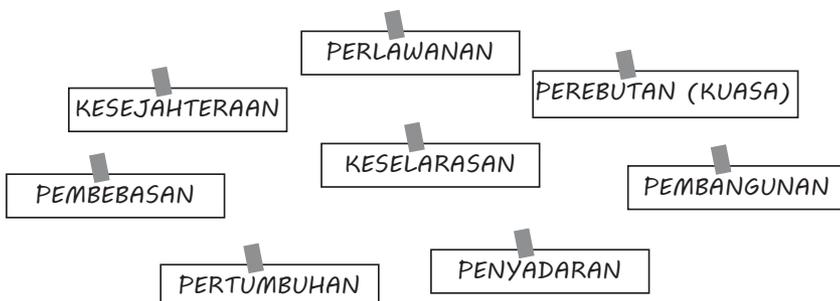
PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Ingatkan kembali peserta mengacu (melihat kembali) pada tempelan kertas lebar di dinding, atau pada salinan (fotokopi) rekaman hasil dari acara sebelumnya tersebut (jika sudah dicetak dan dibagikan).
3. Minta semua peserta kembali ke dalam kelompok terakhir (acara sebelumnya), untuk membahas dan menjawab pertanyaan:

- Berdasarkan rumusan sebab permasalahan, pilihan tindakan pemecahannya, serta jenis peran dan pelakunya pada setiap kelompok (kategori), maka tatanan sosial (masyarakat) seperti apa sebenarnya yang dicita-citakan atau menjadi tujuan dari setiap kategori tersebut?
 - Jika dirumuskan dalam satu kalimat ringkas-padat, apa semboyan (*tag line*) yang tepat dan mewakili visi tatanan masyarakat setiap kategori tersebut?
4. Presentasi hasil diskusi kelompok, masih tetap dengan cara yang sama dengan acara sebelumnya: menempelkan lembaran jawaban pada kolom tabel sesuai kategori masing-masing, sehingga hasil akhirnya akan nampak sebagai berikut (contoh):



5. Jelaskan beberapa konsep dasar yang selama ini dianut oleh berbagai cara pandang masalah sosial tersebut. Caranya:
- Tempelkan secara acak (tersebar tidak beraturan di papan tulis) beberapa lembar potongan kertas yang telah disiapkan, berisi kata-kata kunci dari konsep-konsep dasar tersebut, yakni:



- Sambil menempelkan kertas-kertasnya secara acak, jelaskan satu per satu secara ringkas pengertian dasar dan maksud dari setiap kata kunci (konsep) tersebut sesuai Bahan Acuan berikut:



BAHAN ACUAN

■ **KESEJAHTERAAN:** konsep dasar di mana semua warga masyarakat atau negara berkecukupan. Warga yang memiliki kelebihan, harus membantu yang kekurangan, tanpa harus menjadi sama dan setara.

■ **KESELARASAN:** konsep dasar di mana setiap orang dalam satu masyarakat atau negara sudah punya tempat (kelas)-nya masing-masing yang harus dijaga tetap selaras (harmonis).

■ **PERTUMBUHAN:** konsep dasar untuk mencapai kemajuan melalui laju perekonomian yang tinggi, sehingga kebutuhan dasar semua warga masyarakat atau negara dapat dipenuhi. Untuk itu, dibutuhkan jaminan keamanan yang mantap (stabil).

■ **PEMBANGUNAN:** konsep dasar yang beranggapan bahwa kemajuan dapat dicapai secara bertahap dan terencana dengan matang oleh para pakar profesional dan tenaga kerja yang berkemampuan teknis tinggi. Konflik harus dihindari agar semua rencana berlangsung mulus dan tidak menghancurkan semua prasarana yang dibutuhkan.

■ **PERLAWANAN:** konsep dasar tentang hak semua warga masyarakat atau negara harus diperjuangkan dan direbut, jika perlu dengan merebut kekuasaan

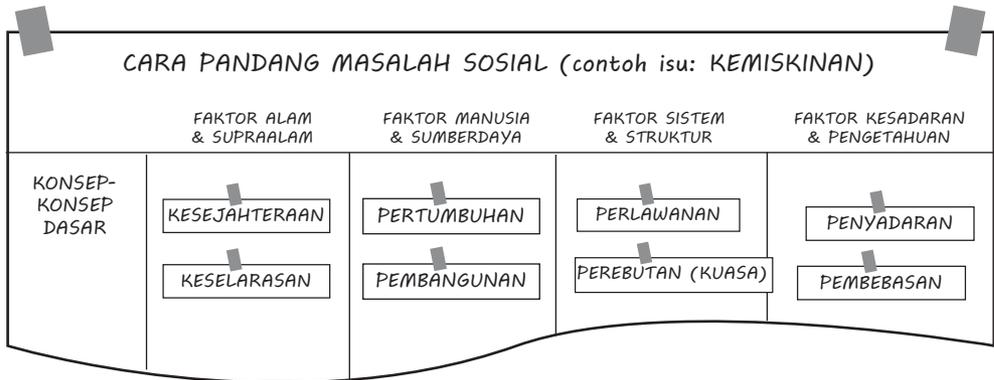
negara. Sehingga, semua kebijakan atau peraturan dapat dibuat untuk menjamin terciptanya keadilan, kesetaraan. Karena itu, diperlukan disiplin ketat dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

■ **PEREBUTAN (KUASA):** konsep dasar yang beranggapan bahwa hanya dengan memegang langsung kuasa negara maka hak asasi semua warga masyarakat bisa dijamin dan keadilan bisa ditegakkan.

■ **PENYADARAN:** konsep dasar yang meyakini bahwa martabat kemanusiaan semua orang di satu masyarakat atau negara hanya bisa dicapai jika semua warga memiliki kesadaran kritis atas realitas sosial. Sehingga, mereka tidak akan mudah dikelabui dan dimanipulasi oleh siapa pun.

■ **PEMBEBASAN:** konsep dasar yang meyakini bahwa kemerdekaan sejati semua orang bisa dicapai jika semua orang mampu membebaskan dirinya dari semua bentuk penindasan, tetapi tanpa harus mengorbankan kemerdekaan orang lain. Perbedaan atau konflik tak mungkin dihindarkan, sehingga proses-proses dialogis dibutuhkan untuk mengelola perbedaan dan konflik menjadi sesuatu yang positif.

- Minta setiap kelompok memilih lembar potongan kertas itu untuk yang paling sesuai dan ditempelkan pada kategori cara pandang sosial masing-masing kelompok, sehingga akan tampak sebagai berikut:



6. Rangkuman atau kesimpulan umum bersama tentang:

- Cita-cita atau visi tatanan sosial (masyarakat) yang menjadi tujuan dari setiap kategori cara pandang masalah sosial.
- Konsep-konsep dasar yang selama ini sering digunakan oleh berbagai cara pandang masalah sosial dan cita-cita sosialnya.

7. Tutup acara dengan penjelasan seperti acara sebelumnya: hasil diskusi (tabel kertas lebar) itu akan menjadi bahan (titik-tolak) acara-acara selanjutnya. Sambungkan dengan tabel kertas lebar dari acara sebelumnya. ❖

ACARA-5

ANGGAPAN DASAR
FILSAFAT, TEORI & PRAKTIK

TUJUAN

- Peserta memahami anggapan-anggapan dasar (asumsi) dan teori yang mendasari setiap kategori cara pandang masalah sosial dan implikasinya pada tujuan dan arah (cita-cita) perubahan tatanan sosial masing-masing.

POKOK BAHASAN

- Anggapan dasar & aliran teori perubahan sosial

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/session)

METODA & MEDIA

- Diskusi dan kerja kelompok
- Tempelan kertas lebar hasil acara sebelumnya

BAHAN & PERALATAN

- Bahan bacaan
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Bagikan Bahan Bacaan #2 (*Perubahan Sosial: Anggapan-Anggapan Dasar Filsafat, Teori & Praktik*). Minta seluruh peserta kembali ke kelompok masing-masing dengan tugas:
 - Membaca dan memahami bersama isi bahan bacaan tersebut.
 - Membahas dan menentukan:
 - **Anggapan-anggapan dasar yang mana yang sesuai bagi kategori cara pandang masalah sosial masing-masing kelompok yang sudah dibahas pada acara-acara sebelumnya? Mengapa demikian?**

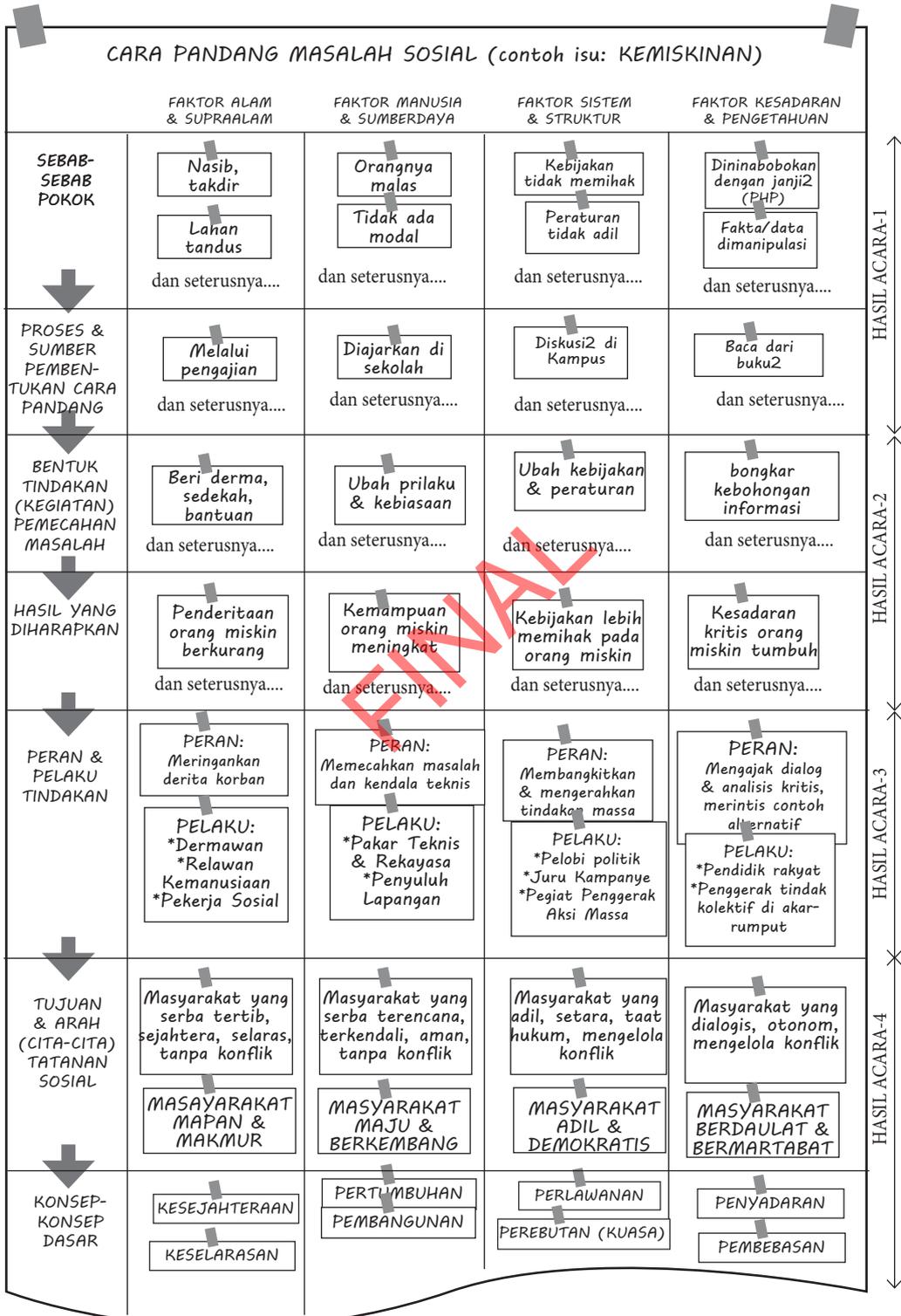
• Dalam kenyataan praktiknya selama ini, organisasi/lembaga mereka dan diri mereka sendiri selama ini menganut anggapan-anggapan dasar yang mana, sehingga bisa disebut termasuk dalam aliran pemikiran atau paham perubahan sosial yang mana? Mengapa demikian?

- Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran. Selama presentasi, cermati setiap jawaban dan minta klarifikasi pada kelompok yang bersangkutan jika ada rumusan jawaban mereka yang meragukan atau tidak terlalu jelas. Ajak anggota kelompok lain juga menanggapi secara kritis.

Catatan

- Proses ini adalah bagian yang sangat penting (*crucial*) untuk refleksi kritis peserta tentang organisasi/lembaga dan diri mereka sendiri. Karena itu, tegaskan kepada para peserta untuk memberikan informasi yang sejujurnya tentang organisasi/lembaga mereka sendiri. Tegaskan bahwa ini bukan penilaian, tapi lebih sebagai suatu proses 'mawas diri', proses bercermin (refleksi) untuk umpan-balik perbaikan.
- Berdasarkan pengalaman selama ini, sangat sering ditemukan banyaknya 'saling pertentangan' (kontroversi) antara retorika normatif (visi-misi, rumusan program) satu organisasi/lembaga dengan bentuk-bentuk program dan kegiatan mereka. Fokuskan perhatian dan pembahasan pada unsur-unsur kontroversial tersebut (jika ada) untuk membantu peserta melihat lebih jernih konsistensi dan koherensi lembaga mereka sendiri.
- Pada organisasi/lembaga peserta yang ditemukan memang masih mengandung kontroversi-kontroversi semacam itu, ajak mereka untuk memikirkan **apa langkah perbaikan yang mungkin dilaksanakan terhadap organisasi/ lembaga mereka?**

- Rangkuman atau kesimpulan umum bersama tentang:
 - Anggapan-anggapan dasar filsafat dan teori yang melandasi cita-cita atau visi tatanan sosial (masyarakat) yatau arah perubahan ang menjadi tujuan dari setiap kategori cara pandang masalah sosial.
 - Implikasi dari anggapan-anggapan dasar tersebut dalam pilihan-pilihan tindakan dan praktik perubahan sosial.
- Ajak aseluruh peserta menyambung-nyambungkan semua kertas lebar berisi tempelan-tempelan kertas hasil pembahasan empat kategori cara pandang masalah sosial pada acara-acara sebelumnya. Sambungkan berurutan dari paling atas (hasil Acara-1) sampai paling bawah (hasil Acara-4), sehingga akan tampak sebagai berikut:



6. Bagikan Bahan Bacaan #3 (*Rangkuman Cara Pandang Masalah Sosial*) kepada seluruh peserta. Jelaskan bahwa bahan bacaan tersebut adalah salinan dari semua kertas lebar yang baru saja disambung-sambungkan, menghasilkan satu tabel panjang dan lengkap tentang cara pandang masalah sosial dan implikasi-implikasi logisnya. Jelaskan bahwa itu adalah rangkuman hasil pembahasan sejak Acara-1 sampai Acara-4. Sebagai tambahan untuk memperkaya bahan acuan mereka, bagikan juga Bahan Bacaan #4 (*Tafsir Realitas Sosial: Pertarungan Kuasa & Ideologi*).
7. Berdasarkan rangkuman tersebut, tanyakan pada peserta:
 - **Apakah mereka sudah melihat cara pandang yang mana dari empat kategori tersebut yang paling memungkinkan seseorang akhirnya memilih atau menetapkan diri untuk menjadi seorang pengorganisir rakyat?**
8. Tutup acara dengan penjelasan bahwa acara selanjutnya akan memperdalam kemampuan melakukan analisis sosial sebagai kemampuan paling dasar dari seorang pengorganisir rakyat. ❖

Catatan

- Acara-5 ini adalah pokok bahasan yang memang tidak mudah, karena merambah sampai ke pemikiran-pemikiran filsafat yang rumit dan jelimet (*sophisticated*), namun penting terutama bagi para pegiat gerakan sosial untuk memahami akar pemikiran yang membentuk dan memengaruhi pilihan-pilihan tindakan mereka selama ini. Karena itu, Acara-5 ini memang lebih tepat dan khusus ditujukan pada para peserta yang terdiri atas para pegiat gerakan sosial, terutama dari kalangan ORNOP dan mahasiswa.
- Jika peserta pendidikan adalah warga biasa, terutama para petani atau buruh yang tidak terlalu memerlukan pengetahuan teoretis, sebaiknya Acara-5 ini tidak perlu dilaksanakan.

Jadi, setelah Acara-4, langsung saja ke Acara-6. Ini sama sekali bukan menyepelkan mereka, tetapi semata-mata karena mereka memang tidak terlalu perlu melakukan 'olahraga intelektual' sampai ke tingkat konseptual teoretis. Atau, akan sangat bagus kalau Anda bisa menemukan cara penyajian yang memang sesuai dan mudah dipahami oleh mereka. Silakan kembangkan daya-cipta Anda!



PERUBAHAN SOSIAL

ANGGAPAN-ANGGAPAN DASAR

FILSAFAT, TEORI, dan PRAKTIK

Semua teori perubahan sosial, pada dasarnya, bertolak dari filsafat sosial dan filsafat ilmu pengetahuan yang didasari oleh anggapan-anggapan dasar (asumsi) yang khas. Secara garis besar, anggapan-anggapan dasar itu mencakup:

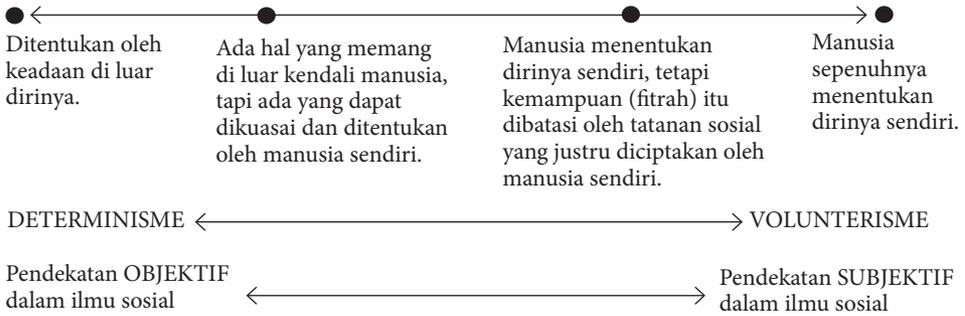
- anggapan-anggapan dasar tentang manusia
- anggapan-anggapan dasar tentang realitas
- anggapan-anggapan dasar tentang ilmu atau pengetahuan
- anggapan-anggapan dasar tentang cara atau proses manusia mendapatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang dirinya dan tentang realitas.

Tentang Manusia

Ada dua ujung (kutub) ekstrem (paling bertentangan) dalam hal anggapan dasar tentang manusia. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, pertentangan anggapan dasar dua kutub ekstrem inilah yang biasa disebut sebagai 'perbantahan tentang fitrah manusia' (*debate on the nature of human being*).

Pada kutub ekstrem pertama adalah mereka yang menganggap manusia dibentuk oleh keadaan di luar dirinya, oleh lingkungan sekitarnya, bahkan juga ditentukan oleh sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Sebaliknya, pada kutub ekstrem lainnya, yang sangat bertentangan dengan pandangan tersebut, adalah mereka yang menganggap manusia memiliki peran penciptaan yang lebih besar, memiliki kemauan bebas, sehingga manusia adalah pencipta keadaan dan lingkungan sekitarnya. Di antara dua rentang (spektrum) ekstrem tersebut, terdapat pandangan-pandangan yang cenderung ke salah satunya. Semua anggapan dasar itu melahirkan aliran pemikiran atau paham pengetahuan sendiri-sendiri yang melandasi berbagai teori sosial dan perubahan sosial yang berbeda-beda pula.

Digambarkan dalam satu garis sambung (kontinum), akan tampak sebagai berikut:

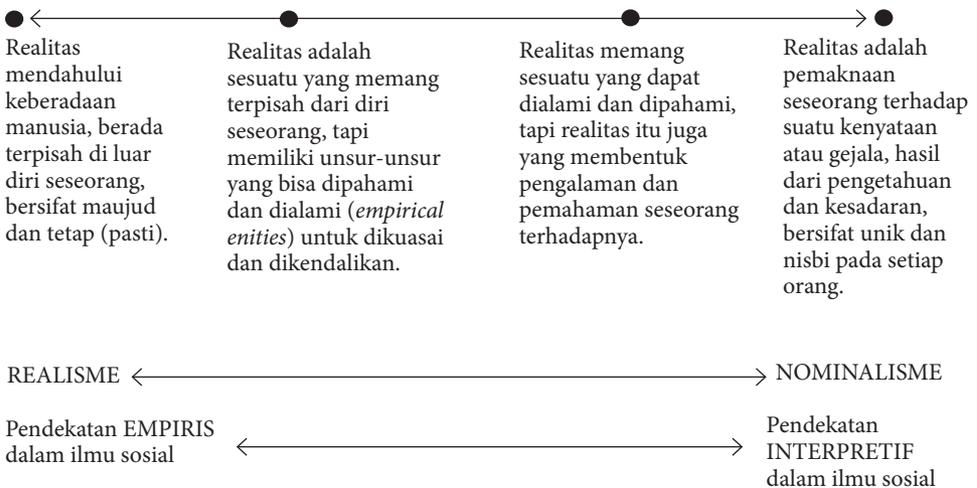


Tentang Realitas

Juga ada dua kutub ekstrem anggapan dasar tentang realitas, termasuk realitas sosial. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, pertentangan anggapan dasar dua kutub ekstrem inilah yang dikenal sebagai ‘perbantahan tentang asal muasal atau inti dari sesuatu yang diamati atau coba dipahami’ (*ontological debate*).

Di ujung kutub pertama adalah mereka yang menganggap bahwa realitas adalah sesuatu yang terpisah (*detached*) dari diri manusia, sudah ada mendahului keberadaan dan kesadaran atau pemahaman seseorang terhadapnya. Realitas sosial sudah ada sebelum seseorang dilahirkan. Sebaliknya, pada ujung ekstrem lainnya, adalah mereka yang menganggap bahwa realitas adalah hasil dari pengetahuan dan kesadaran seseorang. Manusia lah yang memberi nama (konsep) pada realitas dalam rangka menjelaskan, memberi pengertian, dan memahaminya lebih baik. Karena setiap orang memberi nama dan memahami realitas dengan caranya masing-masing, maka realitas bersifat unik dan khas, nisbi (relatif), pada setiap orang atau sekelompok orang. Di antara dua ujung ekstrem tersebut, juga terdapat pandangan-pandangan yang cenderung mengarah ke salah satunya, atau bahkan ada yang menggabungkan beberapa unsur yang sama dari dua-duanya.

Digambarkan dalam satu garis sambung, akan nampak sebagai berikut:



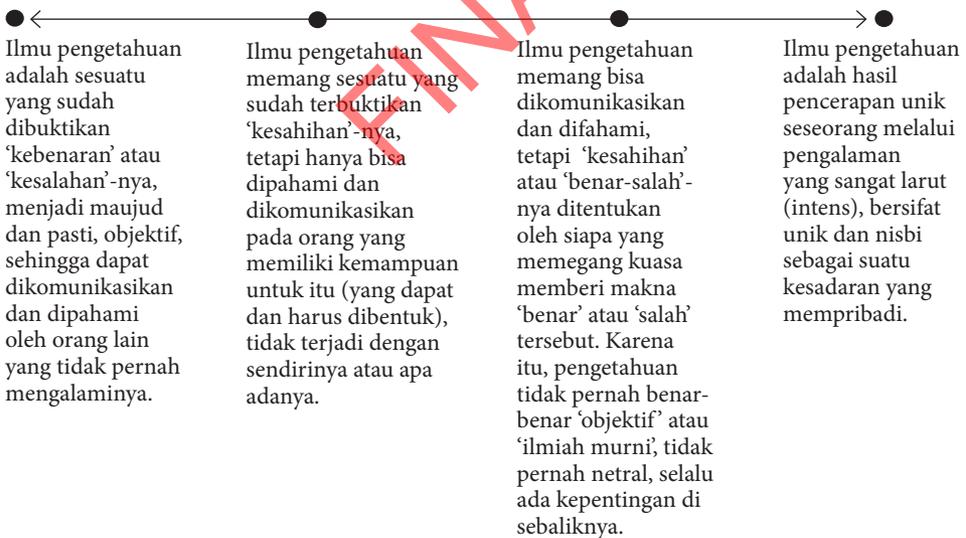


Tentang Ilmu (Pengetahuan)

Juga ada dua kutub ekstrem anggapan dasar tentang landasan atau dasar-dasar yang membentuk ilmu atau pengetahuan manusia, baik tentang dirinya maupun tentang realitas. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, pertentangan anggapan dasar dua kutub ekstrem inilah yang dikenal sebagai ‘perbantahan tentang landasan dasar ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu’ (*epistemological debate*).

Pada sisi ekstrem pertama adalah mereka yang beranggapan bahwa ilmu atau pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipahami atau disampaikan (dikomunikasikan), karena mengandung unsur-unsur yang bersifat umum, berlaku pada semua waktu dan tempat, sebagai sesuatu yang maujud dan tetap. Menurut kubu ini, pemilahan antara yang ‘benar’ dan yang ‘salah’ sudah jelas sekali batasan dan perbedaannya, dapat dibuktikan. Pada sisi ekstrem lawannya adalah mereka yang beranggapan bahwa ilmu atau pengetahuan adalah hasil dari pencerapan dan kesadaran seseorang terhadap sesuatu, hasil dari pengalaman yang dalam dan larut (*intens*), bersifat mempribadi (subjektif) dan unik, bahkan merupakan suatu ‘penghayatan rohaniah’ (*transcendental*). Menurut kubu ini, yang disebut ‘benar’ atau yang ‘salah’ bersifat nisbi (relatif), bergantung pada ‘keadaan’ (konteks) tertentu. Di antara dua sisi ekstrem ini juga terdapat banyak sekali pandangan-pandangan yang cenderung mengarah pada salah satunya, atau bahkan dua-duanya sekaligus.

Digambarkan dalam satu garis sambung, akan tampak sebagai berikut:



POSITIVISME ← ————— → ANTIPOSITIVISME

Pendekatan FORMALISTIS dalam ilmu sosial ← ————— → Pendekatan FENOMENOLOGIS dalam ilmu sosial

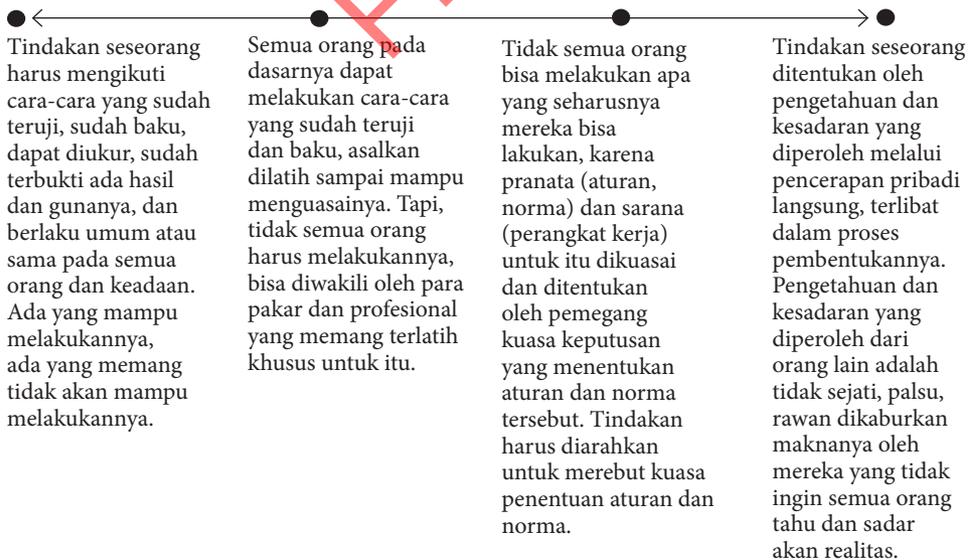


Tentang Cara Memperoleh & Menerapkan Ilmu (Pengetahuan)

Juga ada dua kutub ekstrem anggapan dasar tentang cara atau proses seseorang mendapatkan dan menerapkan ilmu atau pengetahuan, pemahaman tentang sesuatu, termasuk tentang dirinya dan realitas, serta implikasinya pada tindakan atau praktik. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, pertentangan anggapan dasar dua kutub ekstrem inilah yang dikenal sebagai ‘perbantahan tentang cara bertindak berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tertentu atas sesuatu’ (*methodological, axiological debate*).

Pandangan ekstrem pertama adalah mereka yang beranggapan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dan diterapkan —karena sudah terbukti unsur-unsurnya yang bersifat umum dan menetap pasti— menggunakan seperangkat teknik dan tata cara runtut (sistematik) yang baku, sudah teruji. Pandangan ini sangat mementingkan pengujian praduga (hipotesis) menjadi dalil-dalil umum, terkadang sangat kaku dan resmi. Mereka juga sangat mengutamakan penakaran kuantitatif dalam analisis realitas (data). Ada pun pandangan ekstrem lawannya adalah mereka yang beranggapan bahwa realitas dan pengetahuan ‘sejati’ hanya dapat diperoleh melalui pencerapan langsung, melibatkan diri dalam peristiwa sehari-hari dan kehidupan nyata. Bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan mengalami pencerapan langsung itu, dapat memperoleh pengetahuan dan memahami realitasnya dengan cara menghayati proses (sejarah hidup) orang-orang yang mengalaminya langsung. Karena itu, kubu ini sangat mementingkan pendekatan kualitatif dan tindakan keterlibatan langsung. Di antara dua pandangan ekstrem tersebut, juga terdapat sangat beragam pandangan-pandangan yang cenderung mengarah pada salah satunya, bahkan juga sering jumbuh satu sama lain.

Dalam satu garis lurus, penggambarannya akan tampak sebagai berikut:



PRAGMATISME ← ————— → IDEALISME

Pendekatan NOMOTETIK
dalam ilmu sosial



Pendekatan IDEOGRAFIS
dalam ilmu sosial



IMPLIKASI DALAM PANDANGAN & PRAKTIK PERUBAHAN SOSIAL

Penggambaran di atas adalah penggambaran yang disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Sebenarnya, rentang perbedaan dan persamaan di antara semua anggapan dasar atau pandangan tersebut sangatlah majemuk. Perkembangan ilmu sosial sudah sedemikian maju dan dinamis, sehingga banyak di antara pandangan yang awalnya atau sumbernya dari kubu yang sangat berlawanan, pada aras tertentu malah sudah saling jumbuh dan sering sulit dibedakan satu sama lain. Misalnya, berbagai cabang atau pengembangan lanjut dari aliran positivisme kini, seperti liberalisme dan neo-liberalisme —terutama pada aspek metodologi atau aras aksiologinya— mulai pula menggunakan cara-cara yang selama ini diidentikkan dengan aliran antipositivisme tandingannya. Meskipun, hal itu sering dikecam keras sebagai ‘pembauran yang ngawur’ (*arbitrary*), bahkan dituduh mengandung niat-niat ‘pengelabuan’ (manipulatif) untuk tujuan-tujuan praktis dan pragmatis. Demikian pula sebaliknya, sehingga muncullah kecaman-kecaman keras tentang ‘penyempitan pandangan’ (reduksionisme) di kalangan kaum anti-positivisme.

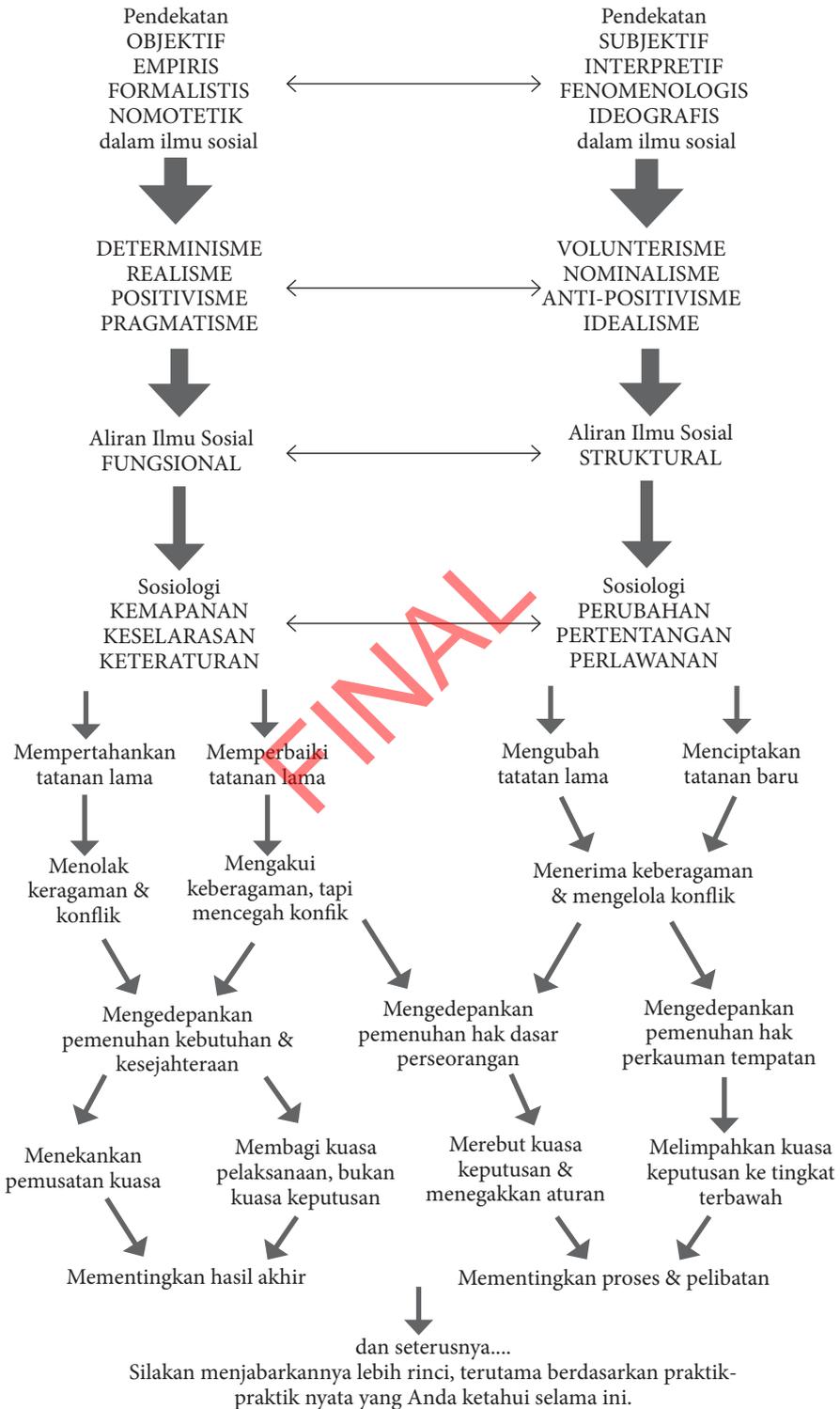
Meskipun demikian, satu ikhtisar umum yang diterima luas selama ini adalah bahwa rentangan dua kutub ekstrem pemikiran tadi telah melahirkan dua pendekatan aliran besar ilmu sosial, termasuk dan terutama dalam pandangan tentang arah perubahan sosial, yakni aliran fungsional dan aliran struktural. Jika dirangkum dalam satu bagan alir, akan nampak sebagai berikut (di halaman berikutnya).

Seperti terlihat pada bagan alir tersebut, implikasi setiap aliran pemikiran ilmu sosial, dalam praktiknya, bisa banyak yang sama. Makin ke bawah ke tingkat praktik atau tindakan lanjut, makin sering terjadi pertemuan atau persamaan yang sering sangat sulit membedakannya. Meskipun, akar pandangan dasarnya dan tujuan atau arah perubahan sosial yang ingin dicapai tetap jelas perbedaannya. Karena itu, penamaan atau pengelompokan berbagai gerakan sosial atau gerakan perubahan sosial dalam berbagai aliran pemikiran sosial tersebut adalah sama sekali tidak mudah.

Satu hal perlu ditegaskan adalah bahwa pilihan menganut salah satu dari banyak aliran pemikiran ilmu sosial tersebut, terutama bukanlah persoalan ‘benar’ atau ‘salah’. Setiap aliran memiliki nalarnya masing-masing. Yang jadi masalah adalah jika seseorang atau organisasi/lembaga tertentu mengaku menganut anggapan-anggapan dasar atau aliran pemikiran sosial tertentu --misalnya, mengaku berada pada kubu aliran struktural dan mencita-citakan perubahan ke arah penciptaan tatanan baru-- namun dalam praktik tindakan atau pilihan-pilihan kegiatannya malah sebenarnya berada pada kubu aliran fungsional yang hanya sekedar memperbaiki tatanan lama saja. Ketidaktaatan asas atau inkonsistensi semacam itu semakin banyak dijumpai, dan itulah salah satu masalah mendasar dalam tubuh banyak gerakan sosial selama ini. ❖

Disarikan dari berbagai buku teks, antara lain:

Benton, Ted & Ian Craib (2010), *Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought (Traditions in Social Theory)*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2nd edition ■ Blackburn, Robin, ed. (1972), *Ideology in Social Science: Readings in Critical Social Theory*. London: Fontana Press ■ Habermas, Jürgen (1973), *Theorie und Praxis*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.





RANGKUMAN CARA PANDANG MASALAH SOSIAL

	FAKTOR ALAM & SUPRAALAM	FAKTOR MANUSIA & SUMBERDAYA
SEBAB-SEBAB UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> ■ nasib, takdir ■ alam tidak mendukung (tandus, tanah tidak subur, banyak hama dan penyakit) ■ bencana alam ■ tempat terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ orangnya malas, menganggur ■ tidak terampil, kurang pendidikan ■ kurang gizi, kesehatan rendah ■ pendapatan rendah ■ tidak ada modal ■ tidak kuasai teknologi & informasi ■ pemasaran hasil sulit, tidak ada akses pasar
SUMBER & PROSES PEMBENTUKAN CARA PANDANG	<ul style="list-style-type: none"> ■ oleh guru rohani, pengkhotbah, melalui pengajian-pengajian ■ diajarkan di sekolah-sekolah ■ diajarkan di rumah (oleh orangtua) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ diajarkan melalui pengajian-pengajian ■ diajarkan di sekolah-sekolah ■ pidato-pidato pejabat pemerintah ■ siaran TV, media sosial
BENTUK TINDAKAN (KEGIATAN) PEMECAHAN MASALAH	<ul style="list-style-type: none"> ■ berderma (sedekah, bantuan pangan obat-obatan, dll.) ■ tampung pengungsi, orang terlantar, anak yatim ■ sampaikan keprihatinan, doa & pesan-pesan penghiburan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ubah prilaku & kebiasaan ■ bangun sekolah, perbanyak balai latihan kerja ■ perbaiki gizi dan kesehatan ■ tingkatkan pendapatan ■ sediakan kredit murah ■ alih teknologi ■ perluas jaringan telekomunikasi ■ bangun prasarana dan sarana (akses jalan, gudang, pasar, dll)
HASIL YANG DIHARAPKAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ penderitaan korban (orang miskin) berkurang ■ nama baik dan pahala (masuk surga) ■ harmoni sosial terjaga, mencegah konflik merebak 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kemampuan orang miskin meningkat untuk mendapat peluang berkembang ■ memperkecil kesenjangan sosial dan antar wilayah ■ mencegah kecemburuan sosial dan konflik horizontal
PELAKU UTAMA TINDAKAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ dermawan ■ relawan kemanusiaan ■ pekerja sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ■ wirausahawan ■ pakar teknis, teknokrat ■ penyuluh lapangan
CITA-CITA TATANAN SOSIAL	MASYARAKAT MAPAN & MANTAP (serba terpusat, serba tertib dan teratur, hindari konflik, jaga keselarasan)	MASYARAKAT MAJU & BERKEMBANG (serba terencana dan terkendali, tak ada gangguan keamanan, hindari konflik)
ARAH & TUJUAN PERUBAHAN	KESEJAHTERAAN & KESELARASAN	PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN
ALIRAN TEORI SOSIAL	FUNGSIONAL	

Dikembangkan dari bagan dasar dalam Hope, Anne & Sally Timmel (1988), *Training for Transformation*. Gweru, Tanzania: Mambo Press, Vol. 3.

(Contoh masalah: KEMISKINAN)



FAKTOR SISTEM & STRUKTUR	FAKTOR KESADARAN & PENGETAHUAN
<ul style="list-style-type: none"> ■ kebijakan dan peraturan tidak memihak ■ pelaksanaan peraturan diselewengkan ■ korupsi, kolusi, nepotisme ■ pemilikan dan akses sumberdaya dibatasi dan tidak merata ■ alat produksi dikuasai segelintir elite ■ pembatasan kebebasan bersuara dan tuntutan hak 	<ul style="list-style-type: none"> ■ proses pembodohan & pengelabuan (ajaran, kepercayaan, nilai) ■ proses pembohongan (manipulasi fakta, sejarah, informasi & pengetahuan) ■ pelanggaran takhayul (mitos-mitos) kemapanan, keselarasan, keamanan
<ul style="list-style-type: none"> ■ baca dari buku-buku ■ diskusi-diskusi di kampus & lsm ■ acara-acara TV (misalnya: ILC) ■ internet dan media sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ■ baca dari buku-buku ■ diskusi-diskusi di kampus & lsm ■ hasil-hasil penelitian
<ul style="list-style-type: none"> ■ ubah kebijakan dan peraturan ■ awasi ketat dan tegakkan pelaksanaan peraturan ■ berantas KKN, reformasi birokrasi ■ pemerataan kepemilikan dan akses sumberdaya (<i>landreform</i>, dll.) ■ ubah 'moda produksi', batasi monopoli & konglomerasi ■ tindakan sepihak (<i>claiming</i>), unjuk-rasa tuntutan dan rebut hak 	<ul style="list-style-type: none"> ■ tumbuhkan kesadaran kritis & 'pandangan dunia' baru (alternatif) ■ ungkap kebohongan sejarah dan informasi ■ bangun 'budaya tanding', bongkar takhayul lama ■ rintis contoh lokal tatanan 'masyarakat baru' yang otonom (swasembada, swakelola, swapraja) dan berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> ■ kebijakan dan peraturan lebih memihak kaum lemah, hak-hak mereka dijamin ■ hukum ditegakkan tanpa pandang bulu ■ pemerintahan bersih ■ pemerataan akses pada modal dan alat produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ semua warga, terutama golongan miskin dan lemah semakin kritis memahami realitas ■ semua warga tidak mudah lagi dibohongi dan dikelabui (dimanipulasi) ■ kelompok-kelompok masyarakat lokal semakin otonom dan memenuhi kebutuhan sendiri ■ ada contoh nyata sebagai alternatif hegemoni
<ul style="list-style-type: none"> ■ pegiat advokasi ■ pelobi politik & legislator ■ penggerak aksi massa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pendidik warga ■ penggerak tindakan kolektif akar-rumput ■ cendekia lokal (<i>organic intellectuals</i>)
<p style="text-align: center;">MASYARAKAT ADIL & SETARA (demokratis, tak ada pembeda-bedaan, hukum ditegakkan & disiplin tegas, konflik dikelola)</p>	<p style="text-align: center;">MASYARAKAT BERDAULAT & BERMARTABAT (dialogis dan dinamis, musyawarah dari bawah, konflik dikelola)</p>
<p style="text-align: center;">PERLAWANAN & PENGAMBIL-ALIHAN (KUASA)</p>	<p style="text-align: center;">PENYADARAN & PEMBEBASAN</p>
<p>STRUKTURAL</p>	



MANSOUR FAKIH

TAFSIR REALITAS SOSIAL: PERTARUNGAN IDEOLOGI & KUASA *)

Ada dua aliran pemikiran besar dalam ilmu sosial.

Golongan pertama adalah mereka yang meyakini bahwa ilmu sosial harus dikembangkan menuju sikap 'ilmiah', yakni bahwa ilmu sosial haruslah objektif, berjarak, bebas nilai, dan bersifat universal. Maka, tugas utama dari golongan faham ini adalah memberi makna realitas sosial melalui 'rekayasa sosial' dalam rangka menuju suatu masyarakat yang dicita-citakan, yakni menuju terciptanya tatanan sosial yang berpijak pada keseimbangan dan keselarasan (harmoni) sosial, kemantapan dan keamanan (stabilitas) sosial.

Pandangan ini berbeda dengan golongan paham kedua, yaitu mereka yang percaya bahwa pada dasarnya tugas ilmu dan analisis sosial tidak sekadar memberi makna terhadap suatu realitas sosial, melainkan memberikan ruang kepada warga masyarakat sebagai subjek sosial untuk melakukan upaya transformasi sosial menuju tatanan sosial yang lebih adil. Dengan demikian, tugas teori sosial adalah menciptakan ruang agar masyarakat berdaya membangun realitas sosial baru yang lebih adil dan lebih baik. Dengan demikian ilmu sosial tidak mungkin dan tidak boleh bersikap netral, melainkan memihak, tidak bebas nilai serta berwatak subjektif.

Sesungguhnya, dua mazhab besar teori sosial tersebut mempengaruhi masing masing penganutnya tidak saja dalam memahami suatu realitas dan masalah sosial, tetapi juga memengaruhi pandangan tentang apa masalah yang dianggap bermanfaat untuk dipecahkan dan metode apa yang akan digunakan untuk memecahkannya. Karena itu, pilihan padangan dan cara seseorang memberi makna terhadap suatu realitas sosial, akan sangat berpengaruh terhadap hasil kajian dan pemecahannya. Namun, pilihan pandangan dan cara analisis sosial tersebut --sebagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah sosial-- tidaklah berkaitan dengan benar atau salahnya analisis yang dipilih. Keunggulan suatu teori sosial terhadap teori yang lain seringkali lebih disebabkan karena kemampuan suatu teori 'menyingkirkan' teori atau analisis yang lain. Bahkan, bagi Ritzer (1975), kemenangan satu teori atau analisis sosial terhadap teori yang lain lebih disebabkan karena para pendukung dari teori yang menang itu lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan (*power*) dari pengikut teori yang dikalahkan. Jadi, sekali lagi, bukan karena teori tersebut lebih benar atau lebih baik dari yang dikalahkan.

*) Dirangkum dan disunting ulang dari beberapa buku penulis, antara lain, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 1996); *Sesat Pikir Teori Pembangunan & Globalisasi* (Yogyakarta: INSISTPress, 2001); dan *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: INSISTPress, 2002).



Demikian halnya dalam memahami perubahan sosial yang sedang berlangsung. Dua aliran besar teori sosial itu memengaruhi dan menentukan pandangan: apakah perubahan sosial yang sedang berlangsung adalah suatu hal yang positif, sehingga perlu lebih didorong menuju ke arah perubahan menyeluruh dan mendasar bagi terciptanya struktur dan sistem sosial yang adil?; atau: proses perubahan sosial yang sedang terjadi adalah suatu kekacauan sosial yang harus dihentikan dan segera dikembalikan pada keseimbangan sosial seperti sebelumnya.

Pilihan penggunaan analisis sosial juga sering dikaitkan dengan implikasinya terhadap terciptanya emansipasi sosial dan relasi sosial yang secara mendasar lebih baik. Oleh karena itu, memilih teori dan analisis sosial itu sendiri sudah merupakan pemihakan atas nilai tertentu. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah: untuk tujuan apa sesungguhnya proses perubahan sosial diabdikan? Masalah siapa yang akan dipecahkan melalui aksi, dalam bentuk program kegiatan apa? Jadi, masalahnya bukanlah apakah kita harus memihak, karena pemihakan adalah mustahil untuk dihindarkan bagi semua teori sosial. Masalahnya adalah: kepada siapa pemihakan tersebut diabdikan?

Analisis tentang perubahan sosial masih diwarnai oleh dua aliran teori sosial yang saling bertentangan tersebut, yakni antara teori modernisasi yang berakar pada paradigma sosial positivisme, dan teori sosial kritik atau dikenal dengan ilmu sosial emansipatoris seperti Teori Kritis nya mazhab Frankfurt, neo-Marxisme, dan *post-modernism*. Semua teori sosial tersebut berbeda dalam memahami perubahan sosial. Teori kelas, misalnya, yang dikenal sebagai akar teori kritis dalam membongkar ketidakadilan struktural, mendorong perubahan sosial untuk perubahan struktur kelas ekonomi dalam sistem kapitalisme.

Oleh karena dominasi suatu teori sosial erat kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan, tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran teori tersebut, maka sesungguhnya proses diskursus dalam teori sosial bersifat politik dan bersifat kalah-menang.

Analisis sosial tentang perubahan sosial sampai sekarang, pada dasarnya, masih didominasi oleh suatu aliran arus utama (*mainstream*) yang lebih memusatkan analisisnya pada 'faktor manusia'. Analisis ini kurang melihat pada sistem dan struktur sosial, selalu menekankan bahwa permasalahan sosial sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumberdaya dan moral manusia di dalam sistem yang ada.

Ada beberapa aliran yang sebageaian besar berlandaskan pada paham modernisasi. Pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh paham modernisasi tersebut, misalnya, analisis 'pengentasan kemiskinan' (*anti poverty*). Dasar pemikiran analisis ini adalah bahwa perubahan sosial perlu dilakukan untuk mendorong kaum miskin mengejar ketertinggalannya. Bagi mereka, penyebab utamanya lebih karena kurangnya sumberdaya alam, atau produktivitas rendah. Karena itu, perlu diciptakan proyek 'peningkatan pendapatan' bagi kaum miskin. Analisis lainnya dari aliran ini adalah 'pendekatan efisiensi', yakni pemikiran bahwa pembangunan dan pertumbuhan mengalami hambatan karena



kaum miskin tidak dilibatkan. Maka pelibatan kaum miskin perlu ditingkatkan demi efisiensi pembangunan dan pertumbuhan

Semua analisis itu sama sekali tidak bertujuan untuk membebaskan golongan miskin, melainkan justru menggunakan kaum miskin untuk tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dua analisis sosial tersebut lebih memusatkan perhatian pada tujuan memenuhi 'kebutuhan praktis' golongan miskin semata, namun tanpa mempertanyakan 'kebutuhan strategis' mereka. Pendekatan efisiensi dan pengentasan kemiskinan itu menjadi aliran utama dari sebagian besar organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, USAID, ODA dan hampir semua pemerintah Dunia Ketiga. Bahkan, sebagian besar kalangan ORNOP di Indonesia juga menganut pemikiran tersebut.

Landasan ideologis dan teoretis analisis perubahan sosial aliran arus utama ini adalah pada pandangan liberal dalam perubahan sosial. Pandangan kaum liberal sesungguhnya berpijak pada nilai yang menjunjung tinggi otonomi, persamaan, nilai moral, dan kebebasan perseorangan. Namun, pada saat yang sama, saat mendefinisikan masalah sosial, mereka tidak melihat struktur dan sistem sebagai pokok permasalahan. Asumsi dasar pikiran liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas. Kerangka umum pemikiran liberal dalam memperjuangkan persoalan sosial tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap pribadi orang. Kesempatan dan hak sosial yang sama ini penting bagi mereka, karena itu menganggap tidak perlu ada pembedaan kesempatan sosial. Ketika mempersoalkan mengapa golongan miskin tertinggal, kaum liberal beranggapan bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh salah kaum miskin itu sendiri. Dengan kata lain, jika sistemnya sudah memberikan kesempatan yang sama, golongan miskin mestinya juga harus mampu bersaing. Jika mereka kalah (dan tetap miskin), maka yang perlu dipersalahkan adalah golongan miskin itu sendiri.

Atas dasar itu, dalam rangka memecahkan masalah kesmiskinan, konsep perubahan sosial yang mereka ajukan adalah menyiapkan golongan miskin agar bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas. Untuk itu, perlu disiapkan kebijakan dan aturan main yang jelas di mana persaingan yang adil (*fair*) boleh dilaksanakan. Sebagian dari wujud penerapannya dapat dilihat, misalnya, dalam program-program pengembangan masyarakat (*community development*, disingkat CD), antara lain, menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga (seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan) serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan sosial golongan miskin untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Didasarkan pada anggapan dasar (asumsi) bahwa keterbelakangan kaum miskin itu terletak pada golongan miskin sendiri, maka kaum miskin itulah yang menjadi pusat perhatian aliran pemikiran ini. Bagi mereka, diskriminasi akibat ideologi patriarki —seperti yang diyakini oleh kaum feminisme radikal— maupun analisis atas struktur kelas dan politik ekonomi —seperti yang diusung oleh kaum sosialis feminis— tidaklah mereka pertanyakan. Bagi mereka, sejak awalnya kaum miskin sudah dianggap sebagai masalah (anomali) bagi ekonomi

modern, partisipasi politik, dan program pembangunan. Keterbelakangan golongan miskin, kata mereka, adalah akibat dari sikap irasional yang bersumber pada peran-peran kelas tradisional. Mereka yakin bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berakibat menetes juga kelak kepada kaum miskin itu. Mereka percaya itu adalah jalan ke arah perubahan sosial, yakni pengentasan kemiskinan.

Analisis liberal perubahan sosial itu mendapat kritik keras. Kritik paling tajam datang dari kaum Marxis yang melihat eksploitasi terhadap buruh dalam sistem kapitalisme sebagai realitas objektif. Analisis mereka tertuju pada sistem kelas yang menjadi penyebab dasar terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial secara luas. Marx sendiri sebagai salah satu peletak dasar analisis kelas menjelaskan bahwa perubahan sosial sejati terjadi jika melalui revolusi sosial. Sesungguhnya banyak kesalahpahaman tentang apa yang dia maksud dengan 'revolusi sosial' tersebut. Jika dipahami secara teoretis, gagasan itu tidak lebih sebagai perubahan struktur kelas sosial dalam arti berhentinya eksploitasi kelas. Berbeda dengan analisis golongan liberal yang lebih terpusat pada faktor manusianya, analisis kaum Marxis lebih tertuju pada sistem kelas yang melekat pada kapitalisme. Mereka percaya bahwa jika struktur dan sistem sosialnya sangat menghisap (eksploitatif), maka golongan miskin selamanya akan berada pada posisi yang tidak manusiawi. Mereka tidak percaya pada 'tetesan berkah pertumbuhan ekonomi' seperti yang digambarkan oleh penganut paham dan teori liberal. Bagi kaum Marxis, pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme yang eksploitatif, pada hakekatnya, meletakkan kaum buruh dalam posisi sosial *status quo* sistem sosial yang tidak adil. Penindasan kaum miskin dilanggengkan oleh kapitalisme melalui berbagai cara dan alasan, antara lain, melalui *hegemony* dan *discourse*.

Maka, bagi kaum Marxis, posisi kaum buruh dalam *status quo* sistem lebih ditujukan demi pelipatgandaan modal (*capital accumulation*). Selain itu, kaum buruh juga dianggap bermanfaat bagi kapitalisme dalam mereproduksi tenaga kerja murah. Di negara kapitalis, struktur dan sistem masyarakat menguntungkan para pemilik modal, antara lain, dari segi terjaminnya persediaan tenaga kerja dari keluarga buruh itu sendiri. Masuknya kaum perempuan dari kelompok miskin sebagai buruh, juga kian menguntungkan kapitalisme, karena upah buruh kaum perempuan miskin seringkali lebih rendah dibanding laki-laki. Dengan upah buruh yang lebih rendah itu, membantu pihak kapitalis melakukan pelipatgandaan modal mereka secara lebih cepat. Semakin banyaknya kaum miskin (terutama yang tercerabut dari sektor pertanian perdesaan) masuk ke dalam sektor industri perkotaan (serbagai buruh upahan), sangat menguntungkan sistem kapitalisme, karena merupakan proses penciptaan tenaga buruh cadangan dalam jumlah yang tak terbatas. Besarnya jumlah tenaga kerja cadangan yang murah itu akan lebih memperkuat posisi tawar kaum kapitalis, sekaligus mengancam kesetiakawanan (solidaritas) di kalangan kaum buruh. Bagi penganut feminisme Marxis, penindasan kaum miskin adalah merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki kaum lelaki sebagai permasalahan, melainkan sistem





kapitalisme.

Bagi penganut teori sosial kritis, usaha perubahan sosial oleh kaum liberal untuk mendidik golongan miskin agar mampu bersaing, lebih merupakan pembaharuan (reformasi) bentuk lama saja, hanya akan menghasilkan perubahan sosial praktis jangka pendek. Paradigmanya yang memusatkan perhatian pada faktor manusia dan aturan main, bukan pada struktur dan relasi sosialnya, mendapat tentangan keras dari mereka yang lebih mengedepankan perubahan (transformasi) posisi dan struktur sosial, yakni perubahan sosial jangka panjang dan strategis, termasuk mendekonstruksi ketidakadilan kelas, gender, dan berbagai ketidakadilan hubungan kuasa lainnya. Analisis kelas, yang pada awalnya digunakan oleh kaum Marxis, sekarang telah menjadi alat analisis yang dipergunakan oleh mereka yang bergerak memperjuangkan perubahan struktural secara mendasar dan menyeluruh.

Analisis kelas memberi perangkat teoritik untuk memahami sistem ketidakadilan dalam struktur sosial. Karena itu, analisis kelas juga melahirkan teori perubahan sosial yang memusat pada perubahan kelas sosial. Semua golongan masyarakat menjadi korban dari ketidakadilan kelas tersebut. Tetapi, karena mayoritas korbannya adalah kaum buruh, banyak orang masih salah kaprah menganggap analisis itu hanyalah alat perjuangannya kaum pekerja dan golongan miskin. Padahal, sebenarnya, analisis kelas justru mencermati semua bentuk ketidakadilan dalam seluruh tatanan sosial yang lebih luas. Tanpa analisis kelas, pandangan tentang arah perubahan sosial menjadi pandangan yang tersempitkan (*reductionism*), antara lain, hanya melihat satu faktor saja, seperti faktor manusia (orang miskin yang salah) dalam analisis masalah kemiskinan. Padahal, analisis kelas sangat membantu memahami pokok persoalan, yakni ketidakadilan dalam sistem dan struktur sosial mapan di mana semua orang sebenarnya mengalami proses menjadi 'semakin tidak manusiawi' (dehumanisasi). Kaum buruh mengalami dehumanisasi karena dihisap, sementara para penghisapnya dan kelas menengah juga mengalami dehumanisasi justru karena melanggengkan penghisapan yang tidak manusiawi itu.

Dengan demikian yang menjadi agenda utama perubahan sosial tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis untuk mengubah kondisi golongan miskin, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis mereka, yakni memperjuangkan perubahan posisi golongan miskin, termasuk pilihan tanding (*counter hegemony and discourse*) terhadap ideologi sosial yang telah mengakar dalam keyakinan sosial. Perubahan sosial semacam itulah yang sebenarnya merupakan pendekatan analisis kelas.

Praktik perubahan sosial melahirkan dampak yang berbeda dalam masyarakat, tidak saja karena adanya kemencengan tafsir (*bias*) kelas, gender, dan positivisme yang sangat elitis, tapi juga berakar pada teori sosial dan metodologinya yang memang sudah menceng. Analisis kelas dan analisis gender membantu mengarahkan perhatian tidak terutama pada perilaku kaum miskin dan kaum lelaki, tetapi juga pada sistem dan struktur sosial yang dikonstruksi oleh keyakinan atau ideologi sosial yang mendasarinya. Kalau golongan miskin dikorbankan oleh suatu sistem sosial, dalam analisis kelas, ma-

ka seyogianya bukanlah golongan miskin yang menjadi objek dan pangkal masalah, melainkan sistem sosial yang diperjuangkan oleh gagasan pembangunan sosial. Maka, analisis kelas menjadi sangat strategis dalam memperjuangkan nasib golongan miskin, sangat diperlukan bagi setiap usaha pembangunan sosial.

Proses perubahan sosial yang tengah terjadi saat ini akan diuji, apakah memang mampu mentransformasikan relasi sosial politik menjadi relasi yang lebih adil dan membebaskan (emansipatoris); ataukah hanya sekadar suatu pembaharuan (reformasi) sosial saja. Jika benar-benar dimaksudkan sebagai proses transformatif, maka penekanannya harus pada perubahan relasi kelas dan implikasinya terhadap praktek dan proyek pembangunan sosial. Hal itu berarti tidak saja memberi dimensi struktural dan pengaitan dengan usaha perubahan posisi golongan miskin di masyarakat, melainkan juga mengaitkan dengan dimensi advokasi terhadap kebijakan negara mengenai posisi golongan miskin. Dengan kata lain, agenda dan arah perubahan sosial yang berwatak membebaskan, tidak hanya berhenti pada reformasi kebijakan yang menyangkut nasib kaum miskin, tetapi juga melakukan transformasi terhadap sistem dan struktur sosial.

Inti dari uraian ini adalah bahwa perubahan sosial yang berwawasan transformatif memiliki dimensi yang luas, baik dari segi metodologi, agenda maupun motivasinya. Analisis sosial dalam perspektif transformasi ini mencakup bukan hanya ideologi dan pikiran yang dianut orang per orang, tetapi juga ideologi kelas yang ada di sebaliknya, termasuk sampai pada aras kelembagaan, bahkan juga dimensi kelas di tingkat negara. Hanya dengan cara pandang yang luas itulah perubahan sosial yang diupayakan akan mengarah pada transformasi seluruh tatanan masyarakat ke arah yang lebih adil. ❖



FINAL



TIANG

FINAL

ALASAN & PENGERTIAN PENGORGANISASIAN RAKYAT

Rakyat yang pernah mengalami langsung bagaimana mengorganisir diri mereka melakukan suatu tindakan bersama, jelas sangat mengetahui benar apa sebab-sebab atau alasan-alasan utama yang menjadi landasan mengapa mereka harus melakukan tindakan tersebut. Tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa biasanya mereka lebih mampu menjelaskan sebab-sebab atau alasan-alasan yang berasal dari lingkungan mereka sendiri (tidak mau bersatu, ada yang berkhianat, ada yang hanya mementingkan diri sendiri saja, dan sebagainya).

Jadi apa sebenarnya pengorganisasian rakyat (*people organising*)—atau yang selama ini lebih lazim disebut sebagai pengorganisasian masyarakat (*community organising*, disingkat CO)—itu?

Tidak mudah menjawab pertanyaan ini, terutama karena pengorganisasian rakyat adalah suatu kegiatan yang keseluruhan prosesnya sangat ditentukan oleh konteks sosial-ekonomi, politik, hukum, dan budaya setempat. Cara-cara pengorganisasian yang dilaksanakan pada satu tempat, waktu dan kelompok masyarakat tertentu, dengan isu atau tema pokok tertentu pula, bisa sangat berbeda dengan cara-cara pengorganisasian yang dilaksanakan pada tempat, waktu dan kelompok masyarakat lain, dengan isu atau tema pokok yang sama atau berbeda sama sekali. Singkatnya, tak ada rumusan baku yang berlaku umum untuk semua situasi pengorganisasian yang berbeda.

Meskipun demikian, terdapat prinsip dasar dan tujuan asas yang sama pada semua kegiatan pengorganisasian rakyat di mana pun, kapan pun, dengan siapa pun dan dengan isu apa pun. Bagian ini bertujuan menemukan dan merumuskan kaidah-kaidah (prinsip-prinsip) dasar dan tujuan-tujuan asas dari suatu proses pengorganisasian rakyat. Dengan menguraikan unsur-unsur pokoknya, dapat dicapai suatu pemahaman yang lebih utuh tentang pengertian pengorganisasian rakyat yang sangat mendasar.

Pencapaian pemahaman dengan cara seperti ini adalah jauh lebih baik ketimbang sekadar menghafalkan atau sekadar menirukan istilah-istilah sepadan yang sudah terlalu sering dan umum digunakan, seperti 'pendampingan', 'pemberdayaan', dan sebagainya. Jika perlu, biarkan peserta menemukan istilah mereka sendiri. Sebagai contoh, para organiser lokal di Sarawak, Malaysia, secara kreatif menemukan istilah lokal mereka sendiri untuk menamai keberadaan dan fungsi mereka, yakni sebagai 'penyelaras rakyat'. Atau, seperti para pegiat gerakan Sandinista di Nikaragua yang menyebut diri mereka sebagai '*con el proceso*' (yang terlibat dalam proses).

ACARA-6

MENGAPA RAKYAT PERLU MENGORGANISIR DIRI?

TUJUAN

- Peserta faham dan mampu merumuskan alasan-alasan perlunya rakyat mengorganisasikan diri mereka.
- Peserta mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan internal (konteks mikro lokal) dan eksternal (konteks makro) dalam proses pengorganisasian rakyat.

POKOK BAHASAN

- Alasan-alasan perlunya pengorganisasian rakyat
- Hambatan-hambatan internal (konteks mikro lokal) pengorganisasian rakyat
- Hambatan-hambatan eksternal (konteks makro) pengorganisasian rakyat

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/*session*)

METODA & MEDIA

- Permainan
- Diskusi kelompok
- Bahan bacaan, infografis, video dokumenter

BAHAN & PERALATAN

- Mata uang tiruan & kartu-kartu pengenalan
- Kantong tidak tembus pandang
- Penjepit kartu pengenalan untuk disematkan di baju peserta (bisa pakai *paper clips*)
- Beberapa papan penilaian (*scoring board*, bisa juga pakai kertas plano)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

 Catatan

- Mata uang tiruan dan kartu-kartu pengenal adalah peralatan yang paling utama dan penting dalam permainan ini. Karena itu, siapkan jauh hari sebelumnya.
- Mata uang tiruan tersebut dapat dibuat dari, misalnya, tutup botol limun atau koin dan diberi lima warna berbeda, dengan rincian:
 - 15 keping (6%) berwarna kuning
 - 25 keping (10%) berwarna hijau
 - 50 keping (20%) berwarna merah
 - 70 keping (28%) berwarna hitam
 - 90 keping (36%) berwarna biru
 - JUMLAH: 250 keping (100%)
- Semua mata uang dimasukkan dalam kantong yang tidak tembus pandang. Lalu, siapkan tiga kartu pengenal:
 - beberapa saja berwarna kuning
 - 15 kartu berwarna merah
 - 30 kartu berwarna biru
- Sebelum acara, sebaiknya periksa (*check*) kembali semua peralatan ini, karena jika kurang lengkap akan memengaruhi kelancaran jalannya permainan.

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini, yakni tentang alasan-alasan utama mengapa rakyat perlu mengorganisir diri. Kaitkan dengan hasil-hasil pembahasan pada acara-acara sebelumnya, misalnya: apakah peserta sudah melihat **kaitan antara masalah-masalah sosial dan analisisnya dengan perlunya rakyat mengorganisir diri?** (Usahakan pembahasan ini tidak berlarut-larut, karena ini sebenarnya hanya pengantar saja untuk masuk ke acara ini yang agak berbeda prosesnya dibanding acara-acara sebelumnya. Jika ada 2-3 orang peserta saja sudah menjawab pertanyaan tadi, itu sudah cukup untuk mengingatkan peserta lainnya akan pembahasan pada acara-acara sebelumnya).
2. Langsung minta setiap peserta secara acak saja mengambil 5 (lima) keping mata uang tiruan yang sudah disiapkan dalam kantong tidak tembus pandang. Lalu, minta mereka masing-masing menghitung jumlah nilai mata uangnya berdasarkan tabel berikut:

Kuning	2 x 80 = 160	3 x 80 = 240	4 x 80 = 320	5 x 80 = 400
Hijau	2 x 40 = 80	3 x 40 = 120	4 x 40 = 160	5 x 40 = 200
Merah	2 x 30 = 60	3 x 30 = 90	4 x 30 = 120+20	5 x 30 = 150+30
Hitam	2 x 20 = 40	3 x 20 = 60	4 x 20 = 80+50	5 x 20 = 100+80
Biru	2 x 10 = 20	3 x 10 = 30	4 x 10 = 40+90	5 x 10 = 50+100



Catatan

■ Dengan perhitungan cermat, peserta diharapkan dapat melihat bahwa bukan hanya warna yang menentukan tingginya nilai mata uang yang mereka miliki, tapi juga kombinasi antar warna. Hal ini akan sangat menentukan nanti dalam proses transaksi.

Misalnya, jika Peserta A memiliki 3 keping berwarna hitam dan 2 keping biru, sementara Peserta B memiliki 3 keping biru dan 2 keping hitam, maka jika Peserta B itu menyerahkan 2 biru pada Peserta A, nilai mereka berdua akan naik banyak sekali.

3. Sesudah semua peserta selesai menghitung dan menjumlah nilai mata uang milik masing-masing, tuliskan dalam daftar di papan nilai yang sudah disiapkan di dinding. Setiap peserta didaftar dengan nama sandi atau nomorurut (misalnya, Peserta-A, atau Peserta No.1, dan seterusnya).

----TRANSAKSI TAHAP PERTAMA---

4. Selesai memasukkan semua peserta dan nilai uangnya masing-masing pada papan nilai, segera minta mereka melakukan transaksi, **tawar-menawar dan melakukan pertukaran mata uang dengan peserta lain untuk meningkatkan jumlah nilai mata uang masing-masing setinggi mungkin**. Tegaskan bahwa:

- Pada saat transaksi, dua pihak yang bertransaksi **WAJIB BERSALAMAN DENGAN TANGAN KIRI SAMBIL BERDIRI!**
- Transaksi (tukar-menukar mata uang) **HANYA BOLEH TERJADI SELAMA BERSALAMAN**. Bila tidak berhasil saling mempertukarkan mata uangnya, **TANGAN YANG BERSALAMAN TIDAK BOLEH DILEPAS!**
- **DILARANG BERBICARA**, kecuali ketika dan selama bersalaman (bertransaksi)! Yang tidak ingin atau menolak melakukan transaksi, **WAJIB BERLIPAT TANGAN SAJA!** (tidak perlu bicara).
- Semua mata uang milik tiap orang **HARUS TETAP TERSEMBUNYI!** (tidak boleh sampai terlihat oleh yang mengajak atau lawan transaksinya).
- Jumlah mata uang pada setiap orang, **HARUS TETAP LIMA KEPING!** (tidak boleh berkurang).
- Untuk tahap pertama, lama transaksi sekitar **10 MENIT!**

5. Setelah waktu transaksi habis, minta setiap peserta segera menghitung kembali nilai semua mata uang yang dimilikinya sekarang, lalu tuliskan pada papan nilai yang sudah tersedia. Berdasarkan jumlah nilai baru tersebut, bagi seluruh peserta dalam tiga kelompok:
 - Kelompok Atas (misalnya, yang nilainya 200 ke atas)
 - Kelompok Menengah (misalnya, yang nilainya 170-190)
 - Kelompok Bawah (misalnya, yang nilainya 0-160)
6. Minta setiap kelompok memisahkan diri satu sama lain. Lalu, setiap peserta pada setiap kelompok diberi kartu pengenalan. Misalnya, Kelompok Atas diberi kartu pengenalan berwarna kuning, Kelompok Menengah diberi kartu pengenalan berwarna merah, dan Kelompok Bawah diberi kartu pengenalan berwarna biru. Minta tiap peserta pada semua kelompok itu menyematkan kartu tanda pengenalnya di baju masing-masing (pakai penjepit atau *paper clips* yang sudah disiapkan).
7. Umumkan bahwa transaksi tahap kedua akan segera dimulai. Jelaskan peraturannya, bahwa:
 - Yang berhak memperoleh promosi (naik tingkat) adalah mereka yang berada pada Kelompok Menengah atau Kelompok Bawah yang setelah transaksi nanti berhasil memiliki nilai mata uang **melebihi nilai mata uang salah seorang anggota Kelompok Atas yang nilainya paling rendah**.
 - Sehingga, anggota Kelompok Atas yang memiliki nilai paling rendah itu, dipersilakan turun (degradasi) ke kelompok yang anggotanya mengalahkan nilainya (misalnya, ke Kelompok Bawah). Pada saat saling bertukar tempat, sekaligus mereka berdua saling bertukar kartu pengenalan.

CONTOH:

Peserta A dari Kelompok Menengah sekarang memiliki nilai mata uang 180. Setelah transaksi kedua nanti selesai, dia memiliki nilai 210. Tetapi, nilai peserta (katakanlah Peserta B) di Kelompok Atas adalah 220. Maka, Peserta A dari Kelompok Menengah itu tak bisa naik menjadi anggota Kelompok Atas. Dia tetap di Kelompok Menengah. Tetapi, jika ada anggota (katakanlah Peserta C) dari Kelompok Atas ternyata nilainya 200, maka dia harus turun menjadi menjadi anggota Kelompok Menengah, sementara Peserta A dari Kelompok Menengah tadi naik menjadi anggota Kelompok Atas. Mereka berdua segera bertukar kartu pengenalan dan bertukar tempat.



■ Pemahaman dan ditaatinya aturan main ini oleh setiap kelompok akan sangat menentukan keberhasilan proses permainan. Karena itu, jelaskan ulang kalau masih ada kelompok/peserta yang belum paham atau bertanya minta pen-

jelasan. **Sebaiknya, jangan lanjutkan permainan kalau masih ada yang belum paham benar aturan main ini.**

---TRANSAKSI TAHAP KEDUA---

8. Jika semua peserta dan semua kelompok menyatakan sudah mengerti dengan aturan tersebut, segera umumkan bahwa transaksi tahap kedua segera dimulai. Waktunya: 10 MENIT!
9. Setelah waktu transaksi habis, minta setiap peserta pada semua kelompok segera menghitung kembali nilai masing-masing, lalu tuliskan di papan nilai, sehingga terlihat berapa dan siapa saja yang mengalami kenaikan (promosi) dan, sebaliknya, berapa dan siapa saja yang mengalami penurunan (degradasi).
10. Setelah semua yang naik maupun yang turun kelas sudah saling bertukar kartu pengenal dan tempat, umumkan bahwa setiap kelompok akan diberi 'subsidi':
 - Kelompok Bawah akan menerima subsidi 450
 - Kelompok Menengah akan menerima subsidi 300
 - Kelompok Atas akan menerima subsidi 200
11. Setelah subsidiya diserahkan ke setiap kelompok, beri waktu sekitar 5 (lima) menit saja kepada mereka untuk bersepakat dan membagi subsidi tersebut pada anggotanya masing-masing. Ingatkan: **kelompok yang tidak mencapai kesepakatan di antara sesama anggotanya tentang cara dan jumlah pembagian subsidi tersebut, maka pemberi subsidi (dalam hal ini fasilitator) akan menarik kembali semua subsidi itu!**
12. Setelah semua kelompok menyatakan pembagian subsidi di kelompok masing-masing sudah selesai, minta setiap orang sekarang menghitung kembali jumlah nilai mata uang yang dimilikinya, lalu tuliskan di papan nilai. Sehingga, akan terlihat apakah ada dan siapa saja yang mengalami kenaikan (promosi) ke kelompok yang lebih tinggi atau, sebaliknya, apakah ada dan siapa saja yang mengalami penurunan (degradasi) ke kelompok yang lebih rendah. Aturan promosi dan degradasi sama saja dengan tahap sebelumnya.

----TRANSAKSI TAHAP KETIGA---

13. Setelah semua pertukaran tempat yang mengalami promosi dan/atau degradasi selesai (jika ada), segera umumkan dimulainya transaksi tahap ketiga. Aturan transaksi sama dengan tahap sebelumnya, tetapi waktunya lebih singkat: hanya 5-7 MENIT!
14. Segera setelah waktu transaksi habis, segera minta setiap peserta pada semua kelompok menghitung kembali nilai mata uang masing-masing, lalu tuliskan di papan nilai. Jika ada yang mengalami promosi dan/atau degradasi, segera melakukan pertukaran kartu pengenalan dan tempat.
15. Umumkan bahwa satu kebijakan baru telah dikeluarkan, yakni setiap kelompok diberi kesempatan selama 5 (lima) menit untuk rapat dengan semua anggotanya untuk menilai:
 - Aturan transaksi (perlu diubah atau tidak?)
 - Aturan promosi dan degradasi (perlu diubah atau tidak?); dan
 - Besarnya subsidi (perlu diubah atau tidak, atau dihapuskan saja?).

Jika ada usulan perubahan dari masing-masing kelompok, segera serahkan (sampaikan) ke fasilitator (bisa tertulis, bisa juga lisan saja, yang penting usulannya jelas, tidak kabur atau bertele-tele!). Tegaskan bahwa **usulan perubahan aturan yang paling cepat disampaikan kepada fasilitator akan menjadi 'aturan baru' transaksi berikutnya.**

----TRANSAKSI TAHAP KEEMPAT---

16. Setelah usulan peraturan baru diumumkan dan jelas bagi semua kelompok, segera umumkan bahwa transaksi tahap keempat dimulai menggunakan aturan baru tersebut. Waktunya: 5-7 MENIT!
17. Setelah waktu transaksi habis, minta setiap orang pada semua kelompok segera menghitung kembali nilai mata uangnya masing-masing, lalu tuliskan pada papan nilai. Berdasarkan nilai terbaru setiap orang tersebut, segera laksanakan proses promosi dan/aturan degradasi menurut peraturan baru yang sudah diusulkan dan diterima.

----TANGGAPAN & REFLEKSI---

18. Umumkan bahwa permainan selesai. Minta semua kelompok bubar dan setiap orang kembali ke tempat masing-masing.
19. Selama 30-45 menit berikutnya, ajak seluruh peserta melakukan refleksi atas permainan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan kunci berikut:

- Apa saja perilaku dan sikap Kelompok Bawah yang tampak paling menonjol (paling jelas atau berbeda dari kelompok lainnya)selama permainan berlangsung?
- Kapan perilaku dan sikap Kelompok Bawah tersebut muncul: pada awal, pertengahan, atau pada akhir permainan? Dengan kata lain, adakah perubahan perilaku dan sikap Kelompok Bawah selama proses permainan?
- Apa saja perilaku dan sikap Kelompok Menengah yang tampak paling menonjol (paling jelas atau berbeda dri kelompok lainnya)selama permainan berlangsung?
- Kapan perilaku dan sikap Kelompok Menengah tersebut muncul: pada awal, pertengahan, atau pada akhir permainan? Dengan kata lain, adakah perubahan perilaku dan sikap Kelompok Menengah selama proses permainan?
- Apa saja perilaku dan sikap Kelompok Atas yang tampak paling menonjol (paling jelas atau berbeda dri kelompok lainnya)selama permainan berlangsung?
- Kapan perilaku dan sikap Kelompok Atas tersebut muncul: pada awal, pertengahan, atau pada akhir permainan? Dengan kata lain, adakah perubahan perilaku dan sikap Kelompok Atas selama proses permainan?
- Berapa banyak yang berhasil naik tingkat (kelas)? Dari kelompok mana ke kelompok mana?
- Sebaliknya, berapa banyak yang turun tingkat (kelas)? Dari kelompok mana ke kelompok mana?
- Mengapa Kelompok Atas berhasil mempertahankan kedudukannya secara terus-menerus (karena ulet atau disebabkan aturan permainan)?
- Mengapa Kelompok Bawah praktis sulit naik jenjang (karena kurang ulet, putus asa, gampang menyerah, atau karena aturan yang tidak adil)?
- Bagaimana jalan keluarnya agar Kelompok Bawah dapat naik tingkat?
- Bagaimana pembagian dan hubungan kekuasaan antar kelompok selama permainan (dimonopoli kelompok tertentu, atau cukup merata)?
- Apa saja nilai-nilai penting yang dapat dipelajari dari permainan ini (nilai persaingan, mementingkan diri/kelompok sendiri; nilai kebersamaan, kerjasama, kesediaan berbagi)?

20. Catat jawaban seluruh peserta pada papan tulis /kertas plano. Atas dasar jawaban-jawaban tersebut, ajak peserta melakukan analisis:

- Mengapa terjadi demikian? Mengapa ada yang kalah dan ada yang menang?
- Siapa pemenang sesungguhnya?
- Siapa lawan/musuh sebenarnya? Mengapa?

21. Catat lagi pokok-pokok jawaban peserta pada papan tulis/kertas plano dan buat rangkuman umum bersama.
22. Tutup acara ini dengan membagikan fotokopi Bahan Bacaan #5 (*Mengorganisir*) agar mereka dapat membacanya pada saat-saat istirahat.

Catatan

■ Jika tersedia peralatannya, mereka dapat menonton satu video dokumenter singkat: *Musuh Nelayan* (waktu tayang 12 menit) tentang penuturan tiga organiser lokal di Maluku yang menceritakan kasus-kasus mereka dan menjadi sebab atau alasan mereka mengorganisir diri. Kasus yang mereka ungkapkan sekaligus dapat digunakan untuk melakukan analisis sosial terhadap suatu isu atau permasalahan yang khas. Setelah menonton, Anda juga harus mengajak peserta mendiskusikan dan menganalisis:

* **Apa kerangka pikir atau cara pandang nelayan di Maluku itu dalam melihat dan memahami masalah yang mereka hadapi? Mengapa mereka bisa sampai berpikir demikian?** (Hubungkan kembali dengan pembahasan pada acara-acara sebelumnya tentang cara pandang masalah sosial).

* **Apa pendapat mereka tentang sikap dan tindakan rakyat kecil (seperti para nelayan di Maluku itu) dalam memperbaiki keadaan hidup dan membebaskan diri mereka dari kemiskinan dan ketidakadilan?**

■ Video *Musuh Nelayan* ini hanyalah salah satu kemungkinan. Jika Anda memiliki video lain yang serupa, boleh saja Anda menggunakannya. Intinya adalah bahwa video itu menampilkan seorang atau beberapa orang pengorganisir rakyat yang menuturkan kasus yang dihadapi masyarakatnya dan, karena itu, menjadi alasan dia atau mereka mengorganisir diri.



SI KAHN

MENGORGANISIR

Disadur & diterjemahkan secara bebas oleh Roem Topatimasang dari Si Kahn (1982), *Organizing: A Guide for Grassroots Leaders*; New York: McGraw Hill; h.6-24. Terjemahan yang sama dimuat juga dalam Roem Topatimasang, Mansour Fakhri & Widjanarka E.S. (1988), *Menggeser Neraca Kekuatan: Panduan Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Konsumen*; Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Si Kahn adalah seorang pemusik kondang yang kemudian menjadi praktisi, pegiat, dan pengorganisir gerakan sosial terkemuka dan berpengaruh di Amerika Serikat tahun 1960 dan 1970-an, semasa dengan para pengorganisir terkemuka lainnya seperti Marthin Luther King Jr., Saul Allinsky, dan Myles Horton. Ia kemudian menulis banyak buku berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangannya, sehingga bahasanya sangat terkesan sederhana dan lancar, khas bahasa orang lapangan. Selain buku yang dikutip ini, bukunya yang lain yang banyak dikutip adalah *How People Get Power: Organizing Oppressed Communities for Action*; New York: McGraw Hill, 1970.

Mengorganisir artinya bekerja bersama sekelompok orang untuk membuat sesuatu dapat terlaksana. Katakanlah, Anda baru saja diperlakukan kurang baik ketika anda mengurus surat-surat di Kantor Kelurahan atau Kecamatan. Padahal, Anda sudah menunggu cukup lama dan mengikuti semua saran pegawai di sana untuk mengikuti semua 'peraturan' mereka. Nah, Anda harus melakukan sesuatu. Anda bisa saja pergi ke camat atau lurah dan bilang: "Kalau Anda tidak memperbaiki cara pelayanan kantor Anda, saya akan menulis surat pembaca di koran-koran." Anda juga bisa protes kepada atasan mereka, bupati atau gubernur misalnya, atau mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat. Tetapi, tidak akan banyak orang yang memperhatikan apa yang Anda lakukan. Soalnya, Anda hanyalah salah seorang yang pernah menderita perlakuan seperti itu yang memnag jamak terjadi dimana saja. Dengan kata lain, itu memang sudah merupakan suatu perkara yang lazim selama ini.

Lain soal, misalnya, kalau Anda berhasil mengajak sekitar 50 orang warga sekitar Anda yang pernah mengalami perlakuan yang sama, lalu beramai-ramai mendatangi kantor bupati atau DPR, menyampaikan petisi dan menyebarkan selebaran tentang betapa brengseknya pelayanan umum oleh kantor camat dan kelurahan. Kemudian, ada sekitar 100 orang lagi ikut menandatangani pernyataan protes yang sama. Nah, para pejabat pemerintah itu mungkin akan lebih mendengar suara kalian dan segera bertindak. Kekuatan sekumpulan orang yang berkumpul dan bertindak bersama adalah cukup kuat untuk membuat perubahan, sementara kekuatan satu orang saja biasanya tidak diperhatikan. Para pejabat pemerintah, para politisi dan wakil rakyat, mereka semua paham betul bahwa suara puluhan atau ratusan orang adalah suara pemilih



yang cukup besar untuk membuat hasil yang berbeda dalam pemilihan umum. Itulah sebab mereka mau mendengarkan baik-baik tuntutan yang disampaikan oleh suatu kelompok, bukan oleh orang per orang.

Fakta bahwa Anda adalah pihak yang benar tidak dengan sendirinya membuat Anda akan selalu memenangkan tuntutan. Soalnya, mereka yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa tak akan pernah mau menyerahkan secuil pun kekuasaan dan hak-hak istimewa mereka secara sukarela. Kekuasaan dan hak-hak istimewa itulah yang justru sering membuat mereka tampak 'selalu benar' dan 'dibenarkan'.

Pertanyaannya adalah: apakah anda sendirian memang punya cukup kekuatan untuk mengubahnya? Kalau anda memang punya kekuatan itu, anda dapat membuat apa saja menjadi mudah atau mungkin diubah.

Apa Mengorganisir itu Sungguh Ada?

Cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat masyarakat sekitar Anda dan amati siapa saja yang mengorganisir diri selama ini, siapa yang tidak. Umumnya, mereka yang memiliki kekuatan adalah mereka yang mengorganisir diri dengan baik. Coba pikirkan: ke mana saja perginya uang yang Anda belanjakan selama ini? Tentu, sebagiannya habis untuk belanja hidup sehari-hari. Juga untuk biaya perawatan kesehatan Anda sekeluarga. Para dokter, misalnya, bisa gampang saja mengenakan berapa biaya yang harus Anda bayar kepada mereka, karena mereka memang merupakan suatu kelompok yang terorganisir dengan baik dan nyaris memonopoli pusat-pusat pelayanan kesehatan di mana saja. Kalau Anda menyewa rumah, sebagian uang Anda akan lari ke kantong para tuan tanah pemilik rumah. Mereka juga adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan baik, punya perkumpulan atau perhimpunan yang rapih melindungi kepentingan-kepentingan mereka, bukan kepentingan Anda. Demikian pula para pedagang atau pengusaha yang terorganisir dengan baik, biasanya enak saja menaikkan harga kebutuhan sehari-hari yang melipatgandakan keuntungan mereka. Fakta bahwa jumlah pajak dari setiap rupiah yang kita belanjakan justru semakin memperkaya mereka yang memang sudah kaya raya, memang mencerminkan kenyataan bahwa ada kelompok orang yang memang terorganisir dengan baik, sementara ada yang tidak.

Dalam masyarakat kita, kekuasaan memang terpusat di tangan sejumlah kecil orang, lembaga atau perusahaan yang terorganisir dengan baik. Mereka semua memiliki hubungan erat dengan pusat-pusat kekuasaan yang memutuskan nyaris segala sesuatu yang menentukan dan memengaruhi hidup kita sehari-hari. Lihat saja, banyak perusahaan besar mulai saling bergabung dan bersatu menetapkan harga barang-barang di pasar tanpa peduli sama sekali akan penderitaan dan kesulitan yang diakibatkannya bagi masyarakat luas, bahkan juga tak mau tahu pada kesulitan yang ditimbulkannya terhadap negara. Beberapa tahun terakhir ini, misalnya, harga semen dan minyak goreng melonjak tiga sampai lima kali lipat. Perusahaan-perusahaan semen dan minyak goreng, yang juga menguasai hampir semua sumberdaya alam negeri kita seperti hasil hutan dan hasil laut, mengeruk keuntungan berpuluh atau bahkan beratus kali lipat.



Itulah suatu kekuatan nyata, suatu jenis kekuatan yang banyak di antara kita tidak pernah memperhatikan atau benar-benar memahaminya. Berapa banyakkah buruh pabrik perusahaan-perusahaan raksasa itu yang tidak pernah meningkat upahnya selama beberapa tahun? Berapa banyak anggota keluarga mereka yang terancam nafkahnya karena PHK atau upah terlalu rendah? Berapa banyak di antara mereka yang dapat menghindari pajak-pajak dan pungutan liar? Berapa banyak di antara mereka yang mampu menentang semua keadaan tersebut atau memprotes hukum yang tidak adil?

Itulah semua yang terjadi di tengah masyarakat kita sampai saat ini. Ada sekelompok kecil orang dan perusahaan raksasa yang sangat berkuasa dan secara amat sistematis melanggengkan kekuasaan mereka, menggunakan hak-hak istimewa yang mereka miliki. Hak-hak asasi yang dijamin konstitusi negara, mereka nikmati sepenuhnya, karena mereka memiliki kekuasaan ekonomi yang menjadi senjata bagi mereka membeli hukum dan menikmati kebebasan politik.

Sebagai rakyat awam, kita semua pun menyaksikan selama ini banyak kekurangan kekuatan kita dalam hampir semua bidang, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Kita menyaksikan dan mengalaminya sendiri dalam banyak hal, mulai dari brengseknya jasa pelayanan umum kantor-kantor pemerintah sampai harga-harga barang yang terus membumbung. Maka, hampir mustahil bagi suatu keluarga buruh kasar di perkotaan untuk memiliki rumah sendiri. Di perdesaan, harga tanah pun melonjak, hingga musykil bagi seorang buruh tani untuk memiliki sebidang lahan garapan yang memadai. Bahkan, lahan-lahan pertanian luas dan subur kini dibeli dan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang kaya baru.

Bagaimana Lawan Menggunakan Kekuasaannya?

Lawan-lawan kita mengendalikan kita dan hidup kita dalam berbagai cara. Kekuasaan mereka gunakan melalui pemilikan dan pengendalian sumberdaya pokok dan penting. Pemilikan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, memberikan kekuasaan untuk mengendalikan kesempatan dan lapangan kerja. Pemilikan atau penguasaan atas sumberdaya alam—batubara, kayu hutan, minyak bumi, dan sebagainya—memberikan kekuasaan kepada mereka untuk menentukan harga sesuka hati, menentukan tingkat penawaran dan permintaan di pasar, membuat keperluan hidup kita menjadi langka dan mahal serta sangat tergantung pada mereka.

Semua bentuk kekuasaan modal itu diperkuat lagi oleh kekuasaan yang mengendalikan proses-proses politik. Kekuasaan politik dibeli oleh kekuasaan ekonomi, korupsi, dan manipulasi merajalela. Akhirnya, semuanya bergantung pada kekuasaan uang, kekuatan uang tunai. Maka, lagi-lagi, kita pun terus saja menyaksikan para lawan kita mampu mempengaruhi proses dan hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum pada semua tingkatan—nasional, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai tingkat RT—dengan iming-iming uang dalam jumlah menggiurkan. Para politisi atau calon-calon wakil rakyat dapat melakukan kampanye politiknya secara meriah dan menyebar karena didukung dananya oleh pusat-pusat keuangan raksasa, dengan perjanjian bahwa mereka akan memberi imbalan yang setimpal jika mereka terpilih nanti, paling tidak dalam beberapa hal yang sangat menentukan dan menjamin



kepentingan sang pemilik uang. Akibatnya, banyak peraturan perundang-undangan resmi adalah dalam rangka melayani kepentingan-kepentingan segelintir orang kaya dan perusahaan-perusahaan mereka, bukan melindungi kepentingan mayoritas rakyat awam dan jelata. Sebagai contoh, serikat buruh adalah satu-satunya kekuatan nyata yang dimiliki kaum pekerja untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka menghadapi kaum majikan. Tetapi, berapa banyak undang-undang dan peraturan perburuhan yang memihak kepentingan kaum pekerja? Undang-undang dan peraturan itu terus saja diutak-utik, diubah, diperbaharui lagi, seakan tak ada habis-habisnya, dan ujung-ujungnya tak lain hanyalah menguntungkan pihak majikan saja, membatasi hak-hak buruh untuk mengorganisir diri sampai ke batas yang membuat mereka nyaris tak dapat berbuat apa-apa lagi.

Dalam beberapa kasus, kekuasaan serupa juga digunakan oleh perseroangan. Terdapat beberapa orang tertentu yang memiliki banyak perlakuan istimewa dan memainkan peran-peran yang sangat menentukan dalam bidang politik. Namun, yang jelas, kekuasaan dan kekuatan orang-orang itu pada akhirnya juga sangat ditentukan oleh apakah mereka mengorganisir diri dengan baik atau tidak. Kekuatan kaum majikan, misalnya, tidak saja berasal dari kekuasaan mereka mengendalikan pengadaan lapangan kerja serta laba yang mereka peroleh dari pengendalian kesempatan kerja tersebut, tetapi juga mereka peroleh berkat penggalangan organisasi yang kuat pada tingkat nasional, seperti Kadin (Kamar Dagang dan Industri), serta perhimpunan-perhimpunan (asosiasi) pengusaha sejenis. Kelompok-kelompok yang terorganisir rapi itu bekerjasama mendesak pembuatan atau perubahan undang-undang atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha dan diri mereka sendiri. Mereka menekan lembaga-lembaga pemerintah untuk memberlakukan berbagai peraturan yang lebih menjamin kepentingan mereka ketimbang kepentingan orang banyak. Bukanlah suatu kebetulan jika banyak undang-undang dan peraturan di negeri ini yang lebih menguntungkan perusahaan, para orang kaya, pemilik-pemilik pabrik, para tuan tanah dan penanam modal saja.

Mereka semua berdalih bahwa kita semua, sebagai warga negara, memiliki hak yang sama untuk berbuat yang sama seperti mereka, kalau kita memang mau dan benar-benar mencoba melakukannya. Seorang penganggur, katanya, punya hak untuk pergi ke mana saja dan melamar pekerjaan. Mereka bilang, kalau orang itu mampu bekerja cukup lama dan menabung cukup uang, maka orang itu pun dapat menjadi seorang pengusaha juga. Seorang gelandangan punya hak untuk bekerja pada seorang tuan tanah tanpa harus membayar sewa tempat tinggal di atas lahan majikannya. Kata mereka, kita semua punya hak untuk 'membuktikan' diri kita, hak untuk memperoleh tambahan pendidikan atau pelatihan yang perlu, meningkatkan keterampilan agar kita makin mampu bekerja dan dibutuhkan orang lain. Jika kita tak punya kerja dan tak punya uang, kita toh masih punya hak mendatangi lembaga pemerintah untuk meminta bantuan mereka mencarikan pekerjaan, atau meminta santunan sosial, jaminan perumahan, dan sebagainya. Jika permohonan kita tidak dipenuhi oleh pejabat pemerintah, kita masih punya hak untuk menggugat mereka di peradilan tata usaha atau peradilan administrasi negara, bahkan boleh menggugat sampai ke tingkat Mahkamah Agung sekalipun.



Dalam teori, sepanjang itu memang menyangkut kepentingan mereka yang berkuasa, tak ada seorang pun yang akan menyangkal hal itu. Tetapi, dalam kenyataannya, sesuai dengan pengalaman selama ini, kita yang pernah mencoba melakukan hal semacam itu pasti akan berkata: semua hak-hak itu hanya ada dalam teori, bukan dalam kenyataan. Nyatanya, jika Anda dipecat dari pekerjaan di suatu perusahaan, maka Anda benar-benar celaka. Nyatanya, jika permohonan Anda ditolak oleh pejabat pemerintah atau oleh peradilan, Anda benar-benar bisa terlantar dan jadi gelandangan kapiran. Nyatanya, jika Anda menganggur, apalagi jadi gelandangan, maka sungguh tak ada tempat lagi bagi Anda. Nyatanya, jika Anda miskin, maka mungkin sekali Anda memang akan terus miskin dan melarat. Nyatanya, jika anda berasal dari lapisan masyarakat yang tak punya hak hak istimewa, maka Anda akan terus-terusan digencet sampai kepayahan. Jadi, tak ada jalan lain, semua jaminan hak-hak asasi perseorangan itu hanya akan ada gunanya dan benar-benar nyata kalau setiap orang di antara kita menyadari perlunya kita bersatu menghimpun diri menghadapi kekuasaan besar yang mengendalikan kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai cara.

Apakah Orang Awam Dapat Mengorganisir Diri?

Sudah terbukti bahwa mengorganisir diri memang terlaksana dengan baik pada mereka yang punya kuasa dan kekayaan. Tetapi, sesungguhnya, terdapat juga bukti sepanjang sejarah negeri ini di mana pengorganisasian dilakukan secara amat berhasil oleh orang-orang awam, rakyat jelata. Jika Anda membuka-buka kembali sejarah, akan Anda temukan bahwa kemerdekaan nasional kita diperoleh justru karena rakyat jelata mengorganisir diri mereka untuk memulainya. Revolusi kemerdekaan kita itu tidak akan pernah benar-benar terjadi jika tidak diorganisir oleh rakyat. Rakyat yang mengorganisir revolusi itu menyelenggarakan serangkaian rapat umum, menyusun strategi, memilih pemimpin, membangun sistem komunikasi, merumuskan masalah yang dihadapi, mengambil tindakan, menjalin hubungan ke luar negeri, mengumpulkan dana, membentuk persekutuan-persekutuan—persis sama dengan apa yang sebenarnya kita lakukan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan kita di masa sekarang.

Banyak di antara hak-hak dan manfaat yang kita miliki sekarang tidak diberikan sebagai hadiah begitu saja. Rakyatlah yang telah mengorganisir diri untuk berjuang merebut dan memperolehnya. Banyak di antara kita yang sekarang tinggal menikmatinya saja. Sekarang, banyak di antara kita yang sudah menikmati jaminan hak memperoleh pendidikan, tunjangan kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Kita tak akan pernah memperoleh semua itu kalau tak ada ribuan rakyat dulu mengorganisir diri mereka untuk memperjuangkannya. Kaum pekerja saat ini mulai menikmati beberapa jaminan pensiun, hak cuti, dan honor kerja lembur, misalnya, justru karena ada kelompok-kelompok buruh di masa lalu yang mengorganisir serikat-serikat bebas yang memperjuangkannya. Fakta bahwa kaum perempuan sekarang memiliki hak suara dan hak-hak lain yang sama dengan kaum lelaki, bukanlah diperoleh sebagai anugerah gratis atau oleh kebaikan hati pemerintah, tetapi karena ada sekelompok orang, perempuan maupun lelaki di masa lalu, bahkan masih terus berlangsung sampai sekarang, yang mengorganisir diri memperjuangkannya.



Apa Manfaatnya Mengorganisir Diri?

Mengorganisir diri punya manfaat jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, mengorganisir diri adalah suatu alat efektif untuk membuat sesuatu terlaksana: memperbaiki pelayanan pendidikan, menurunkan beban pajak, memastikan jaminan lapangan kerja, memperbaiki pelayanan angkutan umum dan kesehatan, melindungi lingkungan hidup dan alam sekitar, dan sebagainya. Banyak di antara masalah keseharian yang kita hadapi saat ini dapat dipecahkan dan diubah dengan cara mengorganisir diri.

Tetapi, mengorganisir diri juga punya manfaat jangka panjang yang mungkin jauh lebih penting. Melalui proses-proses pengorganisasian, masyarakat dapat belajar sesuatu yang baru tentang diri sendiri. Mereka akan menemukan bahwa harga diri dan martabat mereka selama ini diabaikan dan diperdayakan. Mereka akan menemukan bahwa kehormatan dan kedaulatan mereka selama ini justru tidak dihargai karena ketiadaan kepercayaan diri di antara mereka sendiri. Mereka akan belajar bagaimana caranya mendayagunakan semua potensi, kemampuan, dan keterampilan yang mereka miliki dalam proses-proses pengorganisasian: bagaimana bekerja bersama orang lain, menyatakan pendapat dan sikap bersama secara terbuka, memengaruhi kebijakan resmi, menghadapi lawan atau musuh bersama!

Melalui pengorganisasian, masyarakat akan mulai mengenal dan menemukan diri mereka sendiri. Mereka akan menemukan siapa mereka sebenarnya selama ini, berasal dari mana, seperti apa latar belakang mereka, sejarah mereka, cikal-bakal mereka, akar budaya mereka. Mereka akan menemukan kembali sesuatu yang bermakna dalam lingkungan keluarga mereka, kelompok suku atau bahasa asal mereka yang memberi mereka kembali martabat dan kekuatan baru. Mereka akan menemukan kembali sejarah perjuangan dan perlawanan mereka sendiri.

Semua kita adalah bagian dari apa yang kita pikir merupakan bagian dari diri kita sendiri, dan itu adalah apa yang pernah disampaikan kepada kita bahwa hal itu memang bagian dari diri kita. Karena itu, jika kita diberitahu bahwa kelompok masyarakat asal kita sejak dulu tidak pernah membuat keributan, tak pernah menentang bahaya, tak pernah mempertanyakan dan menggugat kekuasaan, maka kita akan cenderung berpikir dan bertindak semacam itu pula, berlaku seperti anak manis yang serba taat dan patuh. Jika kita diberitahu bahwa kelompok masyarakat asal kita adalah orang-orang yang selalu hanya mementingkan diri sendiri dan melakukan apa saja untuk keuntungan sendiri, maka kita pun akan cenderung bersikap dan bertingkah semacam itu, menerimanya begitu saja dan malas mempertanyakannya lagi.

Tetapi, sejarah nyata rakyat negeri ini adalah bukan sejarah kepasrahan menerima apa saja yang diberlakukan atas diri mereka, tetapi sejarah perjuangan, bahkan perlawanan. Ini terbukti sepanjang masa penjajahan, dan revolusi kemerdekaan dulu, bahkan juga masih tetap benar sampai saat ini. Cuma, banyak di antara kita sekarang yang kehilangan daya juang. Kita semua diberitahu bahwa sudah menjadi kesepakatan nasional untuk bahu-membahu membangun kejayaan negeri dan bangsa kita ini. Karena itu, kita semua diharapkan melakukan apa yang masing-masing menjadi bagian kita, berkorban tanpa



pamrih, tanpa banyak omong, tanpa banyak menuntut, tetapi justru bertanya: “apa yang dapat kita sumbangkan bagi negeri ini?”

Nah, siapakah yang telah menikmati semua hasil kerja keras dan pengorbanan itu? Jawabannya: mereka yang menguasai dan mengendalikan perusahaan-perusahaan besar, lembaga-lembaga pemerintah dan partai-partai politik. Mereka semualah yang akhirnya mengendalikan nyaris semua bagian kehidupan kita. Kita ini hanyalah orang-orang awam yang melulu diperintahkan mengencangkan ikat pinggang demi menghemat bahan bakar, sementara perusahaan-perusahaan minyak negara dan swasta sekutunya berpesta pora menikmati keuntungan yang kian besar. Kita cuma rakyat kecil yang bekerja atau bermukim di kawasan yang tanpa pengamanan dan perlindungan polisi, sementara itu pemerintah kotapraja menggunakan uang pajak kita membangun pelataran-pelataran parkir besar bebas pajak atau dengan pajak ringan untuk kawasan dagang dan industri besar. Pemerintah kota mendirikan banyak gedung pertunjukan dan balai-balai sidang raya mewah yang harga karcisnya hanya terjangkau kantong orang gedongan, sementara gedung sekolah dasar, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan sarana MCK umum atau balai pertemuan warga RT kita lumutan tak terawat, dianggap cukup dengan campuran semen-pasir murahan atau bahkan dinding gedek reot.

Dengan mengorganisir diri, kita semua dapat mulai menemukan kembali kebutuhan pokok kita bersama dan menuntut mereka untuk memenuhinya. Dengan cara itu, kita akan menemukan kembali kekuatan yang sebenarnya kita miliki, akar kita, pusaka kita. Kita akan belajar kembali tentang keterampilan bekerja bersama, menggerakkan aksi bersama, mendukung satu sama lain. Dengan pengetahuan dan pengalaman semacam itulah dimulai kekuatan nyata rakyat awam.

Mengorganisir diri bagi kebanyakan orang awam memang bukan tanpa masalah sama sekali. Tetapi, mengorganisir diri adalah proses yang sangat bermanfaat sebagai alat, senjata, perangkat kerja, sekaligus tujuan kita sendiri. Selama kita mengorganisir diri, kita akan memperjelas kembali kedudukan diri kita sendiri sebagai suatu kumpulan orang, karena kita akan belajar menyatakan diri sendiri dalam cara-cara yang akan membuat suara kita bersama didengarkan dan diperhatikan oleh pihak lain.

Siapa yang Dapat Mengorganisir?

Salah satu yang sangat menakutkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah ternyata bahwa hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Memang, ada para pakar yang disebut pengorganisir profesional. Tapi, coba saja sering-sering mendengar apa yang dikatakan oleh para profesional itu, maka Anda lantas terkesan bahwa pekerjaan mengorganisir adalah sesuatu yang sulit atau bahkan muskil. Para pengorganisir profesional, seperti juga kaum pakar dan profesional lainnya, seringkali memberlakukan secara pukol rata saja semua keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan apa yang mereka kerjakan. Mereka bicara dalam bahasa yang aneh dan asing: aksi, model, konstituensi, representasi, koalisi, agenda, strategi, taktik, dan sebagainya! Itu semua adalah ‘omongan mewah’ yang seringkali membuat orang awam lantas percaya bahwa proses mengorganisir itu memang rumit dan pelik. Tetapi, dalam kenyataannya, mengorganisir adalah suatu proses yang sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantung



pada keterampilan dasar yang sebagian besarnya sebenarnya sudah kita miliki dalam kadar yang sama dan memadai. Memang, tak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisasian, ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. Tetapi, semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh orang awam sekalipun.

Banyak di antara kita tidak menganggap diri sebagai seorang yang mampu mengorganisir. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa banyak di antara kita yang cuma meng- anggap diri sebagai seseorang yang tidak dapat melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengorganisir profesional. Mengorganisir, jadinya, bagi kita nampak sebagai sesuatu yang sulit, berbahaya, dan romantik (penuh liku-liku) sekaligus. Para tokoh pengorganisir yang sering Anda saksikan dalam film-film, biasanya memang tokoh yang tampan, gagah, kuat, muda, bule atau rada 'indo' dan lelaki!

Untunglah, semua itu tidak benar! Kalau Anda benar-benar termakan oleh citra seorang pengorganisir dalam film-film itu, maka banyak dari pengorganisasian yang berhasil sepanjang sejarah negeri ini tidak akan pernah terjadi. Sejarah pengorganisasian rakyat di negeri ini adalah sejarah rakyat awam dari semua jenis kelamin, usia, warna kulit, suku, bangsa, dan agama. Upaya-upaya pengorganisasian yang berhasil di masa lalu, yang membawa banyak perubahan dan membuat banyak segi kehidupan kita saat ini nisbi lebih baik, adalah hasil kerja keras ribuan pelajar dan mahasiswa, tukang becak, sopir bemo dan andong, pedagang asongan, buruh kecil, petani desa, nelayan kampung, dan jutaan jelata awam lainnya.

Nalar yang mengatakan bahwa orang awam itu adalah pengorganisir yang baik adalah fakta bahwa keterampilan mengorganisir memang merupakan keterampilan sehari-hari semua orang. Semuanya merupakan ketrampilan yang kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di rumah, lingkungan keluarga dan kerabat, di lingkungan tetangga dan rekan kerja di kantor, atau di tempat kerja lainnya. Orang yang dapat bergaul dengan baik dengan orang lain, pada dasarnya, adalah seorang pengorganisir yang baik.

Kalau Anda adalah seorang pribadi yang khas, mungkin saja Anda berpikir bahwa pribadi pengorganisir itu adalah suatu jenis kepribadian yang memiliki hubungan kemasyarakatan yang luas. Mungkin Anda bilang pada diri sendiri: "Saya tak akan pernah bisa menjadi seorang pengorganisir atau seorang pemimpin." Tapi, banyak orang yang kini jadi pemimpin di berbagai organisasi atau lembaga, pada mulanya juga berpikir seperti itu. Mereka menganggap diri mereka tidak mampu bicara di depan umum. Mereka yakin tak akan mampu berhadapan muka langsung dengan para tuan tanah, majikan, atau para wakil rakyat di DPR. Mereka merasa tidak mampu memimpin acara pertemuan atau merencanakan suatu acara rapat bersama. Mereka anggap tak ada orang yang tertarik mendengarkan omongan, mengikuti atau benar-benar peduli pada apa yang mereka lakukan atau anjurkan. Lantas, mereka serba takut melakukan apa pun. Memang, betapa mudahnya kita beramai-ramai menghakimi seseorang yang berdiri di depan khalayak. Kita semua mengingat itu dengan baik, lalu kita sendiri pun luput untuk menemukan bahwa satu kelompok orang yang berdiri bersama adalah sesuatu yang benar-benar berbeda.



Semua perasaan itu adalah bagian dari harga yang mesti kita bayar terhadap cara-cara kita dibesarkan selama ini. Semuanya berpangkal dari suatu masa dalam hidup kita di mana kita diajar untuk bekerja secara sendiri-sendiri, terpisah dari yang lain, dari suatu masa di mana kita ditakut-takuti dan dimata-matai kalau kita bekerja berkelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Padahal, apa yang benar adalah bahwa semua orang pada hakekatnya mampu untuk bekerja bersama orang lain, untuk menjadi pemimpin, memberi ilham, untuk mengorganisir orang lain. Bagi sebagian besar kita, kemampuan itu memang telah dibenamkan sejak awal, sehingga kita tak lagi punya keyakinan diri untuk memulai melakukannya. Tetapi, sepanjang sejarah, banyak orang yang malah tak pernah berpikir untuk menjadi seorang pengorganisir, justru kemudian memainkan peran penting dalam gerakan-gerakan perubahan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, di sekolahnya, di tempat kerjanya. Setiap kelompok anak-anak, orang tua, remaja, perempuan, lelaki, buruh, petani, pembayar pajak, konsumen, telah melahirkan kepemimpinan kelompoknya masing-masing dari anggota mereka yang sebelumnya justru tidak berpikir untuk menjadi pemimpin kelompok itu.

Semua orang dapat mengorganisir. Semua orang dapat belajar tentang asas-asas pengorganisasian. Tidak ada yang lebih hebat dibanding yang lainnya. Anda dapat 'belajar bagaimana menggalang dukungan rekan-rekan Anda dan mempengaruhi orang lain', Anda dapat 'menemukan potensi Anda sebagai seorang manusia', Anda dapat 'menjadi lebih menarik', dan seterusnya. Tetapi, tak ada satu pun yang dapat mengubah hidup Anda sebanyak apa yang ditemukan oleh orang lain yang ingin bergerak pada arah yang sama dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi, belajarlah bersama mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang Anda semua idamkan.

Mengapa Orang Mengorganisir Diri?

Orang-orang mengorganisir diri karena beberapa alasan yang mungkin berbeda. Adakalanya mereka didekati oleh seseorang yang mengajak mereka mulai menghimpun diri bersama-sama. Orang itu mungkin saja tetangganya, kenalan baiknya, kawan sekerjanya, rekanan usahanya, atau utusan suatu organisasi atau staf suatu serikat atau perkumpulan tertentu. Pendekatan awalnya mungkin sederhana saja. Orang itu datang dan bilang: "Hei, saya benar-benar kewalahan sendirian, nih! Ayo, kita sama-sama kerjakan dan kita lihat nanti apa yang akan terjadi."

Adakalanya, tanggapan balik yang ia peroleh adalah: "Enggak ah... saya lebih baik mengerjakannya sendiri saja." Memang, banyak di antara kita yang cepat curiga pada orang lain. Kalau seseorang datang ke pintu rumah kita dengan selembar petisi, kita berpikir dua kali sebelum menandatangani, jika kita memang mau ikut menandatangani. Kalau kita diajak hadir dalam suatu pertemuan warga, kita suka memikirkan berbagai alasan untuk tidak hadir. Tetapi, sering juga jawaban yang diperoleh adalah justru: "Oke!" Semua itu bergantung pada: bagaimana kita melakukan pendekatan, apa yang mesti kita sampaikan dan apa yang kita tawarkan?

Di lain waktu dan tempat, mungkin kita mulai mengorganisir karena kita sudah gagal mencoba melakukan berbagai cara kebiasaan kita sendiri mencoba memecahkan suatu permasalahan selama ini. Kita sudah mengeluh kepada hampir semua orang. Kita juga



sudah menulis surat pembaca ke koran-koran. Kita sudah menelepon hampir semua stasion radio dan televisi. Kita sudah ajukan protes kepada pejabat yang berwenang. Kita pun lantas terjepit sendirian. Ujung-ujungnya, tak ada satu pun yang berubah. Akhirnya, kita mulai mengajak orang lain: “Hei, apakah Anda juga mengalami hal yang sama?” Maka, kita akan segera menemukan bahwa ternyata memang kita tidak sendirian dan senewen sendiri berpikir bahwa toh sesuatu perubahan akan terjadi juga nantinya. Ternyata, ada banyak orang di sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, di mana-mana, yang merasakan masalah yang sama dan sebenarnya ingin berbuat sesuatu bersama-sama. Mereka semua dikecewakan oleh tidak adanya saluran jawaban yang memuaskan selama ini. Mereka juga mau melakukan sesuatu. Dan, inilah awal yang baik memulai pengorganisasian: mengakui bahwa pemecahan masalah secara perseorangan tidak akan banyak berhasil, sehingga jawabannya tiada lain adalah berhimpun bersama!

Mengapa Orang Tidak Mengorganisir Diri?

Tidak semua orang yang punya masalah lantas mengorganisir diri. Beberapa orang akan tetap berkuat mencoba menyelesaikannya sendirian, meskipun sudah terbukti berkali-kali gagal atau kurang berhasil.

Ada banyak alasan mengapa banyak orang menolak berhimpun dengan orang lain. Untuk sebagian besarnya, karena hal itu memang merupakan hal baru bagi mereka. Mereka mungkin belum pernah melakukannya sama sekali dan menganggap hal itu sulit. Ada juga yang mungkin merasa cemas, karena merasa akan dimintai sesuatu atau melakukan sesuatu yang mereka rasa belum pasti atau yakin. Mereka khawatir akan diberi tanggung jawab yang mereka rasa tidak mampu mereka lakukan. Mereka mungkin takut menyatakan pendapat di depan umum. Mereka takut dituduh naif atau melakukan sesuatu yang dianggap konyol. Kurangnya kepercayaan diri, ditambah lagi dengan rasa takut terhadap keadaan yang masih baru atau asing, merupakan beberapa di antara alasan-alasan utama mengapa orang-orang tak mau mengorganisir diri.

Alasan lain adalah takut pada apa yang bakal terjadi jika pengorganisasian itu nanti sudah berjalan. Anda dapat melihat gejala ini dalam banyak kasus pengorganisasian di kalangan kaum buruh. Para pekerja takut bahwa jika mereka bergabung dalam serikat buruh, mereka akan dipecat, dipotong upahnya atau dipindahkan ke bagian pekerjaan yang paling jorok dan berbahaya dalam lingkungan pabrik. Mereka takut kalau dicap oleh pimpinan perusahaan sebagai pembuat onar, penghasut dan, karena itu, akan dijadikan alasan kuat untuk lebih mengencet dan menindas mereka.

Seringkali, ketakutan semacam itu memang dihembus-hembuskan dengan sengaja. Penggencetan dan penindasan memang suka digunakan terhadap orang-orang yang mencoba mengorganisir diri, bukan cuma di lingkungan serikat buruh, tetapi juga di semua organisasi lainnya. Seringkali, ketakutan itu justru memang sengaja dibesarkan dengan berbagai kabar burung tentang konyolnya akibat mengorganisir diri.

Mereka yang memiliki kekuasaan—perusahaan, pejabat pemerintah, para politisi mapan, dan lain-lain—memang selalu berusaha menyembunyikan rahasia pengorganisasian untuk diri mereka sendiri. Tidak hanya orang-orang kecil dilarang dan



dibatasi untuk mengorganisir diri, tetapi juga mereka memang secara sengaja dibatasi untuk berpikir demikian. Banyak di antara kita yang berpikir tentang pengorganisasian dengan pengertian yang pernah diajarkan pada kita pertama kali di bangku sekolah —yakni ‘orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai apa yang mereka inginkan’; suatu definisi yang agak asing. Kita tidak pernah belajar tentang pengorganisasian justru dari apa yang pernah terjadi sepanjang sejarah, yang dilakukan oleh rakyat dari semua lapisan (usia, jenis kelamin, suku, daerah, agama) tentang hampir semua masalah yang pernah kita kenal. Karena itu, kita tak pernah belajar bahwa pengorganisasian itu semacam adonan kue asli buatan rakyat sendiri, dan itu adalah bagian terpadu dalam kehidupan mereka dan kita sehari-hari. Kita cenderung malah termakan oleh isapan jempol bahwa pengorganisasian rakyat semacam itu adalah sama dengan ‘gerakan ekstrem’, ‘kelompok sempalan’, ‘golongan radikal’, ‘komunis’, ‘pengacau keamanan’, dan sebagainya.

Padahal, pengorganisasian rakyat semacam itulah yang menjadi inti pokok dan jiwa dari sistem demokrasi yang sesungguhnya. Tetapi, karena kebanyakan orang tidak peduli lagi mengenai pengorganisasian diri mereka, maka kita saksikan sekarang bahwa nyaris segala sesuatu yang terjadi saat ini serba ditentukan dan dikerjakan bukan oleh ‘orang-orang semacam kita’.

Sebaliknya, kita malah diwanti-wanti bahwa keadaan yang ada seperti saat ini adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Di tempat kerja, kita dipesan agar kita cukup pergi menghadap seorang diri ke depan atasan dan bermohon kepadanya dengan cara-cara yang ‘sopan’. Di sekolah, kita dinasihati agar sebaiknya menghadap ke guru, kepala atau penilik sekolah, sesudah jam pelajaran usai, dan segala sesuatunya akan beres. Ada pakar yang malah menganjurkan kaum perempuan, jika mereka menghadapi masalah pelecehan dalam rumah tangga, agar melakukan semacam percakapan pribadi dengan suami-suami mereka di rumah saja. Orang-orang tak beruntung yang membutuhkan santunan sosial dianjurkan untuk menghadap secara pribadi dan rahasia ke kantor konsultan.

Begitulah, terus-menerus, semakin gencar kita dianjurkan untuk bertindak secara perseorangan. Kita pun lantas berpikir untuk selalu bertindak melulu sebagai seorang pribadi, bukan sebagai suatu kelompok. Padahal, sesungguhnya, tindakan-tindakan perseorangan semacam itu sudah terbukti tidak banyak membawa hasil. Malah, akan membuat kita tetap terpisah satu sama lain dengan mereka yang senasib, mencegah kita membuat perubahan-perubahan nyata dan mendasar yang benar-benar kita butuhkan.

Itulah semua alasan mengapa masyarakat kita saat ini menjadikan kita lebih cenderung memilih cara-cara pemecahan persoalan secara perseorangan, justru atas masalah-masalah yang sebenarnya bersifat umum dan dirasakan oleh banyak orang. Masalah pribadi memang bisa diatasi tanpa perlu membuat banyak penyesuaian kembali sistem yang berlaku. Jika seorang buruh pabrik mengadu secara pribadi kepada majikannya, maka gampang saja sang majikan melakukan penyesuaian kecil khusus untuk sang buruh atau, sekalian saja, menundukkannya dengan cara menaikkan pangkatnya, misalnya, menjadi mandor atau pembantu mandor. Jika sang buruh justru memanfaatkan potensi kepemimpinannya dengan mengajak rekan-rekannya yang lain



menghadap dan memprotes ramai-ramai, jelas hasil tuntutan mereka akan dinikmati oleh semua buruh di pabrik itu.

Alasan lain menganjurkan pemecahan masalah secara perseorangan adalah keinginan para pemilik kekuasaan untuk membuat rakyat awam menyalahkan diri sendiri jika menghadapi masalah. Banyak di antara kita cenderung berpikir bahwa kita punya lebih banyak masalah atau masalah kita sangat khusus. Kita lantas buta pada kenyataan bahwa masalah yang kita hadapi sebenarnya juga dihadapi oleh orang banyak di sekitar kita. Akibatnya, kita selalu berpikir bahwa diri kita sendirilah yang harus bekerja lebih keras, berpakaian lebih rapih, berbicara lebih sopan, maka semua masalah itu nanti akan beres dengan sendirinya.

Sistem mapan yang berlaku saat ini memang menciptakan semua kebiasaan dan perilaku semacam itu. Para buruh diberitahu bahwa jika mereka mampu meningkatkan produktivitas kerja pribadinya sedikit saja, maka mereka dijanjikan akan memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan. Kaum perempuan dianjurkan bahwa jika mereka dapat menata rumah mereka sedikit lebih apik dan rapi, maka mereka akan memenangkan lebih banyak rasa cinta dari para suami mereka. Kelompok minoritas diberi pesan bahwa jika mereka menempuh cara-cara yang 'santun' dalam mengajukan tuntutan mereka, maka segalanya akan beres dalam sekejap.

Maka, kita pun cenderung melihat kegagalan kita selama ini memperjuangkan tuntutan-tuntutan kita, semuanya semata-mata sebagai kegagalan pribadi kita sendiri. Itulah yang membuat kita percaya bahwa kita memang tidak sebaik mereka yang menjalankan roda pemerintahan, yang menguasai pabrik-pabrik, yang memiliki perusahaan-perusahaan, yang memimpin sekolah-sekolah. Kita bahkan mulai menyangka bahwa mungkin mereka memang benar ketika mereka mengatakan bahwa kita harus menyerahkan segala sesuatunya ke tangan mereka. Lantas, kita pun membiarkan mereka membuat semua keputusan. Kita pasrahkan kepada mereka untuk memberi kepada kita apa saja yang mereka anggap baik dan layak bagi kita.

Maka, kita semua pun menjadi orang-orang yang menjadi serba kekurangan dari apa yang semestinya kita peroleh. Kita kekurangan kepercayaan diri untuk menangani masalah-masalah kita sendiri. Kita menjadi saling terpisah dan terasingkan satu sama lain. Berhadapan dengan mereka yang justru saling bekerjasama secara kompak, yang merancang strategi bersama untuk menudukkan kita, yang menggunakan kekuasaan mereka secara bersama pula untuk membuat kita sampai merasa tidak mampu melakukan apa pun juga.

Itulah semua alasan mengapa kita selalu dianjurkan untuk bertindak secara perseorangan. Mereka yang memiliki kekuasaan paham betul bahwa sekali rakyat awam belajar mengorganisir diri, mereka dapat mendesakkan terjadinya perubahan, sekecil apa pun juga, maka segera khalayak itu mulai berpikir untuk mendesakkan perubahan-perubahan yang lebih besar. Mereka paham betul bahwa orang-orang satu RT yang bergerak bersama dan berhasil menekan pemerintah kotapraja untuk membersihkan taman-taman kota yang kotor, maka segera orang sekampung itu akan mulai bicara tentang bagaimana caranya agar mereka tidak lagi diperas oleh polisi atau memperoleh keringanan pajak yang lebih masuk akal.



Adakah Orang yang Lebih Mudah Diorganisir Ketimbang Lainnya?

Dalam pengorganisasian, sebagaimana halnya dalam banyak hal lainnya, selalu tampak bahwa ada rerumputan yang tumbuh lebih hijau dan subur di seberang pagar. Para anggota banyak organisasi masyarakat selama ini berfikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sulit diorganisir. Seringkali, misalnya, kalau Anda bekerja dalam suatu keadaan yang melibatkan banyak orang dari berbagai suku, orang yang dari suku mayoritas akan berkata: “Anda tahu, mereka yang dari suku minoritas itu lebih kompak ketimbang kita. Mereka saling melindungi, mereka tidak takut saling mendukung satu sama lain. Kalau kita yang mayoritas ini juga melakukan hal yang sama, maka kita akan memperoleh lebih banyak.” Sebaliknya, mereka yang dari kelompok minoritas bilang: “Anda lihat, mereka yang mayoritas itu saling membantu satu sama lain. Mereka tidak seperti kita yang minoritas ini, sukanya cuma saling bertengkar antar sesama kita sendiri. Mereka tidak demikian. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan bekerjasama untuk mencapainya.”

Apa yang menakjubkan dari banyak kasus semacam ini adalah bahwa hampir semua kelompok cenderung melihat diri mereka sendiri lebih jelek ketimbang kelompok lain. Padahal, tak ada satu kelompok pun yang mudah diorganisir begitu saja. Tetapi, juga tak ada satu kelompok pun yang mustahil diorganisir. Setiap kelompok memiliki kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya masing-masing yang khas dan, karena itu, perlu dijadikan sebagai bagian penting dalam strategi pengorganisasian mereka.

Di daerah perdesaan, misalnya, penduduk bermukim lebih menyebar. Maka, mendatangi mereka satu per satu, dari rumah ke rumah, biasanya merepotkan dan cukup sulit. Karena itu, lebih mudah mengajak mereka semua hadir dalam acara temu warga di balai desa. Di masyarakat perdesaan, biasanya masih hidup tradisi kerjasama dan tolong-menolong. Umumnya masih sedikit sekali persaingan di antara mereka, sehingga saling berkunjung, meskipun jaraknya agak jauh, tetap merupakan kebiasaan yang beralasan bagi mereka.

Tak ada satu hal pun dalam kelompok di mana Anda bergabung yang akan menjadi alasan bahwa kelompok itu lebih mudah diorganisir, sementara kelompok lainnya lebih sulit. Apa yang penting adalah bahwa pada setiap kelompok ada yang sebenarnya menjadi kekuatan, dan ada juga yang menjadi kelemahan mereka. Jangan beranggapan bahwa apa yang dapat dilakukan pada satu kelompok tertentu, dapat juga dilakukan pada kelompok lain. Sebagaimana halnya setiap orang juga adalah suatu perkecualian dan membutuhkan perlakuan khas sebagai seorang pribadi, tiap kelompok masyarakat juga punya keunikannya masing-masing. Memahami keunikan dan lebur bersama mereka di dalamnya inilah yang membuat kerja pengorganisasian menjadi lebih menantang, menarik, mengasyikkan, sekaligus bisa lebih efektif dan mungkin lebih berhasil.

Adalah juga benar bahwa ada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang memang lebih mudah diorganisir pada saat-saat tertentu ketimbang yang lainnya. Masyarakat mengorganisir diri mereka jika mereka memang memiliki alasan-alasan yang masuk akal untuk itu, paling tidak sepanjang yang mereka pahami. Waktu yang tepat untuk mengajak mereka berbincang tentang masalah perpajakan, misalnya, adalah ketika



pemerintah baru saja mengumumkan peraturan kenaikan pajak baru. Waktu yang tepat untuk mulai mengorganisir ronda kampung adalah ketika terjadi peristiwa pemerkosaan seorang warga perempuan pada suatu malam di dalam kampung. Orang-orang pada umumnya lebih mau mengorganisir diri ketika ada masalah khusus muncul, baik dalam rangka mempertahankan apa yang sudah mereka miliki maupun karena melihat ada sesuatu yang baru yang mungkin dapat mereka lakukan pada saat itu.

Rakyat juga lebih mudah diorganisir jika mereka melihat ada suatu peluang untuk menang. Banyak orang menghadapi masalah yang sama, tapi ada yang mampu mengatasinya dan ada yang tidak. Tapi, mereka semuanya sebenarnya sama, yakni ingin memecahkan masalah itu. Namun, seringkali, pengalaman menunjukkan bahwa suatu cara pemecahan yang sudah pernah terbukti berhasil justru mereka tidak ingin dan tidak sukai. Seringkali kita menyaksikan, misalnya, mengapa orang yang kampungnya kumuh malah tak mau mengorganisir diri memperjuangkan perbaikan pemukiman mereka. Jawabannya adalah bahwa mereka memang sering merasa tak akan mampu melakukannya. Mungkin mereka benar, mungkin juga salah, tentang apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang tidak. Tetapi, sekali mereka berpikir dan merasa mampu melakukannya, maka pada saat itulah mereka siap mengorganisir diri.

Suatu kelompok masyarakat, seperti halnya juga semua orang, punya saat-saat tertentu untuk bergiat dan untuk beristirahat. Persis seperti orang per orang yang sesekali mampu juga menempuh resiko, mencoba ikhtiar-ikhtiar baru, melangkah lebih jauh. Suatu kelompok masyarakat juga punya masa-masa di mana mereka sangat ingin mencoba kemungkinan-kemungkinan atau cara-cara baru melakukan sesuatu dan berani mengambil risiko bersama. Pada saat lain, mereka mungkin akan lebih berhati-hati. Sesekali, kita mesti berpikir bahwa sekelompok masyarakat tertentu mungkin memang tidak dapat diorganisir pada minggu ini, atau pada tahun ini, atau dalam suatu masalah khusus tertentu, tetapi mungkin pada saat atau masalah lainnya.

Seringkali, misalnya, pada saat sekelompok masyarakat telah berhasil mengorganisir diri dan mencapai tujuan mereka, kita lantas mencoba mendorong mereka lebih maju lagi ke masalah atau tahap berikutnya. Padahal, pada saat itu mungkin saja mereka sebenarnya butuh untuk beristirahat sejenak, untuk mengonsolidasikan kembali diri mereka, untuk merayakan keberhasilan atau memulihkan dulu energi mereka untuk menghadapi saat-saat perjuangan yang lebih keras dan lebih berat lagi. Irama alamiah dari gerak masyarakat adalah penting dan perlu diperhatikan jika kita menggerakkan suatu proses pengorganisasian rakyat.

Di mana Mesti Mulai?

Tempat terbaik untuk memulai suatu pengorganisasian rakyat adalah tempat di mana Anda berada, dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, tentang masalah yang memang Anda prihatinkan bersama, tentang sesuatu yang Anda semua ingin terjadi perubahan atasnya. Mulailah dengan mereka yang bekerja dan hidup bersama Anda, orang-orang seperti Anda juga, mereka yang membagi minat dan perhatian yang sama dengan Anda dan yang lainnya. Pengorganisasian tidak perlu merupakan sesuatu yang serba besar pada awal mulanya, jika ingin berhasil. Suatu kelompok kecil orang saja malah dapat menyelesaikan sesuatu yang besar.



Salah satu hal yang luar biasa mengenai pengorganisasian adalah berapa banyak orang yang ikut mengambil bagian pada saat sesuatu dimulai. Banyak orang ingin melakukan sesuatu untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Tetapi, banyak orang juga yang berpikir bahwa hanya sedikit atau nyaris tak ada sesuatu pun yang mereka dapat lakukan. Karena itu, mereka memilih untuk duduk diam saja menunggu sampai ada orang lain yang melakukannya untuk mereka, yang mengatakan kepada mereka apa yang mesti mereka lakukan. Seringkali, prakarsa itu berupa tindakan yang dilakukan oleh hanya seseorang saja, seringkali juga malah dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang sama, dan itulah awal mula yang baik untuk memulai suatu proses pengorganisasian rakyat.

Beberapa tahun lalu, ketika saya mukim di daerah selatan, pemerintah setempat mengumumkan suatu kenaikan pajak kekayaan yang cukup besar jumlahnya. Semua orang jadi sinting dibuatnya. Lalu, sebagai protes, kami pun beramai-ramai bergelantungan pada sebuah traktor yang menggeling di tengah kota. Itulah saat di mana semua orang bicara. Tetapi, tak seorang pun melakukan sesuatu. Akhirnya, ada seorang anggota serikat buruh tambang tembaga terdekat, memasang satu iklan mini tiga baris di koran lokal. Isinya: "Saya benar-benar senewen gara-gara kenaikan pajak baru itu dan saya ingin melakukan sesuatu. Kalau Anda juga ingin melakukan sesuatu seperti saya, temui saya di depan Gedung Pengadilan Negeri malam ini jam 20:00." Hebat! Ada 300 orang malam itu berkumpul di sana. Maka mulailah satu gerakan untuk mengubah bukan saja peraturan pajak yang tidak adil itu, tetapi juga keseluruhan kebijakan pemerintah setempat. Semua orang lantas ingin melakukan sesuatu, semuanya marah, tetapi semuanya dapat disalurkan ke arah suatu tindakan berkelompok (terorganisir) yang sehat dan dewasa.

Pengorganisasian tidak selamanya berjalan mulus. Tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan. Tidak semua masalah dapat dipecahkan tuntas. Tetapi, jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Anda telah mulai mengambil langkah pertama, orang-orang akan segera mengikuti Anda.

Bagaimana Memulainya?

Karena sejarah pengorganisasian sudah banyak ditulis oleh para pengorganisir berpengalaman, maka sebenarnya gampang mendapatkan gagasan yang Anda perlukan untuk menjadi seorang pengorganisir yang baik, bahkan sebelum Anda memulainya. Sangat membantu jika Anda dapat menemui seseorang yang berpengalaman nyata pernah mengorganisir rakyat, untuk bertukar pikiran dan membantu Anda menyusun rencana, strategi dan taktik-taktik yang sesuai. Tetapi, ingat, banyak gerakan perubahan sosial dan politik penting di negeri ini sebenarnya dimulai oleh orang-orang biasa saja, orang-orang awam seperti kita juga.

Selain itu, meskipun banyak di antara kita yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan pengorganisasian rakyat, dalam kampanye massal atau paguyuban RT sekalipun, namun kita tetap punya pengalaman keorganisasian yang sering kita lupakan. Banyak di antara kita yang pernah bekerja dalam kelompok-kelompok

pengajian setempat, sebagai anggota satu serikat sekerja, dalam perhimpunan pelajar dan mahasiswa, dalam kelompok-kelompok pecinta alam, radio amatir antar penduduk, arisan warga atau koperasi petani, dalam berbagai bentuk dan jenis organisasi. Banyak keterampilan yang digunakan untuk membangun organisasi-organisasi tersebut juga bermanfaat untuk melakukan pengorganisasian rakyat yang kita bahas di sini.

Cobalah ingat kembali perjalanan hidup Anda selama ini dan saat-saat di mana Anda pernah tergabung dalam satu organisasi apa saja. Coba ingat apa saja yang pernah Anda lakukan saat itu dan apa saja yang bisa Anda pelajari dari sana. Maka, Anda mungkin akan menemukan bahwa sebenarnya Anda memiliki banyak keterampilan mengorganisir lebih dari apa yang mungkin Anda bayangkan. Semua keterampilan itu dapat digunakan untuk memulai suatu proses pengorganisasian rakyat.

Itulah semua yang perlu Anda perdalam lebih lanjut, bagaimana melakukan pengorganisasian mulai dengan cara yang anda pahami. Tidak ada yang gaib dan rahasia dalam kerja-kerja pengorganisasian rakyat. Kita semua dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman untuk memainkan suatu peran penting dalam rangka mengubah dunia kita menjadi lebih baik dan lebih adil. Masing-masing kita punya kemampuan dan ketrampilan yang berbeda, punya prioritas dan nilai-nilai yang khas. Tetapi, semua kita, jika bekerja bersama, akan menjadi para penggerak, penggalang, pemimpin suatu gerakan bersama membangun suatu masyarakat yang lebih maslahat bagi semua orang tanpa pembeda-bedaan. ❖



FINAL

ACARA-7

KAIDAH ASAS, TUJUAN, dan UNSUR-UNSUR POKOK PENGORGANISASIAN RAKYAT

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian dasar pengorganisasian rakyat berdasarkan kaidah asas (prinsip-prinsip), tujuan, dan unsur-unsur pokoknya.

POKOK BAHASAN

- Kaidah asas, tujuan, dan unsur-unsur pokok pengorganisasian rakyat

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/*session*)

METODE & MEDIA

- Telaah kasus
- Diskusi kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Infografis, video dokumenter
- Lembar kasus & grafika (komik)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), kertas perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Bagikan Lembar Kasus #2 (*Sang Keong & Sang Elang*) kepada seluruh peserta.



Catatan

- Bahan cerita tertulis ini dapat saja diubah disesuaikan dengan keadaan peserta dan/atau kesediaan peralatan, misalnya diubah menjadi komik bergambar atau tuturan lisan dengan cara yang menarik.
- Atau dapat juga diganti dengan cerita rakyat sejenis yang akrab dengan peserta setempat, misalnya, di Jawa adalah cerita 'Sang Keong dan Sang Kancil'.
- Atau, jika peserta adalah para pegiat dan mahasiswa yang senang dengan metafor filsafat dan persamaan matematika yang rumit, dapat juga diganti dengan epik terkenal zaman Yunani Kuno, yakni kisah perlombaan lari antara Achilles, satria Sang Dewa Atlet, melawan kura-kura yang justru dimenangkan oleh hewan lamban itu.

3. Kepada semua peserta minta mereka membacanya selama beberapa menit.
4. Setelah yakin semua peserta sudah membaca bahan tersebut, ajukan pertanyaan:
 - **Cerita tadi tentang apa?**
 - **Siapa saja tokoh-tokoh cerita tersebut?**
 - **Apa yang mereka lakukan?**
 - **Apa saja yang terjadi dan apa hasilnya?**
5. Catat semua jawaban peserta (pokok-pokoknya, kata kuncinya saja) di papan tulis atau kertas plano. Lalu, lakukan analisis terhadap semua fakta dari jawaban peserta:
 - **Mengapa Sang Keong dapat memenangkan pertandingan?**



Catatan

- Pada pertanyaan terakhir ini, ajak peserta memikirkan bagaimana bisa Sang Keong yang kecil dan lamban bisa mengalahkan Sang Elang yang besar dan bisa terbang cepat? Sebagai cerita kanak-kanak dan cerita rakyat yang sangat populer, biasanya hampir semua peserta sudah tahu jawabannya, yakni Sang Keong mempersiapkan diri mengorganisir seluruh keong yang ada untuk berjajar panjang mulai dari garis awal sampai garis akhir perlombaan. Itu sebab dia meminta waktu selama tiga bulan mempersiapkan siasat tersebut yang tidak diketahui oleh Sang Elang. Namun, tetap saja ajukan pertanyaan terakhir ini untuk menguji sejauh apa 'daya khayal' (imajinasi) para peserta. Karena, dalam pengalaman selama ini, banyak juga peserta yang belum pernah mendengar dongeng tersebut, apalagi membayangkan cara pemecahan masalahnya.

6. Catat lagi semua jawaban peserta di papan tulis atau kertas plano yang terpisah
7. Berdasarkan catatan analisis tersebut, ajak semua peserta merumuskan kesimpulan:
 - **Pelajaran apa yang dapat ditarik dari cerita tersebut?**
 - **Apa yang peserta sekarang pahami tentang pengorganisasian rakyat?**
 - **Apa saja prinsip-prinsip dasarnya?**
 - **Apa saja unsur-unsur pokoknya yang terpenting?**
8. Catat pokok-pokok hasil kesimpulan peserta di papan tulis/kertas plano.
9. Berdasarkan kesimpulan tersebut, ajak peserta mengaitkannya dengan kenyataan yang ada selama ini di tempat mereka atau di tempat lain yang mereka ketahui:
 - **Bagaimana dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat kita? Apakah kisah Sang Keong dan Sang Elang itu juga terjadi? Misalnya?**
 - **Siapakah sebenarnya Sang Keong dan Sang Elang dalam kenyataan sehari-hari kita?**
 - **Dapatkah kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Sang Keong? Mengapa?**
10. Bagi peserta dalam beberapa kelompok kecil (4-5 orang) dan minta tiap kelompok menuliskan satu 'kasus nyata' (pengalaman mereka sendiri atau pengalaman orang lain) proses pengorganisasian yang mirip (analog) dengan cerita Sang Keong dan Sang Elang tadi.

Catatan

■ Deskripsi kasus yang disusun oleh tiap kelompok tidak perlu terlalu rinci, usahakan sepadat dan ringkas mungkin. Yang terpenting adalah deskripsi kasus itu secara jelas mengungkapkan: **kejadian apa, di**

mana, kapan, siapa saja yang terlibat dan melakukan apa saja, bagaimana proses kejadiannya, dan apa saja hasilnya (berhasil atau gagal)?

11. Setelah semua kelompok selesai, ajak mereka kembali dalam kelas pleno, kemudian minta tiap kelompok menyajikan deskripsi kasus mereka.
12. Lakukan klarifikasi deskripsi kasus tiap kelompok, kemudian rangkum sekali lagi dengan menegaskan kembali apa pemahaman peserta sekarang mengenai: pengertian pengorganisasian rakyat, prinsip-prinsip dasarnya, unsur-unsur pokoknya, dan tujuan utamanya.

13. Bagikan fotokopi lembar pertama dari Lembar Kasus #3 (karikatur *Ikan-Ikan Kecil dan Ikan Besar*) kepada peserta.

PERHATIKAN: jangan membagikan dulu lembar keduanya yang merupakan jawaban terhadap lembar pertama ini. Lembar kedua akan dibagikan nanti setelah langkah ini selesai.

Minta mereka menyimaknya sejenak, lalu tanyakan apa jawaban mereka atas pertanyaan dalam lembar tersebut:

- **Bagaimana caranya agar ikan-ikan kecil itu bisa mengalahkan si ikan besar?**

Ingatkan mereka bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan mengacu kembali pada prinsip-prinsip dasar dan unsur-unsur pokok pengorganisasian yang telah mereka rumuskan sebelumnya.

14. Setelah mendengarkan jawaban peserta secara acak, bagikan lembar kedua karikatur *Ikan-Ikan Kecil & Ikan Besar* dan tanyakan pendapat mereka:

- **Apakah cara yang ditempuh ikan-ikan kecil dalam lembar kedua itu (untuk mengalahkan si ikan besar) sesuai atau memenuhi prinsip-prinsip dasar dan tujuan asas pengorganisasian? Mengapa?**
- **Apakah mereka tadi sempat berpikir seperti ikan-ikan kecil itu?**
- **Mengapa demikian? Apakah itu karena memang belum memahami betul apa pengertian dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian yang baru saja dibahas sebelumnya, atautkah lebih karena keterbatasan kemampuan ‘mengkhayal’ (imajinasi) saja? Atau, sejak awal sudah membatasi diri sendiri bahwa cerita ikan-ikan itu hanya ada dalam dongeng, tidak akan pernah ada dalam kenyataan? Mengapa ada kecenderungan suka membatasi diri sendiri semacam itu?**



Catatan

■ Pertanyaan terakhir ini penting untuk menguji apakah mereka memang mampu menerapkan pemahaman yang baru saja mereka pelajari pada satu kasus atau keadaan tertentu seperti dalam komik ikan-ikan tersebut. (Kaitkan dengan bahan bacaan tentang ‘*Mengorganisir*’ oleh Si Kahn yang sudah dibagikan pada acara sebelumnya: **Apakah mereka memang sudah membaca dan memahami isinya?**).

■ Jika waktu memungkinkan, boleh juga Anda kembangkan diskusi ini untuk mengajak peserta merumuskan: **apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya persatuan dan mengapa? Atau: apa saja yang menghambat atau tidak memungkinkan timbulnya persatuan dan mengapa?**

15. Terakhir, bagikan fotokopi Bahan Bacaan #6 (*Petuah Sang Bijak [1]*) dan #7 (*Petuah Sang Bijak [2]*) kepada setiap peserta dan tutup acara ini dengan membaca bersama kearifan (petuah) abad kuno tersebut yang merupakan salah satu adagium yang paling sering dikutip di kalangan para pengorganisir rakyat selama ini sebagai kaidah-kaidah dasar mereka (Jika memang tersedia biayanya, adagium ini dapat dibuat dalam bentuk poster atau stiker dengan rancangan yang menarik, lalu tempel di dinding, sehingga peserta bisa melihat dan membacanya setiap saat).❖

FINAL

CERITA RAKYAT BORNEO

SANG KEONG & SANG ELANG

HIKAYAT SUATU PERLOMBAAN BESAR

Akisah, pada suatu masa, adalah seekor keong dan seekor elang yang hidup di belantara hutan Sarawak di Kalimantan Utara. Sang burung besar, yang biasa melayang tinggi di angkasa dan sudah pernah terbang jauh dengan sayapnya yang perkasa, pada suatu hari menantang Sang Keong untuk berlomba adu cepat mengelilingi daratan besar Pulau Kalimantan. Sang Burung berpikir: “Tentu saja gampang mengalahkan mahluk kecil dan lamban ini.”

Sang Keong menerima tantangan itu dan berkata: “Baik, beri saya tiga bulan dulu untuk mempersiapkan diri.” Sang Elang langsung setuju dengan penuh keyakinan sambil tertawa dalam hati membayangkan bahwa Sang Keong pasti akan sia-sia saja mempersiapkan diri.

Akhirnya, hari perlombaan akbar itu pun tiba. Pada hitungan ketiga, Sang Elang mengepakkan sayapnya dan langsung melesat ke angkasa, melayang di atas rimba lebat. Sementara itu, Sang Keong pun mulai menggeserkan tubuh dengan kulit kerangnya yang lamban itu di atas tanah hutan berumput tebal.

Pada akhir hari pertama lomba, Sang Elang berhenti di ranting sebatang pohon besar. Yakin bahwa Sang Keong pasti tak akan mampu menyusulnya, ia bermaksud rehat panjang sambil menikmati panorama alam hutan sekitar. Tapi, alangkah kaget dia ketika melihat Sang Keong juga sudah berada tepat di bawahnya, merangkak lamban di padang berumput. Sang Elang sangat terkejut dan segera terbang kembali. Dia tak habis pikir bagaimana keong yang kecil dan lamban itu bisa tiba di tempat yang sama secepat seperti dia? Lalu, dia pikir mungkin dirinya salah arah dan terbang berputar-putar di tempat itu saja, sehingga dia sebenarnya tidak jauh meninggalkan Sang Keong yang masih ada di sana. Dia bertekad tak akan salah lagi pada sisa perlombaan berikutnya.

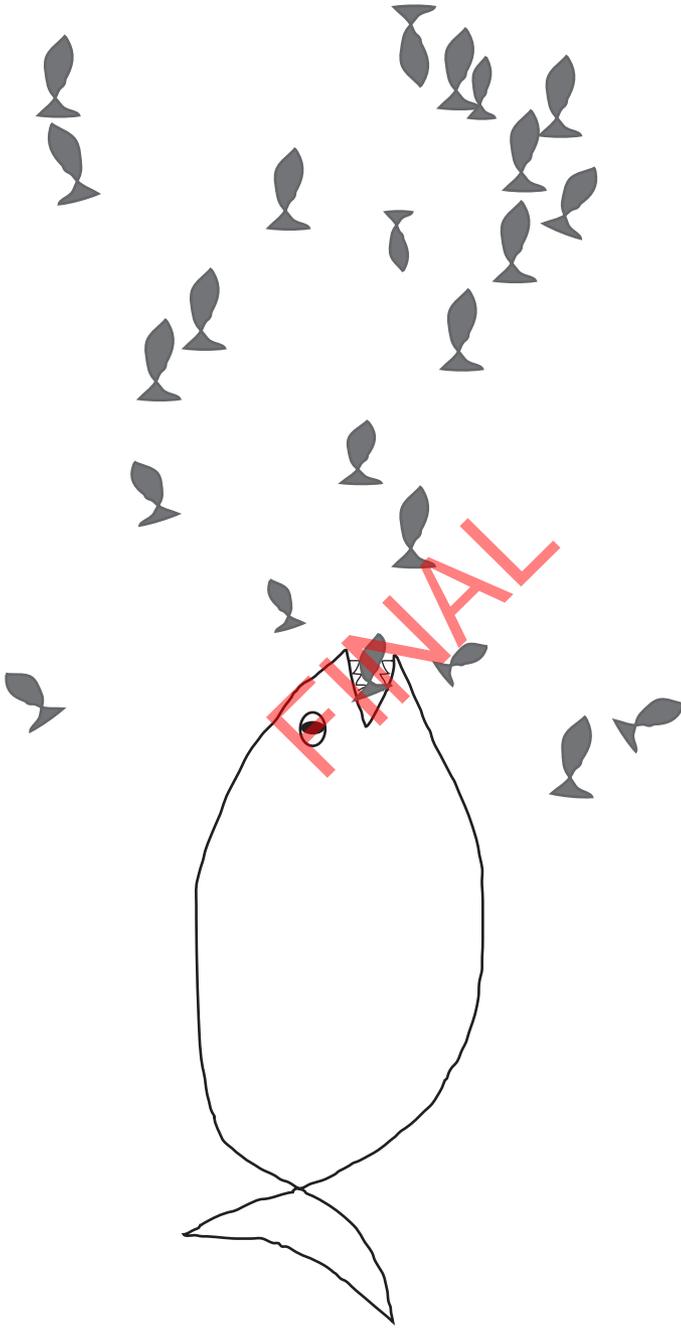
Pada akhir hari kedua, Sang Elang berhenti lagi untuk istirahat. Kali ini dia berkata dalam hati: “Pasti sekarang keong sial itu sudah tertinggal jauh di belakang.” Tetapi, sekali lagi, dia lihat Sang Keong sedang merangkak tepat di bawahnya. Tanpa banyak pikir, dia langsung terbang lagi, tak peduli rasa penatnya sudah terbang tanpa henti selama dua hari. Apa yang dia pikir sekarang hanyalah harus memenangkan perlombaan itu.

Pada akhir hari ketiga atau hari terakhir lomba, Sang Elang sudah melihat garis akhir tak jauh di depannya dan dengan gembira dia berseru: “Ah, akhirnya saya menang juga dan bisa istirahat dulu sambil menunggu keong sial dan lamban itu!” Namun, saat Sang Elang hampir mencapai garis akhir, sekali lagi dia terkejut melihat Sang Keong sudah berada di sana lebih dulu. Kaget, bingung dan keletihan, Sang Elang akhirnya jatuh ke bumi sambil menangis tak percaya pada apa yang terjadi.

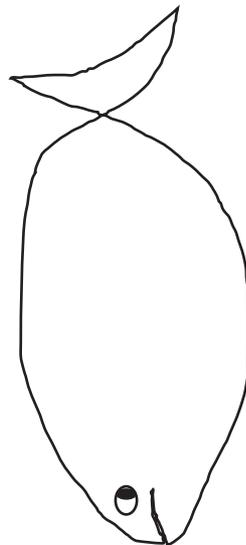
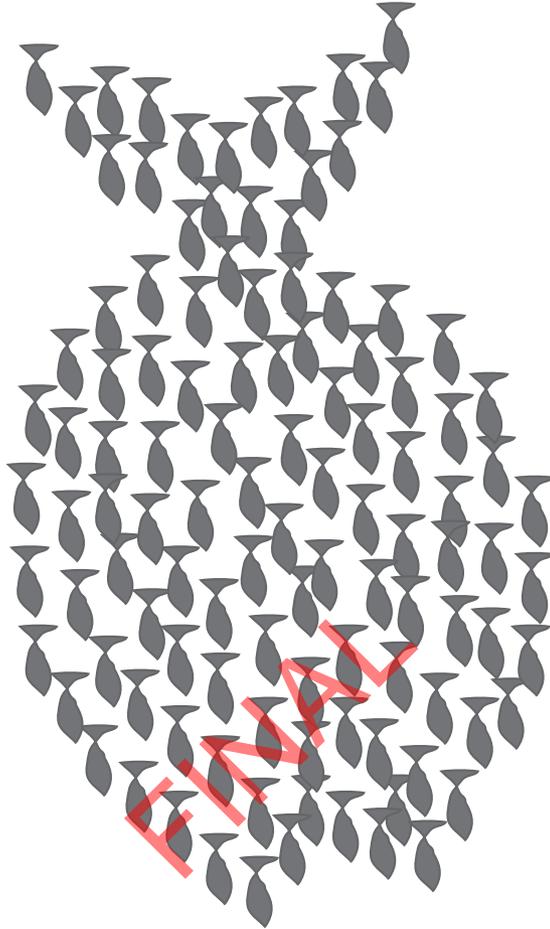
Sang Keong mendekati Sang Burung yang terkapar itu dan berkata:

“Makanya jangan takabur, kawan! Tidak selamanya yang serba besar dan kuat itu akan selalu menang, dan tidak selamanya yang serba kecil dan lemah akan selalu kalah!”





BAGAIMANA CARANYA AGAR SI IKAN-IKAN KECIL
BISA MENGALAHKAN SI IKAN BESAR?

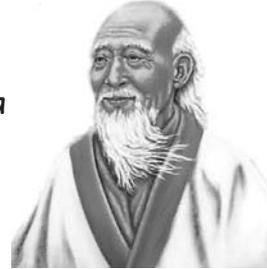


2



PETUAH SANG BIJAK [1]

datanglah ke tengah rakyat jelata
hiduplah bersama mereka
cintailah mereka
bicaralah dengan bahasa mereka
mulailah sesuatu dengan apa yang mereka butuh
lakukanlah sesuatu dengan apa yang mereka tahu
bangunlah sesuatu dengan apa yang mereka punya
karena pemimpin yang baik
adalah yang pada saatnya nanti
ketika pekerjaan selesai
rakyat dengan bangga mengatakan:
“kami sendiri yang menyelesaikan semua ini”



Lao Tze (500 SM)

人民

rakyat

草根

jelata (akar-rumput)

革命

perubahan radikal

Zhi Gong bertanya tentang prinsip negara dan masyarakat. Sang Guru menjawab: “Di masyarakat yang memang punya sikap (prinsip) dan martabat, kemiskinan warga, dan penistaan terhadap manusia adalah hal yang sangat memalukan. Sebaliknya, di masyarakat yang tidak punya prinsip dan martabat, kekayaan dan segala macam gelar kehormatan justru adalah hal yang sangat memalukan.”

(Kong Hu Cu, *Analecta*,
Taibo 3:13)

PETUAH SANG BIJAK [2]

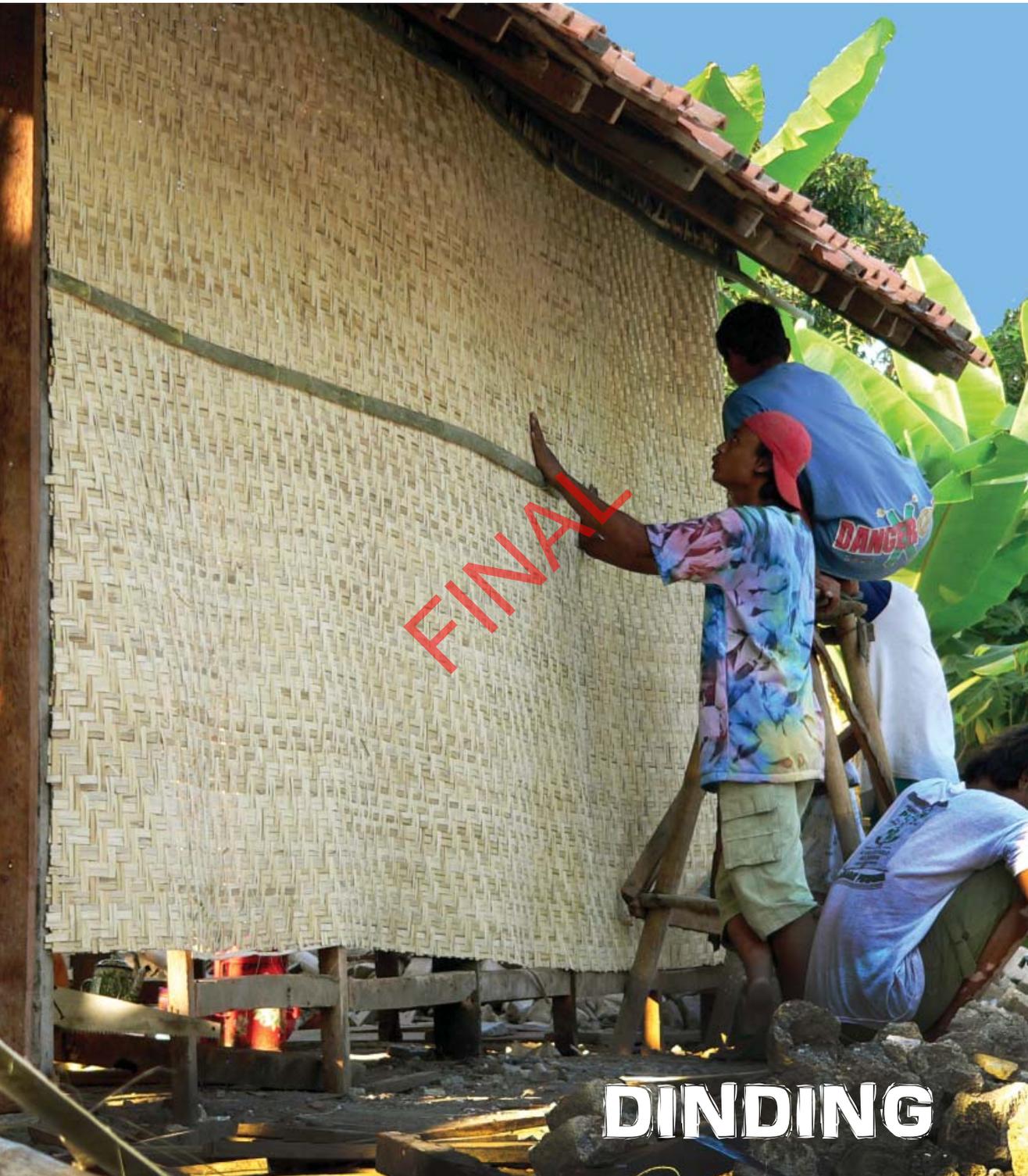
Dalam film klasik Akira Kurosawa, tujuh orang pendekar (*samurai*) pada abad-XVI mengorganisir petani miskin di satu desa melawan gerombolan penjahat dan perampok.

Mereka akhirnya berhasil menumpas gerombolan begal itu, tetapi membayarnya dengan harga sangat mahal: empat orang dari mereka tewas terbunuh! Tersisa tiga orang menyaksikan para petani desa merayakan kemenangan. Saat itulah, sambil menyaksikan para petani bergembira menanam padi di sawah mereka, pada adegan terakhir film, pemimpin kelompok tujuh pendekar tersebut, Kambei Shimada, mengucapkan pernyataan yang menjadi salah satu filosofi dasar para pengorganisir rakyat sejati:

“Kita kalah lagi.
Pemenangnya adalah
para petani itu.”



FINAL



FINAL

DINDING

FINAL

KEMAMPUAN DASAR PENGORGANISIR RAKYAT

Ilmu istilah 'analisis sosial' mulai digunakan oleh banyak kalangan, bahkan sudah mulai dipersyaratkan sebagai suatu keharusan dalam setiap perumusan kebijakan publik dan perencanaan program. Inti analisis sosial sesungguhnya adalah pada hubungan-hubungan (relasi-relasi) sosial yang terjadi di balik suatu gejala, kejadian, peristiwa atau permasalahan kemasyarakatan yang tampak di permukaan serta kepentingan-kepentingan dan pertentangan kepentingan yang ada di balik hubungan-hubungan tersebut. Menjadi jelas bahwa analisis sosial bukan sekadar suatu 'pemerian (deskripsi) sosiografis' atau 'bagan sosiogram' tanpa mempertanyakan kepentingan-kepentingan tersembunyi di balik hubungan-hubungan tersebut.

Maka menjadi sangat penting untuk mengupayakan adanya proses menuju pemahaman atas gambaran lengkap dan utuh tentang suatu situasi sosial dalam konteks waktu (kesejarahan), ruang (tempat, ekosistem, bentang alam), matra (nilai, norma, anutan dan kepercayaan, pandangan-pandangan dasar), dan perkembangan (sebab dan akibat, hubungan antarunsur, dinamika perkembangan dan perubahan) yang melatari, menyertai, dan terkandung (tersurat maupun tersirat) di dalamnya. Pada aras terakhir, yang paling penting adalah berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan langsung maupun tidak langsung (yang paling diuntungkan dan yang justru paling tidak diuntungkan) serta pola-pola hubungan di antara mereka.

Bagian ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian analisis sosial tersebut, unsur-unsur pokoknya, dan cara melakukannya.

ACARA-8

**ANALISIS SOSIAL (1):
SISTEM & STRUKTUR**

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian 'sistem' dan 'struktur' dalam analisis sosial sebagai suatu alat pemahaman tatanan masyarakat secara menyeluruh.

POKOK BAHASAN

- Pengertian dasar 'sistem' dan 'struktur' sosial.

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/session)

METODE & MEDIA

- Telaah kasus
- Diskusi kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Lembar kasus & bahan bacaan
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), kertas perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Bagikan peserta dalam dua kelompok sama besar, lalu bagikan Lembar Kasus #4 (*Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung, Sejuta Sawit...*) dan #5 (*Rindu Seribu Batang Jagung...*) kepada seluruh peserta. Beri waktu cukup (sekitar 15-20 menit) untuk membacanya dengan cermat, jika perlu membuat catatan-catatan yang mereka anggap perlu. Jika ada peserta yang meminta penjelasan tentang sesuatu dalam kasus tersebut, jelaskan seperlunya dan sesingkat mungkin.

3. Setelah semua peserta menyatakan sudah selesai membaca kasusnya, segera bagi mereka dalam dua kelompok sama besar. (Agar terjadi perubahan suasana, usahakan anggota kelompok yang terbentuk sekarang bukan dari kelompok yang sama pada acara-acara sebelumnya).

4. Selama 10 menit pertama, minta tiap kelompok membahas masing-masing satu kasus saja (boleh mereka pilih), dan menjawab pertanyaan kunci pertama:

• **Masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam kasus tersebut?**

Minta tiap kelompok mendaftar (mengidentifikasi) sebanyak mungkin masalah yang mereka bisa temukan. Tegaskan bahwa tidak perlu ada perdebatan panjang di antara mereka tentang apakah itu masalah atau bukan. Apa pun yang mereka anggap masalah, langsung masukkan dalam daftar. Apakah itu masalah atau bukan, akan dibahas dalam presentasi nanti.

5. Selama 10 menit berikutnya, minta tiap kelompok menjawab pertanyaan kunci kedua:

• **Dari semua masalah yang sudah mereka identifikasi, mana yang merupakan masalah paling inti?**

Tegaskan bahwa karena yang diminta adalah menentukan masalah '**paling inti**', maka **hanya akan ada 1 (satu) yang terpilih** dari sekian banyak masalah tersebut. Jika tiap kelompok sudah memilih, minta mereka menuliskan masalah yang terpilih sebagai '**masalah paling inti**' itu pada selembar potongan kertas *metaplan* yang berukuran lebih besar dan berbentuk bulatan yang Anda sudah siapkan (misalnya, berwarna merah).

6. Selama 10 menit berikutnya, minta tiap kelompok menjawab pertanyaan kunci ketiga:

• **Dari semua masalah lain yang tersisa (yang tidak terpilih sebagai masalah paling inti), mana saja yang merupakan sebab terhadap masalah inti tersebut, dan mana yang merupakan akibatnya?**

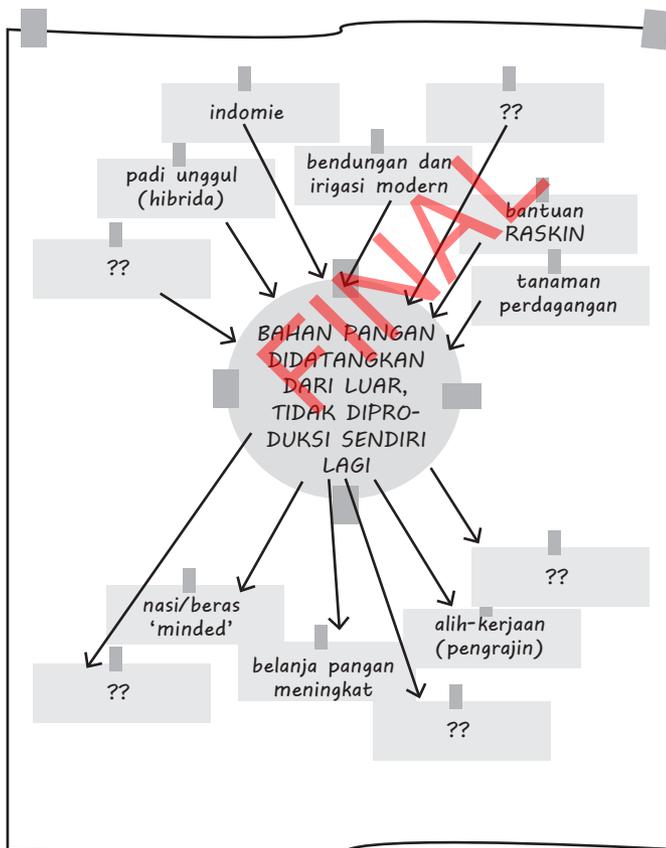
Minta mereka melakukan pengelompokan (klasifikasi, kategorisasi) tersebut dengan ketentuan:

[1] Semua masalah yang dianggap sebagai '**sebab**', dituliskan pada lembar-lembar potongan kertas ukuran biasa seperti yang digunakan pada acara-acara sebelumnya, tapi warna berbeda dengan kertas untuk masalah paling inti tadi (misalnya, hijau). Satu '**sebab**' pada satu lembar potongan kertas!

[2] Semua masalah yang dianggap sebagai '**akibat**', dituliskan pada lembar-lembar kertas yang warnanya lain lagi (misalnya, kuning). Satu '**sebab**' pada satu lembar potongan kertas!

7. Terakhir, selama 10 menit berikutnya, minta tiap kelompok menyusun semua lembar-lembar potongan kertas tersebut di atas satu kertas lebar (*plano*), dengan ketentuan:

- [1] Lembar kertas bulat besar berwarna merah (masalah paling inti) ditempelkan (direkatkan) di bagian tengah kertas plano;
- [2] Semua lembar kertas berwarna hijau (sebab masalah) ditempelkan beraturan di sebelah kiri atau sebelah atas kertas bulat besar merah (masalah paling inti) tadi; dan
- [3] Semua lembar kertas berwarna kuning (akibat), ditempelkan beraturan di sebelah kanan atau sebelah bawah dari kertas bulat besar berwarna merah (masalah paling inti) tadi.
- [4] Dengan spidol, buat garis-garis panah yang menghubungkan semua 'sebab' ke 'masalah inti' dan yang menghubungkan 'masalah inti' ke 'akibat'.
- Dengan demikian, hasil akhirnya akan tampak sebagai berikut (contoh):



8. Minta tiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil akhirnya dengan menempelkan kertas plano masing-masing di papan tulis. Minta mereka menjelaskannya secara singkat **alasan-alasan mengapa memilih 'masalah inti', 'sebab-sebab', dan 'akibat-akibat'nya seperti itu?**



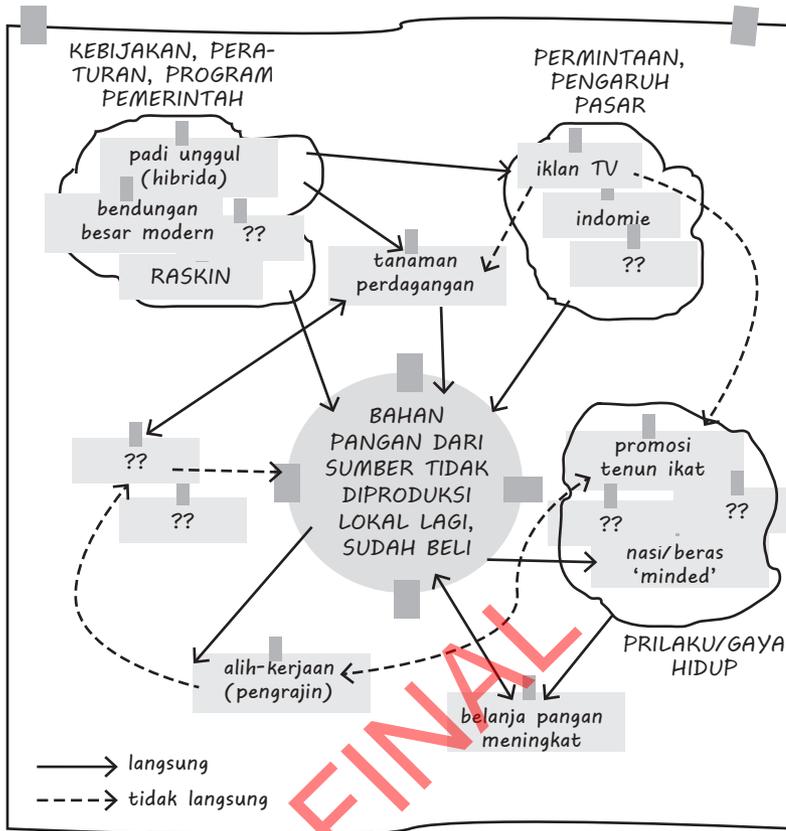
Catatan

- Cermati penjelasan tiap kelompok, ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terutama pada alasan (argumen) menetapkan 'masalah inti'-nya, Berdasarkan pengalaman selama ini, seringkali peserta tidak cukup tajam dan kurang mampu membedakan yang mana 'masalah inti' dan mana yang 'masalah sampingan' saja. Juga sering mencampur-aduk antara 'sebab' dengan 'akibat'. Sebagai fasilitator, memang perlu sedikit 'rewel' dan 'nyinyir', karena ini merupakan proses melatih kemampuan peserta melakukan klasifikasi, kategorisasi, sekaligus diferensiasi (kemampuan-kemampuan paling dasar dalam analisis)
- Jika dalam pembahasan ternyata mereka tidak tepat menetapkan 'masalah inti', 'sebab-sebab', dan 'akibat-akibat', langsung lakukan perbaikan dengan memindah-mindahkan tempelan kertas-kertas yang ada di plano mereka.
- Bisa jadi, tiap kelompok berbeda hasilnya. Jika terjadi, ajak mereka semua membahas dan menetapkan bersama mana yang paling logis sesuai dengan uraian kasusnya, sehingga diperoleh satu bagan 'sebab-masalah inti-akibat' yang sama antar semua kelompok. Kesamaan atau keseragaman bagan ini diperlukan untuk langkah-langkah berikutnya.

9. Pilih salah satu kertas plano yang sudah bagannya sudah diperbaiki, lalu ajak seluruh peserta melakukan pengelompokan lanjutan:

- **Dari semua sebab yang ada, mana yang merupakan 'sebab langsung' dan mana yang 'sebab tidak langsung' terhadap 'masalah inti'? Mengapa?**
- **Dari semua akibat yang ada, mana yang merupakan 'akibat langsung' dan mana yang 'akibat tidak langsung' dari 'masalah inti'? Mengapa?**
- **Mana dari semua sebab dan/atau akibat tersebut (yang langsung maupun tidak langsung) yang dapat dikelompokkan lagi sebagai faktor yang sama atau sejenis?** (misalnya: semua yang merupakan faktor kebijakan/peraturan/program pemerintah dikelompokkan jadi satu; semua yang merupakan faktor ekonomi/pengaruh pasar dikelompokkan jadi satu, dan seterusnya).

Langsung susun ulang tempelan semua potongan kertas yang ada berdasarkan kategorisasi-kategorisasi baru tersebut, sehingga hasil akhirnya akan tampak sebagai berikut (contoh):



Catatan

■ Dari pengalaman selama ini, pemetaan seperti bagan di atas sering memancing perdebatan panjang, dan memang memerlukan pembahasan sampai ke tingkat yang cukup rinci (detail), karena hubungan-hubungan di antara berbagai unsur yang ada sering sangat samar atau berbeda-beda pada tiap daerah tertentu.

Jika itu terjadi, maka lebih baik menambah waktu acara daripada mengorbankan proses pendalaman pemahaman peserta terhadap masalah sosial yang memang sangat kompleks.

10. Ajak semua peserta merangkum seluruh pembahasan yang sudah dilakukan:

- Pengertian dasar 'sistem' dan 'struktur' sosial.
- Unsur-unsur dari sistem atau struktur sosial tersebut sebagai fokus analisis sosial.

Untuk membantu peserta memahaminya lebih baik, bagikan Bahan Bacaan #8 (*Sistem & Struktur Sosial: Pengertian Dasar*). Jika perlu, jelaskan secara singkat inti bahan bacaan tersebut dengan contoh-contoh atau simulasi.

11. Tutup acara dengan penjelasan bahwa acara selanjutnya akan memperlancar kemampuan teknis melakukan analisis sosial dengan penekanan pada inti dari analisis sosial tentang hubungan-hubungan kuasa (*power relations*). ❖

FINAL

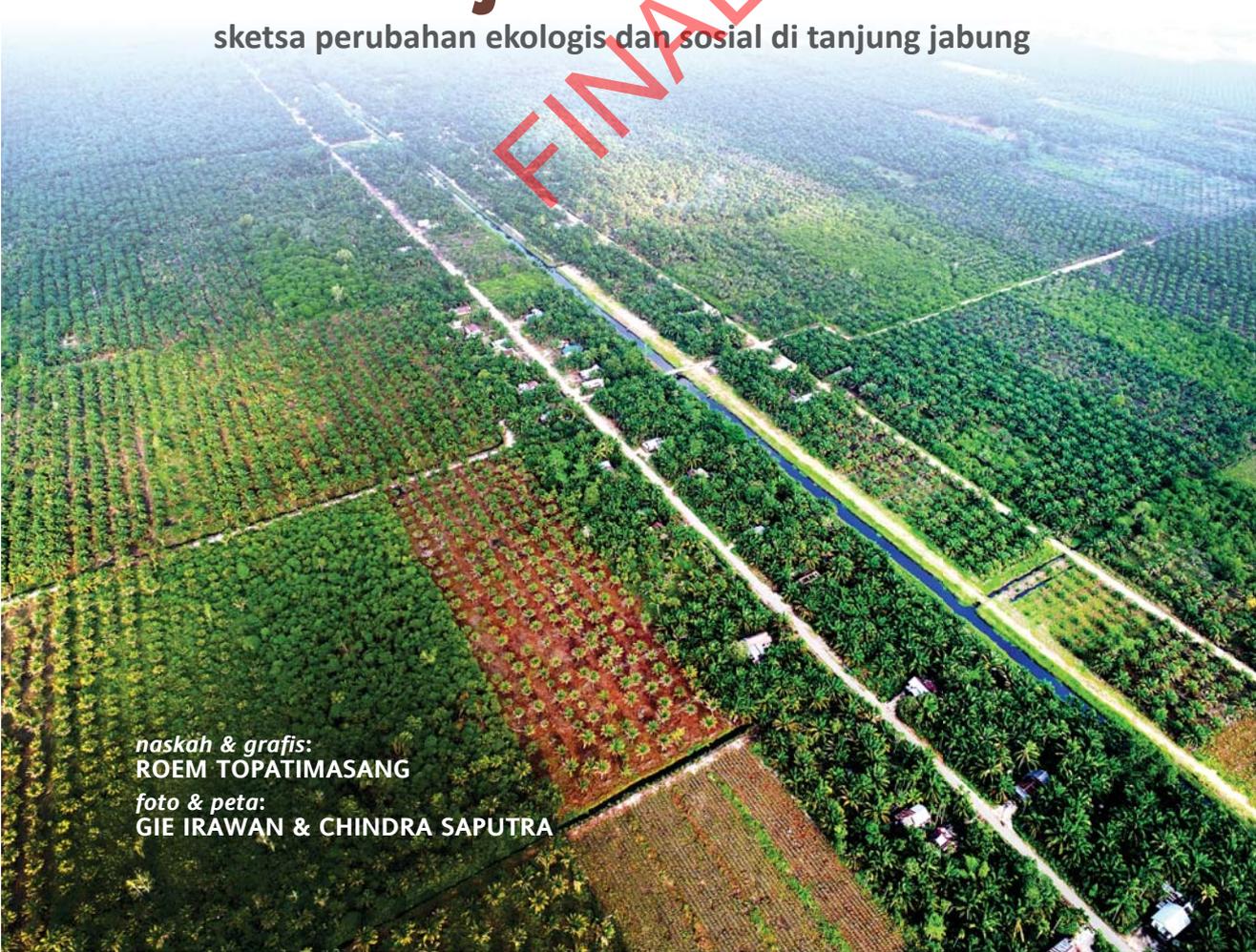


catatan perjalanan #52

sepucuk nipah serumpun nibung sejuta sawit...

sketsa perubahan ekologis dan sosial di tanjung jabung

naskah & grafis:
ROEM TOPATIMASANG
foto & peta:
GIE IRAWAN & CHINDRA SAPUTRA



Secara nasional, Provinsi Jambi memang bukan daerah penghasil beras utama. Sebagian kebutuhan beras warga Jambi selama ini masih diimpor dari provinsi lain, terutama dari provinsi tetangganya, Sumatera Barat, sebagai penghasil beras terbesar di seluruh Pulau Sumatera. Karena itulah, sejak 1970-an akhir, banyak petani dari Jawa didatangkan ke Jambi, melalui program nasional transmigrasi, untuk menggenjot produksi padi di daerah ini agar bisa mencapai taraf swasembada. Sebagian besar transmigran tersebut dimukimkan di wilayah Tanjung Jabung, kawasan dataran rendah di pesisir pantai timur (lihat peta).



Sebagai kawasan muara beberapa sungai besar, termasuk Sungai Raya Batanghari, yang membawa endapan lumpur gembur dari hulunya di kawasan hutan curah hujan dataran tinggi Bukit Barisan, wilayah Tanjung Jabung tak pernah kekurangan air, ideal untuk pertanian pangan (padi). Para transmigran asal Jawa tersebut kemudian bergabung pula banyak pendatang asal Sulawesi Selatan yang juga terkenal sebagai petani padi, membuka lahan-lahan sawah baru. Sejak saat itu, pemandangan hamparan luas sawah-sawah subur mulai menggantikan pemandangan hamparan hutan belukar dan rawa gambut di banyak tempat di Tanjung Jabung. Sehingga, pada awal sampai pertengahan 1980-an, Tanjung Jabung (yang kini terbagi menjadi dua kabupaten: Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat) mencapai kedudukan sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jambi sesudah dataran tinggi Kerinci dan Merangin.

Masa berjayanya produksi padi di Tanjung Jabung itu masih dikenang dengan baik oleh para warga transmigran di banyak desa di sana. “Waktu itu, saya punya enam gudang besar yang selalu penuh setiap panen,” kenang seorang petani padi (sekaligus pedagang beras) asal Sulawesi Selatan di Desa Rantau Rasau di tepian Batanghari. “Sekarang, satu gudang saja tidak pernah penuh.” Di Desa Jati Mulyo, salah satu desa transmigran





asal Jawa Timur, sekitar 30 kilometer ke arah barat Rantau Rasau, satu bangunan besar bekas gudang padi masih berdiri tegak di tengah kawasan permukiman warga. “Tapi,” jelas salah seorang warga tertua di sana, “sudah lebih sepuluh tahun tak pernah ada isinya. Kosong!”



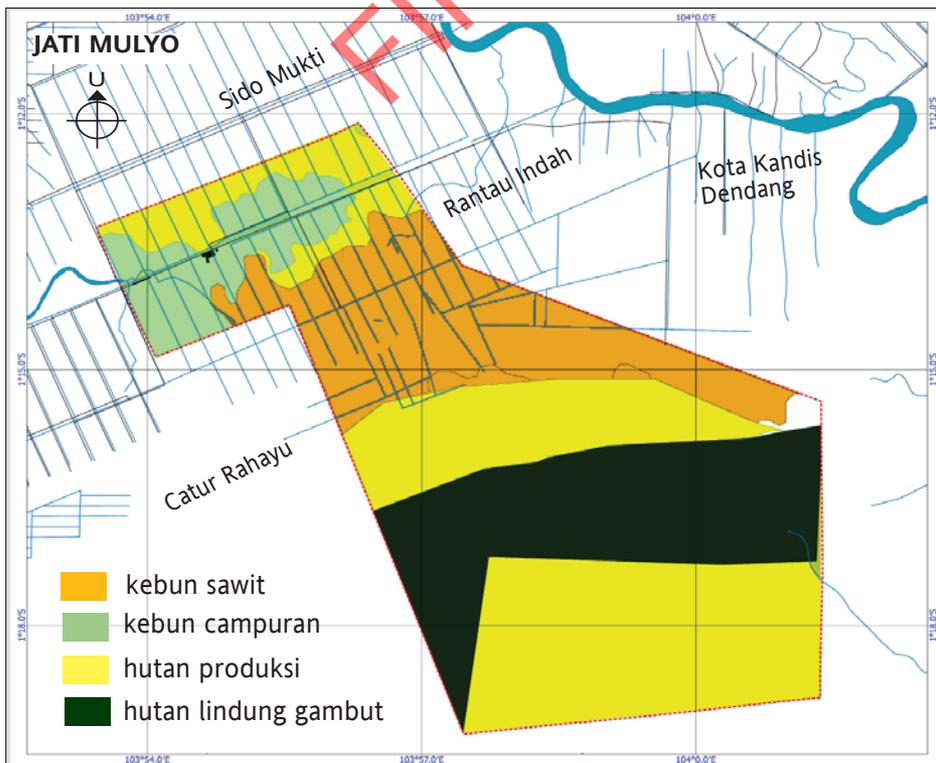
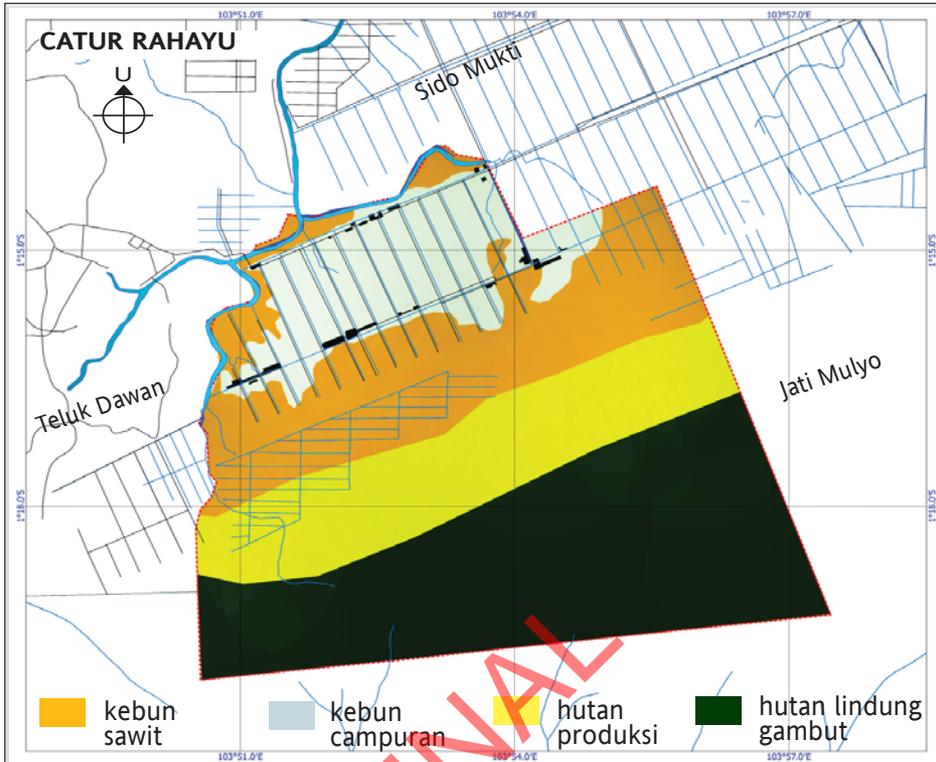
Bangunan tua gudang padi di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur: sudah lebih dari sepuluh tahun tak pernah terisi.

Lantas, ke mana semua hasil panen sawah-sawah luas yang ada di seluruh Tanjung Jabung?

“Sawah?” sergah Pak Tua di Jati Mulyo itu dengan raut wajah mengerut. “Tadi ke sini lewat mana? Ada lihat sawah? Lihat apa? Kebun sawit semua, kan?”

Saya diam saja, tak menjawab apa pun. Tak ada gunanya. Karena, memang itulah yang saya saksikan selama beberapa jam berkeliling dan mengunjungi beberapa desa di sana. Saya tak melihat lagi hamparan sawah di Jati Mulyo dan beberapa desa sekitarnya, seperti Catur Rahayu, Sido Mukti, dan Rantau Indah.

Ya, seperti kata Pak Tua itu, dan semua orang di Jati Mulyo, seluruh lahan sawah di sana telah berubah menjadi kebun-kebun sawit, bahkan sampai ke pekarangan-pekarangan rumah mereka. Itu semua bermula pada akhir 1990-an. Kata mereka, tiba-tiba saja semua warga di sana mengubah lahan-lahan sawah, bahkan juga kebun-kebun tanaman pangan lainnya, menjadi kebun sawit. Hanya dalam jangka waktu kurang dari sepuluh tahun, sampai pertengahan tahun 2000-an, sawah padi pun lenyap, digantikan oleh hamparan kebun sawit sejauh-jauh mata memandang, bahkan sampai merambah ke dalam kawasan hutan gambut yang mengelilingi desa-desa tersebut (lihat peta pada halaman berikutnya). Hanya di Desa Kota Kandis Rendang dan Kelurahan Teluk Dawan saya masih melihat ada hamparan sawah, itu pun tak seberapa luas lagi. Di Teluk Dawan, misalnya, dari seluruh (200 hektare)





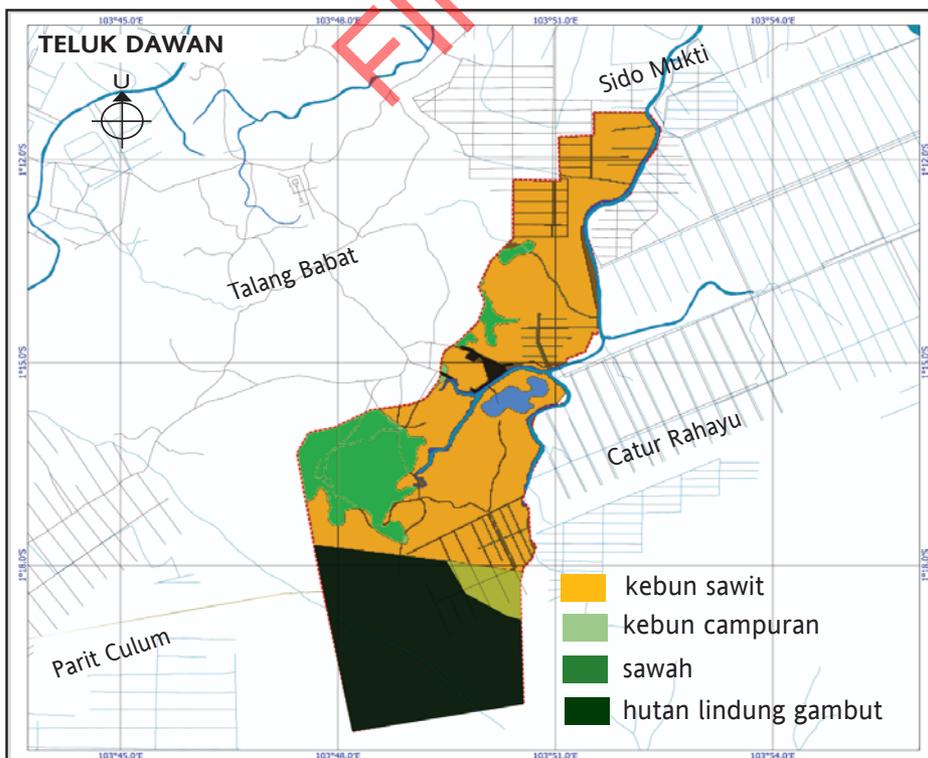
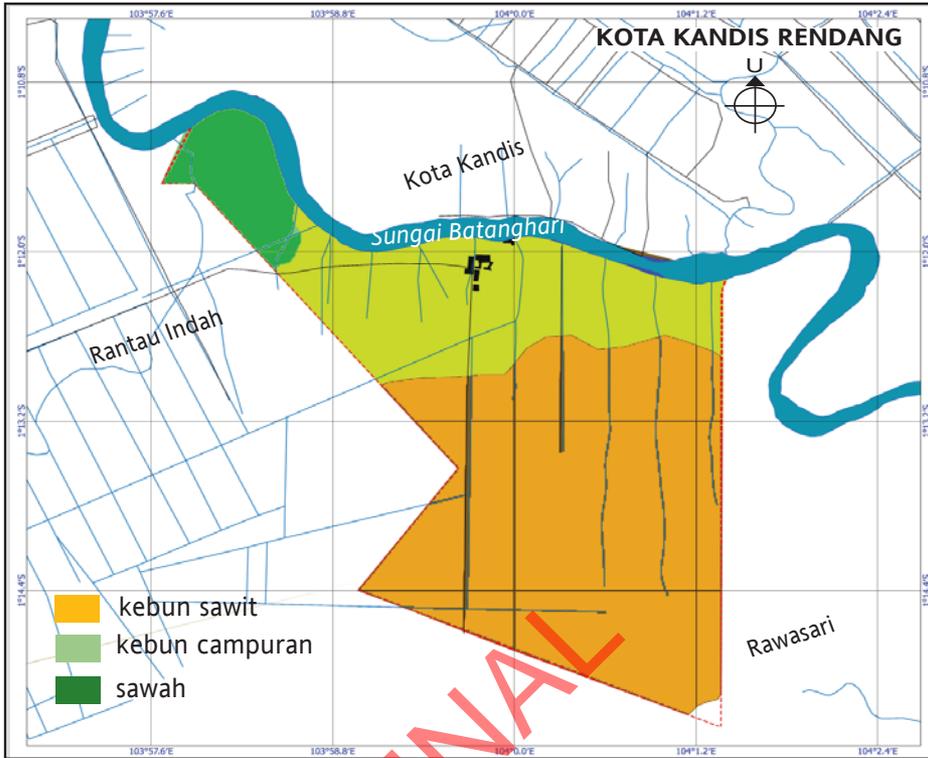
lahan sawah yang masih tersisa, hanya 10% (20 hektare) saja yang masih digarap penuh, sementara 90% (180 hektare) sisanya nyaris telantar sama sekali (lihat peta pada halaman berikutnya).

Mengapa beralih ke sawit? Ada beberapa alasan yang selalu dikemukakan oleh warga setempat. Selain harga sawit waktu itu memang tinggi dan pemerintah menyediakan bantuan bibit sawit dan pupuk gratis, beberapa perusahaan besar mulai membuka perkebunan sawit besar-besaran dan membangun pabrik-pabrik pengolah sekitar desa. Perusahaan-perusahaan itu juga menawarkan bantuan teknis kepada warga yang mau menanam sawit, bahkan menjanjikan jaminan pasar hasil panennya nanti. Semua itu makin menarik minat warga yang saat itu belum pulih penuh dari tamparan keras krisis moneter kawasan Asia Tenggara sejak 1996 (nilai rupiah anjlok lebih 200% dari Rp 2.400 menjadi hampir Rp14.000 per US\$1) serta gonjang-ganjing ketidakpastian dampak reformasi politik nasional tahun 1998.

Warga juga punya alasan lebih praktis. Setelah masa tumbuh sekitar 4-5 tahun, sawit bisa dipanen dua kali sebulan, sehingga mereka selalu bisa mendapatkan uang tunai lebih rutin dibandingkan dengan padi sawah yang harus menunggu panen sekali dalam tiga bulan. Padahal, sawah di daerah tersebut umumnya hanya bisa



Foto udara (*aerial view*) pada bulan Februari 2018 memperlihatkan kawasan permukiman Desa Jati Mulyo di mana tanaman sawit memenuhi lahan sampai ke pekarangan rumah warga (ATAS); dan beberapa petak kecil sawah yang masih tersisa, terkepung oleh kebun sawit, di Desa Kota Kandis Rendang (BAWAH).





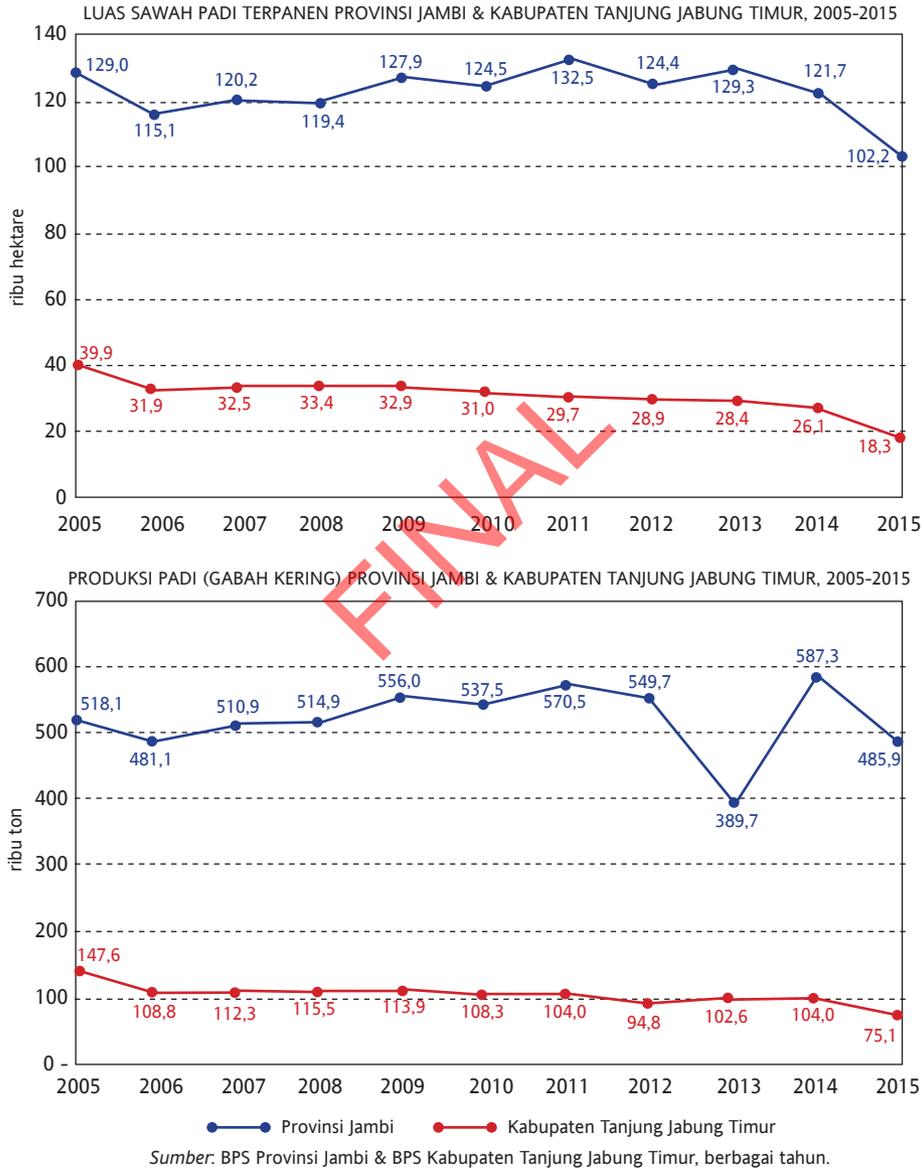
panen sekali setahun. Mereka juga merasa bahwa kerja berkebun sawit ‘jauh lebih mudah dan ringan’ dibanding kerja tani sawah. “Kita cuma perlu kerja keras waktu mulai tanam dan pelihara pada beberapa bulan pertama saja,” jelas salah seorang anak muda di Desa Catur Rahayu. “Setelah itu, sawitnya tumbuh sendiri. Kita hanya perlu sekali-sekali lagi membersihkan rumput dan semak, tidak perlu tiap hari seperti tani padi di sawah.” Anak muda itu tak bisa menyembunyikan nada bangga dalam suaranya sebagai ‘petani sawit, bukan petani padi’.

Maka, berbondong-bondonglah mereka mengubah lahan sawah padi dan lahan tanaman pangan lainnya menjadi kebun sawit. Sebagian besar lahan di desa-desa di Tanjung Jabung kini merupakan kebun tanaman komoditi eksotis itu. Lagi-lagi di Desa Jati Mulyo, sebagai contoh, dari total luas (7.933,30 hektare) wilayah desa, hampir seperempatnya (21,6%) adalah kebun sawit: 13,2% (1.066,57 hektare) milik 218 keluarga warga desa; 5,7% (454,07 hektare) milik PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP); dan 2,5% (196,67 hektare) adalah konsesi PT Tiga Saudara. Dengan kata lain, hampir sepersepuluh (8,2%) wilayah desa dikuasai oleh hanya dua perusahaan, sementara seluruh warga hanya memiliki rerata 7,9 hektare per keluarga. Jika lahan yang dikuasai negara, yakni kawasan hutan produksi seluas 3.396,5 hektare dan hutan lindung gambut (HLG) seluas 2.688,19 hektare yang ada di sana juga dimasukkan dalam perhitungan, maka pemerintah dan warga desa ini sebenarnya hanya berdaulat penuh atas kurang dari seperlima (15,1%) wilayahnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, warga beberapa desa di sana, termasuk Jati Mulyo, sedang menyelesaikan tahap akhir persepakatan dengan pemerintah untuk mendapatkan hak kelola sebagian dari hutan produksi yang ada. Satu langkah yang layak dihargai, tetapi masih belum jelas apakah kawasan kelola masyarakat itu nanti memang dapat dimanfaatkan juga sebagai lahan pertanian pangan, terutama padi sawah. Kemungkinan itu kecil sekali, karena undang-undang dan peraturan resmi jelas-jelas tidak memperbolehkan perubahan fungsi hutan, meskipun sudah ditetapkan sebagai kawasan perhutanan sosial. Kecuali jika ada perubahan kebijakan dan iktikad politik yang cukup radikal, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa kita tak akan pernah lagi melihat hamparan baru sawah padi produktif di Jati Mulyo dan desa-desa sekitarnya.

Luas lahan dan produksi padi di daerah ini memang cenderung terus menurun selama satu dasawarsa terakhir. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperlihatkan dengan jelas. Pada 2005, luas lahan padi sawah yang panen di daerah ini masih tercatat 129.082 hektare (di seluruh Jambi) dan 39.932 hektare (di seluruh Tanjung Jabung Timur). Sepuluh tahun kemudian (2015), tercatat hanya 102.207 hektare (Jambi) dan 18.322 hektare (Tanjung Jabung Timur). Dengan kata lain, terjadi penurunan sampai seperlima (20,82%) di tingkat provinsi dan lebih dari separuh (54,11%) di tingkat

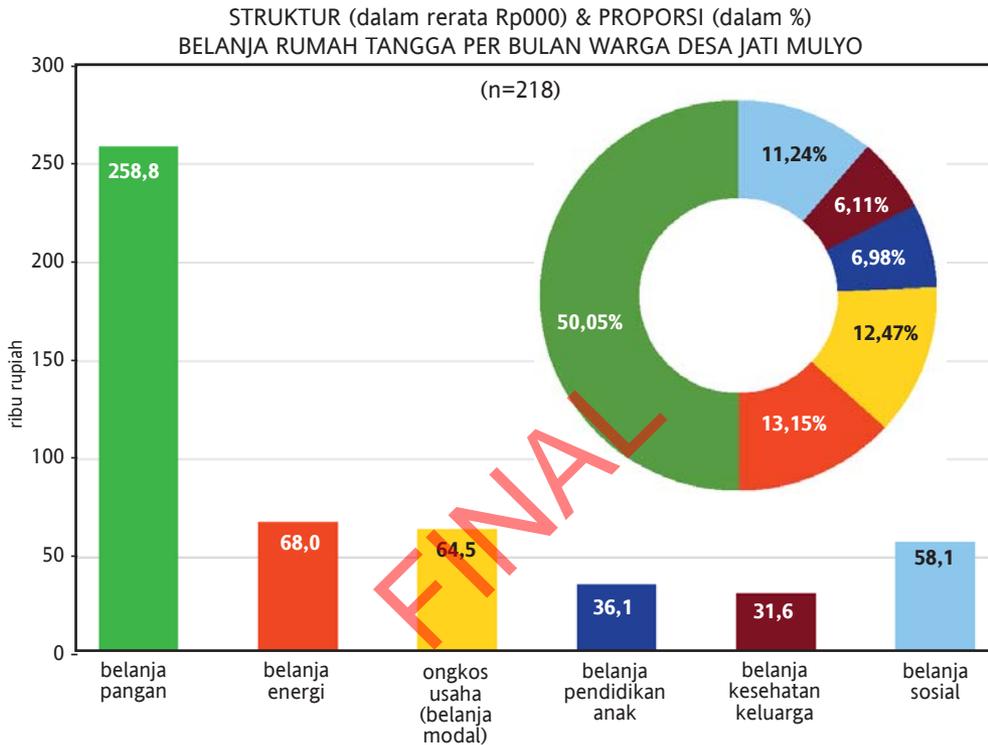
kabupaten. Demikian juga dengan jumlah produksinya. Pada 2005, masih tercatat 518.140 ton (Jambi) dan 147.671 ton (Tanjung Jabung Timur). Pada 2015, hanya mencapai 485.969 ton (Jambi) dan 75.109 ton (Tanjung Jabung Timur). Artinya, terjadi penurunan hampir sepersepuluh (6,21%) di tingkat provinsi dan nyaris separuh (49,13%) di tingkat kabupaten. Pergerakannya per tahun adalah sebagai berikut:



Akibatnya sudah dapat diduga. Produksi lokal padi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan warga setempat. Hampir semua keluarga, terutama di desa-desa di mana



lahan sawah padi sudah tidak ada sama sekali, sekarang harus membeli beras yang didatangkan dari daerah lain, termasuk dari luar Jambi. Akibat lanjutannya terjadinya peningkatan yang besar dalam belanja rumah tangga untuk bahan pangan. Secara keseluruhan di semua (218) keluarga warga Desa Jati Mulyo, rerata belanja pangan mencapai separuh (50,05%) dari total belanja rumah tangga per bulan (lihat grafik).



Sumber: Sensus Rumah Tangga, Tim Pemetaan Desa Jati Mulyo, 2018.

Dengan kata lain, seberapa besar pun pendapatan keluarga, termasuk peningkatan pendapatan dari hasil kebun sawit, tetap saja akan terkuras untuk membeli bahan pangan, terutama bahan pangan pokok (beras). Sehingga, kemampuan untuk belanja kebutuhan lainnya juga turut berkurang, termasuk kemampuan menabung untuk keperluan mendadak untuk kesiapan menghadapi keadaan darurat (sakit parah, bencana, dan sebagainya). Dalam perspektif mikro ekonomi, semakin besar belanja rumah tangga untuk pangan merupakan salah satu indikator penting terjadinya kemerosotan mutu kehidupan dan kesejahteraan satu keluarga. Jika keadaan itu dialami oleh keluarga yang berpendapatan rendah, maka suatu proses pemiskinan (*impoverishment*) sebenarnya sedang berlangsung. Dalam kenyataannya, semakin miskin satu keluarga, biasanya memang semakin tinggi pula belanja pangannya.



Sepanjang perjalanan pulang dari desa-desa di Tanjung Jabung itu, jajaran tegakan pepohonan sawit memenuhi hampir setiap jengkal bentang alam salah satu kawasan lahan gambut terluas di nusantara ini, nyaris tanpa ruang jedah. Dan, ternyata bukan hanya sawit. Satu hamparan maha luas pepohonan akasia membentang hanya beberapa kilometer dari Sabak, ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan hutan tanaman industri (HTI) untuk bahan baku bubur kertas (*pulp*) itu milik anak perusahaan raksasa Sinar Mas Group, membentang ribuan hektare sejauh mata memandang sampai ke kaki langit.

Gapura kota Sabak menyambut kami di atas jalan raya yang penuh lubang besar dan berdebu, hasil gesekan roda-roda puluhan truk besar pengangkut tandan-tandan sawit dan potongan-potongan kayu akasia, hilir mudik dalam iringan-iringan panjang yang memacetkan arus lalu lintas kendaraan lainnya. Mobil kami bergerak lambat mendekati gapura kota. Dari dalam mobil, saya masih sempat membaca tulisan besar semboyan daerah ini yang tertulis di sana: “Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung”!

Satu perasaan aneh bergelayut di hati saya. Sudah beberapa kali saya mengunjungi banyak desa di daerah ini, tapi saya belum pernah melihat pepohonan nipah (*Nypa fruticans*) di sepanjang bantaran puluhan sungai dan anak sungai yang malang-melintang di sana. Ada satu desa di dekat pantai, beberapa kilometer ke arah timur dari Jati Mulyo, di ujung kuala Sungai Raya Batanghari, bernama Nipah Panjang. Saya pernah juga berkunjung ke sana, dan kecewa ketika menemukan jajaran hutan nipah di sana pun tidak sepanjang yang saya bayangkan sebelumnya, bahkan ketebalannya semakin menipis. Sama saja dengan pohon nibung (*Oncosperma tigillarum*), saya hanya pernah melihatnya di beberapa titik yang saling berjauhan dan terserak di beberapa desa, tersembunyi di balik ketebalan ‘hutan-hutan’ sawit.

Spontan saja, saya bergumam, “Semboyan daerah ini mestinya diperbaharui.” Kawan yang mengemudi mobil kami, langsung menyergah, “Mestinya apa, Pak?” Sambil masih menatap tulisan semboyan di gapura kota itu, saya jawab ringan saja: “Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung, Sejuta Sawit...!” ❖



catatan perjalanan #16

rindu
seribu batang
jagung...

sketsa perubahan ekologis dan sosial di lambanapu

FINAL

naskah, foto & peta:
ROEM TOPATIMASANG



Lambanapu, desa kecil di pinggiran kota Waingapu, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (lihat peta). Sungai raya Kambaniru mengalir sepanjang tahun di sana, tak pernah kering di musim kemarau panjang sekalipun. Lahan basah hijau terhampar luas di sekitarnya, termasuk petak-petak sawah dengan sistem irigasi modern, berkat Bendungan Kambaniru yang hanya beberapa kilometer ke arah hulu.

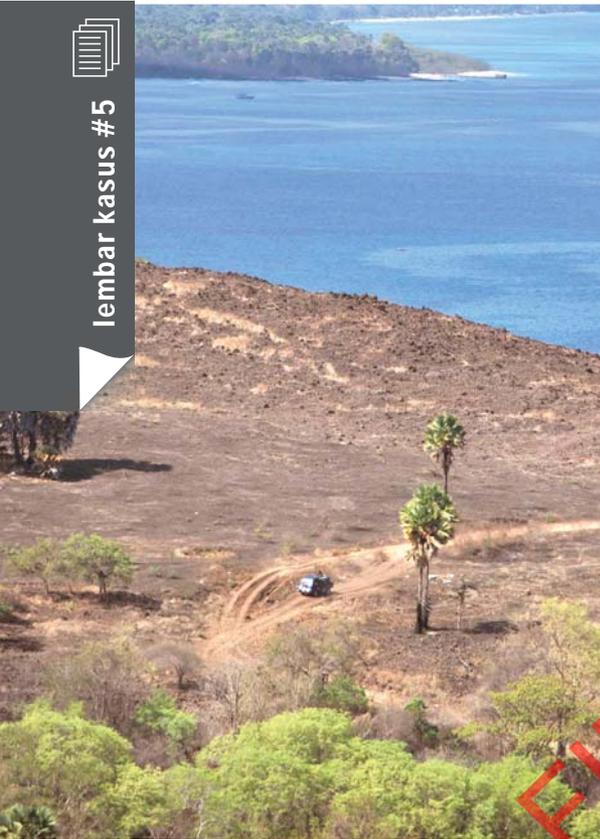
Juni 2004.

Pertama kali memasuki desa ini dan desa-desa sekitarnya, Juni 2004, saya merasa tidak sedang berada di Sumba, pulau lahan kering dan padang rumput seluas-luas mata memandang. Saya merasa seperti berada di salah satu pedalaman Pulau Jawa atau Bali yang subur. Sambil membayangkan dan memperbandingkannya dengan desa-desa lain di berbagai tempat di Sumba yang pernah saya kunjungi sebelumnya, kesimpulan pertama yang mampir di benak adalah: Lambanapu pastilah salah satu dari sedikit saja desa-desa yang paling berkecukupan, terutama dalam hal ketersediaan bahan pangan, di seantero pulau cadas-karang ini.

Dan, dugaan awal itu nyaris meleset. Di semua rumah, yang selalu tersaji di meja makan, hampir semuanya didatangkan dari luar Lambanapu, atau bahkan dari luar Sumba. Petani-petani sawah setempat mengaku menanam beberapa jenis padi yang umum dikenal di seluruh Indonesia, antara lain, jenis IR-65. Itu bermula pada 1980-an, ketika pemerintah gencar menganjurkan, bahkan ‘memaksa dan mengancam’ petani menanam jenis ‘padi unggul’ (hibrida) yang bisa panen tiga kali setahun.

“Waktu itu,” jelas seorang lelaki tua warga Lambanapu, “orang dinas (maksudnya: staf Dinas Pertanian Kabupaten) datang sama BABINSA (Bintara Pembina Desa, tentara petugas teritorial





Salah satu sudut pulau cadas-karang Sumba (ATAS); sangat kontras dengan bentangan hijau subur sepanjang dua sisi bantaran Sungai Raya Kambaniru yang melintasi Desa Lambanapu (BAWAH).



zaman pemerintahan militer Orde Baru--RT) bilang kami orang petani wajib tanam itu padi, karena ini program pemerintah. Siapa yang menolak berarti melawan pemerintah, antipembangunan!” Sama seperti yang dialami para petani padi di seluruh Indonesia masa itu, petani Lambanapu pun tak punya pilihan lain, apalagi petugas pemerintah menjanjikan pada mereka akan menyediakan benihnya secara gratis, juga bantuan sarana produksi (SAPRODI), pupuk dan kimia pembasmi hama, dan... Bendungan Kambaniru!

Salah satu pintu air dan tanggul utama Bendungan Kambaniru, hanya sekitar 3 kilometer ke arah tenggara dari Lambanapu.





Ya, kala itu memang masa jaya Revolusi Hijau dan kampanye besar-besaran ‘swasembada pangan nasional’. Kini, di Lambanapu, bahkan ada beberapa petani dengan bangga memamerkan sawahnya yang ditanami padi jenis Mamberamo, salah satu jenis penghasil beras ‘kelas menengah atas’ di negeri ini, kurang-lebih sekelas dengan yang lebih sohor seperti Cianjur, Rojolele, atau Mentikwangi.

Tetapi, mengapa semua itu tak pernah saya temukan di meja makan rumah-rumah mereka? Mengapa yang tersaji justru beras impor bermutu rendah dengan rasa yang sama sekali tak sedap?

Penjelasannya lumayan rumit. Tetapi, secara singkat dan sederhana dapat ditelusuri sebagai dampak dari krisis ekonomi kawasan dan nasional sejak 1997. Sebagai salah satu negara yang paling parah menderita krisis tersebut dan berbagai krisis sosial serta bencana alam yang menyertainya, sediaan beras nasional sempat guncang, memaksa pemerintah akhirnya harus mengimpor tambahan beras dalam jumlah besar. Bantuan internasional juga mengalir masuk, antara lain, beras murah tapi bermutu rendah dari kelebihan produksi beberapa negara besar, khususnya Amerika Serikat. Dan, terutama beras ‘kelas rendah’ inilah —yang konon di negeri asalnya justru untuk pakan ternak— yang dibagi-bagikan di seluruh Indonesia, terutama ke daerah-daerah minus, atau terkena bencana, atau yang ‘rawan pangan’ seperti Sumba, sebagai ‘bantuan beras untuk golongan miskin’ (disingkat RASKIN –selanjutnya akan disebut saja sebagai ‘beras miskin’). Ada yang dibagikan gratis sebagai jatah bantuan tetap selama beberapa bulan, ada juga yang dibagikan dengan harga jual yang sangat rendah, separuh atau sepertiga harga ‘beras biasa’ yang umum di pasar dan dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia selama ini. Pegawai-pegawai pemerintah lapisan terbawah, terutama di daerah-daerah terpencil dan bukan penghasil beras, adalah juga salah satu kelompok terbesar penerima jatah bantuan ‘beras miskin’ tersebut. Ditambah dengan yang dikorupsi oleh para pengelola peredarannya —termasuk banyak ‘organisasi sosial’ yang mendadak lahir sebagai akibat dari krisis berkepanjangan, peralihan sistem politik yang belum mantap, dan membanjirnya bantuan kemanusiaan— maka beredarlah di pasaran umum (secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi) sejumlah besar ‘beras miskin’ dengan harga yang memang masih tetap jauh lebih murah dibanding ‘beras biasa’ umumnya.

Maka, tuan rumah saya di Lambanapu menjawab pertanyaan saya tadi dengan aritmatika ekonomi khas petani desa: mereka menjual ‘beras biasa’ –atau beberapa orang bahkan menjual ‘beras kelas menengah atas’—hasil produksi mereka sendiri, dengan harga pasaran umum selama ini, lalu membeli ‘beras miskin’ tadi dengan harga separuh atau sepertiga lebih murah. Bahkan sering bisa memperolehnya gratis jika mereka mampu meyakinkan lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi-organisasi yang menyalurkannya bahwa mereka memang termasuk kelompok ‘penduduk miskin’. “Jadi,” kata tuan rumah saya, “jelas lebih untung, kan? Bisa dapat lebih banyak beras, malah masih bisa ada sisa uang dari hasil jual beras kami sendiri.”

Saya sempat terhenyak membisu mendengarnya. Dan, pikiran dan perasaan saya kian galau-balau ketika menemukan kenyataan bahwa mereka juga mulai menganggap bahwa jagung dan umbi-umbian —yang sesungguhnya merupakan bahan pangan pokok (*staple food*) tradisional Sumba— bukan lagi makanan utama. Lebih parah lagi, anggapan itu mulai berubah menjadi ‘kesadaran palsu’ bahwa makan jagung atau umbi-umbian akan menurunkan derajat kelas atau status sosial mereka. Seperti juga sudah umum ditemukan di banyak daerah lain di Indonesia —yang asal-muasalnya justru bukanlah penghasil beras dan pemakan nasi— ungkapan yang sering terdengar di Lambanapu adalah: “Rasanya belum makan kalau belum makan nasi!”

Kegalauan saya semakin balau ketika menemukan bahwa masalah itu di Lambanapu tidak hanya berhenti pada soal bahan pangan pokok. Sementara lahan subur seputar rumah mereka banyak yang menganggur —atau justru lebih dipenuhi tanaman jangka panjang (*cash crops*) seperti kopi, coklat, vanili, jambu mete, mangga, dan sebagainya— mereka malah semakin sering membeli sayur segar dari pasar Kota Waingapu. Bahkan, konsep ‘sayur’ mulai berubah. Seperti juga halnya di banyak daerah lain di Indonesia, hidangan ‘sayur’ di meja makan mulai sering digantikan oleh mie instan yang mereka beli dari warung atau toko terdekat. Hampir tak ada lagi yang menggoreng dengan minyak kelapa buatan sendiri, tetapi minyak-goreng kemasan buatan pabrik berbagai merek.

Mama Dang, sekitar 60-an tahun lebih, mengenang masa kecil dan remajanya yang tidak perlu membeli bahan pangan apa pun. Jagung dan umbian-umbian tersedia sepanjang tahun, dan hampir semua jenis sayuran dan bebuahan penting mereka tanam sendiri di kebun atau pekarangan, atau sepanjang tegalan tepi Sungai Kambaniru yang juga menyediakan berbagai jenis ikan dan udang sungai. Dia mengenang ‘masa makmur’ itu dengan satu contoh berikut. Musim kemarau setiap tahun di Sumba membuat sebagian besar desa lain yang tidak memiliki lahan subur dan sumber air melimpah seperti Lambanapu, pasti akan mengalami kesulitan bahan pangan. Pada saat-saat seperti itulah mereka akan datang ke Lambanapu untuk menukar ternak-ternak mereka (sapi, babi, kambing, atau kuda) terutama dengan jagung dan umbi-umbian. “Biasanya,” kata Mama Dang, “kami menukar 5-6 karung jagung, singkong, atau umbi-umbian lain, ditambah dengan 1-2 karung bawang campur wortel atau labu, kelapa, cabe, tomat, atau sayuran lain, dengan satu sapi atau kuda dewasa, atau dengan dua kambing atau babi dewasa.” Persediaan pangan mereka melimpah, sehingga tidak harus khawatir dengan menukarkan jumlah sebanyak itu.

“Sekarang,” lanjutnya, “kami malah membeli hampir semua itu dari pasar Waingapu.” Ketika ditanya mengapa, Mama Dang menjawab jelas sekali: “Semakin sedikit orang yang menanamnya. Kalaupun ada yang menanam, umumnya hanya cukup untuk keperluan mereka sendiri, atau malah mereka jual ke Waingapu. Hampir semua orang sekarang bikin sawah dan tanam padi, terutama sejak ada Bendungan Kambaniru...”



Dan, kini, Mama Dang, bersama beberapa perempuan tua dan ibu-ibu muda lainnya, membentuk satu kelompok usaha tenun-ikat kain Sumba yang terkenal itu. Tiga atau empat hari dalam seminggu, mereka berkumpul untuk memintal benang, mencelup warna, mengikat, dan menenun. Akibatnya, mereka pun semakin tidak banyak waktu untuk mengolah lahan memproduksi bahan pangan. Beberapa yang lebih muda mengaku bahkan sudah tidak tahu lagi bagaimana melakukannya. Tetapi, mereka tetap berpengharapan besar bahwa hasil penjualan tenun-ikat mereka akan mendatangkan uang tunai yang lebih dari cukup untuk membeli bahan pangan yang tidak mereka produksi sendiri lagi.

Meskipun, harapan itu sebenarnya semakin kabur pula. Mereka mengaku dapat menyelesaikan satu lembar kain dalam jangka waktu beberapa minggu atau bahkan bulan. Harganya memang menggiurkan: antara Rp400 ribu sampai Rp1 juta per lembar, bahkan jenis dan ukuran tertentu bisa dijual lebih dari itu. Tetapi, itu pun membutuhkan beberapa minggu atau bahkan bulan lagi untuk terjual. Beberapa tahun sebelumnya, ada pedagang barang kerajinan dari Bali yang menampung produksi mereka. Sekarang, mereka semakin jarang datang atau memesannya. Sementara itu, saingan semakin banyak pula: hampir semua desa di Sumba telah memproduksi tenun-ikat untuk dijual ke pasar yang sama. Harga pun kian lama kian menurun, sehingga



Pajangan tenun ikat produksi warga setempat di tapak singgah wisatawan sebelum mendaki Gunung Kelimutu di Pulau Flores, tetangga Sumba di sebelah utara (ATAS). Sekelompok ibu-ibu di Kawasan Cagar Budaya Takpala, Pulau Alor, menjajakan tenun ikat dan barang kerajinan lainnya kepada seorang pengunjung ke desa mereka (BAWAH). Pemandangan 'pasar kaget' ini sudah jamak di pedesaan pulau-pulau kering Nusa Tenggara Timur, termasuk Sumba. Kian banyak perempuan beralih ke kerja kerajinan tangan, meninggalkan kerja lahan tani pangan. Padahal, pengunjung pembeli yang datang ke sana dapat dihitung jari setiap bulannya, bahkan cenderung kian sepi, sehingga mereka mulai pula menyerbu ke kota-kota terdekat sebagai 'penjaja serabutan'.



banyak yang kemudian mulai memproduksi tenun-ikat dengan bahan sintetis yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijual. Maka, jadilah tenun-ikat asli tradisional Sumba sebagai barang eksotik yang lebih mahal dengan pasar yang semakin terbatas.

Bukan hanya kaum perempuan yang meninggalkan sektor pertanian pangan mereka, tetapi juga semakin banyak kaum lelakinya. Di hotel-hotel, restoran-restoran, bahkan di jalan-jalan raya dan hampir semua tempat umum di Kota Waingapu, setiap hari puluhan lelaki menjajakan tenun-ikat mereka, terutama kepada para pendatang dan wisatawan, dengan wajah letih dan memelas, tetapi kadang-kadang dengan cara mendesak-desak yang sering menjengkelkan. Di hotel tempat saya menginap, saya menghitung sekitar 20 penjaja tenun-ikat itu berdiri setiap dan sepanjang hari di depan hotel dan, selama beberapa hari itu, saya tidak pernah melihat ada seorang tamu hotel pun yang membelinya...

Secara umum, kelangkaan bahan pangan yang sangat gawat memang belum pernah terjadi di Lambanapu, dibanding sebagian besar desa lain di Sumba, terutama Sumba Timur yang umumnya tandus dan sejak lama —bersama banyak daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat— dikenal sebagai salah satu ‘daerah rawan pangan nasional’. Tetapi gambaran singkat di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi suatu proses perubahan sistem (ekonomi, politik, dan budaya) pangan lokal yang cenderung mengarah pada nasib yang sama di masa depan. Tanda-tandanya sudah sangat jelas: semakin banyak penduduk yang meninggalkan dan tidak terampil lagi dalam produksi bahan pangan lokal mereka, semakin banyak lahan pertanian pangan lokal berubah menjadi sawah monokultur untuk memproduksi beras yang justru lebih banyak dijual katimbang dikonsumsi sendiri, semakin sedikit keberagaman jenis bahan pangan yang mereka produksi sendiri, sehingga semakin lama mereka semakin tergantung pula pada sumber dan jenis bahan pangan yang didatangkan dari luar!

Beberapa data statistik resmi memperkuat prakiraan itu. Laporan mutakhir Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*, HDI) dari Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Program*, UNDP), menunjukkan bahwa proporsi belanja rumah tangga penduduk untuk pangan dan energi di Kabupaten Sumba Timur —di mana Lambanapu terletak— antara tahun 1999-2002, adalah 74,5%. Atau, hampir dua pertiga dari total belanja rumah tangga sebesar rata-rata hanya Rp1.660.600 per bulan (UNDP-BAPPENAS-BPS, 2004). Dalam teori ekonomi makro, belanja rumah tangga yang besar pada kebutuhan pokok sehari-hari itu juga sekaligus memperlihatkan terjadinya ‘arus kelebihan keluar’ (*surplus outflow*) dari desa miskin ini ke pusat-pusat produksi industri pangan di daerah perkotaan. Dengan kata lain, semakin besar belanja rumah tangga untuk pangan dan energi berarti semakin miskin (lebih tepatnya: semakin mengalami proses pemiskinan), karena semakin tidak memiliki kemampuan untuk menabung, atau menyisihkan uang untuk keperluan peningkatan kesejahteraan lainnya, seperti untuk pendidikan dan kesehatan. ‘Survei’ singkat saya selama beberapa hari di Lambanapu memperlihatkan data yang tidak banyak berbeda (lebih rinci, lihat tabel).

BELANJA RUMAH TANGGA DI DESA LAMBANAPU
(rupiah per bulan, harga setempat)
simulasi pada 10 rumah tangga beragam tingkat pendapatan,
rerata 5 orang anggota keluarga

URAIAN BELANJA		SATUAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	(%)
A. BELANJA PANGAN						
1	Beras (kelas-2 dan 3)	kilogram	30	5.000	150.000	
2	Minyak goreng	kemasan	5	12.000	60.000	
3	Bumbu masak (garam, vetsin, dll.)	rerata/bulan	-	75.000	75.000	
4	Lau-pauk (ikan, daging, dll.)	rerata/bulan	-	150.000	150.000	
5	Gula pasir	kilogram	4	10.000	40.000	
6	Kopi + teh	bungkus	10	10.000	100.000	
7	Susu (termasuk susu bayi)	kaleng	3	22.000	66.000	
8	Sirih + pinang, rokok	bungkus	30	14.000	420.000	
JUMLAH BELANJA PANGAN					1.061.000	56,4
B. BELANJA ENERGI						
9	Minyak tanah	liter	30	3.500	105.000	
10	BBM sepeda motor	liter	30	6.000	180.000	
11	Rekening listrik	rerata/bulan	-	70.000	70.000	
JUMLAH BELANJA ENERGI					355.000	18,9
C. BELANJA PENDIDIKAN & KESEHATAN KELUARGA						
12	SPP (anak SMA ke atas)	rerata/bulan	-	30.000	30.000	
13	Peralatan sekolah (buku, dll)	rerata/bulan	-	15.000	15.000	
14	Ongkos & jajan anak	hari	26	5.000	130.000	
15	Ongkos berobat ke PUSKEMAS	rerata/bulan	-	100.000	100.000	
JUMLAH BELANJA PENDIDIKAN & KESEHATAN					275.000	14,6
D. BELANJA LAINNYA						
16	Pulsa telepon seluler	rerata/bulan	-	40.000	40.000	
17	Belanja sosial (arisan, dll)	rerata/bulan	-	50.000	50.000	
18	Belanja hiburan (piknik, dll)	rerata/bulan	-	100.000	100.000	
JUMLAH BELANJA LAINNYA					190.000	10,1
JUMLAH SELURUH BELANJA PER BULAN					1.881.000	100,0

Hal itu, misalnya, terlihat pada jumlah bayi kekurangan gizi di sana yang tercatat sebesar 31,9% pada 1999 dan bertambah menjadi 33,6% pada 2002, sementara angka kematian bayi adalah 73 per 1000 kelahiran pada 2002, dan angka kesakitan (morbiditas) adalah 48,9% pada tahun yang sama. Semua angka-angka tersebut —dan beberapa angka lainnya yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan— merupakan salah satu yang tertinggi di seluruh Indonesia, sehingga Kabupaten Sumba Timur dalam indeks kemiskinan nasional tahun 1999, tercatat pada peringkat ke-273 dari 294 kabupaten dan kota seluruh Indonesia



(artinya, urutan ke-19 termiskin), dan pada peringkat ke-329 dari 366 kabupaten dan kota pada tahun 2002 (atau, urutan ke-37 termiskin) (UNDP-BAPPENAS-BPS, 2002 dan 2004). Singkatnya, masih tetap berada di ‘papan bawah’ sebagai daerah termiskin di negeri ini.

Oktober 2004.

Untuk kedua kalinya saya berkunjung ke Lambanapu. Kami bersepeda motor mendaki bukit-bukit tandus di tepi timur Sungai Raya Kambaniru. Panorama sungguh kontras. Lembah hijau sepanjang sungai dan lembah Lambanapu tertinggal di belakang, remang-remang dalam kepulan debu hasil gesekan roda-roda sepeda motor kami, sementara di depan mulai membentang perbukitan dan lembah gersang, coklat kemerahan sejauh mata memandang: bentang alam Sumba yang sesungguhnya!

Lepas siang, kami beristirahat di bawah satu pohon meranggas sambil menikmati bekal jagung rebus dan dendeng kering. Di kejauhan tampak debu mengepul mengikuti jejak sekelompok anak-anak berlatih menunggang kuda Sumba (*Equus caballus*) yang terkenal itu. Saya teringat sajak terkenal dari Taufiq Ismail yang pernah ditulisnya untuk ‘Sang Guru’ dan ‘Presiden Penyair’ asal Sumba, Umbu Landu Paranggi. Saya melafazkannya dalam hati:

*Rinduku pada Sumba
adalah rindu seribu ekor kuda
yang turun menggemuruh dari bukit-bukit jauh...*

Lalu, dengan suara bergumam yang hanya terdengar oleh pepohonan kering dan rerumput ilalang sekitar, kutambahkan lirik baru rekaan saya sendiri:

*Rinduku pada Sumba
adalah rindu seribu batang jagung
yang tumbuh sepanjang tahun... ❖*

Rumah Klidon, 04/11/2004.



SISTEM & STRUKTUR SOSIAL: PENGERTIAN DASAR



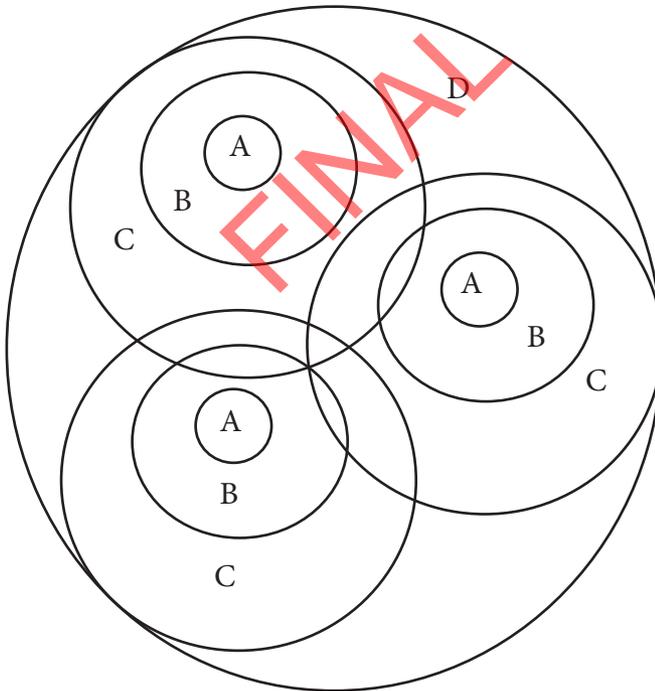
Kita sering mendengar, bahkan mungkin juga sudah sering menggunakan, dua istilah ini: **'sistem'** dan **'struktur'**. Tapi, apakah sebenarnya **'sistem'** dan **'struktur'** itu, khususnya **'sistem sosial'** dan **'struktur sosial'**?

Secara garis besar, **'sistem'** diartikan sebagai **'suatu keseluruhan'** yang terdiri atas berbagai unsur (komponen, faktor, atau aspek) yang **'saling berhubungan satu sama lain'**. Jika ada satu saja dari unsur yang membentuknya tersebut tidak bekerja atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka keseluruhan yang lainnya akan goyah, timpang, atau lama-kelamaan akan tidak bekerja juga sebagaimana mestinya. Dalam contoh kasus satu desa di Sumba (lihat Lembar Kasus #5), masalah rawan pangan di sana terbentuk oleh berbagai unsur yang saling berkaitan satu sama lain, mulai dari kebijakan dan program pemerintah (sebagai salah satu sebab) sampai ke perubahan perilaku, sikap, dan pandangan warga setempat tentang pangan (sebagai salah satu akibatnya). Keseluruhan sebab dan akibat yang saling berkaitan itulah yang disebut sebagai **'sistem'** (dalam contoh kasus rawan pangan di Lambanapu, dapat disebut sebagai **'sistem pangan lokal'** di sana).

Berbagai unsur (sebab maupun akibat) yang membentuk sistem pangan lokal di Sumba itu, ternyata tidak terbatas hanya di Sumba saja, tetapi juga di luar Sumba (misalnya, kebijakan program **'Revolusi Hijau'** dan bantuan RASKIN yang diputuskan di Jakarta, masuknya mie instan yang pabriknya berada di Pulau Jawa, atau permintaan pasar dalam dan luar negeri akan hasil tanaman perdagangan dan tenun ikat Sumba). Sehingga, sistem pangan lokal di Sumba itu pun menjadi bagian dari satu sistem yang lebih besar, yakni sistem pangan nasional dan sistem pangan internasional.



Selanjutnya, sistem pangan nasional dan internasional tersebut juga dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai unsur (sebab dan akibat) yang saling berhubungan satu sama lain, misalnya: pilihan prioritas pengadaan bahan pangan oleh negara, atau perdagangan pangan antarnegara, kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian internasional tentang bagaimana perdagangan dan pertukaran bahan pangan dilaksanakan, kepentingan para pemilik modal dan pembuat alat-alat produksi atau bahan-bahan untuk produksi bahan pangan, dan sebagainya, dan seterusnya. Dengan kata lain, sistem pangan nasional dan internasional itu adalah bagian dari sistem-sistem lain (misalnya, sistem perdagangan, sistem keuangan, sistem politik, sistem hukum, sistem pengetahuan) yang juga mengandung berbagai unsur (sebab dan akibat) yang saling berhubungan satu sama lain dan sama ruwetnya dengan sistem pangan itu sendiri, mulai dari tingkat internasional dan nasional sampai ke tingkat lokal. Keseluruhan sistem pada semua tingkatan itulah yang dapat disebut sebagai 'sistem dunia' (*world system* atau *global system*). Jika digambarkan, akan tampak sebagai berikut:



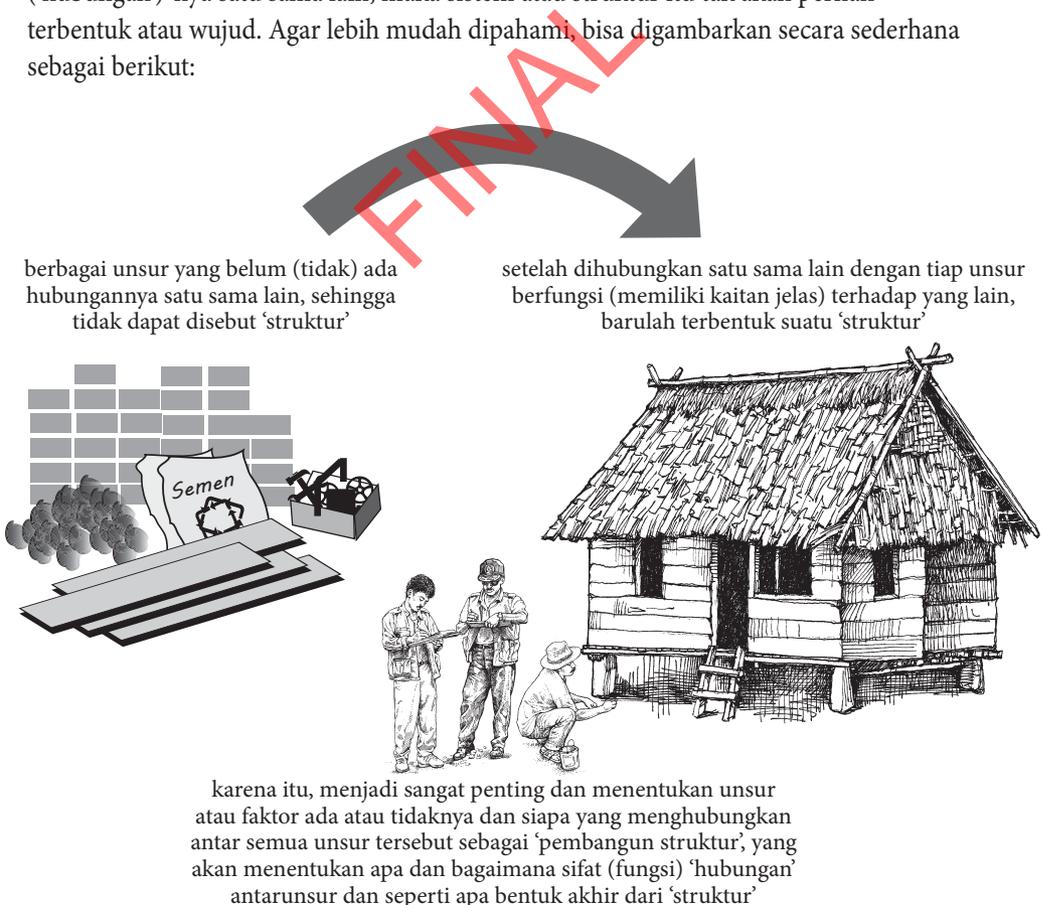
- A = sistem-sistem lokal
- B = sistem-sistem nasional
- C = sistem-sistem internasional
- D = sistem dunia (global)



Singkat dan sederhananya, sistem pangan lokal seperti yang terdapat di Desa Lambanapu di Sumba itu, tak bisa lagi dilihat berdiri sendiri atau terpisah sama sekali dari sistem-sistem lain di luarnya atau dari sistem yang lebih besar.

Seperti terlihat pada gambar tadi, terdapat susunan yang bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis yang mempertautkan keseluruhan sistem tersebut. Ada sistem yang lebih besar atau berada lebih di atas dibanding sistem lainnya. Ada yang berada pada tingkatan atau aras yang sama. Bahkan, di dalam setiap sistem, juga terdapat tingkatan-tingkatan dan lapisan-lapisannya sendiri. Inilah yang disebut sebagai 'struktur' dari sistem. Dengan kata lain, 'struktur' sebenarnya adalah 'salah satu unsur lainnya lagi dari suatu sistem', terbentuk dan sekaligus juga ikut membentuk sistem itu sendiri, baik sebagai sebab maupun sebagai akibat.

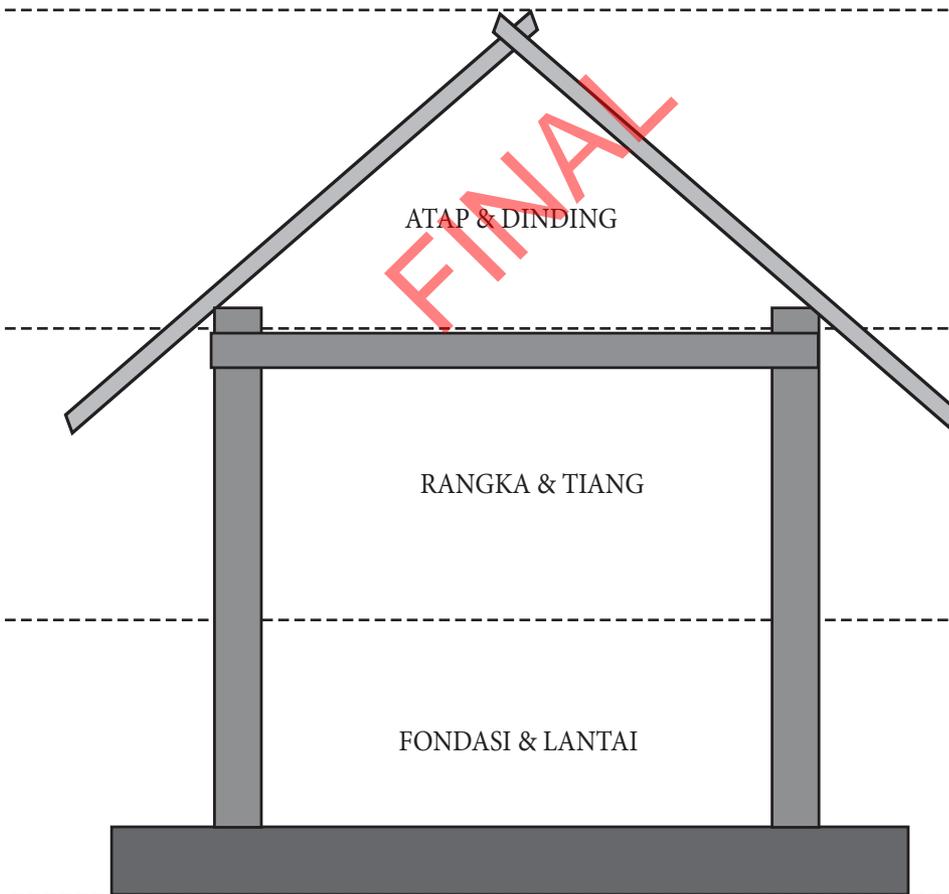
Sama seperti sistem itu sendiri, satu struktur juga terbentuk dari berbagai unsur sebab dan akibat yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan antarunsur itulah yang disebut sebagai 'hubungan' (*relation*). Meskipun unsur-unsur yang membentuk suatu sistem atau struktur semuanya lengkap, tetapi jika tidak ada saling keterkaitan ('hubungan')-nya satu sama lain, maka sistem atau struktur itu tak akan pernah terbentuk atau wujud. Agar lebih mudah dipahami, bisa digambarkan secara sederhana sebagai berikut:





Demikian pula halnya dengan 'sistem' dan 'struktur sosial'. Suatu sistem sosial terbentuk oleh berbagai unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Secara umum, berbagai unsur (biasa juga disebut 'aspek' atau 'bidang') tersebut biasanya dikelompokkan dalam tiga kategori besar:

- **Sumber-sumber penghidupan dan cara-cara suatu kaum atau masyarakat mengelola sumber-sumber tersebut** (proses-proses produksi, distribusi, dan konsumsi) untuk memenuhi kebutuhan mereka (dikenal sebagai aspek atau bidang '**ekonomi**').
- **Pranata (kebijakan, hukum, kelembagaan, organisasi) yang mengatur bentuk-bentuk, sifat, pola hubungan antar sesama warga suatu kaum atau masyarakat dan dengan warga kaum atau kelompok lain**, terutama dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber-sumber penghidupan bersama mereka (dikenal sebagai aspek atau bidang '**politik**').

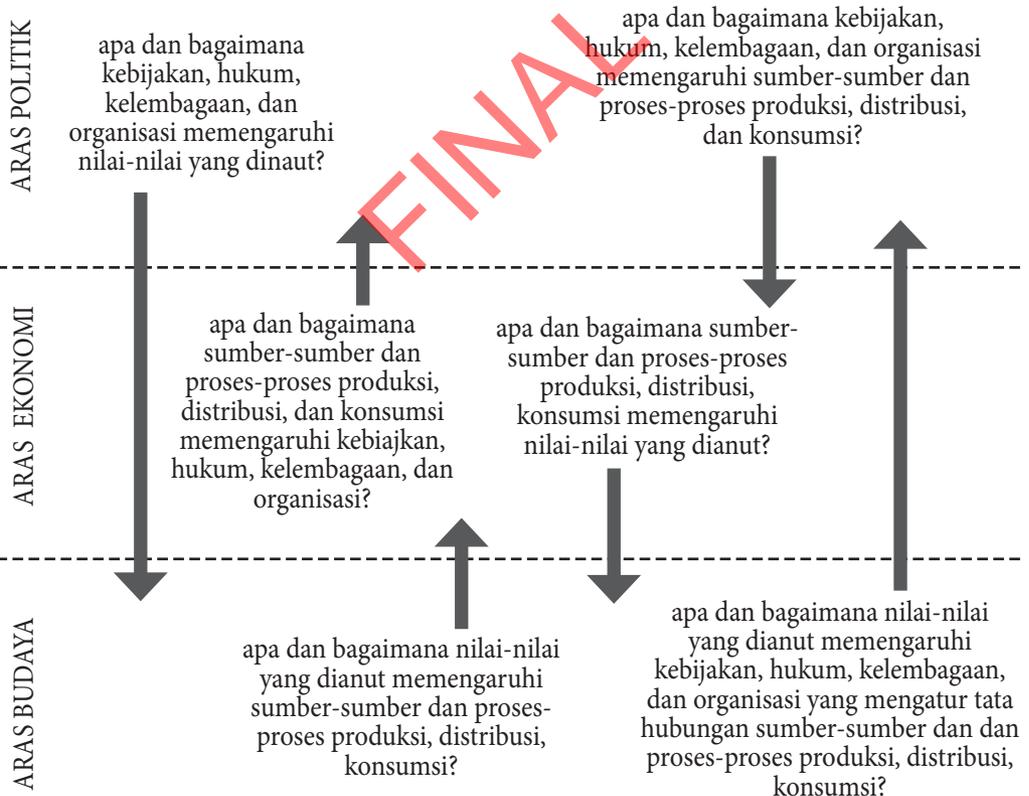




■ Nilai-nilai (ajaran, keyakinan, kesadaran, pengetahuan) yang mendasari perilaku, kebiasaan, dan sikap warga suatu kaum atau masyarakat, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup maupun dalam hal berhubungan dengan sesama warga sendiri dan dengan warga kaum atau kelompok masyarakat lainnya (dikenal sebagai aspek atau bidang 'budaya').

Maka, apa yang disebut sebagai analisis sosial, pada dasarnya, adalah mengurai-rangkaikan dan menelaah saling keterkaitan antara tiga unsur (aspek, bidang) dasar yang membentuk bangunan sistem dan struktur sosial tersebut.

Lagi-lagi, agar lebih mudah dipahami, dapat digambarkan dengan amsal bangunan (struktur) rumah, sebagai berikut:





Sebagaimana terlihat pada gambar sebelumnya, unsur penting dan sangat menentukan adalah ‘siapa yang merangkai hubungan-hubungan antarunsur’ yang membentuk suatu struktur. Sang ‘perangkai’ atau ‘pembangun’ struktur itu selalu memiliki cara pandang (perspektif), cita-rasa, dan maksud-maksud atau tujuan tertentu (kepentingan) tentang bagaimana mestinya wujud akhir dari struktur yang dibangunnya itu nanti bekerja. Mengurai-rangkaikan atau menelaah kepentingan-kepentingan mereka yang memiliki kuasa menentukan bentuk dan kegunaan struktur itulah yang menjadi salah satu atau bahkan pusat perhatian (fokus) dari analisis sosial.❖

FINAL

Disarikan dan dikembangkan dari berbagai sumber buku teks, antara lain:

Bertalanffy, Ludwig von (1969), *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller Inc., Penguin University Book Series. revised edition ■ Stroh, David Peter (2015), *Systems Thinking for Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results*. Vermont: Chelsea Green Publishing ■ Sweeney, Linda Booth & Dennis Meadows (2010), *The Systems Thinking Playbook: Exercises to Stretch and Build Learning and Systems Thinking Capabilities*. Vermont: Chelsea Green Publishing.

ACARA-9

ANALISIS SOSIAL (2): HUBUNGAN KUASA & KEPENTINGAN

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian dan mampu melakukan analisis ‘hubungan kuasa’ dan ‘kepentingan’ yang terdapat dalam satu tatanan masyarakat atau dalam satu masalah sosial tertentu.

POKOK BAHASAN

- Pengertian ‘hubungan kuasa’ dan ‘kepentingan’ dalam analisis sosial.

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/session)

METODE & MEDIA

- Telaah kasus
- Diskusi kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Lembar kasus & bahan bacaan
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), kertas perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Penjelasan singkat tentang tujuan dan pokok bahasan acara ini, yakni melanjutkan pokok bahasan dari acara sebelumnya, tetapi kali ini pada aspek yang menjadi pusat perhatian analisis sosial.
2. Langsung bagi semua peserta secara acak saja dalam dua kelompok sama besar (usahakan kelompok baru lagi yang berbeda dari kelompok pada acara-acara sebelumnya).
3. Bagikan Lembar Kasus #6 (*Surga yang Hilang*) kepada semua peserta.
4. Minta segera setiap kelompok membahas kasus masing-masing dan menjawab pertanyaan:

- Siapa saja pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus tersebut? Siapa yang untung dan siapa yang rugi?
- Apa dan bagaimana dan sifat hubungan atau saling keterkaitan antar setiap pihak tersebut? Siapa menerima dan memberi apa terhadap pihak yang mana? Mengapa demikian (apa maksud dan tujuan atau kepentingannya)?

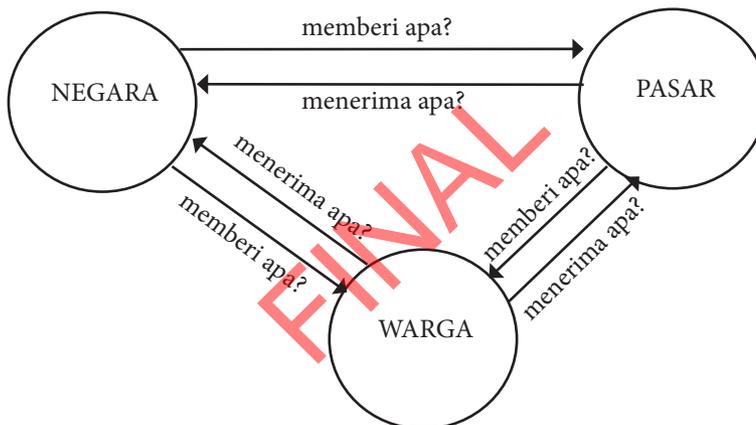
 Catatan

■ Tegaskan bahwa untuk jawaban pertanyaan pertama tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus masing-masing, setiap kelompok meng gambarkannya dalam bentuk bagan

alir dengan menempatkan pihak yang paling dirugikan, ditempatkan di bagian tengah, seperti berikut (contoh):



5. Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran. Cermati apakah setiap kelompok memang mampu melihat adanya kepentingan dan hubungan-hubungan kuasa (*power relations*) di antara berbagai pihak dalam kasus masing-masing, terutama pada jawaban mereka terhadap pertanyaan kedua (siapa memberi atau menerima apa?).
6. Ajak peserta merangkum inti seluruh pembahasan ini:
 - Hubungan kuasa (*power relations*) sebagai fokus analisis sosial.
 - Bentuk-bentuk dan sifat dari hubungan-hubungan kuasa tersebut dalam masyarakat.
7. Jika waktu masih memungkinkan, ajak peserta untuk membahas hubungan-hubungan kuasa dalam skema negara-warga-pasar, sebagai berikut:



8. Tutup acara dengan penjelasan bahwa seluruh acara yang sudah dijalani adalah merupakan bagian paling mendasar dari kerja-kerja pengorganisasian rakyat (cara pandang masalah sosial) dan kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pengorganisir rakyat (analisis sosial). Acara-acara berikutnya akan mulai membahas tema pokok proses pendidikan ini, yakni pengorganisasian rakyat itu sendiri. ❖



catatan perjalanan #23



Surga Yang Hilang...

sketsa perubahan ekologis dan sosial di bandiamo

FINAL

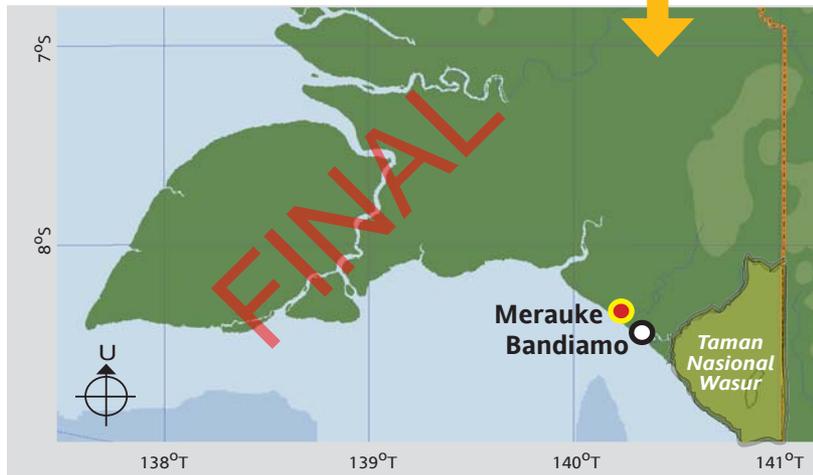
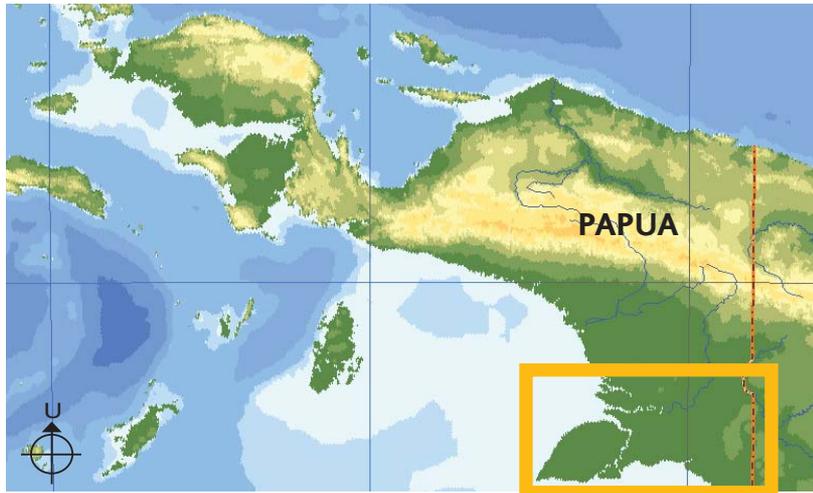


naskah, foto & peta:
ROEM TOPATIMASANG

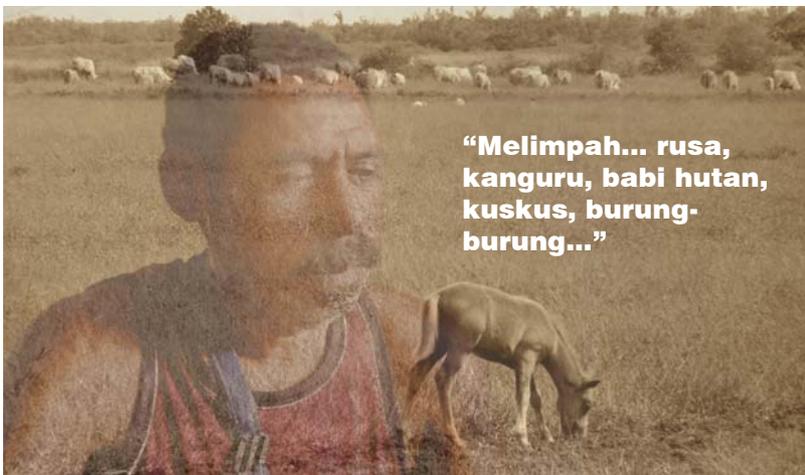


Lembar kasus #6





“Dulu, waktu saya masih kecil sampai remaja, tahun 1980-an...”





“Apalagi yang namanya ikan, terutama ikan kakap rawa, baramundi...”



Baramundi (*Lates calcalifer*)



“Itu, dulu!”



“Sekarang?”





“Dorang larang kitorang cari makan dalam kawasan Taman itu.”



“Tapi kalau di luar Taman su susah cari makan, lama-lama kitorang serbu juga masuk ke sana.”



“Jang bilang... bukan cuma satu dua kali warga pernah bentrok deng petugas Taman.”







“Malah banyak yang tenggelam waktu air pasang besar atau hujan lebat.”



“Sekarang, untuk minum dan masak, *kitorang* terpaksa beli air.”



“Dua ribu rupiah satu jerigen... Tiap hari, *kitorang* rata-rata beli 20 jerigen.”



“Padahal, dulu, orang-orang dari kampung-kampung sebelah, ambil airnya di sini.”



“Sekarang, tambah parah lagi. Ada perusahaan datang gali pasir sampai pinggir-pinggir jalan hampir runtuh.”



“Padahal, pemerintah katanya su larang, tapi dorang gali teruss....”

“Kitorang rakyat kecil mau bilang apa lai...? Saya sampai su pikir mau pindah ke tempat lain sa.”



Lembar kasus #6



PerDikAn

Ini adalah versi yang dipersingkat dari esei visual berjudul sama, diterbitkan oleh Sekretariat Perdamaian & Keadilan (SKP) Keuskupan Agung Merauke & SKP Keuskupan Agats, Papua. Penyuntingan video dikerjakan oleh Robertus Sakimin dan Tri Kanem. Versi audio-visual aslinya dapat diperoleh di PerDikAn, INSIST, Yogyakarta.

FINAL



FINAL

ATAP

FINAL

CITRA DIRI PENGORGANISASIR RAKYAT

Salah satu unsur pokok dan terpenting dalam proses pengorganisasian rakyat adalah ‘sang pengorganisir’ (*the organiser*) itu sendiri. Tetapi, siapakah mereka dan apa saja tolok-ukur atau persyaratan-persyaratan pokok yang harus mereka miliki?

Seperti juga halnya pengorganisasian rakyat itu sendiri, ada banyak rumusan teoretis tentang siapa, apa, dan bagaimana mestinya seorang pengorganisir rakyat. Dari semua rumusan tersebut, juga berdasarkan pengalaman selama ini, maka secara umum dapat dirangkum beberapa sifat dasar seorang pengorganisir, antara lain yang terpenting, adalah pandangan dasar, sikap dan prilakunya sebagai seorang yang terbuka, bersedia berdialog dan mendengarkan orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, selalu membuat keputusan melalui proses-proses musyawarah dan kesepakatan, dan lebih berfungsi sebagai seorang ‘fasilitator’ (yang membantu mempermudah orang lain melakukan sesuatu secara sadar) ketimbang sebagai seorang ‘penguasa’ atau bahkan ‘pemimpin’ dalam pengertiannya yang terlalu jamak dan lazim selama ini.

Kualitas kepribadian semacam itu umum dijuluki sebagai seorang yang ‘demokratis dan partisipatoris’. Secara teoretis, kualitas kepribadian semacam itu dipertentangkan dengan mereka yang ‘otoriter’ pada satu titik ekstrem dan dengan mereka yang ‘terlalu membiarkan’ (*laissez faire*) pada titik ekstrem lainnya. Bagian acara ini dirancang untuk mengajak peserta menganalisis ketiga kualitas kepribadian tersebut: mana yang lebih tepat atau nisbi sesuai dengan citra diri seorang pengorganisir rakyat?

Pengalaman menunjukkan bahwa diskusi di antara para peserta pendidikan tentang hal ini sering memancing perdebatan panjang. Karena itu, bersiap-siaplah menyisihkan cadangan waktu yang cukup, jika perlu harus menambah sediaan waktu yang dirancang di sini. Perdebatan semacam itu perlu, sepanjang terkendali dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan lagi, agar peserta bisa mencapai suatu pemahaman bersama yang utuh, tidak terpaku pada kaidah-kaidah teoretis saja, jika perlu biarkan mereka menemukan istilah atau rumusan teoretisnya sendiri.

ACARA-10

SANG PENGORGANISIR: SIAPA & DARI MANA?

FINAL

TUJUAN

- Peserta mengenali beragam asal muasal, latar belakang, dan proses-proses yang memungkinkan lahirnya seorang pengorganisir rakyat.
- Peserta mampu merumuskan berbagai kemungkinan sumber-sumber dan cara-cara pengkaderan (*recruitment*) seorang pengorganisir rakyat dalam beragam konteks keadaan.

POKOK BAHASAN

- Asal muasal, latar belakang, dan proses-proses menjadi pengorganisir rakyat.
- Sumber-sumber dan cara-cara pengkaderan (rekrutmen) pengorganisir rakyat.

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/*session*)

METODE & MEDIA

- Bermain peran
- Diskusi kelompok
- Telaah Kasus

BAHAN & PERALATAN

- Bahan bacaan, lembar kasus, film/video
- Benda sembarang yang terdapat di sekitar sebagai alat permainan
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), kertas perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Jelaskan secara singkat tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Minta peserta membagi diri kembali secara acak saja ke dalam 3 (tiga) kelompok sama besar. Langsung bagikan lembar-lembar kasus kepada setiap kelompok:
 - Lembar Kasus #7 (*Seorang Nelayan di Pulau Kecil*) kepada Kelompok-1
 - Lembar Kasus #8 (*Seorang Ibu di Pusaran Kerusuhan*) kepada Kelompok-2
 - Lembar Kasus #9 (*Seorang Guru di Kampung Adat*) kepada Kelompok-3
3. Minta setiap kelompok segera membaca lembar kasusnya masing-masing, kemudian membahas bersama:
 - **Siapa sosok utama dalam contoh kasus tersebut?** (minta setiap kelompok menyusun profil singkatnya: nama, tempat tinggal, pekerjaan, latar pendidikan)
 - **Apa sebab-sebab atau faktor-faktor utama yang mendorong atau membuatnya menjadi seorang pengorganisir?** (minta tiap kelompok mendaftar sebanyak mungkin yang mereka bisa identifikasi dalam kasus tersebut)
 - **Dari sekian banyak sebab atau faktor tersebut, mana yang paling menentukan keputusan orang itu untuk menjadi pengorganisir? Mengapa faktor itu yang paling menentukan bagi dia?**
 - **Apa persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan terpenting dan paling menonjol di antara tiga orang pengorganisir rakyat tersebut?**
4. Presentasi tiap kelompok secara bergiliran. Selama presentasi, cermati jawaban setiap kelompok. Minta mereka menjelaskan lebih rinci jika jawabannya terlalu umum. Lakukan klarifikasi pada jawaban mereka yang tidak terlalu jelas.
5. Setelah semua kelompok selesai presentasi, ajak seluruh peserta melakukan rangkuman berdasarkan kategorisasi tertentu, misalnya, menurut latar belakang pribadi masing-masing tiga pengorganisir dalam contoh kasus, faktor yang paling mempengaruhi atau menentukan keputusan mereka menjadi pengorganisir, peran atau fungsi utama yang mereka jalankan sebagai pengorganisir, dan seterusnya. Agar lebih mudah dan lancar, Anda bisa menyiapkan satu tabel pada kertas lebar, sebagai berikut (contoh):

	PERSAMAAN	PERBEDAAN
LATAR BELAKANG PRIBADI (Usia, Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan, Status Sosial, Asal)	<ul style="list-style-type: none"> * Si Nelayan dan Pak Guru usia relatif sama & laki-laki * Si Nelayan dan Pak Guru juga sama latar pendidikannya (hanya SMP) * Semua sama, orang asli (warga setempat) * apa lagi..... (jika ada)? 	<ul style="list-style-type: none"> * Kecuali Si Ibu, lebih tua dan perempuan * Pekerjaan beda semua * Kecuali Si Ibu, pernah kuliah * apa lagi..... (jika ada)?
FAKTOR PENDORONG UTAMA (Penyebab menjadi pengorganisir)	<ul style="list-style-type: none"> * apa (jika ada)? 	<ul style="list-style-type: none"> * Semua beda: Si Nelayan karena urusan hidup-mati; Pak Guru karena mulai paham tentang masalah warga; Si Ibu karena prihatin melihat keadaan korban kerusuhan * apa lagi..... (jika ada)?
PROSES AWAL (Kejadian atau keadaan yang menggerakkan)	<ul style="list-style-type: none"> *? *? 	<ul style="list-style-type: none"> *? *?
PERAN POKOK (Fungsi utama yang dilakukan sebagai pengorganisir)	<ul style="list-style-type: none"> *? *? 	<ul style="list-style-type: none"> *? *?
CARA KERJA (Strategi/taktik, metode/media yang digunakan, ketersediaan waktu, kedudukan dalam lembaga)	<ul style="list-style-type: none"> *? *? 	<ul style="list-style-type: none"> *? *?
LAINNYA (Hal-hal unik atau menarik dan penting diperhatikan)	<ul style="list-style-type: none"> *? *? 	<ul style="list-style-type: none"> *? *?
<p>dan seterusnya.....? (silakan kembangkan lebih lanjut)</p>		

5. Berdasarkan rangkuman tersebut, ajak peserta menganalisis:

- **Bisakah kita sekarang merumuskan satu panduan umum atau daftar tolok ukur (kriteria) dasar tentang hal-hal apa saja yang paling penting diperhatikan jika ingin menemukan (mengader) calon pengorganisir rakyat? Apa saja alasan-alasannya?**
- **Bagaimana dengan organisasi/lembaga mereka selama ini, apakah para pengorganisir mereka direkrut dengan kriteria seperti itu? Apakah para pengorganisir di organisasi/lembaga tersebut lahir dengan cara yang sama seperti tiga contoh kasus atau justru beda sama sekali? Mengapa demikian?**
- **Bagaimana dengan diri mereka (peserta) sendiri? Apakah melalui proses yang sama atau tidak? Mengapa?**



- Khusus untuk pertanyaan yang terakhir, jika memang masih ada waktu, bisa Anda elaborasi lagi dengan meminta kesediaan dua atau tiga peserta menceritakan pengalaman pribadinya saat mulai menjadi pengorganisir dan proses perkembangannya kemudian seperti saat ini.
- Bandingkan lagi dengan tiga contoh kasus dan rangkumannya yang ada pada kertas lebar tadi. Kaitkan dengan hasil-hasil pembahasan pada acara-acara

sebelumnya. Jika masih ada waktu dan peserta menginginkan, anda dapat menayangkan dua film klasik Akira Kurosawa: “Waga Seishun Ni Kuinashi” (Tak Ada Penyesalan Masa Muda Kami, waktu tayang 110 menit); atau “Yoidori Tenshi” (Malaikat Pemabuk, waktu tayang 102 menit). Bandingkan asal muasal dan proses masing-masing tokoh dalam film itu memilih menjadi seorang pengorganisir rakyat. Dua film ini dapat di-copy dari perpustakaan digital PerDikAn, INSIST, Yogyakarta.

6. Tutup acara ini dengan membagikan Bahan Bacaan #9 (*Sang Pengorganisir*) kepada semua peserta, sebagai rujukan mereka. ❖



- Khusus untuk Bahan Bacaan #9 (*Sang Pengorganisir*) ini, cukup panjang dan agak teoretis. Karena itu, jika peserta pendidikan umumnya adalah orang kampung (pengorganisir lokal), bahan ini tidak terlalu perlu dibagikan, cukup menjadi bahan bacaan fasilitator untuk menjelaskan pokok-pokoknya saja kepada peserta dengan bahasa yang

lebih sederhana dan mudah dipahami. Bahan ini sebaiknya hanya dibagikan jika para peserta adalah para pegiat ORNOP dengan latar pendidikan rata-rata SLTA ke atas atau para pegiat mahasiswa. dalam bentuk penyajian yang lain (kasus tertulis, misalnya).



SEORANG NELAYAN DI PULAU KECIL

Pada 1980-an akhir, suatu prakarsa pengorganisasian rakyat mulai dilaksanakan di Kepulauan Kei. Satu pusat pelatihan dan pendidikan masyarakat didirikan di Desa Evu, sekitar 24 kilometer di luar kota Tual, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Selain kegiatan-kegiatan praktis menjawab persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, tahap paling awal dan mendasar dari prakarsa tersebut adalah rangkaian pelatihan dan pendidikan bagi para pengorganisir lokal. Selain rangkaian pertemuan kelompok-kelompok warga secara berkala tetap (reguler) setiap dua bulan, di tempat itu juga dilaksanakan program pendidikan khusus untuk beberapa orang terpilih dari beberapa desa yang disiapkan sebagai pengorganisir lokal di desa masing-masing. Program pendidikan khusus ini diselenggarakan dua kali setahun, diikuti sekitar 20-25 orang peserta pada setiap program yang berlangsung rerata 1-2 minggu. Tetapi, bukan hanya peserta 'resmi' yang selalu hadir pada setiap kali acara pendidikan berlangsung. Beberapa warga setempat juga sering hadir, meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaian acara. Salah seorang dari mereka adalah Mochsen Renhart—sehari-hari dipanggil 'Ocen'—seorang nelayan muda dari desa tetangga Desa Evu. Pada awalnya, nelayan muda itu hanyalah pemasok ikan untuk keperluan konsumsi para peserta dan panitia pelaksana pendidikan.

Jadi, setiap pagi, setelah melaut semalam suntuk, Ocen datang ke pusat pelatihan dan pendidikan di Evu, membawa beberapa ikat ikan-ikan besar dan segar. Biasanya, setelah panitia membayar harganya, Ocen tidak langsung pulang lagi ke kampungnya di Dusun Maduwat, sekitar 7 kilometer dari Evu menyeberangi muara sungai lebar Hoat Varang atau Teluk Surbay. Karena dia baru akan berangkat lagi melaut selepas magrib, maka dia menghabiskan waktunya sampai sore hari di Evu, bukan sekadar untuk beristirahat, tetapi malah tekun mengikuti proses-proses pendidikan yang sedang berlangsung. Namun, dia tidak masuk ke dalam ruang kelas, bergabung dengan peserta 'resmi'. Dia hanya duduk di luar sambil melihat dan mendengarkan apa yang berlangsung dalam kelas yang berdinding setengah terbuka itu. Bahkan dia sama sekali tak pernah bicara, hanya melihat dan mendengar. Kalau peserta melakukan diskusi kelompok, dia bergabung dengan salah satu kelompok, tetapi duduk di luar lingkaran kelompok itu, juga hanya melihat dan mendengar, tanpa bicara sama sekali.

Demikianlah berlangsung selama hampir tiga tahun. Jadi, selain menjadi pemasok tetap ikan, dia juga sebenarnya menjadi 'peserta tetap' setiap acara pertemuan atau pelatihan dan pendidikan di sana. Sampai akhirnya, pada 1993, satu program pelatihan tematik khusus membuat dan menggunakan perangkat audiovisual diselenggarakan untuk para pengorganisir lokal yang sudah mengikuti rangkaian proses pendidikan dasar sejak 1991. Karena kegiatan pelatihan ini lebih banyak berupa praktik teknis, Ocen mulai tertarik untuk terlibat langsung, belajar menggunakan peralatan seperti kamera foto dan kamera video. Demikian juga pada beberapa bulan sesudahnya, yakni ketika dilaksanakan satu program pelatihan tematik teknik-teknik dasar pemetaan spasial dan peragaan bentang



alam (*landscape modeling*) dalam bentuk peta 3D (tiga dimensi). Ocen melibatkan diri langsung dalam proses praktik, belajar menggunakan peralatan seperti kompas, alat ukur jarak (masih menggunakan meteran), selain ikut menggambar peta dan membuat peta kontur desa. Pada saat pelatihan berakhir dan semua peserta sudah pulang ke desa masing-masing, Ocen malah mengajukan permintaan pada panitia agar dipinjamkan kamera video dan beberapa kasetnya (masih S-VHS analog, belum ada kamera dan cakram digital), juga kompas dan beberapa alat lainnya. Ketika ditanya untuk apa, Ocen menjelaskan singkat bahwa dia ingin membuat video singkat tentang kehidupan nelayan di kampungnya, sekaligus ingin membuat satu sketsa peta dasar tentang beberapa titik di pulau-pulau kecil lepas pantai di mana selama ini dia sering memancing dan menjaring ikan. Dia berjanji akan menjaga semua peralatan tersebut tidak sampai rusak, dan hasilnya nanti (dalam bentuk kaset rekaman video dan peta sketsa) akan dia serahkan ke Yayasan Nen Masil sebagai pengelola pusat pelatihan dan pendidikan di Evu.

Singkat cerita, dua minggu kemudian, Ocen datang lagi ke Evu membawa beberapa kaset rekaman video dan peta-peta sketsa yang dijanjikannya. Dia sampai menginap selama tiga hari dan tiga malam suntuk di Evu untuk membantu staf Studio Audio-Visual Nen Masil menyunting rekaman-rekaman kaset videonya. Hasilnya, satu video cerita singkat (14 menit) tentang satu keluarga asal Buton, tetangga Ocen di Maduwat, yang bekerja sebagai nelayan bagang. Judulnya: *Nelayan Bagang: Sehari Dalam Hidup La Asiru*. Video itu menyajikan gambar-gambar kegiatan dan kehidupan sehari-hari sang nelayan bagang dan keluarganya dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Hasil lainnya adalah peta-peta sketsa dari beberapa pulau kecil di lepas pantai, lengkap dengan beberapa titik koordinat di pulau-pulau tersebut yang sudah dikuasai oleh beberapa perusahaan budidaya mutiara, sehingga sering menimbulkan konflik dengan para warga nelayan setempat. Selain itu, juga beberapa titik koordinat dan garis-garis lintasan (*waypoints*) armada-armada perusahaan penangkap ikan yang menggunakan cara-cara dan alat tangkap merusak terumbu karang, seperti bom ikan (menggunakan bahan dasar pupuk urea) dan bius ikan (menggunakan potassium sianida). Bahkan, ada beberapa titik koordinat menunjukkan di mana perusahaan-perusahaan perusak lingkungan itu selama ini menyembunyikan karung-karung pupuk urea dan botol-botol potassium mereka agar tidak bisa ditemukan oleh polisi atau warga setempat. Memanfaatkan potongan-potongan gambar video yang dibuat Ocen, dihasilkan pula satu video cerita lainnya (17 menit) berjudul: *Musuh Nelayan*.

Walhasil, selama beberapa tahun berikutnya, dua video tersebut menjadi bahan-bahan contoh kasus yang digunakan dalam banyak kegiatan pelatihan dan pendidikan di pusat pelatihan dan pendidikan Yayasan Nen Masil di Desa Evu, di banyak kegiatan pelatihan di tempat-tempat lain di Maluku, bahkan juga sering digunakan di banyak kegiatan pelatihan pengorganisir rakyat di beberapa negara Asia Tenggara melalui jaringan Program Komunikasi Kerakyatan Asia Tenggara (South East Asia Popular Communication Programme, SEAPCP)



yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara itu, Ocen sendiri tetap melanjutkan kehidupannya sebagai seorang nelayan, tetapi sejak saat itu mulai pula aktif mengorganisir sesamanya nelayan di kampungnya dan beberapa desa sekitarnya untuk menentang perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik-praktik penangkapan merusak ekosistem yang merugikan mereka selama ini sebagai nelayan kecil tradisional.

Banyak orang tidak menyangka bahwa video etnografis dan dokumenter itu dihasilkan dari kerja seorang nelayan kampung yang hanya tamat SMP di satu dusun terpencil di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Ocen, sang pengorganisir tersebut, bahkan tidak pernah tercatat resmi sebagai peserta berbagai program pelatihan atau pendidikan untuk menjadi seorang pengorganisir rakyat. Dia lantas benar-benar menjadi seorang pengorganisir rakyat yang sesungguhnya, hanya karena 'serba kebetulan' mendapat kesempatan sering melihat, mendengar, kemudian melibatkan diri dalam rangkaian acara pertemuan, pelatihan dan pendidikan para pengorganisir lokal di satu tempat dekat desanya. Dia lantas tertatik dan memutuskan untuk menjadi seorang pengorganisir rakyat setelah wawasan dan pengetahuannya menjadi lebih terbuka dan lebih luas, terutama tentang masalah-masalah nyata yang memang dihadapi oleh para nelayan tradisional setempat, termasuk dirinya sendiri.

"Diskusi-diskusi di Evu itu," jelas Ocen, "membuat saya sadar bahwa kami para nelayan memang harus bersatu menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Saya tergerak untuk mengajak nelayan-nelayan lain, karena ini masalah hidup atau mati bagi kami. Kalau laut kami tercemar dan rusak, kami akan kehilangan sumber penghidupan yang akan membuat kami jadi miskin dan tambah sengsara." ❖

Disarikan dari kisah nyata dalam beberapa monograf dan dokumen internal yang tidak diterbitkan dari Jaringan Baileo Maluku.



SEORANG IBU DI PUSARAN KERUSUHAN



Akhir 1990-an, luapan semangat dan harapan (euforia) tumpah ruah di seluruh Nusantara, sebagai akibat dari tumbangnyanya satu rezim diktator militer yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa di negeri ini. Tetapi, apa yang kemudian dikenal sebagai masa ‘reformasi’ itu juga menumbuhkan ketidakpastian yang menyulut keresahan dan akhirnya kerusuhan sosial di banyak tempat. Salah satunya adalah kerusuhan sosial besar di seantero Kepulauan Maluku di bagian timur Indonesia. Mula-mula meledak dan hanya terbatas di beberapa pulau kecil di Maluku Tengah dan Tenggara, lalu akhirnya menjalar pula sampai ke pulau-pulau di Maluku Utara. Praktis, sejak awal 2000, warga dari puluhan desa di wilayah Galela, Tobelo, Kao, dan Malifut, di semenanjung tengah dan utara Pulau Halmahera, menjadi kancah kerusuhan yang paling kacau, menewaskan ratusan warga dan mengakibatkan ribuan lainnya mengungsi sebagai korban.

Di tengah pusaran kerusuhan yang sepertinya tak berujung-pangkal itu, seorang perempuan separuh baya tegerak melakukan sesuatu untuk menghentikan atau paling tidak mencegah kekacauan itu semakin meluas. Perempuan itu, Nursiah Yaru--sehari-hari dipanggil ‘Ibu Nur’—seorang janda yang tinggal sendirian di rumahnya di Desa Toweko, sekitar 18 kilometer ke utara Tobelo, ibu kota Kabupaten Halmahera Utara—mulai gelisah melihat keadaan. Mula-mula, perempuan yang pernah kerja sebagai guru dan pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Ternate itu, cukup bingung akan memulai dari mana? Dia membayangkan banyak ibu-ibu lain yang jauh lebih menderita sebagai korban kerusuhan, karena suaminya terbunuh atau hilang tak berjejak, lalu mengungsi dan kehilangan sumber penghidupan. Itu membuatnya teringat pada teman-temannya di beberapa tempat terserak, terutama di pusat kerusuhan di wilayah Kao dan Malifut, sekitar 80 kilometer ke arah selatan dari Toweko. Seperti juga dirinya, mereka semua adalah anggota Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Maluku Utara. Tapi, gara-gara kerusuhan sosial tersebut, semua anggotanya kini tidak aktif lagi, sibuk menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing, sehingga organisasi mereka praktis lumpuh sama sekali. Ingatan itu mengilhaminya satu gagasan: mengapa tidak mulai dari para anggota PEKKA yang cerai-berai itu?

Ibu Nur pun segera mewujudkan gagasannya. Dengan cara yang sangat berhati-hati, tidak jarang harus menyerempet bahaya yang mengancam keselamatan nyawanya sendiri, dia mulai menghubungi satu per satu ibu-ibu anggota PEKKA di berbagai tempat, termasuk di beberapa tempat pengungsian mereka. Pertemuan-pertemuan terbatas mulai berlangsung. Selain untuk saling menguatkan satu sama lain, bangkit kembali dari keterpurukan dan trauma, mereka sepakat mulai membantu para korban lainnya, terutama kaum perempuan dan anak-anak, termasuk yang bukan anggota PEKKA. Dari kegiatan-kegiatan sederhana itulah, Ibu Nur dan kawan-kawan tiba pada



kesimpulan bahwa mereka, kaum perempuan, sebenarnya punya potensi besar sebagai penggerak proses penyatuan dan perukunan kembali (rekonsiliasi) para warga yang terlibat atau terdampak kerusuhan yang sudah memasuki ranah konflik berdalih kebencian antarsuku dan antarpemeluk agama. Mereka mengalami sendiri bagaimana diri mereka, sebagai sesama perempuan dan ibu, dengan mudah bisa saling berkomunikasi, saling mengunjungi, saling menguatkan, tanpa embel-embel suku atau agama, sama sekali tidak dipengaruhi oleh sentimen-sentimen primordial dan sektarianisme. Mereka hanya bertolak dari satu keinginan yang sama: hidup dalam damai, sehingga bisa mengurus keluarga dan hidup mereka lebih nyaman dan aman. Tak ada dendam dan kesumat. Itulah yang membuat mereka, sebagai anggota Serikat PEKKA yang sebagian besarnya beragama Islam, bisa menjalin hubungan dan kerjasama dengan beberapa pemuka dan pendeta perempuan dari kalangan gereja Protestan yang justru adalah agama mayoritas orang asli Tobelo di seluruh Halamahera Utara dan Tengah. Ibu Nur sendiri bahkan bersahabat baik, menjadi mitra kerja, dengan beberapa pendeta perempuan yang memimpin jemaat di beberapa klasis di bawah Sinode Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) yang berpusat di kota Tobelo.

Atas dasar kesamaan-kesamaan keinginan dan harapan akan kedamaian itulah, semakin banyak kaum perempuan, terutama para janda korban kerusuhan, termasuk juga ibu-ibu muda, bahkan gadis-gadis, tertarik dan akhirnya bergabung. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan lapisan sosial, juga dari latar berbagai latar belakang suku dan agama. Mereka mengaktifkan kembali Serikat PEKKA Maluku Utara, membangun beberapa pusat-pusat pertemuan di beberapa tempat strategis, bahkan Ibu Nur sendiri menjadikan rumah dan lahan pertaniannya yang cukup luas di Toweko sebagai tempat mereka berkumpul secara berkala tetap.

Seiring dengan semakin meredanya suasana, sejak 2004, PEKKA Maluku Utara mulai memperluas kegiatan mereka.

Difasilitasi oleh Serikat Nasional PEKKA di Jakarta, PEKKA Maluku Utara mulai terlibat langsung dalam program nasional pengurusan gratis dokumen-dokumen legal identitas diri dan keluarga warga, terutama akta kelahiran anak dan surat nikah. Dokumen-dokumen itu merupakan prasyarat legal formal untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan





sosial dari pemerintah. Hasil kerja keras mereka tidak terlalu mengecewakan. Sampai akhir 2014, PEKKA Maluku Utara sudah berhasil membantu warga menyelesaikan 19.174 akte kelahiran anak dan 1.016 surat nikah warga. Mereka bahkan sudah merencanakan bisa menyelesaikan 5.000 akte kelahiran anak dan 535 surat nikah dari 272 pasangan keluarga Muslim dan 263 pasangan keluarga Kristen sepanjang 2015. Dalam kenyataannya, Serikat PEKKA Maluku Utara kini menjadi satu organisasi besar kaum perempuan yang sangat dikenal dan dihormati di daerah itu.

Tetapi, mulai 2016, Ibu Nur tidak lagi menjadi pemimpin resmi Serikat PEKKA Maluku Utara. “Saya sudah pensiun,” katanya separuh bercanda. “Sekarang, saya hanya membantu pengurus baru saja yang muda-muda. Tapi, saya masih menyimpan cita-cita ingin mewujudkan impian menjadikan lahan pertanian sekitar rumah saya ini sebagai tempat belajar, semacam demplot, tentang pertanian organik yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, seperti bumbu-bumbu dapur, sayur-sayuran dan buah-buahan.” Ibu Nur sangat terusik melihat data belanja rumah tangga ibu-ibu anggota PEKKA di daerahnya. Hampir separuh (rerata 46,4%) belanja rumah tangga mereka habis untuk membeli bahan pangan. Fakta itu membawanya pada gagasan swasembada bahan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi besar lahan luas yang masih banyak terserak di semua desa para anggota PEKKA. Meskipun, dia sadar bahwa itu tidak mudah. Pencampuran lahan oleh pemodal besar dari luar mulai marak di daerah itu, terutama industri keruk (ekstraktif) seperti pertambangan. Sejak 2000-an awal, tidak kurang dari 14 konsesi besar tambang menyerbu Halmahera yang kaya bahan galian berharga itu. Salah satunya adalah penambangan emas di wilayah Kao-Malifut yang juga menjadi salah satu sebab pemicu konflik dan kerusuhan sosial di sana. Bahkan, telah mengakibatkan pula pencemaran berat dan perusakan ekosistem lokal yang membuat Teluk Kao kini tak lagi dikenal sebagai penghasil teri terbesar di sana seperti sebelumnya.

Namun, dengan segenap keterbatasannya, perempuan energetik itu tak menyerah. Ibu Nur itu mulai mewujudkan impiannya dengan mendirikan satu bangunan baru di samping rumahnya di tanah pertanian tersebut. Bangunan panggung sederhana serba kayu itu memiliki satu ruang pertemuan dan beberapa ruang tidur untuk menginap bagi ibu-ibu yang datang untuk belajar. “Masih rintisan sama sekali,” jelasnya. “Kami masih punya kendala sumberdaya dana untuk mengembangkan, tapi terutama sekali sumberdaya manusia yang masih terbatas. Kami belum punya orang yang berpengalaman praktis mengelola lahan dan tempat belajar macam itu.” ❖



SEORANG GURU DI KAMPUNG ADAT

Nama saya Hermanus Bolong. Biasa dipanggil Herman. Saya dilahirkan di satu kampung di perhuluan Sungai Melawi, di pedalaman Kalimantan Barat. Nama kampung saya adalah Kampung Bunyau, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.

Awalnya saya bekerja sebagai penambang emas yang oleh orang kampung diistilahkan 'ngejek'. Pekerjaan itu saya mulai tahun 1998, beberapa bulan setelah saya menikah. Saya bekerja ikut abang iparku. Kami kerja di daerah Serawai. Selama kerja tambang emas itu, saya tidak mau tahu dan tidak peduli soal kampung halamanku. Itu sebabnya saya jarang sekali pulang ke kampung. Setelah sekian tahun, barulah saya sadar bahwa pekerjaan cari emas itu sebenarnya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Menyadari hal itu, maka pada tahun 2002, saya memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kampung.

Sesampai di kampung, warga meminta saya mengajar di Sekolah Dasar (SD) jarak jauh di Bunyau, menggantikan paman saya yang pada tahun 2002 itu mulai pensiun, berhenti mengajar. Awalnya, saya keberatan memenuhi permintaan itu. Alasan utamanya adalah karena pendidikan formal saya hanya sampai tingkat SMP. Tetapi, warga terus mendesak. Karena memang tidak ada orang lain lagi, mau tidak mau permintaan warga itu akhirnya saya kabulkan.

Beberapa bulan kemudian, saya diajak oleh paman saya untuk mengikuti pertemuan para pemimpin umat Katolik di Paroki Menukung. Sebenarnya saya merasa keberatan dan malu, karena pernikahan saya belum diresmikan di gereja secara Katolik. Lagi-lagi, karena tidak ada orang lain yang mau menemani paman saya, saya terpaksa ikut. Dalam pertemuan itu saya hanya bisa diam karena tidak tahu apa yang harus diomongkan. Ada perasaan minder terhadap para peserta lainnya. Selain faktor status perkawinan saya belum tuntas secara Katolik, juga karena saya memang tidak punya pengalaman seperti mereka. Syukurlah, dalam pertemuan itu, pastor paroki menawarkan peresmian pernikahan bagi para pemimpin umat yang pernikahannya belum disahkan





secara Katolik. Sesuai janji pastor paroki itu, maka pada Desember 2002, pernikahan saya diberkati secara katolik di Gereja Bunyau. Sejak itulah hubungan saya dengan sang pastor paroki semakin erat. Beberapa kali saya mengunjungi beliau untuk bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan, salah satunya adalah tentang cara mengajar yang baik.

Pekerjaan sebagai guru pada akhirnya menempatkan saya sebagai orang yang selalu dimintai pendapat oleh orangtua murid tentang banyak hal. Salah satunya adalah pertanyaan mereka tentang masalah penebangan kayu oleh PT Maju Karya Kita (MKK) di hutan Bukit Bunyau yang merupakan wilayah adat Kampung Bunyau. Tepatnya, pada bulan Maret 2003, sejumlah warga masyarakat mendatangi rumah saya dan bertanya: “Siapa yang mengizinkan perusahaan itu menebang kayu di hutan adat? Apa yang harus kami lakukan berkiatan dengan persoalan ini?”

Pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya bingung. Dalam hati kecil, saya sendiri mulai bertanya-tanya: “Mengapa mereka meminta saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu?” Padahal, saya benar-benar tidak tahu apa dan bagaimana harus menjawabnya. Seketika, muncul perasaan menyesal kembali ke kampung. Sampai-sampai timbul pikiran: “Kalau tahu akan dijadikan guru yang tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan kepada anak-anak kampung, tetapi juga sebagai orang yang dapat menjawab persoalan orangtua dari anak-anak didik saya itu... ah, mungkin saya tidak akan pernah pulang kampung.” Ya, saya sadar hanya tamat SMP, dan tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan seperti dan serumit ini.

Untunglah paman saya memberi jalan keluar. Saat mulai menyesal dan nyaris putus-asa itu, paman saya berkata kepada para warga yang berkerumun: “Coba kita tanya pada pastor paroki, siapa tahu dia punya saran atau pendapat untuk kita.” Saya langsung setuju usul paman itu, membuat saya lega, seperti terlepas dari beban berat dan pikiran buntu. Saat itu juga, kami semua bersama-sama mendatangi pastor paroki.

Setibanya di pastoran paroki, kami menceritakan peristiwa penebangan kayu oleh PT MKK itu kepada Bapa Pastor. Mendengar cerita kami, Bapa Pastor pun menyatakan bersedia membantu, yakni menemani kami mendatangi *basecamp* perusahaan dan memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan perusahaan. Jadi,

kami pun memutuskan untuk menginap saja di pastoran paroki malam itu. Keesokan harinya, bersama-sama dengan Bapa Pastor, kami mendatangi *basecamp* perusahaan. Sayangnya, setiba di sana, pimpinan perusahaan tidak mau menemui dan hanya diwakili karyawan hariannya. Bukan cuma itu, mereka juga malah balik melaporkan kami ke pimpinan Kecamatan, Kepolisian Sektor (POLSEK) dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Menukung. Untungnya, memang tidak terjadi tindak kekerasan. Tapi ketegangan mulai terjadi





antara warga dengan pihak perusahaan, juga dengan pihak pertugas keamanan dan pemerintah setempat.

Sejak saat itu, saya sendiri menjadi tahu bagaimana menutupi keterbatasan saya selama ini dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para warga tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Setiap kali mereka bertanya, saya langsung menghubungi tokoh agama dan beberapa kawan di organisasi nonpemerintah yang memang memiliki pengetahuan lebih luas tentang masalah-masalah seperti itu. Lama-kelamaan, saya makin sering bertemu dengan mereka, malah sering ikut berbagai kegiatan mereka. Pengetahuan dan wawasan saya semakin bertambah, terutama setelah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi nonpemerintah itu, yakni Lembaga Bina Banua Talino (LBBT) yang bermarkas di Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, sekitar 400 kilometer dari Menukung. Saya tetap saja melanjutkan pekerjaan saya sebagai guru, tetapi mulai juga bekerja sebagai relawan paruh-waktu (*part timer*) bagi LBBT. Dengan segenap keterbatasan yang saya miliki, saya lebih banyak melakukan kerja-kerja 'penghubung' antara warga dengan LBBT, pimpinan agama (pastor), dan juga dengan aparat pemerintah dan politisi lokal. Kebetulan saja banyak di antara mereka saya kenal, karena mereka adalah teman-teman saya sepermainan waktu masih kanak-kanak dan remaja. Saya selalu terlibat membantu mengajak warga mengerjakan banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh LBBT maupun oleh gereja, termasuk mulai sering dipercaya memfasilitasi proses-proses pertemuan antarwarga. Untuk itu, saya mulai belajar memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh warga. Karena kampung saya adalah bagian dari masyarakat dan wilayah adat yang terdiri atas beberapa desa di wilayah Menawi, saya juga mulai sering berkunjung dan berdialog dengan warga di desa-desa lainnya. Saya mulai memahami kerangka besar permasalahan masyarakat adat dalam hubungannya, misalnya, dengan sengketa wilayah, kebijakan dan peraturan pemerintah, serta kehadiran perusahaan-perusahaan dari luar mengambil sumberdaya alam di wilayah adat kami. Beberapa kali, saya dikirim oleh LBBT mengikuti pertemuan atau pelatihan di tingkat nasional, sehingga saya juga mulai mengerti bagaimana keadaan yang sama dihadapi pula oleh warga masyarakat adat di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Saya mulai mengenal gerakan-gerakan masyarakat adat di banyak daerah lain itu.

Meskipun demikian, saya tetap tahu diri dengan semua keterbatasan saya. Saya tetap menganggap tugas sebagai guru sekolah kampung adalah tugas utama saya. Tetapi jika dibutuhkan, dan memang saya ada waktu, saya dengan senang hati membantu LBBT atau gereja melakukan tugas-tugas menggalang warga kampung saya dan kampung-kampung sekitar untuk melakukan kegiatan bersama-sama, terutama dalam rangka mempertahankan hak-hak tradisional kami sebagai suatu kesatuan hukum masyarakat adat. ❖

Disunting ulang dari kesaksian pribadi Hermanus Bolong yang disampaikan secara tertulis khusus untuk keperluan buku ini.

JACQUELINE MONDROS & SCOTT WILSON

SANG PENGORGANISIR

Disadur dan diterjemahkan secara bebas oleh Roem Topatimasang dari Jacqueline B. Mondros & Scott M. Wilson (1994), *Organising for Power and Empowerment*, New York: Columbia University Press; Bab. II 'The Organisers', hal.11-35 dan tabel dari hal.240. Kedua penulis, selain mengajar di universitas, juga adalah peneliti sekaligus praktisi lapangan yang terlibat langsung dalam berbagai proses pengorganisasian dan gerakan masyarakat sipil di Amerika Serikat. Mereka berdua aktif menulis banyak buku dan makalah pada jurnal-jurnal ilmiah seperti *Social Development Issues* dan *Journal of Sociology and Social Works*.



bahan bacaan #9

Menurut para pengkaji dan pelaku pengorganisasian, sang pengorganisir rakyat (*the organiser*) adalah kekuatan pendorong (*driving force*) dalam suatu organisasi aksi sosial (Allinsky 1971, Biklen 1983, Rothman 1969). Allinsky menganggap para pengorganisir rakyat sebagai “para insinyur dan arsitek yang sangat kreatif dan penuh daya-cipta” yang dimiliki oleh organisasi-organisasi masyarakat, “para pembawa pesan-pesan perubahan dan kemungkinan pencapaiannya tidak terbatas hanya pada satu kawasan geografis tertentu atau kelompok anggotanya saja” (Allinsky 1971: 65). Kritik memang pernah diajukan tentang kemungkinan besar terjadinya penguasaan dan penipuan (*demagoguery*) yang terkandung dalam definisi tersebut serta akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya (Aronovitz 1964). Tetapi, semuanya sependapat bahwa sang pengorganisir adalah para pelaku terpenting dalam suatu organisasi rakyat dan, karena itu, merupakan bahan kajian yang sangat menarik. Mari kita bahas berbagai aspek tentang latar belakang, pengalaman, semangat pendorong, tugas sehari-hari dan pengaruh seorang pengorganisir rakyat terhadap organisasi masyarakat.

Perkembangan Seorang Pengorganisir Rakyat

Banyak yang tergerak menjadi seorang pengorganisir rakyat tidak memedulikan kenyataan bahwa mereka umumnya tidak digaji atau menerima upah sangat rendah, bekerja nyaris tanpa kenal waktu, dan menghadapi tekanan berat bertubi-tubi dengan sumberdaya yang sangat terbatas. Tetapi, mengapa mereka tetap saja melakukannya? Kalau ditanya soal ini, para pengorganisir itu biasanya menjawab karena mereka memang berminat dan berniat melakukannya, selain karena ada tuntutan keadaan yang menantang mereka untuk melakukannya. Faktor-faktor serba kebetulan atau tidak sengaja ada juga yang memengaruhi, tetapi berbeda pada setiap orang pengorganisir dan pada setiap tahap pengorganisasian yang mereka lalui.



Beberapa orang pengorganisir mungkin memang berasal dari keluarga yang sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik. Latar belakang keluarga inilah yang telah mendidik mereka tentang keadaan dan masalah-masalah sosial serta mengukuhkan minat mereka menjadi pegiat (aktivis) juga. Mereka mengembangkan suatu pandangan dunia (seperangkat nilai dan kepercayaan tentang rakyat dan masyarakat) sejak usia dini, dan pandangan-pandangan itulah yang nantinya memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pengorganisasian rakyat. Keluarga mereka sendirilah yang pertama kali memperkenalkan kepedulian sosial kepada mereka, menjadi faktor yang sangat menentukan ketika mereka sendiri juga memutuskan untuk terlibat dalam kerja pengorganisasian, meskipun juga bukan satu-satunya faktor penyebab.

Beberapa orang lainnya menemukan minat mereka melakukan pengorganisasian berdasarkan pengalaman pribadi pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sebagai relawan atau pegiat saat masih di SLTA atau sebelumnya. Mereka mungkin pernah aktif sebagai relawan dalam organisasi-organisasi pelayanan sosial atau kampanye politik, atau dalam perkumpulan-perkumpulan pelajar atau mahasiswa yang, akhirnya, membentuk kehendak mereka untuk 'melakukan sesuatu'. Mereka mungkin melihat diri sendiri sebagai juru bicara yang sudah punya pengalaman dan, karena itu, merasa cocok melakukan 'kerja pengorganisasian', meskipun sebenarnya masih belum memiliki citra diri yang cukup jelas sebagai seorang penggalang rakyat. Kehidupan di perguruan tinggi memang menyediakan banyak sekali bahan kuliah dan bacaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan kesadaran sosial dan politik yang lebih besar, sehingga menyediakan banyak sekali kemungkinan untuk terlibat sebagai pegiat kampus.

Beberapa orang pengorganisir lainnya lagi mungkin saja mulai justru karena pengalaman buruk atau mengalami kekecewaan pada bidang pekerjaan lain yang, pada gilirannya, menumbuhkan kesadaran baru pada diri mereka. Kekecewaan semacam itu biasanya muncul melalui proses sebagai berikut: sejak awal mereka sudah mengembangkan dan memiliki suatu cita-cita dan analisis politik tertentu, tetapi kemudian kecewa karena merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan cita-cita atau analisis politik tersebut, lalu memutuskan untuk melakukan pengorganisasian rakyat yang mereka anggap sebagai jalan terbaik untuk memengaruhi masalah-masalah sosial. Misalnya, seorang wartawan yang kemudian merasa jenuh dengan pekerjaan rutinnya hanya melaporkan berbagai kejadian, tetapi tak pernah bisa memengaruhi jalannya kejadian tersebut. Atau, seorang pekerja sosial dalam suatu Program Pelayanan Masyarakat yang kemudian melihat bahwa pekerjaannya selama ini sebenarnya tidak menjawab langsung akar penyebab utama kemiskinan penduduk. Atau, seorang pengacara dan pakar hukum lingkungan yang semakin kecewa oleh kenyataan sangat terbatasnya kemampuan hukum formal melawan para pelaku perusakan lingkungan dari kalangan pemodal yang sangat berkuasa.

Apakah kesadaran politik seorang pengorganisir memang sudah ada jauh sebelumnya, atau baru saja muncul ketika dia memutuskan untuk mulai terlibat dalam kerja pengorganisasian yang sesungguhnya, yang jelas adalah seorang pengorganisir merasakan adanya kebutuhan melakukan pengorganisasian, karena pengorganisasian rakyat memang memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan sosial yang lebih luas.

Pengalaman pribadi menderita langsung oleh penindasan atau dirampas hak-haknya

adalah kekuatan pendorong lainnya bagi seseorang untuk melakukan pengorganisasian rakyat. Ada banyak pengorganisir yang secara pribadi memang pernah menderita sebagai korban, lalu mampu mengatasi akibat-akibat buruk dari penderitaan tersebut, kemudian mengalami suatu proses pemberdayaan kembali, dan akhirnya merasakan suatu kehendak untuk membantu para korban lainnya untuk mengalami pencapaian seperti dirinya. Misalnya, seorang ibu atau bapak mantan buruh tani yang datang ke satu kelompok pembela hak-hak penggarap lahan dan menyatakan siap membantu melakukan sesuatu. Ibu atau bapak tadi kemudian terlibat aktif dalam serangkaian unjuk rasa dan kegiatan lainnya, kemudian merasa lebih kuat dan berdaya ketika kelompok tersebut akhirnya memenangkan tuntutan-tuntutan mereka. Bisa jadi, ibu atau bapak tadi akhirnya juga memutuskan untuk bekerja tetap paruh atau purna-waktu untuk kelompok tersebut, mungkin dibayar tapi mungkin juga tanpa perlu bayaran sama sekali. Ada cukup banyak pengorganisir yang mengalami proses peralihan semacam ini, dari mantan korban yang tak berdaya sama sekali menjadi seorang pegiat yang kian percaya diri. Para pengorganisir jenis ini adalah contoh-contoh 'kisah berhasil' yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kepemimpinan dan pemberdayaan diri sendiri. Fakta bahwa mereka tetap bertahan terus melakukan pengorganisasian akan menjadi teladan yang baik bagi kemungkinan pengembangan kepemimpinan dan kemampuan anggota lainnya.

Semua faktor penyebab atau latar belakang yang diuraikan di atas, secara tersendiri atau sebagai gabungan beberapa di antaranya, memengaruhi para pengorganisir secara sadar memilih menjadi seorang pengorganisir rakyat. Meskipun mungkin mereka memang tidak menyadarinya pada tahap awal, tetapi setelah itu para pengorganisir selalu mampu menguraikan secara gamblang proses-proses kejadian dan pengalaman yang mereka lalui selama ini menjadi seorang pengorganisir rakyat. Bagi mereka, proses kesadaran bertahap dan berkelanjutan itulah yang mengarahkan mereka ke dalam dunia pengorganisasian rakyat.

Namun, tetap saja ada kemungkinan faktor serba kebetulan atau tidak bersengaja pada awal mulanya yang mengarahkan seseorang ke dalam dunia pengorganisasian rakyat. Ada beberapa pengorganisir yang mengaku terus terang bahwa mereka sendiri merasa heran menemukan dirinya sebagai seorang pengorganisir rakyat. Pada dasarnya, para pengorganisir jenis ini adalah mereka yang terlibat dalam suatu proses pengorganisasian sebelum diri mereka sendiri memiliki tekad untuk menjadi seorang pengorganisir dalam artian yang sesungguhnya, atau sebelum mereka menyadari bahwa pekerjaan tersebut memang sangat cocok dan sesuai dengan diri mereka. Iktikad awal para pengorganisir jenis ini mungkin memang masih terbatas hanya terhadap isu tertentu atau hanya pada organisasi yang memperjuangkan isu tersebut, bukan pada kerja-kerja pengorganisasian itu sendiri. Mereka mungkin awalnya diajak oleh orang lain untuk memanfaatkan atau menyumbangkan keahlian tertentu yang mereka miliki, lalu perlahan-lahan berubah dari seorang tenaga relawan menjadi seorang pengorganisir tetap purna-waktu. Dalam kasus semacam ini, mereka mengerjakan tugas-tugas pengorganisasian sebelum mereka sendiri memiliki pemahaman yang jelas tentang politik dan wawasan yang melandasi proses pengorganisasian rakyat yang sesungguhnya.





Faktor serba kebetulan atau ketidaksengajaan semacam itu biasanya tampak jelas sekali pada mereka yang pertama kali terlibat, termasuk sebagai tenaga relawan, dalam suatu proses pengorganisasian rakyat yang sesungguhnya. Biasanya demikian: kebetulan saja mereka membaca suatu pengumuman atau iklan di koran yang mengajak menyumbangkan tenaga untuk suatu kegiatan pengorganisasian, kemudian mereka mendaftarkan diri dan merasa senang diterima walaupun tanpa bayaran sama sekali. Atau, masuk begitu saja karena diajak oleh teman sekolah atau rekan kerja, terus menjadi aktif, dan akhirnya menjadi tenaga tetap melakukan suatu tugas tertentu pula tanpa pernah melamar atau mendaftarkan diri sama sekali.

Sebagai rangkuman, beberapa unsur dari proses seseorang masuk ke dalam dunia pengorganisasian rakyat adalah sebagai berikut:

- Melalui berbagai cara dan jalur. Tidak ada satu penyebab atau kejadian tunggal murni yang sepenuhnya membuat seseorang terlibat dalam proses pengorganisasian.
- Beberapa pengalaman menunjukkan adanya apa yang disebut oleh para peneliti sebagai ‘dampak yang sangat kuat’ (*sharpness of effect*). Mereka yang mengalaminya akan sangat kuat dipengaruhi oleh pengalaman tersebut, dan pengaruh itu berketetapan. Latar belakang keluarga yang aktif dalam kegiatan sosial atau politik, atau pengalaman pribadi mampu mengatasi dampak penindasan, adalah dua contoh yang jelas. Dua faktor ini boleh kita sebut sebagai kejadian-kejadian utama yang membentuk (*primary formative events*) dan sangat memengaruhi keputusan seseorang memasuki dunia pengorganisasian rakyat.
- Tidak ada garis batas atau titik masuk yang jelas ke dalam dunia pengorganisasian rakyat. Karena, memang tidak ada tujian saringan masuk ke dalamnya, tak ada jenjang karier yang tegas di dalamnya, bahkan tak ada ketentuan harus melalui tahap apa saja untuk akhirnya bisa disebut sebagai seorang pengorganisir yang ‘sudah berpengalaman’ atau seorang ‘pensiunan pengorganisir’. Garis pembeda antara seorang tenaga relawan aktif dengan seorang pengorganisir ‘profesional’ nyaris jumbuh dan kabur. Dalam kenyataannya, banyak pengorganisir yang melintasi garis tersebut pada saat mereka sedang melakukan suatu tugas pengorganisasian, bahkan sebelum mereka benar-benar menyadari bahwa mereka sebenarnya ‘sudah menjadi seorang pengorganisir’.

Dorongan untuk Mengorganisir

Sekarang kita coba lihat apa saja dorongan yang membuat seseorang menjadi dan terus melakukan pengorganisasian rakyat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Cloward dan Piven dalam kata pengantar mereka untuk analisisnya mengenai proses pengorganisasian bahwa: “Kita perlu mengetahui lebih banyak tentang anak-anak muda, lelaki maupun perempuan, yang mengabdikan dirinya pada panggilan tugas pengorganisasian, sementara yang lainnya kembali ke bangku sekolah atau pekerjaan mereka, atau bahkan hanya untuk membuat sandal” (Delgado 1986: xiii). Jadi, apa yang membuat orang-orang itu tetap melanjutkan kerja pengorganisasian rakyat? Dorongan kehendak memulai pengorganisasian diawali oleh apa yang boleh kita sebut sebagai ‘paham pertentangan secara sadar’ (*conscious contrarianism*) —suatu proses di mana seorang pengorganisir menolak



ideologi yang berkuasa dan ingin menggantikannya dengan suatu pandangan dunia baru atau alternatif. Dorongan kehendak untuk terus melanjutkan kerja pengorganisasian itu kemudian diperkuat oleh kepuasan melaksanakannya.

Saul Alinsky (1971) dan Steve Burghardt (1982a, b) menyatakan bahwa para pengorganisir rakyat memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap nilai-nilai masyarakat dan memandang proses pengorganisasian itu sendiri sebagai suatu upaya memenuhi kebutuhan pribadi mereka untuk melakukan perubahan sosial. Apa yang mereka nyatakan itu sama dengan apa yang kita sebut tadi sebagai 'paham pertentangan secara sadar' tadi yang memiliki tiga unsur pokok: suatu pandangan dunia (*worldview*), dilengkapi oleh suatu analisis kekuasaan (*power analysis*), dan dilaksanakan dengan memilih proses pengorganisasian rakyat (*organising work*) sebagai cara terbaik yang mengabsahkan pandangan sang pengorganisir.

Pandangan Dunia. Para pengorganisir rakyat ditandai oleh suatu kepekaan kuat tentang apa yang 'adil' di dan untuk dunia ini (Lippman 1937). Wawasan ini mencerminkan adanya nilai-nilai politik demokratik yang tak perlu diragukan lagi adalah sesuatu yang khas bagi para pengorganisir rakyat. Nilai-nilai ini mengacu pada ajaran kitab suci agama-agama besar dan tradisi demokrasi yang mencakup keadilan dan kejujuran kepada setiap orang, juga suatu kesediaan berkorban untuk orang lain (*altruism*) yang menuntut perlunya tanggung jawab pribadi untuk turut terlibat memecahkan persoalan bersama (Walton 1969).

Para pengorganisir memahami bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab tertentu untuk menjaga dan melindungi mereka yang bernasib rentan, bahwa semua orang memiliki peran-peran penting untuk mengupayakan tercapainya sesuatu yang diidamkan bersama dan mempertahankan pencapaian tersebut, dan bahwa menggalang suatu kekuatan bersama secara memadai adalah cara untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Denyut rangsangan untuk mengorganisir rakyat muncul dari penerimaan seseorang akan adanya tanggungjawab pribadi untuk bekerja secara aktif bersama orang lain dalam rangka memengaruhi proses perubahan sosial ke arah yang diidamkan bersama, berbeda dengan mereka yang hanya mampu menggambarkan mimpi-mimpi yang tak mungkin tercapai. Dalam beberapa kasus, pergeseran dari kesediaan berkorban menjadi perlawanan politik bermula justru dari suatu pandangan dunia yang bersifat keagamaan atau yang diilhami oleh ajaran agama (*religious worldview*). Ini terutama berlaku bagi para pengorganisir yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat atau jamaah dari suatu paham keagamaan.

Aspek pandangan dunia dari 'paham pertentangan secara sadar' mencerminkan adanya nilai-nilai yang sebenarnya dimiliki oleh banyak orang yang memiliki kepedulian sosial tetapi tidak terlibat dalam kegiatan pengorganisasian rakyat. Denyut dan kemampuan untuk menggambarkan suatu dunia yang sempurna yang diidamkan bersama, umumnya dimiliki oleh, antara lain, para perenung dan pemikir masa depan, oleh kelompok-kelompok keagamaan dan perhimpunan-perhimpunan warga. Maka, memang penting tetapi bukanlah penjelasan yang memadai dengan bertanya: "Mengapa perlu mengorganisir rakyat?"



Analisis Kekuasaan. Menjadi seorang pengorganisir rakyat selalu terlibat dalam analisis tentang apa yang salah dengan perilaku dan pemikiran orang lain, mengapa hal itu terjadi dalam masyarakat kita? Rumusan umum tentang siapa yang diuntungkan dalam masyarakat dan mengapa, selalu dipertanyakan menurut kelas, suku, bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya. Tetapi, pendapat umum tentang metode atau cara untuk mengubahnya adalah 'lakukan melalui saluran-saluran yang sudah ada, dan inilah yang ditentang oleh cara-cara yang menantang para penguasa (Tropman 1985). Penolakan aktif terhadap banyak nilai dan tradisi umum tersebut itulah yang mulai menandai para pengorganisir rakyat sebagai orang-orang yang khas dan berbeda dari yang lain, sebagai orang-orang yang saling membagi suatu pandangan dunia baru ke arah lebih baik. Inti kekuatan analisis mereka adalah sangat berlawanan dengan apa yang disarankan oleh para penguasa yang menciptakan berbagai aturan serba membatasi. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pengorganisir rakyat: "Orang-orang yang langsung terjun ke dalam kancah organisasi-organisasi masyarakat dengan segera belajar untuk omong tentang masalah tersebut dalam kerangka hubungan kekuasaan, dalam pengertian baik dan buruk." Sikap penolakan terhadap nilai-nilai umum yang menindas dapat muncul melalui persoalan-persoalan pribadi. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang suaminya mengalami kecelakaan dalam pekerjaan. Dia lantas bersabar menerima keadaan itu sesuai dengan etika kerja dan nilai-nilai kelembagaan yang umum diberlakukan selama ini, sampai akhirnya suaminya kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah mereka. Padahal dia harus melindungi kehidupan keluarganya, lalu benar-benar kecewa berurusan dengan para dokter, pengacara, dan perusahaan asuransi. Pada saat itulah dia mulai menolak nilai-nilai dari sistem yang sedang berlaku yang hanya melindungi kepentingan mereka yang berkuasa, bukan kepentingan seorang buruh yang terluka berat dan keluarganya. Dia kemudian menjadi relawan pada serikat buruh setempat yang memperjuangkan hak-hak kaum pekerja dan, setahun kemudian, dia sudah menjadi seorang pengorganisir buruh yang sesungguhnya.

Para pengorganisir rakyat juga memiliki keyakinan yang meragukan kemampuan memperbaiki keadaan dari sistem kesejahteraan sosial yang berlaku saat ini, suatu pemahaman masalah atas dasar adanya perbedaan-perbedaan kekuasaan. Pelayanan sosial yang ada hanyalah semacam 'pemberian bantuan', tidak mengarah langsung pada akar penyebab kemiskinan yang sesungguhnya dan tidak memberikan jalan pemecahan yang tuntas.

Kemarahan juga sering dirasakan oleh para pengorganisir rakyat ketika mereka menentang ideologi yang berkuasa. Mereka menyaksikan adanya ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung, menimbulkan kemarahannya melihat ketidakjujuran tersebut. Proses perlawanan ini tidak semata-mata bersifat intelektual atau dalam pemikiran saja, tetapi sudah merasuk sampai ke perasaan yang terdalam dan kadangkala bersifat pribadi. Para pengorganisir yang sudah mencapai tahap ini akan menemukan dirinya telah berada di luar jalur masyarakatnya sendiri, memilih suatu kedudukan pinggiran, sangat mungkin disisihkan oleh para rekan, kerabat, tetangga, atau bahkan oleh keluarganya sendiri.

Sengaja Memilih Kerja Pengorganisasian. Pada tahap ini, sang pengorganisir sudah menetapkan untuk menentang nilai-nilai umum yang berlaku, memahaminya sebagai suatu hasil dari hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak adil. Mereka telah mengganti-



kan ideologi yang berkuasa dengan pandangan alternatif baru tentang apa yang harusnya menjadi tanggung jawab pribadi seseorang demi terjadinya perubahan sosial. Pemahaman inilah yang melahirkan dorongan awal untuk melakukan pengorganisasian rakyat.

Merujuk pada teori tentang dorongan hasrat (Maslow 1970), perilaku seseorang didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kita sudah merumuskan bahwa salah satu unsur kunci dari dorongan seseorang untuk melakukan pengorganisasian adalah hasrat untuk mencapai nilai-nilai yang diyakini secara pribadi sebagai tujuan utama perubahan sosial yang diinginkannya. Dorongan hasrat ini kemudian diikuti oleh teori tentang harapan (Vroom 1964) bahwa keputusan-keputusan (untuk memilih melakukan sesuatu) dibuat atas dasar keinginan untuk mewujudkan harapan-harapan yang telah ditetapkan. Para pengorganisir memang mengharapkan kerja pengorganisasian memiliki peluang besar yang memungkinkan mereka menghasilkan perubahan dan, karena itu, mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Mereka memang mencari jenis pekerjaan yang mengarah pada perubahan sosial dan pengorganisasian rakyat adalah cara yang paling layak untuk itu.

Pada tahap ketiga dari proses pertentangan secara sadar inilah para pengorganisir mencari kegiatan yang, paling tidak, memang mengandung kemungkinan melakukan perubahan sosial. Sebagai orang yang hampir selamanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menentang kebiasaan umum, para pengorganisir rakyat memilih kedudukan pinggiran dalam masyarakat. Namun, mereka tidak berada di luar arus umum yang jelas-jelas mereka tentang. Mereka ingin mengubah arus tersebut ketimbang menjauhkan diri atau tak peduli sama sekali. Meskipun, dalam rangka membangun suatu organisasi rakyat yang kuat, para pengorganisir tetap saja akan selalu berurusan dengan orang-orang lain. Padahal, orang-orang lain itu umumnya tidak menyukai mereka, paling tidak pada awalnya. Pertentangan antara disisihkan secara sosial dengan kebutuhan untuk tetap menjaga hubungan dengan orang lain adalah salah satu masalah paling rumit dalam kerja pengorganisasian rakyat.

Namun, para pengorganisir memang kadangkala merasa disisihkan dan kesepian sendirian. Tetapi, pasti, mereka pun sering menyatakan ada banyak manfaat dari keadaan tersebut. Mereka bilang bahwa sungguh menyenangkan berjumpa dengan banyak orang—menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama—karena para pengorganisir rakyat memang senang menganjur atau mengajak orang lain. Memang banyak sekali kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam proses pengorganisasian, dan para pengorganisir biasanya merasakan kepuasan ketika melihat perkembangan hasilnya, menggunakan semua ketrampilan mereka dalam cara-cara baru dan berbeda dari biasanya.

Sejak saat itulah para pengorganisir menandai diri mereka dengan organisasi-organisasi, gerakan-gerakan, atau atau isu-isu tertentu yang khas. Pada saat inilah pula mereka mulai membawa beragam pengalaman ke dalam pekerjaannya, juga berbagai dorongan hasrat yang berbeda. Ada dorongan hasrat pribadi dan kesadaran sosial yang lebih besar, tetapi juga ada kesadaran politik dan pilihan kedudukan sebagai 'penentang kekuasaan' yang memang sudah terbentuk sebelumnya atau pada saat awal keterlibatan dalam proses pengorganisasian.



Pengorganisir Rakyat: Ciri-Ciri Ideal

Sekali seseorang mulai melakukan pengorganisasian rakyat, maka pandangan-pandangan dan tujuan-tujuannya haruslah selaras dengan pandangan-pandangan dan tujuan-tujuan organisasi di mana ia bergabung melakukan proses pengorganisasian. Pandangan pengorganisir pada saat itu sudah diletakkan dalam kerangka peluang-peluang, kendala-kendala, hubungan-hubungan, kegagalan-kegagalan, dan keberhasilan-keberhasilan suatu organisasi. Hal ini akan menguji dorongan hasrat awal dan analisis sang pengorganisir. Sebaiknya seorang pengorganisir tetap melanjutkan pekerjaannya dalam organisasi tersebut, sepanjang hal itu memang bersesuaian dengan kebutuhan dan harapan-harapannya. Mari kita coba lihat sekarang apa saja yang dapat dirumuskan sebagai ciri-ciri ideal seorang pengorganisir rakyat, dan membahas bagaimana kesadaran dan harapan-harapan mereka itu berhubungan dengan harapan-harapan dan sumbangsih orang lain dalam organisasi di mana mereka bekerja bersama.

Selain yang pernah dirumuskan Allinsky, belum ada lagi 'dalil-dalil' mengenai sikap dan prilaku ideal seorang pengorganisir rakyat. Seorang pengorganisir perlu memiliki berbagai jenis keterampilan yang, kadangkala, saling bertentangan satu sama lain. Prilaku seorang pengorganisir mestinya mengikuti perkembangan keadaan yang terus berubah, juga dengan kepentingan dan kemampuan orang-orang dengan siapa dia bekerja bersama. Meskipun, dia sama sekali tidak boleh bersikap seperti bunglon. Ada banyak hal yang dianggap sebagai ciri 'seorang pengorganisir yang ideal'. Semuanya menunjukkan harapan tentang pengorganisir rakyat sebagai seorang pribadi yang utuh.

Keragaman Pengertian

Para pengorganisir rakyat dan pemimpin masyarakat selama ini merumuskan sejumlah ciri ideal seorang pengorganisir. Kutipan berikut, oleh seorang pengorganisir yang pernah melakukan pengorganisasian di lapis bawah dan dalam rangka pencerahan massa, memperlihatkan betapa majemuk dan rumitnya ciri ideal tersebut:

Saya pikir seorang pengorganisir rakyat perlu punya suatu keakuan (*ego*) yang kuat, tetapi bukan keakuan yang besar. Saya rasa seorang pengorganisir harus memiliki suatu keyakinan kuat mengenai kemampuan dirinya, karena kemampuan itu tidak akan banyak dibantu peningkatannya [oleh orang-orang lain] dalam proses pengorganisasian. [Saya temukan] memang demikian terutama setelah saya sendiri melakukannya dan menyaksikan langsung bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pengorganisir secara budaya tidak memperoleh imbalan atau penghargaan apa pun. Saya pikir seorang pengorganisir memang harus memiliki rasa humor, suka bertemu dengan orang-orang baru, senang pada siapa saja (tidak hanya pada orang-orang yang dia rasa sependapat atau melakukan hal yang sama seperti dirinya), terbuka pada semua orang. Seorang pengorganisir mestinya adalah seorang yang cukup cerdas, mampu memikirkan akibat-akibat tindakannya, mampu memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi. Saya kira, dalam pengertian politik, dia juga harus memiliki sikap pemihakan yang tegas, tetapi tidak harus terlalu kaku pada satu ideologi tertentu, berkeyakinan bahwa sistem yang ada tidak bermanfaat bagi rakyat awam dan bersungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu untuk mencoba mengubahnya.



Brager dan Specht (1973) menyatakan bahwa seorang pengorganisir rakyat harus memiliki keterampilan teknis dan keterampilan mengungkapkan diri. Keterampilan teknis adalah seperti apa yang diungkapkan dalam kutipan di atas tadi: 'cukup cerdas', maksudnya suatu kemampuan untuk memikirkan akibat-akibat dari suatu tindakan, kemampuan untuk memikirkan apa yang mungkin akan terjadi. Keterampilan mengungkapkan diri mencakup: 'rasa humor', 'senang bertemu dengan orang-orang baru', dan 'terbuka kepada semua orang'. Yang agak kurang jelas adalah beberapa jenis kemampuan yang terletak di antara dua jenis keterampilan tersebut, misalnya: 'keakuan yang kuat, tetapi bukan keakuan yang besar', 'keyakinan kuat akan kemampuan dirinya sendiri', atau 'keyakinan bahwa sistem yang ada tidak bermanfaat bagi rakyat awam dan secara bersungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu untuk mengubahnya'. Namun, dua jenis keterampilan teknis dan pengungkapan diri ini terlalu sedikit dan terbatas untuk mencakup berbagai jenis kemampuan yang sangat kaya dan beragam yang pernah digambarkan oleh para pengorganisir rakyat selama ini.

Karena itu, perlu suatu uraian yang lebih lengkap mengenai jenis keterampilan dan ciri-ciri kepribadian seorang pengorganisir rakyat. Kami mengusulkan ada tiga jenis, sebagai berikut:

Pandangan Perubahan (*Change Vision Attributes*). Yakni tentang bagaimana seorang pengorganisir rakyat memandang dunia ini dalam pengertian politik, cita-cita perubahan sosial yang diidamkannya, pandangannya tentang kekuasaan yang didukung oleh semua jenis keterampilan teknis maupun keterampilan berhubungan dengan orang lain. Tentu saja, semua keterampilan teknis dan berhubungan dengan orang lain itu adalah dalam rangka menunjang pandangan pribadinya mengenai perubahan sosial. Pandangan perubahan sosial inilah yang menentukan ciri-ciri kepribadian khas dan tertentu seorang pengorganisir rakyat, seperti keteguhan sikap dan pengabdian yang memungkinkannya terus-menerus berupaya mencapai tujuan-tujuan perubahan sosial yang diidamkannya.

Keterampilan Teknis (*Technical Skills*). Seorang pengorganisir rakyat harus memiliki dua jenis keterampilan teknis —yang bermanfaat bagi penanganan isu atau masalah yang dihadapi, dan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara sehat dan efektif. Keterampilan teknis yang berkaitan dengan penanganan isu antara lain adalah kemampuan melakukan analisis isu tersebut, menganalisis lawan dan struktur kekuasaan yang ada, kemampuan mengembangkan dan melaksanakan berbagai strategi dan taktik gerakan, kemampuan menilai pencapaian hasil dan sasaran ke arah tujuan akhir perubahan sosial, juga kemampuan dalam melakukan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan (*public relations*) dan berkomunikasi dengan media massa. Keterampilan teknis yang berkaitan dengan efektivitas organisasi, antara lain, kemampuan merumuskan, membangun, dan mengembangkan suatu struktur kelembagaan yang memadai untuk merekrut dan melibatkan para anggota, kemampuan membentuk dan mengembangkan kelompok-kelompok kerja (panitia aksi, satuan tugas, dewan koordinasi, koalisi, dan sebagainya), serta kemampuan mencari dana dan mengelola organisasi, merencanakan anggaran, melakukan perundingan dan menangani perjanjian, menyelia penugasan, mengalokasikan sumberdaya, menyusun rencana program, dan seterusnya. Semua keterampilan teknis ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir perubahan sosial yang diidamkan sang pengorganisir.



Keterampilan Berhubungan dengan Orang Lain (*Interactional Skills*). Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau keterampilan mengungkapkan diri ini mencakup kemampuan memberi jawaban dan memahami orang lain, kemampuan secara tepat menilai dan bergaul dengan orang lain atau kelompok orang, juga kemampuan memilih, mendidik dan mengembangkan potensi anggota dan pemimpin organisasi. Semua keterampilan ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan perubahan sosial yang diidamkan oleh sang pengorganisir, karena sangat memberdayakan anggota dan pemimpin organisasi untuk memiliki kekuatan yang diperlukan melalui proses pengorganisasian.

Pandangan perubahan, keterampilan teknis, dan keterampilan berhubungan dengan orang lain, dalam kenyataannya, sering jumbuh satu sama lain, tetapi tetap ada perbedaan yang jelas di antara ketiganya.

Pandangan akan Perubahan

Para pengorganisir rakyat memiliki perbedaan pemahaman tentang bagaimana perubahan harus dilakukan dan dicapai. Selain perbedaan dalam cara tersebut, mereka pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan tentang arah perubahan yang akan dicapai. Kehendak melakukan perubahan inilah yang membuat para pengorganisir umumnya memiliki beberapa ciri kepribadian yang sama, yakni ketegaran untuk memperjuangkannya meskipun hal itu harus mereka lakukan seorang diri, tanpa memedulikan kedudukan mereka yang terpinggirkan di tengah masyarakat, tanpa memedulikan berbagai kegagalan yang mereka hadapi. Ketahanan seorang pengorganisir, pertama kali dan terpenting, adalah sangat ditentukan oleh sikap pemihakan dan pengabdian mereka yang tegar. Pengabdian mereka lakukan dengan memasukkan filosofi politik pribadi mereka ke dalam filosofi, isu dan tujuan-tujuan organisasi, memengaruhi basis massa dan para anggota organisasi. Singkatnya, mereka selalu membawa pandangan politik pribadi mereka menjadi bagian dari pandangan organisasi.

Para anggota organisasi biasanya menghargai pengabdian mereka itu secara tidak langsung. Mereka mengagumi kemampuan dan kemauan sang pengorganisir untuk bekerja tanpa kenal waktu dan dengan bayaran kecil atau bahkan tanpa bayaran sama sekali. Kemauan dan kesediaan sang pengorganisir untuk bekerja keras inilah yang membuktikan dorongan hasrat mereka yang tidak mementingkan diri sendiri (*selfless*), yang tidak terlalu mementingkan imbalan-imbalan material. Keteguhan hati dan ketahanan para pengorganisir adalah kualitas pribadi yang mereka miliki sebagai pemimpin yang, umumnya, memang jarang dimiliki oleh para anggota biasa suatu organisasi. Umumnya, para pengorganisir juga sepakat bahwa benih-benih dari sikap pemihakan mereka yang teguh itu adalah dasar dari pandangan-pandangan politik pribadi mereka.

Para pengorganisir beragam dan berbeda dalam cara bagaimana mereka menanggapi berbagai akibat dari pilihan sikap pemihakan tersebut. Ada yang menanggapinya dengan cara membatasi kegiatan mereka di bidang lain. Mereka kemudian menemukan bahwa mungkin saja mereka sering tidak banyak waktu lagi berkumpul dengan keluarga atau kerabat lain, bahkan ada yang akhirnya memilih tetap membujang 'sebagai tuntutan yang memang tak bisa dihindari akibat kerja yang tak kenal waktu, jadwal yang terus berubah-



ubah dan sulit dipastikan, serta kepuasan hati menikmati proses keterlibatan yang menyenangkan. Ada juga yang sudah pernah mengalami masa kelelahan raga dan perasaan sebagai akibatnya, lalu mencoba memisah-misahkan secara jelas bagian-bagian hidup mereka, sedemikian rupa menciptakan ruang bernapas tersendiri antara dunia pekerjaan dengan dunia keluarga dan kerabat.

Para pengorganisir juga omong soal 'keterampilan bertahan' (*survival skills*) yang akan menyanggah mereka jika dihadapkan pada tekanan dan kekecewaan dalam proses pengorganisasian. Paling utama dari keterampilan ini adalah rasa humor, terutama karena sebagian besar isu atau masalah yang dihadapi dalam pengorganisasian memang merupakan isu atau masalah yang sangat rumit dan berat. Perbendaharaan 'humor-humor yang mencekik' inilah yang biasanya mereka gunakan untuk menghibur diri dari tumpukan beban kerja berlebihan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh organisasi.

Keterampilan bertahan terpenting kedua adalah kemampuan untuk menghindari sebanyak mungkin kejadian-kejadian, tekanan-tekanan, serangan-serangan dan kekeliruan-kekeliruan yang bersifat mempribadi. Memang penting bagi seorang pengorganisir untuk selalu mampu membedakan dirinya dengan orang kebanyakan, tidak merasa orang-orang melakukan sesuatu atau berpikir seperti dirinya, karena dalam kenyataannya memang mereka berbeda karena 'menjadi seorang pengorganisir rakyat'.

Tekad dan disiplin pribadi adalah sikap perilaku yang sangat membantu seorang pengorganisir rakyat untuk tetap bisa bertahan dari berbagai tekanan berat tanpa dukungan sumberdaya yang memadai dan banyak kegagalan yang mungkin dialaminya. Mereka memiliki tekad kuat untuk mencapai tujuan yang membentuk kemampuan pribadi untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri (*selfdirection*).

Pandangan perubahan yang dimiliki oleh para pengorganisir rakyat membentuk kemantapan sikap, ketekunan pengabdian dan disiplin keras pribadi mereka. Ciri-ciri kepribadian semacam ini bersifat mutlak (*sine qua non*) bagi seorang pengorganisir rakyat. Keterampilan teknis dan keterampilan berhubungan dengan orang lain juga harus terus dikembangkan dan ditingkatkan, tetapi tetap harus selalu menunjang pandangan dasarnya. Seorang pengorganisir pernah bilang:

Anda harus siap menerima tekanan yang sangat berat, karena Anda memang akan menghadapi banyak sekali tentangan dan penolakan. Apakah Anda bisa menghadapinya dengan baik, atau apakah Anda justru balik menghantam habis orang-orang itu —maksudnya anda menyikat dan menyingkirkan mereka selama-lamanya— dua-duanya akan membawa akibat yang sangat berbeda. Anda harus memiliki sikap yang jelas mengapa penting melakukan sesuatu, dan hal itu membutuhkan tindakan untuk membuatnya terlaksana, lalu menuntut Anda untuk meyakinkan orang lain agar mau melakukannya juga dan tahu bagaimana cara melakukannya. Semua itu memerlukan kemampuan memperkirakan yang cukup agresif. Apa yang ingin saya katakan adalah agar mampu bertahan, keteguhan sikap adalah penting sekali. Anda mungkin nampak seperti seorang yang agak pemalu, mungkin tidak terlalu fasih omong, tetapi jika Anda tetap teguh dalam pendirian, akan membuat banyak hal menjadi mungkin. Inilah yang mengagumkan pada diri para pengorganisir rakyat. Mereka mampu membuat banyak hal terjadi karena mereka tidak pernah menyerah, karena mereka terus saja mengajak orang,



karena mereka terus saja mencoba, dan mereka membuat orang-orang akhirnya mengakuinya.

Keterampilan Teknis

Banyak pengorganisir rakyat menganggap diri mereka sebagai pakar dalam berbagai hal teknis. Keterampilan teknis yang mereka miliki dibagi dalam dua jenis: yang berkaitan dengan penanganan isu, dan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara sehat dan efektif.

Keterampilan yang berkaitan dengan Penanganan Isu. Kepakaran dalam proses pengorganisasian rakyat ini —yakni keterampilan mengidentifikasi dan merumuskan isu serta keterampilan menyusun strategi dan melaksanakannya— adalah salah satu tahap terpenting dalam pengembangan kemampuan seorang pengorganisir rakuayat. Keterampilan ini mencakup pengetahuan tentang bentuk-bentuk pengorganisasian dalam berbagai keadaan yang khas serta cara-cara melaksanakannya —antara lain adalah kemampuan untuk menerjemahkan masalah-masalah perseorangan menjadi masalah bersama; kemampuan melakukan analisis, memilah-milah dan merumuskan kembali suatu permasalahan sedemikian rupa sehingga mengarah pada tindakan nyata; kemampuan memusatkan perhatian pada inti persoalan dan bukannya pada hal-hal sepele dari suatu isu tertentu; kemampuan melakukan analisis menyeluruh terhadap suatu isu dan keterampilan melakukan pengkajian data mengenai isu tersebut; kemampuan mengubah fokus isu organisasi secara cepat dan tepat; kemampuan merumuskan sasaran pencapaian program dan strategi pelaksanaannya, jika perlu membuat penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; serta kemampuan memikirkan kemungkinan-kemungkinan akibat dari suatu isu terhadap organisasi secara keseluruhan, mengevaluasi efektivitas kinerja organisasi melaksanakannya. Karena itu, seorang pengorganisir rakyat harus memiliki sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan isu tersebut, termasuk informasi mengenai kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan hukum, berbagai program dan hasil-hasil penelitian. Semua itu jelas membutuhkan penguasaan terhadap rincian permasalahan, ingatan kuat terhadap sejumlah besar informasi, dan ketekunan analisis terus-menerus.

Para pengorganisir rakyat tidak hanya harus sadar akan isunya, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan sosial-politik di mana dia bekerja serta mampu memengaruhinya dengan baik. Para pengorganisir harus memperbaharui terus-menerus analisis mereka tentang kekuasaan dalam bidang atau isu yang mereka geluti, tetap mengikuti perkembangan keadaan tentang siapa yang menguasai apa, siapa berhubungan dengan siapa saja dan mengapa, tentang basis-basis kekuatan berbagai lembaga dan perseorangan dan celah-celah kerentanan mereka. Analisis ekonomi tentang siapa yang memiliki apa, siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang dirugikan, adalah hal mendasar yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kekuasaan semacam itu. Juga penting adalah analisis tentang pelaku-pelaku kunci—perseorangan maupun kelompok yang memiliki kekuasaan cukup besar untuk memengaruhi suatu isu—serta bagaimana dan mengapa mereka terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sekali para pengorganisir telah terbekali dengan hasil-hasil analisis kekuasaan, mereka



kemudian membutuhkan keterampilan membentuk pendapat umum —di kalangan warga masyarakat awam, para pelaku kunci, juga para lawan— tentang isu tersebut, tentang siapa yang berkepentingan dan apa saja kepentingannya, tentang organisasi mereka sendiri dan kepentingan-kepentingannya. Inilah keterampilan berhubungan dengan masyarakat (*public relation skills*), mencakup pengetahuan tentang bagaimana cara media massa bekerja dan bagaimana menarik perhatian mereka terhadap apa yang diperjuangkan oleh organisasi dan, pada saat yang bersamaan, mampu menjamin bahwa apa yang tampil dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik memang benar-benar mewakili pandangan organisasi. Para anggota suatu organisasi aksi sosial umumnya sangat menghargai keterampilan teknis yang dimiliki oleh para pengorganisir mereka. Dalam banyak kasus, penghargaan itu malah dinyatakan dalam bentuk kekaguman.

Keterampilan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Organisasi secara Sehat dan Efektif. Hampir semua pengorganisir rakyat (kecuali mereka yang bekerja pada organisasi yang sudah besar dengan sejumlah tenaga staf administrasi khusus) harus memiliki keterampilan teknis yang dapat digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Keterampilan jenis ini mencakup kemampuan merancang pelatihan untuk para anggota, kemampuan membentuk struktur pembuatan keputusan dan penugasan yang efektif (seperti kepanitiaan, satuan tugas, atau dewan koordinasi), kemampuan melibatkan berbagai ragam orang yang berbeda dalam tugas-tugas bersama dan menyenangkan semuanya, kemampuan menyelia dan mengarahkan staf, kemampuan merancang kegiatan pencarian dana, kemampuan merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berbeda secara serempak, juga kemampuan untuk membagi kekuasaan dan bahkan menerima masukan/pengarahan dari para anggota organisasi.

Para pengorganisir dan banyak anggota organisasi biasanya kurang memberi perhatian pada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara keberlangsungan hidup organisasi—khususnya kemampuan untuk menjaga sistem pertanggungjawaban dan akuntansi keuangan, terutama kepada sumber-sumber pendanaan mereka. Keterampilan ini mencakup keterampilan dasar pembukuan, kemampuan mengumpulkan dan mengolah informasi program, kemampuan menulis laporan, serta keterampilan menyajikan informasi dan memfasilitasi pertemuan.

Keterampilan Berhubungan dengan Orang Lain

Jika keterampilan-keterampilan teknis berkaitan dengan otak para pengorganisir, maka hati mereka lebih berkaitan dengan pekerjaan berhubungan dengan orang lain. Brager dan Specht (1973) menyebutnya sebagai ‘keterampilan mengungkapkan diri’ (*expressive skills*). Orang-orang dan keadaan di mana para pengorganisir rakyat berjumpa dengan mereka membutuhkan berbagai ragam dan jenis keterampilan berkomunikasi dan melakukakan hubungan satu sama lain. Para anggota organisasi apa pun juga selalu menekankan pentingnya jenis keterampilan ini ketimbang keterampilan teknis lainnya. Ini berarti para anggota organisasi itu sendiri harus juga memiliki keterampilan ini ketika bekerja bersama para pengorganisir mereka. Bahkan pada organisasi yang bersifat nasional sekalipun, di mana kontak-kontak pribadi antar anggota lebih jarang terjadi dibanding pada organisasi lokal, para anggotanya pun masih omong soal dampak, baik atau buruk, dari dina-



mika hubungan seorang pengorganisir ketika menghubungi mereka dengan cara melakukan kunjungan rumah yang jarang sekali terjadi, melalui surat tertulis atau percakapan telepon. Para pengorganisir, umumnya, memang menekankan pentingnya keterampilan berkomunikasi ini dalam kaitannya langsung dengan jumlah dan intensitas kontak mereka dengan para anggota, basis massa atau bahkan juga dengan sasaran atau lawan.

Keterampilan ini dapat dibagi dalam tiga jenis: (1) keterampilan seorang pengorganisir sebagai pengirim pesan; (2) sebagai penafsir pesan; dan (3) sebagai pembagi pesan.

Pengirim Pesan (*Message Sender*). Para pengorganisir rakyat biasanya omong soal kebiasaan mereka yang harus menjamin terjadinya tanggapan balik yang diharapkan dari para anggota organisasi maupun pemimpin masyarakat sekitar. Keterampilan memperkirakan ini adalah kemampuan untuk menggambarkan kemungkinan-kemungkinan tanggapan yang khas dari masyarakat. Dalam hal ini, seorang pengorganisir rakyat berperan ibarat seorang pengilham dan penggagas (*impresario*), teladan sekaligus sumber ilham atau gagasan itu sendiri. Maka apa yang terpenting adalah bahwa sang pengorganisir harus memiliki 'kemampuan bertindak secara meyakinkan'. Para pengorganisir harus sadar betul bahwa diri mereka dijadikan teladan oleh orang lain, mewakili suatu citra-diri yang diharapkan oleh para anggota dan pemimpin organisasi. Manfaat utama dimilikinya kemampuan ini adalah justru untuk mengilhami orang lain agar mau bertindak, bukan terutama menonjolkan keunggulan pribadi atau organisasi:

Saya kira Anda akan berusaha selalu tampil sebagai seorang pemberita yang baik. Bukannya tidak optimistik, tetapi cukuplah kalau Anda katakan saja, 'mari kita lihat dulu' ketika orang-orang berteriak 'Tidak!'. Sebaiknya mengatakan bahwa segala sesuatu adalah mungkin, tetapi sebaiknya pula mengatakan mari kita coba lihat apa saja kebaikan yang mungkin kita peroleh dengan mengerjakan hal itu. Jadi, tempalah beberapa orang agar menjadi sangat jelas bagi mereka bagaimana caranya mereka bisa bertindak dalam rangka mencapai apa yang mereka inginkan.

Peran sebagai pengirim pesan bagi seorang pengorganisir memerlukan kemampuan untuk membuat dirinya disukai dan dipercaya oleh orang lain. Karena seorang pengorganisir dituntut mampu menyampaikan pesan secara tepat guna kepada setiap orang yang berbeda, maka dia dituntut pula untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan khas dari orang-orang tersebut. Orang-orang harus merasa bahwa sang pengorganisir memang benar-benar tertarik pada permasalahan mereka, bahwa sang pengorganisir memang mampu mengomunikasikan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mereka pun memahami akibat-akibatnya bagi diri mereka sendiri.

Para pengorganisir rakyat harus sadar betul menampilkan diri, prilaku, sikap, kebiasaan dan semangat mereka sebagai teladan bagi orang lain. Pengorganisir harus mampu menunjukkan apa yang mungkin, apa yang bisa dilakukan, dan tahu betul mana saja dari prilaku dan sikapnya yang bisa memengaruhi orang lain atau membuat orang lain mau mengikutinya.

Penafsir Pesan (*Message Interpreter*). Keterampilan mengungkapkan diri atau berhubungan dengan orang lainnya adalah kemampuan melakukan analisis, memahami, mendengarkan dan menyampaikan kembali pikiran dan perasaan orang-orang yang diajak terlibat ke dalam organisasi. Para pengorganisir rakyat harus belajar tentang bagaima-



na para anggota organisasi berpikir, tentang 'keyakinan-keyakinan' mereka, tentang aras dan pusat kemarahan mereka, tentang bagaimana mengkaitkan perasaan mereka yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil dengan agenda organisasi, tentang bagaimana cara mengajak mereka bersedia bergabung dalam organisasi. Jika punya keterampilan ini, maka pengorganisir akan mampu membantu orang-orang merasa dan memahami bahwa mereka tidaklah sendirian menghadapi persoalan, bahwa mereka tidak akan dipersalahkan karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, bahwa mereka (sama seperti yang lainnya juga) memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan tidak adil. Hakikatnya adalah bahwa seorang pengorganisir rakyat harus mampu meyakinkan kepada orang-orang bahwa persoalan pribadi mereka dapat dijadikan persoalan umum bersama yang dapat dijadikan dasar oleh organisasi untuk bertindak secara bersama pula. Seorang pengorganisir pernah menguraikan proses ini sebagai berikut:

Apa yang saya lakukan adalah membuat suatu kendaraan sebagai wahana bagi orang-orang agar mampu bertindak demi kepentingan mereka sendiri secara lebih berhasil. Saya akan bicara pada beberapa orang yang, misalnya, baru saja ditolak permohonan kreditnya oleh bank. Mereka merasa dipermalukan, sesuatu yang selalu diberlakukan kepada mereka semata-mata hanya karena mereka adalah buruh miskin. Inilah saatnya untuk bicara kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang fakta bahwa mereka memang telah diperlakukan tidak adil, bahwa bank-bank memang hanya mau meminjamkan uang kepada perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang memiliki jaminan harta dalam jumlah besar. Inilah saat menjelaskan apa yang mereka tidak atau belum pahami, tentang apa saja yang mestinya menjadi hak mereka, dan bahwa semuanya OK! kalau mereka mau terlibat mencoba melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan... soalnya mereka selama ini memang belum terbiasa memeriksa persoalannya sejauh itu dan biasanya sulit memahami adanya perlakuan tidak adil atas diri mereka. Saya pun mulai menjelaskan kepada mereka tentang ketidakadilan, memperlihatkan kepada mereka banyak hasil penelitian yang membuktikannya. Saya menjelaskan isunya sedemikian rupa jelasnya bahkan dengan cara yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh ibu saya sendiri sekalipun. Sesudah itu, mereka pun akan menjelaskan hal yang sama kepada orang lainnya lagi.

Salah satu yang membuat seorang pengorganisir rakyat berhasil menjalankan perannya sebagai penafsir pesan ini adalah kemampuan untuk memahami pesan orang lain, kemampuan mendengarkan mereka, dan menggunakannya untuk membentuk cara pikir dan sikap mereka. Dalam hal ini, yang terpenting adalah seberapa baik sang pengorganisir memahami pikiran-pikiran anggota organisasi serta membantu mereka memutuskan sesuatu atas dasar pilihan mereka sendiri. Para pemimpin organisasi biasanya sangat menghargai kemampuan para pengorganisir mereka yang juga menghargai dan memahami pikiran-pikiran mereka sendiri. Mengancam, menggertak dan menghujat mereka karena tak mau aktif adalah sama sekali tidak akan membantu. Para anggota organisasi merasa didukung dan dihargai jika sang pengorganisir mampu menjelaskan dengan baik manfaat dari keterlibatan aktif mereka. Sehingga, mereka akan merasa kehilangan sesuatu jika tidak ikut terlibat aktif.

Para pengorganisir harus menyampaikan kepada para anggota organisasi bahwa mere-



ka harus membuat keputusan atas dasar pilihan sadar mereka sendiri, termasuk penilaian terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, tak terkecuali sang pengorganisir sendiri. Bagian terpenting dari keterampilan menafsirkan pesan adalah membantu orang-orang berpikir dan bertindak berdasarkan kemauan dan kesadaran mereka sendiri, melatih mereka mengembangkan gagasan-gagasan mereka sendiri ketimbang hanya mendengarkan apa saja yang dikatakan orang lain.

Pembagi Pesan (*Message Sharer*). Kemampuan seorang pengorganisir rakyat untuk menciptakan dan memelihara hubungan pribadi yang akrab dengan para anggota organisasi adalah apa yang kita sebut sebagai keterampilan membagi pesan. Keterampilan ini mengurangi keangkeran kekuasaan dan jarak yang terjadi antara diri mereka dengan para anggota organisasi. Sebagai pakar teknis yang dihormati atau mungkin bahkan dikagumi oleh para anggota, mereka mungkin sering merasa sungkan dan tidak nyaman terhadapnya. Para pengorganisir rakyat harus menolak pandangan jenis profesi pelayanan lainnya yang menganggap perlu adanya semacam ‘jarak profesional’ antara diri mereka dengan para klien yang mereka layani. Sebaliknya, seorang pengorganisir rakyat justru harus membangun suatu ikatan pribadi dengan para anggota organisasi dalam suatu kedudukan setara sebagai sesama manusia, sebagai kawan seperjuangan. Sebagai bagian dari kemampuannya memimpin adalah justru seberapa baik sang pengorganisir menyapa dan menyalami para anggotanya. Dia perlu tahu banyak tentang kehidupan pribadi para anggotanya, sehingga dia sangat fasih atau tidak canggung lagi untuk menyapa mereka, misalnya, tentang bagaimana keadaan anak-anak mereka atau bahkan bisa menyebut nama kucing atau anjing piaraan mereka.

Tapi, hubungan informal yang dimilikinya dengan para anggota organisasi tidak mesti menjadi penghalang baginya untuk bertindak tegas menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Para pengorganisir juga harus membahas bersama para anggota apa saja harapan mereka tentang tugas-tugas dan peran yang harus mereka jalankan, oleh mereka sendiri maupun oleh para anggota. Organisasi aksi sosial adalah suatu sistem yang manusiawi, tetapi sekaligus juga suatu sistem yang diciptakan untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam isu-isu tertentu. Dengan demikian, hubungan-hubungan antar pribadi yang akrab dan hangat harus selalu dibuat berimbang dengan tuntutan tugas agar para anggota organisasi bekerja keras mencapai hasil yang diinginkan bersama. Para pengorganisir harus membahas pembagian peran dan tugas ini dengan para anggota dalam percakapan-percakapan pribadi, dalam pertemuan-pertemuan atau rapat anggota dan, jika perlu, mengadakan pelatihan khusus untuk hal tersebut. Dalam berbagai forum itulah para pengorganisir dapat menyampaikan harapan-harapan mereka sendiri tentang peran apa yang mereka dapat jalankan. Adalah penting bagi para pengorganisir untuk mengomunikasikan secara tegas bahwa ada banyak pekerjaan dan tugas yang harus dijalankan dan bahwa mereka jelas tidak sanggup mengerjakannya sendirian.

Para anggota organisasi umumnya menghargai berbagai jenis dan ragam ketrampilan yang dimiliki oleh pengorganisir mereka. Baik para anggota maupun para pengorganisir sendiri sering menekankan bahwa para pelaku lain dalam organisasi diharapkan dapat dibentuk lebih banyak oleh pengorganisir, bukan sebaliknya. Ini sekali lagi menegaskan pentingnya peran pusat seorang pengorganisir dalam organisasi. Tetapi, peran pusat ini



hanya akan terlaksana dengan baik jika para anggota organisasi juga berperan aktif dan menjadi pusat atau inti dari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan organisasi:

Menjadikan mereka semakin bersemangat terlibat aktif dan menjadikan organisasi benar-benar berlandaskan pada harapan mereka. Harus dibuat sedemikian rupa sehingga para anggota tidak merasa sungkan atau malas mengerjakan sesuatu, tetapi merasa bahwa kerja sekecil apa pun tetap penting dan berguna dalam organisasi. Jika setiap orang tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian tugasnya, maka kita pun tak akan berada di tempat di mana kita sekarang berada. Jadi, hargailah apa yang dikerjakan oleh orang lain, karena mereka pun telah mengorbankan sebagian dari kehidupan pribadi mereka untuk mengerjakan hal itu. Jadi, saya pernah bilang kepada Ibu Ratih: 'Omong-omong dengan lima orang anggota saja di rumah Anda adalah penting bagi keberhasilan pertemuan kita nanti dengan camat dan bupati. Karena, kalau mereka datang, kita menjadi lebih kuat dan yakin dalam pertemuan itu. Dan, saya sangat menghargai Anda meluangkan waktu mengerjakan ini semua, karena saya pun tahu kalau Anda sebenarnya sudah sangat sibuk dan sedang pusing dengan anak-anak anda yang sedang sakit. Bantuan Anda ini akan sangat membantu pertemuan kita itu nanti berhasil dengan baik.

Maka semakin jelas bahwa ada sekian banyak kemampuan, sikap-sikap dan perilaku yang diharapkan bagi seorang pengorganisir rakyat yang 'ideal'. Ini benar-benar tantangan serius bagi mereka yang ingin mengorganisir rakyat. Tetapi memang tidak mungkin mengharapkan seorang pengorganisir rakyat yang darah-dagingnya sepenuhnya memenuhi semua harapan ideal itu. Jadi, paling banter, para pengorganisir dapat menggunakan semua harapan ideal itu untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri mereka sendiri, lalu berusaha mencoba memperbaiki apa saja yang masih kurang pada diri mereka selama ini.

Harapan-harapan yang banyak itu mungkin juga akan menimbulkan masalah bagi para pengorganisir yang para anggotanya terus saja menuntut mereka memiliki semua bakat dan kemampuan ideal tersebut, lalu akhirnya menjerat semua staf organisasi ke dalam tuntutan-tuntutan yang mustahil dipenuhi. Tuntutan-tuntutan itu memang menimbulkan masalah terutama karena keterampilan-keterampilan ideal tersebut sering banyak yang saling bertentangan satu sama lain.

Kita melihat ada kecenderungan yang sedemikian bersemangat untuk menderetkan satu daftar perilaku dan tugas seorang pengorganisir yang saling bertentangan itu sebagai sesuatu yang dianggap semuanya penting. Kesenangan berkumpul dan berteman dari seseorang yang 'disenangi banyak orang' akan mudah membentuk dan memelihara hubungan akrab dan hangat dengan beragam orang yang berbeda, tetapi sifat ini mungkin tidak akan ditemukan pada diri seseorang yang memiliki keterampilan handal dalam melakukan riset, menulis makalah dan menyusun strategi program. Harapan bahwa seorang pengorganisir rakyat mampu membangun hubungan akrab dengan siapa saja dan, pada saat bersamaan, juga mampu mempertahankan objektivitas dan jarak analitis dengan siapa pun, adalah tuntutan yang saling bertentangan, jika tidak malah mustahil sama sekali.

Seorang pengorganisir pada suatu organisasi tingkat nasional yang bertugas mengerahkan massa, tetapi sebelumnya pernah bekerja langsung di tengah masyarakat lapis bawah di tingkat lokal, mungkin akan melihat ada banyak pertentangan dalam berbagai tun-



tutan terhadapnya. Namun, dia ‘memecahkan’ persoalan ini dengan tetap bekerja pada organisasi nasional tersebut yang memang hanya membutuhkan keahlian khususnya saja. Dia lantas memahami bahwa keterampilan menjalin hubungan baik dengan orang lain memang dibutuhkan pada tingkat lokal, tetapi keterampilan menulis secara analitis adalah sama pentingnya pada tingkat nasional. Dia merasa kariernya mulai bergeser ke arah jenis pekerjaan baru yang sangat disukainya dan—pada akhirnya—meyakini bahwa dirinya tidak akan efektif lagi pada tingkat lokal. Adanya pengkhususan keahlian semacam itu dapat terjadi dalam suatu organisasi besar di mana orang lain dapat mengambil peran yang masih lowong, tetapi hal ini bukanlah keadaan umum yang tersedia bagi kebanyakan pengorganisir rakyat. Pada organisasi di mana para profesional yang dibayar untuk penyelesaian tugas-tugas tertentu cenderung mengerjakan tugas-tugas yang mereka sukai saja, jelas berbahaya bagi organisasi karena tugas-tugas lainnya kemungkinan besar dibiarkan terbengkalai begitu saja.

Di balik berbagai tuntutan peran yang sangat beragam dan sering saling bertentangan tersebut, persoalan lain yang dialami oleh para pengorganisir adalah masalah ketersendirian (*isolation*). Banyak yang omong soal apa yang oleh Allinsky (1971) disebut sebagai kenyataan seorang pengorganisir rakyat sebagai ‘orang luar yang berada di dalam’ (*inside outsider*), atau apa yang oleh Burghardt (1982) disebut sebagai ‘kedudukan pengorganisir yang berada di pinggiran’. Bahkan jika para pengorganisir telah terlibat secara intensif sekali dengan kelompok masyarakat yang diorganisirnya, tetap saja mereka harus menerima kenyataan sebagai orang luar yang tersendiri. Ketersendirian ini dapat tampil dalam beberapa cara:

- Seorang pengorganisir memang memiliki tugas tersendiri yang orang lain memang tidak dapat melakukannya. Dia harus meyakinkan para anggota organisasi bahwa tugas mereka itu memang penting. Padahal, pada saat yang sama dia harus membantu para anggota semakin meningkatkan peran mereka dalam organisasi. Pada saat inilah, bisa jadi perang sang pengorganisir akan mulai berkurang atau malah dianggap berlebihan.
- Seorang pengorganisir memang diharapkan sebagai seorang yang tahan banting dalam berbagai tugas atau keadaan yang melelahkan secara fisik maupun perasaan. Akibatnya, dia selalu diharapkan siap menularkan energinya kepada para anggota lain, mengilhami dan menyemangati mereka, dan sama sekali tidak boleh goyah oleh rendahnya semangat atau pasifnya anggota yang lain.
- Seorang pengorganisir dituntut untuk selalu memahami keterbatasan-keterbatasan para anggota organisasi, tetapi sekaligus menghargai juga nilai-nilai, norma-norma dan tujuan-tujuan yang mereka yakini. Namun, pada saat yang sama, dia juga tidak boleh terbatas oleh semua itu. Dia juga harus selalu berusaha bersikap objektif terhadap berbagai kemungkinan kemencengan (*biases*) pribadi para anggota organisasi.

Semua tuntutan yang menekan tersebut adalah bagian yang tak bisa dihindari dalam kerja seorang pengorganisir rakyat. Ada dua hal yang penting diperhatikan dalam hal ini, yakni adanya kesenjangan antara pandangan sang pengorganisir dengan pandangan para anggota tentang proses pengorganisasian, dan adanya perbedaan tajam antara pandangan sang pengorganisir dengan kenyataan yang dia hadapai dalam pelaksanaan tugas yang sesungguhnya.



Kecocokan antara Tugas dengan Harapan

Kita telah menguraikan bahwa para pengorganisir rakyat umumnya akan tetap bertahan dan terus melakukan tugas-tugasnya jika memang ada kecocokan antara: (1) tujuan-tujuan pengorganisasian dan dorongan hasratnya untuk mengorganisir [unsur kebutuhan]; dengan (2) prilaku-prilaku dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya [unsur harapan]; dan dengan (3) tugas-tugas nyatanya itu sendiri.

Tugas. Umumnya tugas-tugas seorang pengorganisir rakyat mencakup peran-peran perencanaan, pengelolaan, pembuatan keputusan atau kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan program, membina hubungan dengan masyarakat luas dan pelayanan terhadap anggota. Singkatnya, semua jenis tugas itu dapat dikelompokkan menjadi empat: tugas-tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi, yang berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan dalam organisasi, yang berkaitan dengan pendidikan anggota dan masyarakat luas, dan yang juga berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi.

Tugas-tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi adalah jenis tugas yang paling utama dan terpenting bagi para pengorganisir rakyat. Kenyataannya, inilah tugas mutlak mereka. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam jenis tugas ini: mengkaji isu atau permasalahan yang dihadapi, mengembangkan strategi dan taktik bersama anggota atau kelompok-kelompok kerja khusus, melaksanakan berbagai taktik kampanye dan aksi nyata, mengarahkan proses-proses lobi, dan melatih para anggota lainnya agar mampu melakukan proses-proses tersebut.

Tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan dalam organisasi, antara lain: melatih para anggota dan basis massa organisasi, mengembangkan keterampilan mereka, membangun kepercayaan diri mereka, membantu terciptanya hubungan-hubungan yang baik antar para pemimpin organisasi dan antar para anggota, membentuk kelompok-kelompok kerja, berkomunikasi dengan para pendukung organisasi, dan bekerjasama dengan para pemimpin organisasi dalam perumusan-perumusan kebijakan organisasi. Pada umumnya diperlukan adanya perhatian khusus dalam proses-proses penggalangan anggota dan kelompok kerja dalam organisasi.

Tugas-tugas yang berkaitan dengan pendidikan anggota dan masyarakat luas mencakup kegiatan-kegiatan menjalin hubungan dengan media massa, menulis tentang isu-isu yang diperjuangkan oleh organisasi, mengunjungi dan berbicara dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan melancarkan pendidikan masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi.

Akhirnya, tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan dengan baik, antara lain: mencari dukungan dana, mengelola kantor, membangun sistem pembukuan keuangan, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan staf dan anggota, menyediakan sarana pendukung, mengarahkan pelatihan kader, dan mengurus para relawan.

Kecocokan. Sekarang mari kita lihat kecocokan antara tugas apa yang diharapkan oleh seorang pengorganisir dengan tugas nyata yang dikerjakannya, yakni dengan membandingkan pandangan-pandangannya tentang tujuan-tujuan perubahan yang diperjuang-



kannya, keterampilan-keterampilan yang dimilikinya untuk memperjuangkan perubahan tersebut, dan tugas-tugas nyata yang harus dikerjakannya. Tujuan-tujuan perubahan sosial yang diperjuangkan oleh para pengorganisir rakyat dapat dibedakan menjadi tiga jenis: (1) perubahan sosial yang mendasar dan menyeluruh; (2) peningkatan kemampuan dan kepemimpinan organisasi; dan (3) peningkatan kesadaran umum masyarakat luas.

Dari percakapan dengan banyak pengorganisir rakyat selama ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan mereka itu sangat berkaitan erat dengan jenis keterampilan yang mereka miliki. Misalnya, mereka umumnya lebih memusatkan perhatian pada tujuan perubahan kepemimpinan dan peningkatan kemampuan organisasi dan, karena itu, sangat mementingkan dan menguasai keterampilan-keterampilan membina hubungan dengan orang lain, terutama dengan para anggota dan pemimpin organisasi, dan ternyata memang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ketegangan mulai terjadi ketika sang pengorganisir harus mengerjakan tugas-tugas yang kurang cocok dengan minat atau harapan-harapannya, mengerjakan hal-hal yang bersifat rutin dan sebenarnya dikerjakan pula oleh para pelaku lain dalam organisasi. Karena, tugas meningkatkan kemampuan dan kepemimpinan organisasi memang tidak banyak berkaitan dengan soal-soal teknis dan kerja rutin sehari-hari dalam organisasi. Padahal, tugas-tugas teknis semacam itu juga tetap diharapkan menjadi bagian dari tugas-tugas seorang pengorganisir, meskipun banyak di antara mereka yang umumnya tidak terlalu mementingkannya atau merasa tidak perlu terlalu banyak terlibat mengerjakannya. Hal yang sama juga terjadi terhadap tugas-tugas pelayanan dan pendidikan masyarakat di luar organisasi.

Meskipun demikian, ternyata hanya sebagian kecil saja pengorganisir rakyat selama ini yang merasa adanya ketidakcocokan semacam itu sebagai sesuatu yang sangat serius. Hanya sedikit di antara mereka yang akhirnya tak tahan dan kemudian meninggalkan pekerjaannya.

Lantas, mungkin ada orang yang akan bertanya: mengapa banyak pengorganisir rakyat —tanpa mengabaikan kenyataan kuatnya tekanan, tuntutan dan harapan yang saling bertentangan, jam kerja yang nyaris tak kenal batas waktu, juga biaya terbatas atau bayaran yang sangat rendah— tampaknya tetap senang saja dan puas dengan pekerjaan mereka. Dalam hal ini, para pengorganisir mendamaikan diri mereka dengan tetap melihat tugas-tugas teknis rutin yang mereka kerjakan itu adalah masih dalam jalur apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang tetap perlu dikerjakan dalam rangka menciptakan perubahan. Maksudnya, mereka percaya bahwa salah satu cara untuk memengaruhi jalan dan arah perubahan dalam organisasi adalah dengan mengembangkan kemampuan para pemimpin dan anggota organisasi, sehingga mereka tetap menganggap penting untuk mengerjakan hal-hal yang tampaknya terlalu teknis dan bersifat rutin sekalipun. Padahal, mereka anggap bahwa mereka mestinya mulai lebih banyak mengerjakan tugas-tugas yang lebih bersifat strategis seperti merencanakan program, melakukan pengkajian dan menulis laporan. Jadi, pada hakekatnya, keyakinan para pengorganisir tentang bagaimana memengaruhi terjadinya perubahan dan kemampuan mereka untuk mewujudkan keyakinan tersebut dalam tugas sehari-hari, itulah yang menentukan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka.



Pandangan tentang arah perubahan yang akan dicapai memang sangat memengaruhi bukan cuma bagaimana para pengorganisir memandang tugas-tugas mereka, tetapi juga bagaimana cara mereka bekerja dengan para pemimpin dan anggota organisasi, bagaimana mereka memilih isu, sasaran dan strategi, serta bagaimana organisasi itu sendiri dibentuk dan berfungsi. Mari kita coba lihat sekarang bagaimana pandangan tentang arah perubahan itu memengaruhi kerja seorang pengorganisir rakyat.

Arah & Cara Perubahan

Para pengorganisir rakyat memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri tentang bagaimana dan mengapa perubahan sosial terjadi, suatu “teori yang menghubungkan antara sebab masalah dan tindakan penanggulangannya” (Brager dan Specht 1973: 83). Keyakinan-keyakinan inilah yang kemudian membentuk proses-proses pengorganisasian yang akan ditempuhnya. Jadi, mengetahui apa keyakinan-keyakinan para pengorganisir tentang perubahan sosial, karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana organisasi yang mereka bangun dan kembangkan berjalan mengupayakan pencapaian perubahan sosial tersebut.

Merujuk pada analisis-analisis mengenai organisasi-organisasi aksi sosial (Fisher dan Kling 1990; Gramsci 1971), juga pada pengalaman kami sendiri, kita bisa menyebut keyakinan-keyakinan tersebut sebagai pandangan tentang arah perubahan. Pandangan ini menggambarkan suatu alur sebab-akibat tentang bagaimana perubahan sosial terjadi. Pandangan-pandangan ini meliputi:

- (1) suatu rumusan pengertian tentang perubahan dan tujuan perubahan;
- (2) suatu rumusan tentang sasaran-sasaran yang akan dicapai dan suatu pandangan tentang hubungan antara sasaran-sasaran tersebut dengan organisasi (apakah memang sesuai atau bertentangan dengan tujuan dan sasaran organisasi itu sendiri);
- (3) suatu pemahaman tentang sumberdaya yang harus dimiliki untuk memungkinkan melakukan perubahan yang diinginkan;
- (4) suatu strategi perubahan (bagaimana menggunakan sumberdaya tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran).

Kita dapat membagi empat ‘pandangan tentang arah dan cara perubahan’ ini, yakni: lembaga-lembaga tanding, tuntutan kemajemukan, pendidikan massa aksi, dan cita-cita kharismatik.

Lembaga-lembaga Tanding (*Counter-vailing Institutions*). Ada tiga arah perubahan yang ingin dicapai menurut pandangan ini. Pertama, pengandaian bahwa bagian terbesar rakyat melihat diri mereka sendiri, dan dalam kenyataannya memang demikian, sebagai kaum yang tak berdaya. Jadi, arah perubahan yang harus diperjuangkan oleh suatu organisasi rakyat adalah membantu rakyat merasa atau menjadi dan mampu bertindak secara lebih berdaya. Kedua, mengupayakan terjadinya perubahan-perubahan paling mendasar (*substantive*) dalam isu-isu tertentu yang mereka perjuangkan. Ketiga, membagi kekuasaan secara lebih merata dengan cara memengaruhi para pemegang kekuasaan untuk tunduk kepada tuntutan perubahan yang mendasar tersebut. Pandangan ini sangat sejalan de-



ngan pengertian Gramsci tentang 'kelompok-kelompok tanding' (*subaltern groups*) yang memiliki keyakinan dan kesadaran yang khas tentang bagaimana masyarakat mengada dan bagaimana seharusnya mereka diorganisir (1971: 52-55).

Pandangan ini mengakui bahwa para pemegang kekuasaan adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki kewenangan resmi atau pengaruh tidak resmi. Para pemegang kekuasaan ini dianggap tidak bersedia sama sekali menyerahkan kekuasaan mereka. Suatu organisasi rakyat harus memperjuangkan dan merebutnya dari para pemegang kekuasaan tersebut. Merekalah yang menjadi sasaran pengorganisasian yang harus dipaksa tunduk dan bersedia menyerahkan kekuasaan mereka.

Menggalang sebanyak mungkin orang bergabung ke dalam suatu organisasi resmi yang berdisiplin dan bersifat tetap, dianggap sebagai sumberdaya kekuatan utama bagi perubahan menurut pandangan ini. Maksudnya, semakin besar jumlah anggota, yang bertindak dalam suatu keterpaduan, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki. Maka, strategi perubahan sosial yang ditempuh adalah menggalang sebanyak mungkin massa rakyat ke dalam suatu organisasi, lalu para pengorganisir membantu mereka melihat dan memahami bahwa dengan bersatu bekerja bersama mereka akan memiliki kekuatan, dan bahwa salah satu cara terpenting untuk melakukannya adalah mengarahkan kekuatan mencapai perubahan dalam isu-isu yang mereka prihatinkan. Dengan aktif terlibat merumuskan isu-isu mereka sendiri, maka mereka akan mendesakkan suatu kekuatan yang lebih besar katimbang jika hanya sekadar bereaksi terhadap isu-isu yang diciptakan dan dirumuskan oleh pihak lain terhadap diri mereka (Freire 1968). Kalau organisasi kemudian mampu meraih keberhasilan-keberhasilan yang akhirnya membawa kepada pencapaian tujuan mereka, maka akan membuat para anggotanya merasa dan menjadi lebih berdaya, artinya mereka telah merebut kekuatan dari para pemegang kekuasaan menjadi kekuatan organisasi mereka sendiri.

Tuntutan Kemajemukan (*Pluralist Pressure*). Arah perubahan yang dituju menurut pandangan ini adalah penegakan hukum, peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu yang diperjuangkan (misalnya, perlunya pengesahan Amandemen Persamaan Hak dalam konstitusi, atau penegakan hukum lingkungan hidup secara tegas, dan lain-lain). Pandangan ini mengakui bahwa pemerintah dan sistem hukum yang ada adalah mekanisme yang absah yang bisa digunakan untuk merundingkan dan melaksanakan perubahan sosial. Analisisnya diarahkan untuk menilai apakah pemerintah dan para pelaku politik lain netral, dapat dijadikan sebagai mitra atau sekutu, atau menjadi lawan dalam isu yang diperjuangkan. Para pejabat pemerintah dianggap sebagai pihak yang sebenarnya dapat dilunakkan, mereka dapat dipengaruhi sedemikian rupa agar dapat bekerjasama dan mendukung gerakan atau, paling tidak, netral atau tidak memihak dalam isu yang diperjuangkan. Dengan demikian, pengaruh mereka yang menentang atau menjadi lawan bisa dikurangi sesedikit mungkin.

Pandangan ini menyarankan bahwa orang-orang yang memiliki kepedulian dan sekaligus kepakaran yang cukup memadai dalam isu yang diperjuangkan sangat mungkin mampu meyakinkan para pemegang kekuasaan dan, karena itu, merupakan sumberdaya utama untuk melakukan perubahan sosial. Orang-orang semacam itu bisa saja diajak sebagai bagian dari suatu organisasi maupun sebagai seorang pribadi. Strategi yang ditempuh ada-



lah mengidentifikasi isu, mengumpulkan data untuk melihat jenis kepakaran khusus apa saja yang dibutuhkan, merekrut orang untuk menjalankan program-program pendidikan masyarakat untuk menyebarkan hasil-hasil temuan organisasi, untuk merumuskan saran pemecahan, dan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah agar bersedia menerima usul-usul perubahan yang diajukan.

Pendidikan Massa Aksi (*Mass Education for Action*). Pandangan ini menyatakan bahwa perpaduan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik saat ini mengabaikan hak-hak rakyat kebanyakan, menguasai program sosial dan menciptakan ketidakadilan terlembaga. Arah perubahan yang ingin dicapai adalah menyuarakan adanya kenyataan pengabaian hak-hak rakyat tersebut dalam seluruh proses perumusan kebijakan, dan mendesak suatu perubahan mendasar yang nyata untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. Pemerintah—terutama pada tingkat pusat yang memiliki sumberdaya melimpah dan kekuasaan terpusat yang sangat besar—adalah sasaran utama. Tetapi, para pemegang kekuasaan itu selalu cenderung menolak keras tuntutan rakyat yang terabaikan hak-haknya dan, karena itu, menentangnya. Pandangan ini beranggapan bahwa perubahan sosial hanya dapat dilaksanakan pada periode sejarah tertentu, yakni ketika berbagai peristiwa politik, sosial, dan ekonomi menampilkan adanya sejumlah ‘jendela-jendela peluang’ (Piven dan Cloward 1977).

Maka, sumberdaya utama untuk melakukan perubahan adalah sejumlah besar kelompok-kelompok kepentingan setengah resmi atau perhimpunan-perhimpunan rakyat yang mampu ‘memanfaatkan saat-saat yang tepat’ (*seizing the moment*) untuk mendesak tuntutan perubahan sedemikian rupa kuat kepada para pembuat keputusan politik. Strategi perubahan yang ditempuh didasarkan pada pemahaman tentang perubahan sosial sebagai suatu daur (*cyclical*), yang meyakini bahwa pengorganisasian rakyat adalah suatu proses maju dua langkah ke depan dan, kalau bisa, hanya mundur selangkah dulu ke belakang sebagai anjang-ancang. Demikianlah, pada saat masyarakat luas belum sepenuhnya menerima gagasan-gagasan perubahan yang mereka usulkan, maka sejumlah kecil orang (yakni ‘para pegiat’) melakukan serangkaian analisis politik dan ekonomi serta, melalui media massa dan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat, berusaha membangkitkan dan memelihara terus kesadaran umum tentang isu-isu yang diperjuangkan. Mereka berharap dapat memengaruhi sejumlah besar orang yang, ketika saat atau peluang sejarahnya muncul, dapat dikerahkan untuk bertindak mendesak perubahan. Jika iklim politik, sosial, dan ekonomi memang memungkinkan, para pegiat itu menggalang dan menggabungkan sejumlah besar massa untuk menentang dan menekan pemerintah. Pemerintah kemudian mencoba memperkecil tekanan itu dengan memenuhi sebagian dari tuntutan mereka. Tetapi, pada saat iklim berubah lagi seperti sediakala, pukulan balik terjadi dan beberapa perubahan yang pernah dicapai mungkin juga hilang kembali. Maka, para pegiat tadi mulai lagi dari awal, menyiapkan isu, dan menggalang massa menantikan saat atau peluang berikutnya yang tepat untuk bertindak.

Cita-cita Kharismatik (*Charismatic Vision*). Pandangan perubahan ini hampir sepenuhnya dilandaskan pada nilai-nilai dan keyakinan moral tentang suatu dunia yang lebih baik dan lebih adil. Tujuan arah perubahan yang ingin dicapai adalah agar semua keputusan dan kebijakan sosial mencerminkan dan menegakkan nilai-nilai keadilan dan keju-



jurannya. Sasarannya adalah pemerintah dan perusahaan pemegang kekuasaan yang selama ini menerapkan kebijakan yang dianggap tidak bermoral. Kedua pihak ini dianggap cenderung tidak bersedia mengubah perilaku mereka dan, karena itu, harus dipermalukan atau dibuat sedemikian rupa agar malu melakukannya terus menerus.

Maka, sumberdaya utama untuk melakukan perubahan adalah kemarahan moral (*moral indignation*) yang dinyatakan oleh seorang atau sekelompok kecil pemimpin berwibawa beserta para pengikutnya, tidak jadi soal sekecil apa pun jumlahnya. Strategi yang ditempuh adalah mengamati atau memantau terus menerus semua kebijakan pemerintah dan perusahaan yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan secara moral tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Biasanya, gerakan semacam ini dipimpin oleh seorang atau beberapa orang tokoh atau pemimpin berwibawa di mana rakyat segera bergerak jika menyaksikan atau diyakinkan akan adanya tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang mereka anggap tidak bermoral lagi, yakni dengan memermalukan para pembuat keputusan sehingga mereka mengubah kebijakannya. Bentuk-bentuk tindakan yang ditempuh seringkali sangat keras mengutuk dan menantang berhadapan-hadapan langsung (misalnya, dengan cara pembangkangan sosial).

Umumnya, seorang pengorganisir rakyat meyakini satu saja pandangan arah dan cara perubahan sosial tersebut, meskipun ada juga yang menggabungkan berbagai aspek dari semua pandangan tersebut yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Bagi para pengorganisir rakyat, pandangan-pandangan perubahan sosial ini bukan seperangkat keyakinan yang niskala (abstrak). Sebaliknya, pandangan perubahan sosial yang mereka yakini justru menyediakan panduan bagi mereka tentang apa yang mesti mereka lakukan dengan para anggota organisasi, apa isu yang harus diperjuangkan, bagaimana strategi yang harus ditempuh, dan jenis atau bentuk organisasi macam apa yang mereka hendak bangun atau bekerja di dalamnya. Dalam kenyataannya, dalam berbagai cara, pilihan-pilihan prioritas yang harus dilakukan oleh seorang pengorganisir rakyat, pilihan-pilihan tugas yang ingin mereka kerjakan (dan juga yang mereka ingin hindarkan), serta pilihan-pilihan cara yang mereka jalankan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, semuanya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa pandangan perubahan sosial yang diyakininya.

Kaidah-kaidah asas melakukan tindakan yang dianut oleh seorang pengorganisir rakyat adalah terutama ditentukan oleh pandangan perubahan sosial yang dimilikinya. Kita boleh menyebut ini sebagai metoda praktiknya seorang pengorganisir rakyat. Jika pandangan perubahan sosialnya itu sekaligus merupakan ideologinya, maka metode praktik yang dilakukannya adalah 'ideologi mereka dalam bentuk tindakan'.

Jika pandangan perubahan sosial adalah pandangan niskala tentang cara-cara terbaik untuk memengaruhi perubahan, maka metode praktiknya adalah cara-cara kerja operasionalnya. Metode praktik menjadi panduan bertindak bagi seorang pengorganisir tentang apa yang harus dikerjakannya pada saat dan keadaan tertentu. Metode-metode praktik ini menentukan pemahaman seorang pengorganisir tentang permasalahan-permasalahan rakyat, kemampuan apa yang diharapkan dari mereka untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut serta menentukan peran-peran, proses-proses, dan capaian hasil yang diinginkan.



Metode-metode praktik pengorganisasian belum banyak dikaji dan diurai dalam kepustakaan tertulis selama ini. Harry Boyte pernah membuat satu daftar panjang berbagai metodologi pengorganisasian yang berakar pada tradisi gerakan-gerakan sosial dasawarsa 1960-an dan sebelumnya, yang “menarik minat rakyat awam untuk menentang struktur kekuasaan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang tidak tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas.” Daftarnya mencakup tradisi-tradisi pengorganisasian rakyat berbasis masyarakat lokalnya Allinsky, gerakan-gerakan advokasi kebijakan publik rintisan Ralph Nadeer, serta cara-cara pengerahan massa menentang suatu isu atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan tertentu (1980: 7). Berdasarkan semua itu, kami mengusulkan beberapa unsur pokok metoda praktek pengorganisasian sebagai berikut:

- (1) adanya rumusan yang jelas tentang peran-peran apa saja yang harus dijalankan oleh para pemimpin, para anggota, dan para staf organisasi;
- (2) adanya tolok ukur dan proses yang jelas dalam memilih dan menetapkan isu yang akan diperjuangkan;
- (3) adanya pemahaman yang jelas tentang sasaran-sasaran perubahan yang akan atau ingin dicapai;
- (4) adanya pedoman yang jelas tentang pilihan strategi tertentu yang akan ditempuh;
- (5) dan adanya pemahaman yang jelas tentang peran atau fungsi organisasi.

Dari berbagai kajian pustaka, perbincangan dengan banyak pengorganisir rakyat, dan juga pengalaman kami sendiri, maka kita dapat merangkum berbagai metode praktik pengorganisasian ke dalam tiga jenis saja, setiap jenis berkaitan erat dengan pilihan pandangan perubahan sosial tertentu.

Para pengorganisir rakyat yang memilih pandangan perubahan sosial melalui lembaga-lembaga tanding, biasanya cenderung menggunakan metode praktik lapis bawah (*grassroots practice method*). Mereka akan berusaha menggalang suatu basis massa luas dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu yang memiliki kesamaan isu tertentu pula mengatasi kepentingan-kepentingan pribadi mereka masing-masing. Sang pengorganisir akan bekerja bersama mereka menetapkan sasaran-sasaran dan merumuskan strategi yang umumnya akan berhadapan-hadapan langsung dengan lawan (konfrontatif). Maka, pembentukan dan pengembangan suatu ‘organisasi rakyat’ yang bersifat tetap, berdisiplin tinggi, dan dengan struktur yang ketat, adalah tugas terpenting pengorganisir dalam hal ini.

Para pengorganisir yang memilih pandangan perubahan sosial melalui tuntutan-tuntutan kemajemukan, biasanya cenderung menggunakan metode praktik melobi (*lobbying practice method*). Mereka akan berusaha menghimpun sejumlah orang atau lembaga yang berkepedulian terhadap suatu isu tertentu dengan tujuan untuk mengubah atau mungkin juga mempertahankan berbagai keadaan atau persyaratan yang berkaitan dengan isu tersebut. Isunya sendiri ditetapkan melalui pemantauan proses-proses penyusunan undang-undang dan peraturan-peraturan, sementara sasarannya umumnya adalah para pejabat pemerintah yang dianggap mampu memengaruhi proses-proses legislasi tersebut. Bentuk dan jenis organisasi yang dikembangkan dengan cara ini umumnya adalah perhimpunan berbasis keanggotaan yang tidak terlalu ketat, setiap anggota wajib membayar



aturan dan setiap saat akan diminta untuk melakukan sesuatu, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berkaitan dengan isu yang diperjuangkan.

Para pengorganisir yang memilih pandangan perubahan sosial melalui pendidikan aksi massa maupun cita-cita kharismatik, biasanya cenderung menggunakan cara-cara pengerahan (*mobilizing approach*). Mereka akan berusaha mengerahkan sebanyak mungkin massa yang berkepedulian terhadap suatu isu tertentu atau suatu penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Isunya ditetapkan melalui suatu analisis berbagai peristiwa politik, ekonomi, dan sosial yang ada saat itu. Strategi yang dianut dan ditempuh adalah bahwa hanya dengan aksi massa besar dan protes atau perlawanan yang memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia yang dapat memaksa lembaga-lembaga berkuasa untuk mengubah kebijakan mereka. Gangguan-gangguan atau kekacauan-kekacauan spontan lebih banyak digunakan ketimbang membangun suatu organisasi aksi sosial.

Kian jelas tampak bahwa para pengorganisir rakyat dan para pemimpin organisasi rakyat yang membentuk organisasi-organisasi aksi sosial memang membuat banyak sekali hal-hal yang saling bertentangan dalam keseluruhan proses pengorganisasian rakyat. Pilihan isu dan strategi mereka didasarkan pada berbagai tolok ukur yang berbeda. Para anggotanya juga terlibat dalam gerakan dalam berbagai aras dan tingkatan berbeda pula, sementara para pengorganisirnya sendiri menggunakan berbagai teknik untuk menggalang dan menghimpun mereka. Semua keragaman ini harus dipertimbangkan dan diperhatikan baik-baik jika kita ingin melakukan pengorganisasian rakyat.

Apa yang kami ingin katakan adalah bahwa para pengorganisirilah yang membuat semua perbedaan dan keragaman tersebut. Sang pengorganisirilah yang membentuk dan mencetak proses-proses pengorganisasian, bahkan organisasinya itu sendiri. Berbeda sekali dengan jenis-jenis pekerjaan pelayanan sosial lainnya di mana para pekerja sosial dibentuk oleh kerangka organisasi yang sudah ada, maka pengorganisir rakyat umumnya justru yang membentuk kerangka organisasi tersebut dan lingkup kerjanya. Merekalah yang menyediakan arahan, gagasan-gagasan, panduan, dan kepakaran yang dibutuhkan oleh organisasi, paling tidak, pada tahap awalnya. Merekalah yang membawa cita-cita apa yang mestinya diperjuangkan oleh suatu organisasi rakyat. Cita-cita ini dilahirkan dari pandangan-pandangan perubahan sosial yang diyakini oleh sang pengorganisir serta metode-metode praktik yang digunakannya untuk memperjuangkan perubahan sosial tersebut. Dua faktor inilah yang mungkin paling sangat menentukan bagaimana seorang pengorganisir mengorganisir rakyat, juga memengaruhi keputusan-keputusan organisasi tentang keanggotaan, kepemimpinan, isu, strategi, dan strukturnya.

Ada banyak jalur yang dapat ditempuh untuk menjadi seorang pengorganisir rakyat, juga bagaimana agar seorang pengorganisir tidak patah semangat berhadapan dengan kenyataan jam kerja yang tidak kenal waktu, tekanan yang bertubi-tubi dan ketersendirian. Sebaliknya, kita lihat hampir semua pengorganisir justru tetap dan semakin bersemangat oleh keyakinan-keyakinan, pilihan sikap pemihakan, dan cita-cita perubahan yang mereka miliki. Dalam hampir semua kasus, para pengorganisir rakyat justru merasa puas dengan pekerjaan mereka karena merekalah memang yang membentuk dan membangun organisasinya, programnya, dan tugas-tugas yang mereka harus kerjakan di da-

lamnya. Tanpa itu, mereka pun akan merasa semua pekerjaan rutin dan tetek bengek yang mereka harus kerjakan dalam proses pengorganisasian sehari-hari sebagai hal yang tak ada gunanya bagi apa yang mereka anggap jauh lebih penting, yakni melakukan perubahan sosial.

Maka, tak ada keraguan lagi bahwa sang pengorganisir adalah kekuatan inti dan terpenting dalam suatu organisasi aksi sosial. Baik para anggota organisasi maupun para pengorganisir sendiri memahami dan mengakui pentingnya pengaruh mereka dan bahwa banyak dari keberhasilan suatu organisasi memang sangat ditentukan oleh kerja dan kinerja sang pengorganisirnya. Para pengorganisir rakyat memang membawa ke dalam organisasi keyakinan-keyakinan mereka tentang perubahan (suatu arah perubahan sosial tertentu) dan kaidah-kaidah asas bertindak (suatu metode praktik) yang sangat memengaruhi bagaimana proses pengorganisasian akan berlangsung dan organisasi itu sendiri nanti akan berwujud. ❖



FINAL

ACARA-11

CIRI KEPERIBADIAN & KEPEMIMPINAN

TUJUAN

- Peserta mampu merumuskan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan citra diri seorang pengorganisir rakyat.
- Peserta mampu menguraikan dan menyepakati tolok ukur dan syarat-syarat pribadi seorang pengorganisir rakyat yang ideal serta sumber-sumber rekrutmennya.
- Peserta mampu merumuskan fungsi-fungsi pokok seorang pengorganisir.

POKOK BAHASAN

- Kualitas dasar keperibadian & kepemimpinan seorang pengorganisir rakyat
- Sumber-sumber dan cara-cara rekrutmen pengorganisir rakyat
- Fungsi-fungsi pokok seorang pengorganisir rakyat

WAKTU

- 2-4 jam efektif (1-2 satuan acara/*session*)

METODE & MEDIA

- Bermain peran
- Diskusi kelompok
- Telaah Kasus

BAHAN & PERALATAN

- Bahan bacaan, lembar kasus, film/video
- Benda sembarang yang terdapat di sekitar sebagai alat permainan
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Jelaskan secara singkat tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Minta peserta membagi diri kembali secara acak saja ke dalam 3 (tiga) kelompok sama besar, sebutlah masing-masing sebagai Kelompok-A, B, dan C. Minta tiap kelompok mengelilingi satu meja atau pelataran pada tempat yang saling terpisah (tidak saling mengganggu satu sama lain).
3. Jelaskan kepada semua kelompok bahwa mereka masing-masing akan membangun sesuatu (tetapkan saja satu objek tertentu, misalnya, 'rumah' dalam bentuk maket) menggunakan bahan-bahan dari benda-benda apa saja yang tersedia di sekitar (meja, kursi, potongan kayu, ranting pohon, batu, pasir, kotak karton, dan sebagainya).
4. Minta tiap kelompok memilih seorang pemimpin terlebih dahulu. Kemudian, panggil pemimpin terpilih tiap kelompok itu untuk mendekat ke Anda. Umumkan kepada semua kelompok bahwa Anda akan memberi rincian instruksi cara bekerja kepada para pemimpin mereka. Para pemimpin mereka nanti yang akan menyampaikan kepada masing-masing kelompok tentang apa yang harus dibangun dan bagaimana caranya.
5. Bawa ketiga pemimpin kelompok ke luar ruangan sebentar atau menjauh dari semua kelompok agar kelompok mereka tidak mendengarkan instruksi yang anda berikan kepada pemimpin mereka. Kepada ketiga pemimpin kelompok, beri instruksi sebagai berikut:

- Untuk pemimpin Kelompok-A: minta dia berperan sebagai pemimpin yang 'OTORITER', artinya semua rencana dan keputusan (gambar bangunan rumah yang akan dibangun, bahan apa yang akan digunakan, cara membangunnya, pembagian tugas anggota, pokoknya semua hal) harus mutlak berasal dari dia sendiri, tidak perlu meminta pendapat atau saran anggota kelompoknya. Tetapi, dia sendiri tidak perlu ikut bekerja, dia cukup memerintah dan mengawasi saja dengan sikap tegas dan keras, jika perlu menghukum atau memecat anggotanya yang bandel atau melawan.

- Untuk pemimpin Kelompok-B: minta dia berperan sebagai pemimpin yang 'DEMOKRATIS', artinya semua rencana dan keputusan (mulai dari gambar rencana sampai pembagian kerja anggota serta pelaksanaannya) harus dirundingkan dan disepakati bersama dengan seluruh anggotanya. Bahkan, kalau perlu, dia jangan memulai pekerjaan kalau belum ada kesepakatan bersama seluruh anggotanya. Dia juga harus ikut bekerja dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan bersama-sama anggota lain. Kalau ada anggota yang bandel atau malas, dia harus berusaha menegur atau membujuknya dengan cara yang sopan dan baik, jika perlu menunda pekerjaan dulu dan mengajak seluruh anggota rapat membicarakan masalah tersebut.

- Untuk pemimpin Kelompok-C: minta dia berperan sebagai pemimpin 'SERBA MEMBIARKAN' (*LAIZZES FAIRE*), artinya semua rencana dan keputusan dia serahkan sepenuhnya kepada para anggotanya. Pokoknya, dia cuma datang dan bilang: "Kita diminta untuk membangun rumah, saya serahkan kepada Anda semua untuk merencanakan dan melaksanakannya. Silahkan!" Dia sendiri boleh ikut kerja atau lebih tidak sama sekali (mengerjakan sesuatu yang lain dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kelompok: baca buku, jalan-jalan, dan lain-lain). Kalau ada anggotanya yang tanya sesuatu, dia selalu menjawab: "Menurut Anda sendiri bagaimana? Silahkan cari jalan sendiri, kreatif, pokoknya saya percaya penuh pada kalian!"

Catatan

- Sebaiknya, Anda tetapkan saja sesuatu yang akan dibangun itu sama (jangan berbeda!) pada semua kelompok (misalnya: rumah), agar tingkat kesulitan yang dihadapi tiap kelompok memang sama atau sebanding (tidak ada yang terlalu sulit dan tidak ada yang terlalu gampang). Tetapi, jangan menetapkan sesuatu objek yang tidak jelas atau terlalu rumit (misalnya: kapal atau pesawat terbang) atau yang nyaris tidak mungkin karena memerlukan bahan khusus yang tidak tersedia di sekitar.
- Sementara Anda memberikan instruksi kepada tiga pemimpin kelompok, Anda bisa saja meminta peserta lain untuk mengisi waktu menunggu mereka dengan melakukan

kegiatan 'selingan' (*ice-breaker, energizer*).

- Yakinkan diri Anda bahwa tiga pemimpin kelompok itu memang sudah memahami dan sanggup melakukan perannya masing-masing dengan baik dan meyakinkan.

Tegaskan: **MEREKA WAJIB MERAHASIAKAN, TIDAK BOLEH MEMBERITAHU, KEPADA PARA ANGGOTANYA TENTANG PERAN MEREKA MASING-MASING (SEBAGAI PEMIMPIN OTORITER, DEMOKRATIS, dan LAIZZES FAIRE)!**

6. Setelah tiga pemimpin kelompok itu benar-benar paham instruksi Anda, minta mereka segera kembali ke kelompok masing-masing. Anda sendiri mengumumkan kepada semua kelompok bahwa apa yang akan mereka kerjakan dan bagaimana caranya, akan disampaikan oleh para pemimpin masing-masing.
7. Segera minta semua kelompok mulai bekerja berdasarkan instruksi para pemimpin masing-masing. Selama kelompok bekerja, amati setiap pemimpin kelompok: apakah mereka benar-benar menjalankan perannya dengan baik atau tidak? Amati juga proses kerja dan prilaku anggota setiap kelompok: bagaimana reaksi mereka terhadap sang pemimpin dan bagaimana mereka melaksanakan

- pekerjaan sampai selesai? Pengamatan ini penting untuk proses analisis nanti.
8. Setelah semua kelompok menyatakan selesai, minta mereka saling melihat atau menonton hasil pekerjaan kelompok lainnya, lalu kembali ke kelas besar. Ajukan pertanyaan kepada anggota kelompok (hanya anggota kelompok yang boleh menjawab, sang pemimpin tidak boleh):
 - **Apa yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin mereka tadi, sejak awal sampai akhir pekerjaan?**
 - **Apa hasilnya? Selesai atau tidak? Sesuai rencana atau tidak? Memuaskan mereka atau tidak? Mengapa?**
 - **Kelompok mana yang paling efisien bekerja (paling cepat selesai, paling lancar prosesnya, dan sebagainya)?**
 9. Catat semua jawaban peserta di papan tulis/kertas plano. Atas dasar jawaban-jawaban tersebut, ajak mereka melakukan analisis:
 - **Apa perbedaan paling menonjol di antara tiga kelompok tersebut, baik dalam hal sikap/perilaku pemimpinnya maupun akibatnya terhadap anggotanya dan proses serta hasil kerja mereka?**
 - **Manakah di antara tiga jenis kepemimpinan tersebut yang nisbi paling sesuai dengan sikap/perilaku seorang pengorganisir rakyat yang 'ideal'? Mengapa?**
 10. Catat pokok-pokok jawaban/pendapat peserta di papan tulis/kertas plano. Atas dasar itu, ajak peserta membuat suatu kesimpulan umum bersama tentang sifat-sifat pribadi (sikap dan perilaku) seorang pengorganisir rakyat.

Catatan

■ Ragam lain (variasi) dari permainan yang bisa dilakukan adalah permainan yang lebih mengasyikkan tetapi lebih rumit dan membutuhkan waktu panjang, misalnya, permainan 'Mencari Harta Karun' di mana tiga kelompok berlomba menemukan sesuatu (yang sengaja disembunyikan di suatu tempat oleh fasilitator) melalui proses berliku-liku (memecahkan sandi-sandi tertentu, dan sebagainya). Tapi, bentuk atau jenis permainan apa pun yang digunakan, inti dan prinsipnya adalah adanya tiga peran pemimpin kelompok yang dirancang secara sengaja berbeda

(otoriter, demokratis, *laizzes faire*) agar dapat dijadikan titik-tolak analisis kualitas pribadi seorang pengorganisir rakyat yang dianggap 'ideal' oleh peserta. Karena itu, mungkin saja Anda bisa menemukan bentuk atau jenis permainan baru sama sekali atau ada permainan rakyat setempat yang mungkin dapat dirubah-sesuaikan (modifikasi) untuk keperluan pokok bahasan ini. Silahkan berkreasi sendiri!

11. Segera bagi kembali seluruh peserta dalam beberapa kelompok kecil baru (4-5 orang, tidak mesti kelompok yang tadi), untuk mendiskusikan dan merumuskan:
 - **Bagaimana caranya memperoleh dan membentuk calon-calon pengorganisir yang memiliki sifat (sikap dan perilaku) seperti yang sudah mereka rumuskan?**
 - **Dari mana sumber-sumbernya? Apakah sebaiknya orang setempat atau perlu mendatangkan orang dari luar? Mengapa?**
12. Minta setiap kelompok menyajikan hasil diskusi dan rumusan mereka. Lakukan klarifikasi dan pertajam hal-hal yang dianggap perlu atau masih memancing perbedaan pandangan di antara para peserta.
13. Atas dasar pembahasan terakhir ini, ajak peserta menyimpulkan dan merumuskan secara umum:
 - **Apa fungsi-fungsi pokok dan ciri-ciri ideal seorang pengorganisir rakyat?**
14. Untuk memberi suatu gambaran yang lebih hidup dalam keadaan yang sebenarnya, ajak peserta menonton film “The Burning Season” (masa putar 140 menit), tentang kisah kehidupan dan perjuangan Chico Mendes, pengorganisir Serikat Petani Karet di Brasil. Siapkan peralatannya dan langsung tayangkan.
15. Setelah penayangan selesai, ajak seluruh peserta mengemukakan pendapat mereka tentang kualitas pribadi Chico sebagai seorang pengorganisir rakyat, peran dan fungsi yang dilakukannya, dan kesan umum mereka mengenai proses-proses pengorganisasian dalam kasus Serikat Petani Karet di Brasil tersebut.

Catatan

- Kaset video atau cakram digital (CD) film “The Burning Season” (Musim Membakar) bisa dibeli di toko-toko video atau diunduh (*download*) dari internet.
- Jika anda tidak mendapatkan film “The Burning Season”, film lain sebagai penggantinya disarankan salah satu dari berikut ini:
 - * “Seven Samurai” (Tujuh Pendekar), film klasik (masih hitam-putih, produksi tahun 1954, masa tayang 160 menit) karya sutradara sohor Jepang, Akira Kurosawa.

* “Sanjuro” (nama tokoh pengorganisir), juga masih-hitam putih, produksi tahun 1962, masa tayang 96 menit, karya sutradara yang sama, Akira Kurosawa.

* “Lagaan” (Pajak Bumi), film modern (berwarna, layar lebar, produksi tahun 2001, masa tayang 224 menit), karya sutradara India, Ashutosh Gowariker. dinominasikan sebagai pemenang Oscar 2002.



Catatan

* “Swades” (Swadesi), berwarna, layar lebar, produksi 2004, masa tayang 189 menit) dari sutradara yang sama, Ashutosh Gowariker.

■ Seperti film “The Burning Season”, semua film itu berdasarkan sejarah dan kisah nyata, kecuali “Swades” yang merupakan kisah fiksi (data dan sinopsis semua film itu dapat anda lihat pada Daftar Pustaka di bagian akhir buku ini).

■ Semua film itu tersedia dan dapat di-copy di perpustakaan digital PerDikAn, INSIST, Yogyakarta.

■ Atau, anda bisa mencari film lain yang relevan. Intinya, film itu menuturkan proses-proses pengorganisasian rakyat serta peran dan kualitas pribadi pengorganisirnya. Sebaiknya memang yang berdasarkan sejarah atau kisah nyata. Jika semua film tersebut tetap tak bisa anda dapatkan, lewatkan saja dan ganti dalam bentuk penyajian yang lain (kasus tertulis, misalnya).

16. Akhirnya, tutup acara ini dengan membagikan Bahan Bacaan #10 (*Garis Waktu Perjalanan Seorang Pengorganisir Rakyat*) dan #11 (*Petuah Sang Bijak [3]*).❖



GARIS WAKTU PERJALANAN SEORANG PENGORGANISIR RAKYAT

Mengorganisir rakyat artinya membangun suatu organisasi rakyat yang kuat dan mandiri, suatu organisasi yang mampu menjadi wadah bagi anggota masyarakat setempat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai kegiatan bersama sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa lembaga atau organisasi tersebut memang miliknya rakyat atau masyarakat setempat, yang dibentuk, dikelola, dan dikendalikan oleh mereka sendiri, bukan oleh sang pengorganisir (kecuali kalau sang pengorganisir memang adalah orang setempat juga yang hidup dan mukim di sana sebagaimana layaknya warga yang lain).

Tetapi, kenyataan umumnya menunjukkan bahwa sebagian besar warga setempat biasanya masih belum berpengalaman membentuk, mengelola, dan mengendalikan suatu organisasi yang kuat secara sistematis. Inilah pula sebab mengapa seorang atau beberapa orang pengorganisir (dari luar maupun dari kalangan warga tempatan sendiri) biasanya dibutuhkan pada saat-saat awal suatu proses pengorganisasian. Maka, tugas pokok pengorganisir tersebut, pada hakekatnya, adalah secara perlahan dan bertahap mengalihkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya kepada warga tempatan, sehingga mereka secara perlahan dan bertahap juga dapat menjalankan semua fungsi sang pengorganisir.

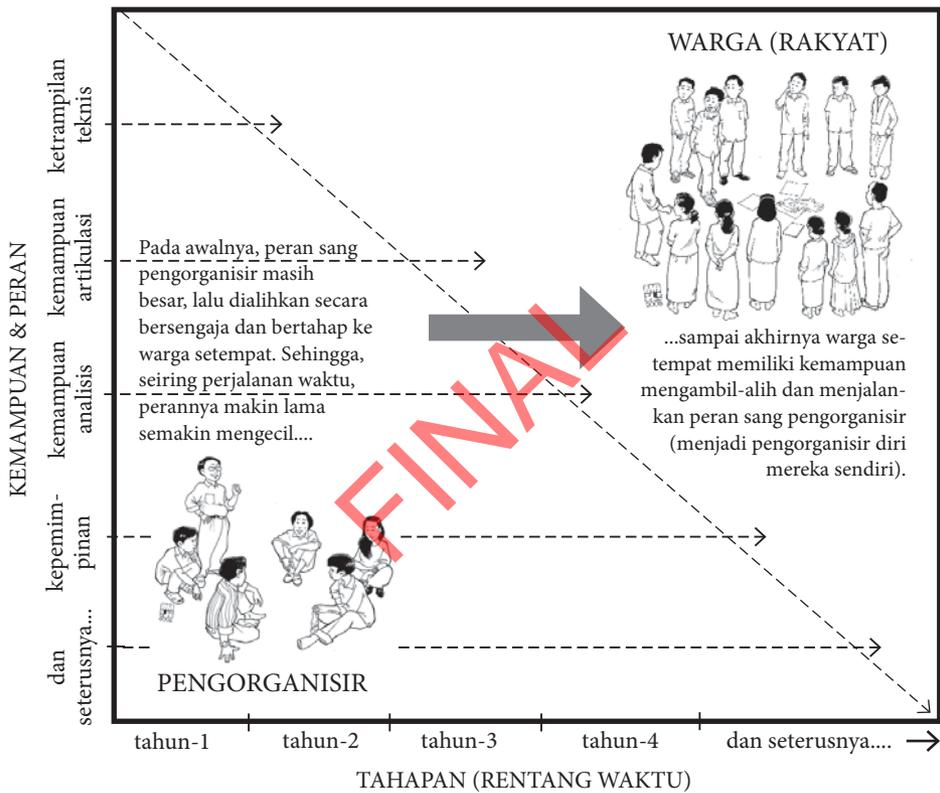
Karena itu, salah satu bagian pekerjaan, bahkan seharusnya merupakan kegiatan inti, seorang pengorganisir rakyat adalah menyelenggarakan proses-proses pendidikan kepada warga tempatan. Pendidikan ini dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk: dari perbincangan-perbincangan dialogis sampai ke pelatihan-pelatihan reguler, pemagangan dan, jika memang tersedia dananya, juga pertukaran (*exchange*) ke tempat lain. Penugasan-penugasan khusus (*job assignments*) juga sangat membantu. Jangan lupa, orang awam umumnya belajar lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah melalui hal-hal praktis, contoh-contoh langsung, pengalaman-pengalaman nyata. Mereka umumnya lebih tertarik dan berminat pada hal-hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, metoda pendidikannya juga harus sepraktis mungkin, meskipun materinya mungkin tentang suatu konsepsi pemikiran yang niskala (abstrak) sekalipun. Gunakan prinsip-prinsip pendidikan partisipatoris dan metode 'daur pengalaman bertata-pola' seperti yang digunakan dalam panduan ini. Dengan kata lain, seorang pengorganisir rakyat yang baik adalah mestinya juga seorang 'fasilitator' pendidikan rakyat sekaligus.

Melalui proses-proses pendidikan semacam itulah, apa yang disebut sebagai proses perubahan (transformasi) sosial berlangsung. Sejatinya, proses pengorganisasian rakyat memang pada adalah suatu proses perubahan sosial: mengubah tatanan sosial-ekonomi, politik, dan budaya suatu masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, di mana mereka sendiri mampu mengelola dan mengendalikannya secara



otonom dan berdaulat, sesedikit mungkin campur tangan pihak lain, termasuk negara atau pemerintah. Dan, hal itu hanya mungkin mereka capai kalau mereka memang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, memiliki pranata kelembagaan dan organisasi yang juga kuat, mandiri, dan otonom.

Walhasil, pada saat itulah tugas atau peran seorang pengorganisir rakyat sebenarnya sudah berakhir. Rakyat atau warga setempatlah kini yang akan melanjutkan sendiri kerja-kerja pengorganisasian diri mereka sendiri pula. Jika digambarkan secara skematis, proses ini akan tampak sebagai berikut:



Seperti terlihat pada bagan di atas, semakin lama semakin mengecil dan berkurang peran pengorganisir, karena peran atau fungsi-fungsinya itu, mulai dari yang sifatnya teknis (keterampilan, kecakapan, metodologi) sampai ke taraf yang jauh lebih rumit (pengelolaan organisasi, penyusunan strategi, analisis masalah, akses sumberdaya dan jaringan) serta yang paling mendasar (pembentukan sikap, visi dan ideologi gerakan, dan seterusnya) dialihkan secara bersengaja dan bertahap kepada rakyat warga setempat. Sehingga, sampai pada waktu tertentu, misalnya, 3-4 tahun kemudian, warga tempatan sendiri sudah mampu melaksanakan seluruhnya dan sepenuhnya apa yang selama ini dikerjakan oleh sang pengorganisir, jika perlu melanjutkan dan mengembangkannya secara lebih baik dan lebih berhasil.



Sebenarnya, inilah inti dari apa yang selama ini dikenal sebagai ‘pemberdayaan rakyat’ (*people empowerment*), menjadikan rakyat benar-benar mampu melakukan sendiri apa yang selama ini hanya dilakukan oleh orang atas diri mereka, menjadikan mereka benar-benar ‘berdaya’ dalam artian yang sesungguhnya. Kalau ada orang mengaku melakukan proses pemberdayaan rakyat, tetapi setelah sekian lama, rakyat ternyata tetap dan terus bergantung pada orang itu—artinya tidak mengalihkan kemampuan (peran dan fungsi) nya kepada warga setempat—maka orang itu sebenarnya tidak melakukan pemberdayaan, tetapi ‘memperdayakan’ (menaklukkan, menipu) mereka. Salah satu indikator utama untuk melihat apakah terjadi proses ‘memberdayakan’ atau ‘memperdayakan’ ialah: apakah ada terbentuk dan berkembang suatu pranata kelembagaan atau organisasi rakyat tempatan yang kuat dan mandiri, yang memang dikelola dan dikendalikan sendiri oleh mereka secara berdaulat dan otonom?

Walhasil, lantas apa yang harus dikerjakan oleh seorang pengorganisir jika rakyat setempat sudah mampu melakukan semuanya sendiri?

Ada banyak kemungkinan. Bisa saja, dia mulai mengambil fungsi-fungsi atau peran-peran lain yang, meskipun rakyat setempat sebenarnya sudah mampu, namun mungkin tidak sempat atau tidak punya waktu untuk mengerjakannya (misalnya: advokasi kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi). Dia bisa juga berpindah ke tempat lain memulai proses pengorganisasian yang sama. Jangan khawatir, seorang pengorganisir tidak akan pernah kehilangan pekerjaan atau kurang kegiatan. Masih banyak kelompok masyarakat di tempat lain yang membutuhkan Anda, karena masalah-masalah kemasyarakatan yang membutuhkan pengorganisasian akan selalu ada di mana-mana dan kapan saja.

Atau, bahkan, dia bisa saja tetap di tempat itu, tetapi kali ini justru hanya sekadar ‘membantu dari belakang’, bahkan menjadi ‘anak buah’ dari para pemimpin baru yang telah dididik dan dihasilkannya. Apa salahnya? Karena peran pengorganisir memang bukan suatu jabatan struktural atau karier hierarkis. Seorang pengorganisir sejati hanyalah perintis dan pembuka jalan. Selanjutnya rakyat itu sendirilah yang akan menjadi pelaku utama dari proses sejarah mereka sendiri. ❖

PETUAH SANG BIJAK [3]

Hampir dua ribu tahun lalu, seorang budak yang kemudian menjadi pemikir dan filsuf di Nicopolis, Yunani, menulis: “Gunakan sebaik mungkin apa yang ada dalam kemampuanmu, biarkan selebihnya sebagaimana apa adanya.”

(*Enchiridion*, Epictetus, 55-135 M)

Sembilan ratus tahun kemudian, seorang petapa bijak di Nalanda dekat Bihar Sharif, Patna, India, berujar: “Jika ada pemulihan saat petaka, apa alasan untuk berduka? Jika sungguh tak ada yang bisa menolong, apa guna larut dalam murung?”

(*Śikṣāsamuccaya*, Zhiwa Lha, 685-763 M)

Tiga ratus tahun setelah itu, seorang penyair dan pemikir alim di Andalusia, Spanyol, menulis: “Pada puncak pemahaman adalah mengetahui apa yang bisa dan apa yang tidak, dan kelegawaan untuk menerima apa yang kita memang tak kuasa untuk mengubahnya.”

(*Kitab al-Islahul Akhlaq*, Abu Ayyub Sulaiman ibnu Jabirul, 1021-1070 M)

Baru sembilan ratus tahun lagi sesudahnya, hampir seratus tahun lalu, seorang padri cendekia di Missouri, Amerika Serikat, merangkumnya menjadi doa penyejuk (*tombo ati*): “Tuhan, beri saya keteduhan menerima apa yang tak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya.”

(*The Serenity Prayer*, Reinhold Niebuhr, 1892-1971 M)

Tiga puluh lima tahun lalu, sekumpulan pendidik dan pengorganisir rakyat dari berbagai negara Asia dan Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia and South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE) yang bertemu di Incheon, Korea Selatan, 1983, mengutipnya menjadi satu ‘semboyan’ tentang kemampuan dasar yang perlu dimiliki untuk melakukan perubahan sosial:

“KEKUATAN untuk mengubah yang memang bisa diubah”

“KETABAHAN untuk menerima yang memang tidak bisa diubah”

“KEARIFAN untuk mengetahui perbedaan antara yang bisa diubah dan yang tidak bisa”



FINAL



PAGAR

FINAL

STRATEGI & TAKTIK PENGORGANISASIAN RAKYAT

Setelah mencoba memahami konsep-konsep dasar pada tiga bagian acara sebelumnya, maka kini saatnya mulai mencoba memahami langkah-langkah atau proses pengorganisasian rakyat itu sendiri. Tetapi, hal yang pertama harus dilakukan adalah memperjelas dahulu apa sebenarnya tujuan, cita-cita, atau visi dan misi pengorganisasian yang akan diwujudkan?

Jika pertanyaan pokok ini sudah terjawab, maka menjadi lebih mudah merumuskan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya, bagaimana cara melakukannya, kapan dan di mana akan dilakukan, siapa saja yang harus terlibat, sumberdaya apa saja yang diperlukan? Dan sebagainya, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai **strategi** dan **taktik** pengorganisasian.

Ada banyak kerangka kerja yang dikembangkan selama ini untuk menyusun suatu strategi dan taktik. Semua kerangka kerja tersebut, secara teoretis, dapat dibedakan dalam dua jenis: (1) cara atau pendekatan linear, dan (2) cara atau pendekatan konjungtural. Cara linear adalah cara perencanaan konvensional yang berpegang teguh pada tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan, dengan asumsi semua faktor eksternal dan internal tidak akan mengalami perubahan berarti. Karena itu, cara pendekatan ini bersifat statis. Padahal, dalam kenyataannya, pelaksanaan suatu strategi dan taktik sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor eksternal maupun internal organisasi yang bersifat dinamis dan berubah terus-menerus.

Oleh karena proses pengorganisasian rakyat juga bergerak dalam kancah yang sangat dinamis, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang terus berubah, maka cara pendekatan kedua lah, yang bersifat kontekstual, yang tampaknya lebih sesuai dalam penyusunan strategi dan taktiknya. Bagian ini akan membahas cara penyusunan strategi dan taktik pengorganisasian rakyat menurut cara pendekatan konjungtural dan kontekstual tersebut.

ACARA-12

SIMULASI TIGA KONTEKS

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian dan kaidah asas perencanaan strategis pengorganisasian rakyat.
- Peserta mampu dan terampil melakukan langkah-langkah perumusan strategi dan taktik pengorganisasian menurut kaidah-kaidah asas perencanaan strategis tersebut.

POKOK BAHASAN

- Pengertian dan kaidah-kaidah asas perencanaan strategis.
- Langkah-langkah dan teknik-teknik perencanaan strategis dalam rangka pengorganisasian rakyat.

WAKTU

- 6-8 jam efektif (3-4 satuan acara/*session*)

METODE & MEDIA

- Telaah kasus, pertunjukan video
- Bermain peran
- Diskusi kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Bahan bacaan, lembar kasus, film/video
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Jelaskan secara singkat tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Minta peserta membagi diri kembali ke dalam tiga kelompok sama besar, sebutlah masing-masing sebagai Kelompok-A, B dan C. Minta tiap kelompok mengelilingi satu meja atau pelataran pada tempat yang saling terpisah (tidak saling mengganggu satu sama lain).
3. Jelaskan kepada semua kelompok bahwa mereka masing-masing akan berperan sebagai suatu kelompok pengorganisir pada suatu komunitas, tempat dan isu yang berbeda:

Kelompok-A

- Komunitas: masyarakat adat pesisir (nelayan)
- Tempat: kepulauan terpencil di Indonesia Timur
- Isu: pengakuan hak adat dan otoritas pengelolaan sumberdaya laut setempat

Kelompok-B

- Komunitas: petani dan buruh tani perkebunan
- Tempat: kawasan pedesaan di Sumatera atau Kalimantan
- Isu: harga hasil perkebunan dan saluran pemasarannya yang dimonopoli oleh perusahaan (swasta maupun BUMN)

Kelompok-C

- Komunitas: ibu-ibu rumah tangga kelas menengah ke bawah, campuran berbagai kelas dan pekerjaan.
- Tempat: salah satu kota besar di Jawa
- Isu: buruknya fasilitas pelayanan umum dan pencemaran lingkungan sekitar


Catatan

- Pembagian kelompok ini juga bisa diubah sesuai keadaan setempat atau berdasarkan usulan peserta menurut minat atau situasi nyata mereka. Apa yang penting adalah baik komunitas, tempat, dan isunya harus spesifik, tidak terlalu umum, dan usahakan tiap kelompok berbeda, jangan sama semua. Jika pesertanya nisbi homogen (misalnya semua petani atau anggota masyarakat adat suatu daerah), maka pembagian kelompok dilakukan semata-mata untuk membuat mereka terlibat dalam proses secara intensif dan hasil masing-masing kelompok nanti akan diperbandingkan satu sama lain.

4. Jelaskan pada seluruh kelompok bahwa mereka akan bekerja merumuskan kerangka (garis-besar) strategi dan taktik pengorganisasiannya masing-masing, langkah demi langkah. Sebagai langkah pertama, setiap kelompok harus mampu membayangkan wujud bentuk dan sifat kelembagaan, cakupan dan fungsi dari organisasi rakyat yang mereka cita-citakan tercipta nanti di tengah komunitas masing-masing dalam jangka waktu 3-5 tahun mendatang. Untuk itu, ajak setiap kelompok 'mengkhayalkan'-nya:

- **Apa nilai-nilai dasar yang akan menjadi konstitusi (ketentuan, norma, prinsip) komunitas tersebut? (garis besarnya saja!) Mengapa?**
- **Apa tujuan utama yang ingin dicapai komunitas tersebut dalam jangka waktu 3-5 tahun mendatang?**

- Bagaimana posisi dan hubungannya dengan lembaga-lembaga lain yang ada di daerah itu (pemerintah desa/kecamatan/kabupaten, organisasi masyarakat lain, cabang partai politik, lembaga keagamaan, dsb.)?
- Dengan demikian, apa dan bagaimana bentuk serta sifat kelembagaan organisasinya (Serikat, Perhimpunan, Koperasi, Yayasan, atau apa)? Mengapa?
- Berapa banyak dan siapa saja anggota aktif (benar-benar aktif dan terlibat, bukan sekedar anggota; daftar nama?) komunitas tersebut? Bagaimana proses rekrutmen, pengembangan kapasitas dan pelibatan mereka sebagai anggota dalam kegiatan kolektif?
- Apa saja sumberdaya yang harus dimiliki oleh komunitas tersebut untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya (sebutkan secara cukup rinci: prasarana, sarana, keahlian, dana dan sumbernya, dan sebagainya)?

Jelaskan, bahwa setelah menjawab semua pertanyaan tersebut, setiap kelompok kemudian merumuskan satu gambaran umum singkat merangkum semua jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Jika perlu, beri contoh, misalnya, Kelompok-A bisa saja merumuskannya sebagai berikut:

- Pada 3-5 tahun mendatang, di daerah kami telah terbentuk suatu lembaga permusyawaratan adat secara demokratis, didasarkan pada prinsip dan nilai keterbukaan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama.
- Tujuan utama lembaga ini adalah memperjuangkan pengakuan hak-hak adat dan otoritas pengelolaan sumberdaya laut setempat oleh masyarakat sendiri. Lembaga ini akan berfungsi sebagai organisasi induk atau payung dari kelompok-kelompok nelayan yang terorganisir rapi dalam serikat nelayan yang ada pada setiap desa dan kampung.
- Serikat nelayan ini adalah organisasi independen, tidak akan berafiliasi dengan partai politik, lembaga keagamaan, atau organisasi sosial manapun, tetapi merupakan organisasi warga yang independen dan otonom. Dengan pemerintah setempat, organisasi ini akan menjaga jarak, bekerjasama jika mungkin, tetapi juga akan berhadapan jika pemerintah merugikan anggotanya dan masyarakat setempat umumnya.
- Agar tetap mandiri, serikat nelayan ini akan mengembangkan dan memiliki lembaga-lembaga produksi ekonomi dalam bentuk koperasi primer maupun sekunder, punya anggota aktif minimal 5.000 orang yang sadar dan disiplin membayar iuran bulanan mereka.
- Di beberapa desa strategis, lembaga ini dan jaringan Serikat nelayan anggotanya akan memiliki prasarana pusat informasi dan pelatihan anggota yang sekaligus juga berfungsi sebagai balai pertemuan, kantor dan toko/warung koperasi. Semuanya didirikan dan dikelola sendiri langsung oleh anggota dan sebagainya, dan seterusnya....

Seperti terlihat pada contoh, tegaskan bahwa rumusannya jangan panjang-panjang, yang penting inti (*point*) nya.

4. Jika tak ada lagi pertanyaan dari peserta dan semua sudah cukup jelas bagi mereka, segera minta tiap kelompok mulai bekerja. Beri waktu agak lapang, misalnya 60-90 menit.
5. Setelah tiap kelompok selesai, minta mereka masing-masing menyajikan hasilnya. Ajak kelompok lain memberikan tanggapan dan saran perbaikan. Fokuskan analisis terhadap semua hasil kelompok mengacu pada pengertian, konsep dasar, dan kaidah-kaidah asas pengorganisasian rakyat yang telah dibahas pada acara-acara sebelumnya: **apakah ‘khayalan’ mereka itu benar-benar menggambarkan konsep dan kaidah asas pengorganisasian rakyat yang sesungguhnya (membangun suatu komunitas lokal yang independen, mandiri, otonom dalam suatu kelembagaan organisasi yang dibentuk, dikelola dan dikendalikan sendiri oleh rakyat setempat)?**
6. Minta tiap kelompok (sekitar 10-15 menit) memperbaiki rumusannya berdasarkan komentar dan saran perbaikan tadi. Hasil perbaikan tidak perlu didiskusikan lagi. Tegaskan bahwa rumusan ‘khayalan’ tiap kelompok itulah yang menjadi ‘visi’ pengorganisasian masing-masing kelompok. Maka, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya (strategi dan taktik) mewujudkan ‘visi’ tersebut? Untuk itu, bagikan Lembar Kasus #7 (*Bermula dari Loburapa: Derap Serikat Petani Sumatera Utara*) kepada semua peserta sebagai contoh pembandingan. Minta mereka membacanya selama beberapa menit, lalu ajukan pertanyaan:
 - Apa visi (tujuan, idaman, ‘khayalan’) pengorganisasian dalam kasus tersebut?
 - Apa dan bagaimana strategi dan taktik (langkah-langkah, proses, pola-pola pendekatan, metode, cara-cara, media) yang mereka gunakan untuk mewujudkan visi tersebut?
 - Bagaimana dan dengan cara apa mereka memulainya?
 - Bagaimana pentahapan dan perkembangannya kemudian?
 - Hal-hal apa saja yang paling menunjang keberhasilan mereka? Mengapa?
 - Apa saja hambatan yang mereka temui? Bagaimana mereka menghadapi dan mengatasinya?
7. Catat pokok-pokok jawaban peserta di papan tulis/kertas plano, kemudian ajak mereka menganalisis dengan fokus perhatian pada rincian strategi dan taktik pengorganisasian yang ditempuh:
 - Apakah memang sesuai (konsisten) dengan visinya? Jika tidak, mengapa?
 - Mengapa mereka menempuh strategi dan taktik seperti itu?

8. Jika masih ada waktu, Anda bisa mengajak dan meminta peserta mengajukan contoh lain yang pernah mereka ketahui atau, lebih baik lagi, yang pernah mereka alami sendiri.



Catatan

- Jika ada, minta mereka menyajikannya secara lengkap sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pokok pada langkah nomor 6 di atas tadi.
- Lebih bagus lagi jika mereka bisa menyajikannya dengan peraga visual (gambar, foto, peta, infografis, dan sebagainya). Untuk itu, jika perlu, beri waktu yang cukup untuk menyiapkannya.
- Setelah mereka presentasi, ajukan kembali pertanyaan-pertanyaan seperti langkah nomor 6 dan 7 di atas. Bandingkan juga misalnya dengan contoh kasus yang menjadi pokok bahasan tadi: apa persamaan atau perbedaannya? Mengapa demikian?
- Pengulangan pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membuat pemahaman peserta semakin tajam terhadap inti pokok bahasan tentang strategi dan taktik dalam proses-proses pengorganisasian rakyat, sekaligus melihat adanya perbedaan strategi dan taktik pada tempat, waktu, dan keadaan yang berbeda, meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap sama.

9. Rangkum pokok bahasan acara ini, lalu tutup dengan membagikan Bahan Bacaan #12 (*Bermula dari Tindakan Kecil: Beberapa Contoh*) dan #13 (*Mengapa Negeri Tua Itu Tak juga Tumbang?*). ❖

BERMULA DARI LOBURAPA

DERAP SERIKAT PETANI SUMATERA UTARA

Menjelang akhir 1980-an, beberapa pegiat mahasiswa di Sumatera Utara mulai sering berkunjung ke desa-desa di pedalaman, terutama di wilayah Kabupaten Asahan, berbincang dengan para petani tentang berbagai masalah yang mereka hadapi dan melakukan kerja-kerja teknis untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam usaha tani warga di kampung-kampung tersebut. Setelah tamat kuliah, para pegiat itu kemudian membentuk dan mendirikan yayasan Sintesa, pada tahun 1991, untuk mewadahi kegiatan mereka. Sejak saat itulah, kegiatan mereka berkunjung dan bertemu dengan para petani di desa-desa mulai dilakukan secara lebih sistematis, termasuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berkala kelompok tani dan antar kelompok tani dari desa-desa yang berdekatan.

Sambil tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis budidaya pertanian kepada para petani setempat, para pegiat Yayasan Sintesa mulai pula menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khusus analisis sosial bagi para petani itu untuk melihat dan memahami permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam konteks yang lebih luas. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai media, mulai lembar-lembar fakta dan bacaan, video dokumenter, sampai ke simulasi dan praktik lapangan. Mereka menerapkan metodologi Sekolah Lapang (SL) untuk pelatihan-pelatihan teknis budidaya pertanian, tetapi dalam kurikulum SL tersebut mereka selipkan acara-acara khusus melakukan analisis sosial. Para petani desa itu kemudian semakin terbiasa melihat dan membahas setiap perkembangan politik dan ekonomi di tingkat makro nasional, bahkan juga internasional, terutama yang langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan mereka sebagai petani di tingkat lokal. Para pegiat Yayasan Sintesa memfasilitasi mereka menyelenggarakan diskusi-diskusi berkala tetap semacam itu pada waktu-waktu senggang mereka, terutama pada malam hari, sampai akhirnya mereka semua merasa perlu ada tempat untuk berkumpul bersama secara berkala dalam jumlah yang lebih besar. Yayasan Sintesa lalu membeli sebidang tanah, seluas sekitar 4 hektare di Kampung Loburapa di pedalaman Asahan, dan membangun prasarana gedung pertemuan dan penginapan sederhana di tempat itu, selain lahan-lahan percontohan (demplot) tanaman jangka pendek dan kebun tanaman perdagangan (karet) sebagai salah satu sumber pendanaan mereka.

Sejak saat itulah, rangkaian pertemuan dan pelatihan para petani yang diorganisir Yayasan Sintesa selalu diselenggarakan di tempat tersebut. Sepanjang 1994-1995, para petani itu mulai memusatkan perhatian mereka mengamati kecenderungan perkembangan politik dan ekonomi nasional menjelang kejatuhan rezim militer Orde Baru. Ketika aksi-aksi massa kaum buruh di wilayah perkotaan mulai semakin merebak dan membentuk serikat-serikat buruh independen, para petani yang sering berkumpul di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yayasan Sintesa di Loburapa itu pun berkesimpulan bahwa sudah saatnya pula mereka sendiri membentuk suatu organisasi massa petani yang independen.

Mereka pun mulai sibuk mempersiapkan diri dan, akhirnya, pada bulan September 1996, di Loburapa yang terpencil itu, mereka mendeklarasikan terbentuknya Serikat





Petani Sumatera Utara (SPSU). Sebagai satu 'serikat', mereka lalu menyelenggarakan Kongres Pertama mereka pada bulan November 1996, diikuti oleh sekitar 800 orang utusan perwakilan dari apa yang mereka sebut sebagai organisasi tani lokal (OTL), yakni kelompok-kelompok tani tingkat desa atau antar desa —yang selama ini diorganisir oleh Yayasan Sintesa— dan kini resmi menjadi anggota SPSU. Karena rezim militer Orde Baru masih berkuasa saat itu, kegiatan-kegiatan SPSU hampir semuanya dilakukan 'di bawah tanah'. Pertemuan-pertemuan anggota umumnya dilakukan malam hari, disamarkan sebagai pelatihan-pelatihan teknis budidaya pertanian untuk mengelabui pihak penguasa.

Barulah setelah rezim Orde Baru tumbang, pada Mei 1998, SPSU mulai muncul terang-terangan ke permukaan. Mereka mulai membuat pernyataan-pernyataan politik di depan umum, mengerahkan aksi massa unjuk rasa, bahkan melakukan aksi sepihak 'pendudukan' (*reclaiming*) lahan-lahan pertanian yang selama ini dirampas secara paksa oleh penguasa militer dan perusahaan-perusahaan besar. Bersama dengan serikat-serikat petani di daerah lain —seperti Serikat Petani Pasundan (SPP) di Jawa Barat— SPSU kemudian ikut membentuk Federasi Serikat Petani Indonesia (FPSI) sebagai jaringan nasional mereka. Di bawah koordinasi FPSI inilah, pada 24 September 2000, bertepatan dengan Hari Tani Sedunia, ratusan petani anggota SPSU bergabung dengan ratusan petani dari serikat-serikat petani daerah lain, membentuk satu barisan massa sekitar 10.000 orang, melakukan unjuk rasa besar-besaran di Jakarta, menuntut perubahan kebijakan nasional di sektor pertanian. Aksi massa petani terbesar pertama di Indonesia setelah lebih dari 30 tahun tersebut, akhirnya memicu lahirnya kebijakan baru politik penyelesaian sengketa agraria dan penataan ulang penguasaan tanah (reforma agraria), antara lain, melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) Nomor IX Tahun 2001.

SPSU semakin mengembangkan organisasi dan anggotanya, bahkan mulai masuk ke kancha internasional perjuangan petani sedunia. Mereka kemudian menjadi anggota resmi La Via Campesina, federasi serikat petani independen sedunia yang bermarkas besar di Meksiko. Dalam Kongres La Via Campesina tahun 2000 di India, SPSU dan FPSI terpilih sebagai Koordinator Wilayah Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Bahkan, salah seorang pendiri Yayasan Sintesa dan perintis SPSU dan juga FPSI, Henry Saragih, terpilih sebagai Presiden La Via Campesina pada kongres organisasi itu tahun 2004 di Meksiko.

Maka, kegiatan para petani lokal yang bermula di desa-desa terpencil di Asahan, kemudian dipusatkan di Kampung Loburapa itu, kini menjadi bagian dari satu gerakan besar petani di tingkat nasional dan internasional. ❖

BERMULA DARI TINDAKAN KECIL

BEBERAPA CONTOH



1 Kereta Bayi Mengalahkan Tank Baja

Munculnya Solidaritas, suatu gerakan rakyat yang terbentuk pada bulan Agustus 1980 melalui aksi mogok para buruh di pelabuhan Gdansk dan kemudian di seluruh Polandia, menimbulkan kepanikan rezim yang berkuasa di negeri itu sejak Perang Dunia II. Pada 13 Desember 1981, rezim Komunis Polandia menderetkan barisan tank lapis baja di jalan-jalan guna menghentikan laju gerakan Solidaritas untuk selama-lamanya. Ratusan orang pun ditangkap, lusinan bahkan dibunuh.

Mengabaikan ancaman tank-tank lapis baja itu dan penangkapan atas diri mereka, rakyat Polandia pun mengorganisir unjuk rasa menentang pemberangusan Solidaritas, termasuk memboikot siaran-siaran berita televisi oleh pemerintah. Tetapi aksi boikot siaran televisi pemerintah itu tidak membuat pemerintah bergeming. Memangnya berapa banyak orang yang akan mengikuti seruan aksi boikot itu?

Di satu kota kecil, warga menemukan caranya sendiri. Setiap petang, bermula pada 5 Februari 1982, warga kota kecil Świdnik di bagian timur Polandia mulai bertindak. Begitu televisi mulai menyiarkan berita-berita resmi pemerintah selama setengah jam, semua warga Świdnik keluar rumah memenuhi jalan-jalan, mondar-mandir, bercengkerama satu sama lain, ngobrol menghabiskan waktu. Sebelum keluar rumah, beberapa warga meletakkan pesawat televisi mereka yang sudah dimatikan di jendela, menghadap ke luar, ke jalan-jalan, sehingga semua orang melihat hanya layar gelap tanpa suara dan gambar. Yang lainnya lagi bertindak lebih jauh. Mereka meletakkan pesawat televisinya yang sudah dimatikan di dalam kereta-kereta dorong bayi atau yang biasa dipakai berbelanja atau mengangkut bahan bangunan. Mereka menggelandang kereta-kereta dorong berisi pesawat televisi itu di jalan-jalan sepanjang malam.

“Kalau suatu aksi perlawanan dilakukan oleh para pegiat gerakan bawah tanah, maka itu bukanlah saya atau kamu,” kata salah seorang pendukung Solidaritas. “Tetapi, kalau kamu melihat tetangga-tetanggamu menggelandang televisi mereka di jalan-jalan, maka itu akan membuatmu merasa menjadi bagian dari mereka. Salah satu tujuan para penguasa diktator adalah membuat kamu merasa terasing sendirian. Warga Świdnik mematahkan pengucilan itu dan membangun kepercayaan diri mereka.”

Taktik membawa-televisi-jalan-jalan itu, yang kemudian menyebar dan ditiru di kota-kota lain, membuat pemerintah benar-benar berang. Tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Keluar rumah untuk berjalan-jalan santai jelas bukanlah tindak kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Maka, pemerintah pun mempercepat waktu pemberlakuan jam malam, dari awalnya yang mulai jam 10 malam menjadi mulai jam 7 malam. Mereka pikir ini akan membuat warga Świdnik akan tetap berada di dalam rumah mereka pada saat



siaran berita resmi yang dimulai jam 7:30 malam. Keluar rumah saat itu berarti ditangkap atau ditembak.

Warga Świdnik menanggapi larangan baru itu justru dengan keluar rumah dan memenuhi jalan-jalan lebih awal, pada jam 5 sore, yakni saat siaran berita resmi petang hari!

Sama sulitnya untuk memastikan apakah semua warga memang tidak menonton siaran berita resmi televisi (kecuali semua orang memang benar-benar keluar rumah saat itu), adalah juga sulit mengetahui berapa banyak yang sebaliknya mendengarkan siaran-siaran radio yang menentang pemerintah. Solidaritas menemukan cara pemecahannya yang khas pula.

Radio Solidaritas menyiarkan berita-berita terlarang menandingi siaran berita propaganda pemerintah. Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak warga yang mendengarkan siaran-siaran berita bawah-tanah itu. Melakukan survei pendapat umum masa itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan kemungkinannya. Maka, para penyiar Radio Solidaritas melakukan percobaan yang unik. Mereka meminta warga mengedap-ngedipkan lampu rumah mereka pada saat-saat tertentu jika sedang mendengarkan siaran Radio Solidaritas.

Tentu saja itu bukan tanpa risiko sama sekali. Kalau ternyata hanya anda seorang diri yang mengedap-ngedipkan lampu rumah, sementara para tetangga Anda tidak melakukannya, jelas itu akan mengundang perhatian polisi patroli untuk mendatangi rumah anda: “Lihat, ini rumah seorang pembangkang!”

Salah seorang pembangkang, Konstanty Gebert, mengisahkan waktu itu ia keluar rumah menyusuri satu jalan di ibu kota Warsawa, tepat pada saat siaran Radio Solidaritas mulai mengudara. Ia menyaksikan lampu dalam satu apartemen di lantai bawah gedung mulai berkedap-kedip. Ketika ia kembali lagi ke rumah menyusuri jalan yang sama, lampu-lampu seluruh apartemen di gedung itu sudah berkedap-kedip semuanya. Dia membalikkan badan menegok ke arah dari mana dia tadi datang, dan tampaklah lampu berkedap-kedip di seluruh jajaran gedung di sepanjang jalan tersebut. Laporan berita menyebutkan bahwa lampu berkedip-kedip terjadi di seluruh kota malam itu. Gebert bilang: “Anda tidak bisa membayangkan macam apa perasaan kemenangan saat itu.”

Akan halnya pihak penguasa: menangkap seluruh penduduk ibu kota Warsawa adalah jelas tindakan yang nyaris muskil.

Bahkan dalam peristiwa-peristiwa khidmat sekalipun, para pendukung Solidaritas menemukan cara mereka untuk melecehkan berbagai aturan pemerintah Polandia saat itu yang sangat mereka benci. Pada tahun 1984, pemimpin Soviet, Yuri Andropov, meninggal dunia. Siaran liputan resmi acara pemakamannya disabot, termasuk pidato sang pengganti Andropov yang tua renta, Konstantin Chernenko, yang berpidato dari puncak gedung Musoleum Lenin di Lapangan Merah Moskow.

Penyabotan siaran liputan resmi pemakaman itu dapat dilihat dalam film dokumenter tahun 2006 garapan Grzegorz Linkowski, “Stroll with the Television News” (Menggelandang Berita-Berita Televisi). Bukannya mendengarkan suara



renta Chernenko (“Yuri Andropov, seorang putra cemerlang Partai Komunis, telah meninggalkan kehidupan ini...”), para pemirsa televisi Polandia justru tiba-tiba mendengar suara lain: “Inilah siaran televisi Radio Solidaritas. Selamat petang, para pemirsa...” Akibatnya, sejumlah pegiat ditangkap, tetapi disusul oleh serangkaian tindakan pembangkangan berikutnya.

Para pemirsa Polandia benar-benar menikmati semua itu. Pihak penguasa tentu saja tidak. Polisi rahasia pemerintah tak mampu menemukan siapa sang penyabot. Kegagalan itu semakin memalukan pemerintah —dan kesenangan para warga yang membangkang pun semakin melonjak.

Aksi menggelandang televisi dengan kereta dorong di jalan-jalan, mengedap-angedipkan lampu rumah, dan menyabot siaran resmi pemakaman pemimpin Partai, itu semualah yang menjaga nyala semangat perlawanan rakyat Polandia —dengan akibat-akibat dramatik yang diakibatkannya selama beberapa tahun sesudahnya. Rezim yang selama ini tak tergoyahkan pun akhirnya tumbang hanya dalam beberapa tahun kemudian.

2 Sayur Umbi dan Revolusi

Boikot adalah satu bentuk tindakan politik, ekonomi, dan sosial yang sudah diterima luas di seluruh dunia. Semua orang sekarang menggunakan istilah itu tanpa merasa perlu mempertanyakan lagi asal muasalnya. Padahal kata itu bermula dari satu tindakan sederhana. Alkisah, adalah seorang bernama Kapten Charles Cunningham Boycott. Dia adalah seorang kaki-tangan Lord Erne, seorang tuan-tanah guntai (*absentee landlord*) di Kecamatan (*County*) Mayo, di bagian barat daratan Irlandia yang dikuasai Inggris, yang sangat tidak disukai oleh warga setempat.

Pada 23 September 1880, “seperti suatu kehendak yang tak tertahankan lagi” (dalam kata-kata koran *Connaught Telegraph*), para penggarap lahan di bawah pengawasan Boycott mogok kerja memprotes harga sewa dan pencaplokan lahan mereka yang tidak adil. Boycott dan keluarganya pun terpaksa harus memeras sendiri susu sapi-sapi mereka, memasang sendiri sepatu kuda-kuda mereka, dan menandur sendiri benih-benih di lahan pertanian mereka. Para penjaga toko menolak melayani Boycott dan keluarganya. Kantor Pos berhenti mengantarkan surat-surat kepadanya. Boycott pun terkucilkan dan tak berdaya untuk melakukan pembalasan apa pun, sehingga para pendukungnya pun kehilangan semangat membelanya. Di London, satu tajuk rencana di koran *Times* mengeluhkan peristiwa itu sebagai: “Suatu gambaran yang menakutkan dari kemenangan anarki yang belum pernah terjadi di masyarakat mana pun, yang minta diakui sebagai tindakan beradab dan patut mendapat perlindungan hukum.”

Salah seorang penggerak aksi mogok itu, James Redpath, akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ada satu kata pun yang tepat untuk menyebut bentuk tindakan ketidakpatuhan yang berhasil itu. Untuk memperkuat dampak politik dari tindakan tersebut, dia merasa perlu suatu penyebutan baru. Sebagaimana tertulis dalam catatan kenangannya pada 1881, *Talks About Ireland* (Omong-omong Soal Irlandia), dia



meminta nasihat pada seorang pastor yang bersimpati, Romo John O'Malley: “[O'Malley] menunduk, menyanggah badan besarnya yang condong ke depan, lalu bilang: ‘Bagaimana kalau kita sebut saja itu mem-Boycott-nya?’”

Dalam buku *Captain Boycott and the Irish* (Kapten Boikot dan Irlandia), Joyce Marlow menguraikan bagaimana seorang relawan pro-Inggris datang untuk membela Boycott yang sedang keok itu, dikawal oleh satu detasemen yang terdiri atas seribuan orang serdadu. Perbekalan mereka antara lain terdiri atas empat belas galon wiski, tiga puluh *pounds* (sekitar 13,6 kilogram) tembakau, dan empat terompet penengara kabut. Setelah beberapa minggu menggali lahan dan menyemai benih sayuran di sana, di bawah guyuran hujan lebat, akhirnya mereka pun menyerah dan meninggalkan Boycott. Sang Kapten pun akhirnya hengkang pulang ke Inggris. Dia tak pernah kembali lagi ke Kecamatan Mayo. Dan itulah awal mula perjalanan sejarah Irlandia meraih kemerdekaannya.

Selanjutnya, nama sang Kapten yang semula tidak terkenal di pedalaman barat Irlandia itu pun mendunia dalam buku-buku kamus. Rezim militer pimpinan Jenderal Augusto Pinochet sempat menderita akibat tindakan *boicotear* produksi buah apel dan anggur Cili sebagai protes terhadap penindasan oleh pemerintahan junta militernya pada 1970-an. Rakyat Polandia menentang pemberlakuan paksa undang-undang darurat oleh penguasa Komunis pada 1981 dengan menyatakan *bojkot* terhadap siaran-siaran berita resmi televisi pemerintah (termasuk tindakan menggelandang televisi dengan kereta dorong ke jalan-jalan, sebagaimana dikisahkan di atas tadi). Orang Rusia omong tentang *boikotirovat*, dan orang Prancis menyebutnya *un boycott*. Semua itu gara-gara satu kejadian kecil lokal saat panen sayur umbi-umbian (*turnip*) yang gagal di pedalaman Irlandia pada 1880.

3 Mempermalukan Satu Kerajaan Besar

Dalam film Bollywood tahun 2001 berjudul “Lagaan” (Pajak Bumi), satu kampung kecil di India mencabar keperkasaan Kerajaan Inggris Raya melalui satu pertandingan kriket. Petaruhannya? Para warga desa itu akan membayar pajak tambahan jika mereka kalah, dan dibebaskan sama sekali dari pajak apa pun kalau mereka menang. Film yang dicalonkan sebagai salah satu pemenang Penghargaan Oscar itu penuh dengan kejutan, sebagaimana masa depan desa itu tergantung di neraca taruhan. Tetapi itu semua memang hanya kisah rekaan belaka (meskipun, tentu saja, akhir ceritanya adalah desa itu yang keluar sebagai pemenang).

Sembilan puluh tahun sebelumnya, satu kisah pertandingan olahraga yang berbeda —tetapi ini adalah satu peristiwa nyata— memukau India. Pada 1911, kesebelasan sepakbola berjudul *Mohun Bagan* (‘Kelompok Manis’) menang terus-menerus alias tak pernah kalah melawan kesebelasan orang-orang Inggris. Itu membuat semangat gerakan kemerdekaan India melawan Kerajaan Inggris semakin meningkat pula. Ketika kesebelasan *Mohun Bagan* mencapai final melawan East Yorkshire Regiment (kesebelasan yang sampai saat itu terus merajai Liga Sepakbola India), puluhan ribu orang dari berbagai penjuru negeri datang untuk menonton pertandingan bersejarah itu pada 29 Juli 1911.



Tempat pertandingan bukan stadion, tapi lapangan terbuka. Penonton yang berada di bagian belakang nyaris tak bisa melihat langsung penuh jalannya pertandingan di tengah lapangan. Mereka yang kebetulan berada di bagian paling depan menyampaikan skor pertandingan kepada mereka di bagian belakang dengan cara menaikkan layang-layang kertas. Di tengah lapangan, kesebelasan *Mohun Bagan* yang berkaki telanjang bertarung ketat melawan kesebelasan Inggris yang berkaus-kaki dan bersepatu lengkap.

Setelah tertinggal 1-0, kesebelasan ceker-ayam India itu akhirnya membalas dengan dua gol beruntun pada lima menit terakhir. Kemenangan bersejarah 2-1 oleh anak bangsa jajahan atas bangsa penjajahnya itu langsung memicu perayaan massal, di dalam dan di luar lapangan pertandingan. Ketika pluit akhir pertandingan berbunyi, ribuan kaos, topi, saputangan, tongkat dan payung beterbangan ke udara. Di sana terdengar gemuruh teriakan, jeritan, dan tarian massal.

Itu memang hanya satu kemenangan dalam satu pertandingan olahraga. *Nayak*, salah satu koran di kota Kalkutta, melukiskannya: “Kemenangan itu membuat setiap orang India merasa sangat senang dan bangga mengetahui bahwa orang-orang Bengali berkaki ceker-ayam, pengidap penyakit malaria, pemakan nasi, bisa mengalahkan orang-orang Inggris yang bersepatu, yang bersosok seperti Herkules, pemakan daging, justru dalam satu permainan aneh olahraga Inggris.”

Pada tahun itu juga, Inggris memutuskan memindahkan ibu kota penjajahan mereka dari Kalkutta ke Delhi, antara lain, untuk mencegah semakin maraknya kegiatan yang mempermalukan mereka di wilayah Bengal itu, satu wilayah di mana sentimen sepakbola dan semangat pro-kemerdekaan nasional berkait berkelindan sangat erat.

Penyair Achintya Kumar Sengupta menulis: “*Mohun Bagan* bukan satu kesebelasan sepakbola. Ia adalah satu negeri yang tertindas, yang berguling-guling dalam debu, yang baru saja bangkit menegakkan kepalanya.”

Satu pertandingan sepakbola telah membuat satu kerajaan besar gerah dan tak nyaman di tanah jajahannya.

4 Palsukan!

Slobodan Milošević, pemimpin para penjahat perang Serbia selama dasawarsa 1990-an, adalah seorang jagoan penipuan di bekas Yugoslavia itu. Tetapi, menjelang berakhirnya kekacau-balauan di sana, Milošević pun kehilangan keperkasannya.

Dia dan para pengikut setianya ternyata tidak cukup cerdas menghadapi para ‘pengecoh’ *Otpor* (Perlawanan), gerakan mahasiswa yang terbukti merupakan lawan paling tangguh bagi Milošević dibanding semua lawan politiknya yang lain. Sekalipun banyak pegiat *Otpor* ditangkap dan disiksa, mereka tetap tangguh menantang penguasa, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pemimpinnya, Srdja Popović, yang menilai rezim Milošević akhirnya tak bisa berkutik menghadapi mereka. Ketika diwawancarai dalam film dokumenter, “Bringing Down A Dictator” (Menumbangkan Seorang Diktator), garapan Steve York dan Peter Ackerman,



Popović mengatakan kepada para penguasa Serbia itu: “Saya ini orang yang punya banyak humor dan ironi, tapi kalian malah memukuli dan menangkap saya. Jadi inilah permainan di mana kalian pasti akan selalu kalah.”

Menjelang pemilihan umum pada September 2000, penguasa semakin berang oleh laju keberhasilan *Otpor*. Polisi segera menggeladahkan kantor *Otpor* di ibukota Belgrade. menyita semua komputer dan bahan-bahan kampanye mereka.

Otpor lalu melancarkan serangan balasan yang sangat telak. Di saluran telepon yang mereka tahu persis bahwa pembicaraan mereka akan disadap, mereka membicarakan rencana pemasokan bahan-bahan kampanye dalam jumlah besar di satu tempat tertentu pada jam tertentu. Mereka mengundang para wartawan foto untuk menyaksikan dan mengabadikannya. Demikianlah, pada jam dan tempat yang telah ditentukan, para relawan *Otpor* terlihat sibuk membongkar muatan kotak-kotak karton besar dari satu truk, tampak terengah-engah menahan beban berat isi kotak-kotak tersebut.

Polisi yang sudah sedari tadi mengintai mereka, segera menyerbu untuk menyita semua kotak-kotak karton besar itu. Saat itulah para polisi tersebut merasa semua kotak itu sangat ringan. Ternyata memang semuanya kosong, tak ada isi sama sekali, dan polisi kecele karena merasa terkecoh.

Tetapi perintah adalah perintah. Para polisi itu tetap saja menyita semua kotak karton kosong itu. Di bawah sorot kamera para wartawan dan para penonton yang lewat, polisi membawa pulang banyak sekali kotak-kotak karton besar kosong ke markas mereka.

Kini memang sangat mungkin melakukan berbagai tipuan visual hanya dengan satu program komputer sederhana. Gerombolan khalayak secara digital dapat dibuat tampak jauh lebih banyak jumlahnya, hanya dalam beberapa detik. Tetapi melakukan tipuan visual semacam itu bisa sangat memalukan akibatnya jika ketahuan, seperti yang tampak pada gambar kartu pos tentang massa yang hadir di suatu acara kampanye pemilihan umum Serbia tahun 2000 --tanda lingkaran putih dan tulisan besar *Dosta Je Laži!* (Cukup Sudah Kebohongan!) pada kartu pos itu menelanjangi tipuan visual yang dilakukan oleh rezim penguasa.

Terutama karena keberhasilan kampanye *Otpor* yang semakin berpengaruh, pihak penguasa merasa sangat khawatir jumlah pendukung Slobodan Milošević akan terus dan semakin berkurang saat pemilihan umum pada tanggal 24 September 2000, meskipun mereka sudah melakukan berbagai usaha, termasuk menyuap para calon pemilih.

Maka, mereka pun tiba pada satu gagasan yang mereka anggap cemerlang. Dengan satu sentuhan klik pada *mouse*, maka jumlah massa dalam foto bisa dibuat berlipat ganda sesuai keinginan anda. Foto hasil tipuan digital ini kemudian dimuat dalam media massa pro-Milošević. Di halaman depan koran pro pemerintah, *Večernje Novosti*, foto itu tampil dengan klaim bahwa itu adalah bagian dari kerumunan 100.000 orang massa pendukung Milošević.

Tetapi, tipuan itu segera terungkap ketika para pengamat Serbia menunjukkan bahwa banyak orang di dalam foto itu —termasuk, misalnya, lelaki berambut putih salju, perempuan muda berambut hitam panjang, dan lelaki berambut kelabu di



bagian depan— tampil dua kali dalam foto yang sama. Para penentang Milošević kemudian memperbanyak foto itu menjadi kartu pos laris, dengan keterangan bahwa jumlah massa yang senyatanya hadir dalam acara tersebut paling banyak hanyalah 15.000 orang. Agar lebih meyakinkan, pada cetakan kartu posnya, mereka memberi lingkaran putih pada tipuan visual foto tersebut.

Ah, bantah para pengikut setia Milošević, itu kebetulan hanya satu kesalahan teknis kecil saja.

Dan hanya duapuluh hari sesudahnya, hasil akhir perhitungan suara pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan Milošević memang sudah tamat.

5 Menolak Seks Demi Perdamaian

Aristophanes pasti tidak pernah bermaksud agar kisah Lysistrata yang dikutip pada pembukaan bab ini ditafsirkan secara harafiah. Naskah sandiwaranya itu adalah satu sindiran, suatu cara menekan demi mengakhiri kematian dan kerusakan akibat Perang Peloponnesia yang berkepanjangan di Yunani pada abad-V sebelum Masehi. Kisahnya didasarkan pada satu gagasan yang sungguh mencengangkan: bahwa kaum perempuan, dengan cara menolak melakukan hubungan seks dengan para suami mereka, dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan konflik yang penuh kekerasan dan kekejaman.

Dua ribu tahun kemudian, Lysistrata menemukan wujudnya yang nyata dalam berbagai konteksnya di seluruh dunia.

Misalnya, pada 2002, kaum perempuan di Sudan bagian selatan bertindak untuk menghentikan dua puluh tahun perang saudara antara kawasan utara melawan kawasan selatan negeri itu yang diperkirakan telah menewaskan sekitar dua juta orang. Banyak perempuan di desa-desa yang terdampak oleh perang merasa tak berdaya memengaruhi perdebatan untuk menghentikannya. Tetapi, Samira Ahmed, seorang mantan guru besar di satu perguruan tinggi, punya satu rencana untuk memberdayakan kembali para perempuan itu. Bekerja dengan perempuan-perempuan dari dua kelompok etnis yang bertikai, dia mulai melancarkan aksi yang dinamakannya ‘penelantaran seksual’ (*sexual abandoning*). Tepat waktunya, ribuan orang segera bergabung dengan mereka.

“Perempuan-perempuan itu berkesimpulan bahwa dengan menolak melakukan hubungan seks dengan suami, mereka dapat menekan para lelaki itu untuk bertekad mengusahakan perdamaian —dan taktik itu berhasil,” kata Samira Ahmed. Pada tahun 2005, karena semakin banyak warga masyarakat awam melancarkan tekanan untuk mengakhiri perang, suatu kesepakatan perdamaian antara pihak utara dengan pihak selatan pun akhirnya ditandatangani.

Taktik Lysistrata juga memainkan peran penting di Kenya pada 2009, yakni ketika banyak orang takut mengungkapkan berbagai tindak kekerasan pasca-pemilihan umum yang menyeret negeri itu ke tubir jurang kekacauan setahun sebelumnya.



Hubungan antara dua pemimpin politik yang saling bersaing, Perdana Menteri Raile Odinga dan Presiden Mwai Kibaki, mengakibatkan suhu panas yang berbahaya. Organisasi-organisasi perempuan, yang sangat khawatir akan terjadinya kembali rangkaian tindak kekerasan, terus mendesak dua lelaki itu menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan “mulai lebih melayani kepentingan bangsa yang mereka wakili.” Untuk memperkuat desakan mereka, kaum perempuan itu pun melancarkan aksi ‘mogok seks’ (*sex strike*).

Rukia Subow, pemimpin dari salah satu organisasi perempuan itu, menyatakan alasannya: “Kami melihat bahwa seks adalah jawabannya. Seks tidak mengenal suku, tidak punya partai politik, dan itu betul-betul terjadi di lapisan masyarakat paling bawah.” Patricia Nyaundi, Direktur Federasi Perempuan Pengacara, menyebut aksi mogok seks itu —terbatas hanya sampai seminggu, karena berbagai alasan praktis— mengandung pesan yang lebih luas: “Gagasannya adalah menahan diri kami sendiri melakukan sesuatu yang selama ini kami anggap demikian hakiki, semuanya demi kebaikan negeri kami.”

Mogok gaya Lysistrata itu pun segera memperoleh dukungan luas, bahkan istri Sang Perdana Menteri, Ida Olinga, menyatakan bahwa ia mendukung aksi itu dengan ‘jiwa dan raga’-nya.

Seorang lelaki, James Kimondo, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia berencana mengajukan gugatan hukum kepada organisasi-organisasi perempuan yang memelopori dan melakukan mogok seks itu. Kimondo mengatakan bahwa aksi mogok seks itu telah membuatnya menderita tekanan mental dan kegelisahan luar biasa, sakit punggung dan kurang tidur.

Tetapi organisasi-organisasi perempuan tetap tegar melancarkan aksi mereka. “Semakin banyak warga Kenya yang memperbincangkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu semua membuat para politisi akhirnya juga bersedia berunding.” Para perempuan itu bahkan mengajak para pekerja seks ikut melancarkan aksi mogok.

Aksi mogok seks itu diakhiri dengan acara doa bersama. Sang Perdana Menteri dan Sang Presiden pun akhirnya sepatutnya untuk berunding.

Kota Pereira di Kolombia sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu tempat paling sarat tindak kekerasan di negara yang juga tak pernah sepi dari kekerasan. Sebagian besar biang keroknya adalah kaum lelaki muda. Banyak dari tindak kekerasan mereka itu ada kaitannya dengan gang-gang kejahatan di sana. Ada banyak alasan untuk bergabung atau meniru gaya hidup gang-gang tersebut, tetapi yang paling menonjol adalah karena para lelaki muda di sana merasa menjadi anggota atau bagian dari gang itu akan membuat mereka tampak lebih keren dan lebih diidamkan secara seksual oleh para wanita.

Mengetahui hal itu, kaum perempuan pun berkesimpulan bahwa seks pun dapat menjadi kunci untuk mengakhiri rangkaian tindak kekerasan selama ini.

Pada 2006, para gadis pacar dan isteri dari para lelaki muda biang kerok kekerasan, mulai melancarkan aksi menolak berhubungan seks dengan para pacar dan suami mereka. Aksi itu kemudian dikenal luas sebagai *huelga de piernas cruzadas*: mogok dengan menyilang kaki.



Dalam kata-kata Jennifer Bayer, salah seorang gadis pacar dari para lelaki muda biang kerok itu: “Kami ingin mereka tahu bahwa tindak kekerasan sama sekali tidak seksi.”

Ruth Macias, seorang ibu muda berusia delapan belas tahun tapi sudah beranak dua, mengatakan kepada para wartawan: “Inilah cara kami mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak ingin menjadi janda dan anak-anak kami bertumbuh tanpa ayah. Selama ini mereka sama sekali tak memedulikan pendapat kami. Dengan cara ini, mereka harus mendengarkan kami.”

Perempuan-perempuan muda itu pun menyeru agar para lelaki meletakkan senjata mereka. Mereka merekam satu lagu berirama *rap*, menyiarkannya lewat radio-radio lokal, yang mengajak sesama kaum perempuan bergabung. “Sebagai perempuan, kita punya banyak sekali... Mari kita silangkan kaki melawan para lelaki yang doyan tindak kekerasan itu. *Paro sexual!* Mogok seks!”

Aksi kaum perempuan Pereira itu dengan segera menjadi pola gerakan yang ditiru secara nasional. Warga awam Kolombia pun mulai menentang tindak kekerasan —di lingkungan rukun tetangga mereka, di tempat-tempat kerja, dan sampai ke pelosok-pelosok desa. Semua aksi yang mengikuti gerakan mogok seks kaum perempuan Pereira itu pun membantu memuluskan jalan bagi maraknya gerakan menentang kekerasan di seluruh negeri.

6 Gerbong Kereta Gerakan Mendunia

Pada 19 November 1960, Peter Benenson, seorang pengacara Inggris, berada dalam kereta bawah tanah kota London dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Di dalam kereta itulah dia membaca berita singkat di koran tentang dua orang mahasiswa Portugis yang baru saja dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun. Pasalnya: di satu kafe di ibu kota Lisabon, mereka bersulang mengangkat gelas untuk kebebasan, menentang kekuasaan diktator António Salazar.

Benenson, sangat terganggu oleh berita yang dibacanya, mulanya berpikir akan pergi ke Kedutaan Besar Portugis untuk menyampaikan protes. Tetapi, ia malah pergi ke satu tempat dekat Gereja St. Martin di Lapangan Trafalgar dan duduk tercenung di sana. Dia tiba pada kesimpulan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menarik perhatian orang terhadap nasib mereka yang dipenjarakan hanya karena menyatakan pendapat mereka yang berbeda atau dianggap melawan rezim yang berkuasa.

28 Mei 1961, Benenson menulis satu artikel di halaman depan harian *Observer*, berjudul “Para Tahanan Yang Terlupakan” (*Forgotten Prisoners*). Tulisan itu memulai suatu kampanye untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membangkitkan kesadaran masyarakat luas untuk menolong mereka yang dipenjarakan karena keyakinan mereka —yang ia sebut sebagai ‘para tahanan politik’ (*prisoners of conscience*).

Benenson menulis, “Baca koran Anda setiap hari selama seminggu dan akan Anda temukan satu berita dari suatu tempat tertentu di dunia ini di mana ada seseorang dipenjarakan, disiksa, atau dihukum mati karena pendapat atau



agamanya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintahnya.... Para pembaca koran selama ini merasa tidak mampu berbuat sesuatu. Tetapi, jika semua orang yang merasakan hal itu di dunia bisa digalang untuk bersatu melakukan tindakan bersama, maka sesuatu yang efektif dapat dikerjakan dan dicapai.”

Ajakan bertindak itu pun segera mendapat sambutan luas. Ribuan orang menulis ke Benenson memberikan dukungan mereka. Tulisan Benenson itu lalu dicetak ulang di berbagai negara. Itulah yang kemudian melahirkan organisasi hak asasi manusia bernama Amnesty International.

Benenson menulis: “Adalah penting memikirkan adanya satu kelompok yang lebih besar yang dapat mengelola semangat warga di seluruh dunia yang sangat ingin melihat terlaksananya penghormatan atas hak-hak asasi manusia.” Pandangan dasarnya sederhana saja, yakni bahwa jika para pemerintah tahu bahwa mereka diawasi, bahwa kasus-kasus ketidakadilan dalam pemenjaraan seseorang akan segera diketahui umum, maka itu semua akan mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang bersangkutan.

Ada saja orang yang skeptis menanggapi prakarsa tersebut sebagai “salah satu kegilaan terbesar di zaman sekarang.” Tetapi, terbukti kemudian bahwa pandangan itu keliru. Salah satu keberhasilan pertama Amnesty International adalah dalam kasus Uskup Agung Josef Beran yang dipenjarakan selama empat belas tahun oleh rezim Komunis Cekoslowakia. Beran dibebaskan setelah delapan belas bulan kasusnya dikampanyekan oleh Amnesty melalui pengiriman surat-surat protes dari para anggotanya. Sejak saat itu, tak terhitung lagi banyaknya para tahanan politik yang dibebaskan berkat kampanye Amnesty.

Benenson tetap aktif terlibat dalam perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia sampai ia wafat pada 2005, pada usia 83 tahun. Sekarang, Amnesty International punya dua juta orang anggota di seluruh dunia. ❖

MENGAPA NEGERI TUA ITU TAK JUGA TUMBANG?



Bahkan setelah berhasil menyelamatkan miliaran Euro melalui skema ‘Troika’-nya EU-IMF-World Bank, perekonomian Yunani masih terus meluncur anjlok ke bawah pada tingkat yang masih sangat mengkhawatirkan. Lapangan kerja masih sulit setengah mampus, tingkat pengangguran dua kali lipat dari rerata semua negara Eropa lainnya, termasuk yang paling parah seperti Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Statistik terakhir, 55% warganya yang usia produktif (15-24 tahun) sampai sekarang masih kelimpungan tidak dapat pekerjaan. Seperempat penduduk Yunani sekarang hidup di bawah garis kemiskinan baku —lebih buruk dibanding, misalnya, Meksiko atau Iran. Bukan hanya dalam perekonomian, dampak krisis juga sudah memasuki relung-relung terdalam kejiwaan pribadi orang Yunani. Lembaga Kajian Kesehatan Mental Universitas Athena mencatat statistik mengejutkan: tingkat bunuh diri warga melonjak sampai 17%, sementara usaha bunuh diri melonjak sampai 36% sejak awal krisis pada 2009 (Michael Madianos & Marina Economou, et.al., “Depression and Economic Hardship Across Greece since 2008-2009”, *Psychiatry Epidemio* 2011, 46: 843-52).

Sementara itu, pajak-pajak langsung meroket, upah minimum melorot, dan sistem jaminan sosial (khususnya jaminan kesehatan —salah satu sistem yang tertua di dunia) ambruk. Beberapa pakar dan pengamat, termasuk orang Yunani sendiri, malah ada yang sudah mulai bicara tentang ‘tamatnya riwayat Yunani sebagai model negara kesejahteraan (*welfare state*)’ atau bahkan ‘Yunani kini adalah satu contoh negara gagal (*failed state*)’ (Baldini, M. et Ciani, E., *Disegualianza e pvoverta durante la recessione*. Universita de Modena e Reggop Emili, CAPP #75).

Tetapi setelah sekian tahun apa yang disebut sebagai ‘krisis Yunani’ itu berlangsung, negeri asal para dewa Eropa dan filsuf besar dunia (dari Thales dan Heraclitus sampai Socrates, Aritoteles, dan Plato) itu ternyata tak juga bubar atau ambruk sama sekali. Bahkan, mereka masih sempat mengirim tim sepakbola mereka menjadi salah satu peserta final Piala Dunia Sepakbola 2014 di Brazil.

Sambil menonton kesebelasan Yunani berlaga di Brazil (sayangnya, mereka sudah tumbang sejak putaran kedua), satu pertanyaan mengganggu benak saya: apa yang membuat negara yang sudah dinilai gagal, bahkan diramalkan akan segera tamat riwayatnya itu, tak juga tumbang? Kekuatan apa yang membuat negara asal ilmu pengetahuan dan peradaban Barat itu mampu bertahan?

Beberapa pengamat sekali lagi menyebut ‘berkat campur-tangan dan bantuan negara-negara Eropa lainnya’ (terutama Jerman) dan lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Tetapi, beberapa kawan lama saya, orang Yunani asli yang tetap tinggal bertahan di negeri mereka, tidak ikut-ikutan berhamburan (*diaspora*) ke beberapa negara tetangganya di Eropa, memberi penjelasan berbeda. “Sebagai negara,” kata teman saya yang mukim di Thessaloniki, “mungkin memang kami sudah gagal. Tapi sebagai masyarakat, tidak sama sekali.” Kata dia, para pengamat itu sekali lagi gagal dan



abai memperhatikan kekuatan-kekuatan asli dan ketangguhan setempat yang dimiliki oleh rakyat Yunani sendiri. Beberapa kisah-kisah dari dalam (*inside stories*) dari para proponent (para pegiat dan pewarta) Yunani memberikan kesaksian tentang bagaimana rakyat awam di negeri itu menghidupkan kembali kekuatan-kekuatan kolektif lokal mereka, antara lain, berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar perkauman tradisional dari ajaran Yunani Kuno (misalnya, diktum seorang filsuf Yunani kuno, Plutarch: “Jangan berutang!”). Cuplikan kisah-kisah ‘perlawanan warga akar-rumput’ dan ‘prakarsa-prakarsa warga tempatan yang semakin meluas’ di Yunani itu memperlihatkan potensi besar ke arah transformasi struktur sosial-politik suatu negara sekaligus transformasi budaya dalam pandangan dunia (*world view*) dan gaya hidup suatu masyarakat.

Berikut adalah beberapa ringkasan dari gerakan-gerakan prakarsa lokal warga Yunani selama krisis tersebut, saya sarikan dari risalah-risalah yang dikirimkan melalui surat elektronik beberapa kawan di sana, laporan-laporan dua orang pewarta warga (*citizen journalists*), Konstantinos Koukalis dan Alexandra Salina, yang marak beredar di selebaran-selebaran lokal berbahasa Yunani dan Latin, terutama sepanjang tahun 2009-2014.

1 ‘Gerakan Kentang’: Tak ada Lagi Tengkulak!

Pada Februari 2012, para anggota Kelompok Aksi Relawan (sebut saja dengan singkatan KAR) di Wilayah Pieria, bermarkas di Katerini, satu kota kecil di utara Yunani, meluncurkan satu aksi bersama (kolektif) yang mereka namakan sebagai ‘Gerakan Kentang’ sebagaimana yang kemudian dipopulerkan oleh media massa.

“Untuk menyatakan kesetiakawanan kami kepada para petani, maka kami mengajak mereka menjual hasil panen mereka langsung kepada kami, para konsumen warga kota-kota di mana gerakan kami aktif.” Demikian penjelasan resmi KAR dalam laman tapakmaya mereka.

Gerakan ini bermula ketika serombongan anggota KAR memrakarsai satu acara kunjungan bersama ke kawasan pedesaan di Thessaloniki. Selama panen raya kentang di kawasan tersebut, para petani membagi-bagikan gratis semua hasil panen mereka kepada siapa saja membutuhkan atau yang mau menerimanya. Tindakan para petani itu adalah sebagai protes terhadap anjloknya harga kentang di pasaran umum sampai ke tingkat yang “sangat merendahkan derajat mereka,” yakni jauh lebih rendah dari harga sebungkus permen atau setengah bungkus rokok. Harga itu ditentukan oleh para tengkulak (pedagang pengumpul, pedagang perantara, pengepul) di seluruh negeri.

Elias Tsolakidis, salah seorang pegiat KAR, menjelaskan: “Setelah kami bertemu dengan para petani di perdesaan, melalui tapakmaya kami, kami menanyakan ke seluruh warga kota berapa harga kentang yang mampu mereka bayar, tetapi tetap layak dan tidak merugikan petani, sekaligus tetap bersaing dengan harga yang ditetapkan oleh para tengkulak. Warga kota bersepakat pada harga 25 sen Euro per kilo. Hanya dalam waktu kurang dari sehari, sudah 24 ton kentang para petani dipesan oleh para warga kota Katerini dan sekitarnya... Sekarang, setiap minggu, kami bukan hanya menyalurkan kentang saja,



tapi berbagai jenis hasil panen para petani, secara langsung ke lebih dari 6.500 keluarga pelanggan di seluruh Katerini dan sekitarnya. Gerakan ini bahkan sudah meluas ke kota-kota lain. Sudah ada 45 kelompok aksi relawan semacam kami yang setiap sebulan sekali menyelenggarakan bazar bersama secara besar-besaran. Setiap hari kami menerima puluhan surat elektronik dari para petani di seluruh negeri yang menawarkan produk mereka untuk disalurkan melalui jaringan kami.”

Karena gerakan ini sudah meluas secara nasional, mereka mulai pula memasang merek dan label pada semua produk petani yang mereka salurkan.

“Kami penuhi semua ketentuan resmi tentang pelabelan produk pertanian,” jelas Tsolakidis lebih lanjut. “Karena itu, kami tak bisa digugat secara hukum dan membuktikan bahwa kami mampu membangun satu jaringan pasokan (*supply chain*) bahan pangan yang sanggup bersaing dengan jaringan pasaraya (*supermarket*) modern. Dengan demikian, kami telah membentuk satu jaringan besar yang menyatukan para petani penghasil dengan para konsumennya dalam satu jaringan kerja nasional di seluruh Yunani.”

Gerakan ini akhirnya memaksa para pedagang dan pasaraya terpaksa mengikuti tingkat harga yang ditetapkan oleh KAR dan para petani. ❖

2 ‘Paguyuban Warga Exarchia’: Dari Bergerilya Menduduki Taman-taman Kota sampai Merintis ‘Bank Waktu’

Lama sebelum aksi-aksi bersama warga terus marak memprotes keadaan perekonomian nasional Yunani yang kian parah, satu kelompok warga di kawasan Exarchia di ibu kota Athena telah membentuk paguyuban mereka bernama ‘Komite Prakarsa Warga’ (selanjutnya disingkat saja KPW) Exarchia.

Salah satu aksi mereka yang sangat terkenal adalah pendudukan taman-taman kota dan lapangan-lapangan parkir yang selama ini tak terurus, lalu mereka ubah menjadi taman umum dan lapangan parkir terbuka dan gratis bagi semua warga. Bekerjasama dengan kelompok-kelompok relawan dari berbagai kalangan, hanya dalam beberapa hari saja, hampir semua taman kota dan pelataran parkir di

kawasan Exarchia sudah mereka duduki dan bersihkan. Pagar-pagar pembatas, balok-balok beton atau semen yang bertumpuk-tumpuk tak karuan karena pembangunnya terhenti akibat kemerosotan perekonomian, sampah yang berserakan, semuanya beres mereka rapihkan atau singkirkan. Selain itu, di semua tempat tersebut, mereka juga menanam ratusan pohon peneduh dan tanaman hias penyejuk mata.





Setiap seminggu sekali, para warga anggota KPW Exarchia berkumpul di taman-taman kota dan pelataran parkir terbuka yang sudah resik itu. Mereka membahas berbagai agenda prakarsa baru berikutnya. Salah satu yang unik dan sudah mulai berjalan adalah apa yang mereka sebut sebagai 'Bank Waktu'. Gagasan pokoknya adalah semua warga anggota didaftar dalam satu pangkalan data lengkap tentang kemampuan atau keahlian yang mereka miliki masing-masing. Kemampuan dan keahlian itulah yang akan mereka saling 'pertukarkan' sebagai layanan jasa, nilainya dihitung dalam jumlah waktu yang mereka sediakan untuk melayani yang lain. Jumlah waktu yang telah disediakan seorang warga, misalnya, untuk melayani kebutuhan warga yang lain, dihitung sebagai 'tabungan' untuk membayar jumlah waktu yang disediakan oleh warga yang lainnya lagi untuk melayani kebutuhan warga yang sudah 'menabung waktu' tadi. Demikian seterusnya.

Dalam praktiknya kemudian, 'transaksi' yang terjadi antarwarga yang tercatat dalam komputer pusat KPW bukan hanya meliputi pertukaran keahlian untuk memenuhi kebutuhan pokok (bahan pangan, obat-obatan, pemeliharaan kesehatan, perbaikan rumah atau saluran sanitasi, penyediaan peralatan kerja, dan sebagainya), tetapi juga sudah meluas ke pertukaran keahlian untuk banyak hal yang kian sulit diperoleh oleh para warga —terutama selama masa krisis pangan dan moneter yang melanda seluruh Yunani. Antara lain, misalnya, mulai banyak 'transaksi' berupa pelayanan pelajaran bahasa asing, peningkatan kemampuan mengelola usaha, perbaikan sarana pemukiman, latihan olahraga, dan sebagainya. Tak heran, semakin banyak kaum profesional mendaftarkan diri dan keahliannya untuk dipertukarkan. Mereka terdiri dari para arsitek, pengacara, dokter, akuntan, guru, dan lain-lain.

Semua itu telah melahirkan satu 'perasaan kebersamaan' di antara sesama warga di semua lapisan dan kalangan, menghilangkan batas-batas penyekat status sosial-ekonomi di antara mereka. "Jadi," kata Aphrodite dan Georgia, dua perempuan separuh baya anggota paguyuban, "bukan hanya kami merasa lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dari layanan sesama warga, tapi lebih daripada itu adalah ikatan kesetiakawanan." Georgia yang selama lebih dari setahun menderita tekanan (depresi) berat karena di-PHK dari perusahaan yang bangkrut akibat krisis keuangan nasional, mulai merasa pulih kembali. Kata dia: "Setiap keluar rumah sekarang ini untuk pergi melayani warga yang lain dengan keahlian yang saya miliki, saya merasa diri saya berguna, kreativitas saya muncul kembali. Saya pikir inilah salah satu cara masyarakat kita untuk keluar dari jebakan budaya dan nilai-nilai konvensional yang didasarkan pada sistem berbasis uang." ❖

3 'Votsalo': Alternatif Melawan Euro (Uang)

Mata uang lokal mulai memasyarakat di beberapa kota di seluruh Yunani. Terilhami, antara lain, oleh gerakan 'Bank Waktu' di Exarchia, satu 'mata uang lokal' baru bernama 'Votsalo' mulai beredar di Koridalos, kawasan pinggiran kota sebelah barat Athena. Mata uang lokal itu baru tiga bulan lalu diperkenalkan oleh satu kelompok kecil warga, hanya dua puluh orang saja, sebagai 'alat tukar' di antara mereka. Sekarang, lebih dari enam ratusan orang di Koridalos sudah ikut menggunakannya, tidak lagi menggunakan mata uang resmi (Euro).



Setiap warga Koridalos boleh mendaftarkan diri sebagai pengguna Votsalo. Segera setelah mereka mendaftar dan aktif hadir dalam pertemuan berkala, segera pula 'rekening Votsalo' mereka diaktifkan melalui jaringan komputer seperti yang digunakan oleh sistem perbankan konvensional selama ini.

Sebagai langkah awal, anda bisa mulai dengan menerima 150 unit Votsalo dalam rekening Anda dan bisa mengumpulkan sampai 300 unit. Mekanisme penggunaannya (pembayaran, penarikan, dan sebagainya) dioperasikan melalui sistem perangkat lunak terbuka (*open source*) bernama 'Cyclos' yang dirancang khusus oleh para relawan ahli komputer sebagai satu sistem 'perbankan masyarakat' (*community banking*). Sistem ini telah meluas digunakan oleh semua jaringan mata uang lokal alternatif terhadap Euro di seluruh Yunani.

Elena, salah seorang pegiat Votsalo menjelaskan: "Kami menghimpun para seniman perupa, perancang grafis, akuntan, pakar ekonomi, dan banyak lagi anggota dengan keahlian yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Kami bersepakat menetapkan mata uang lokal ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan pangan dan layanan kesehatan warga sebagai prioritas. Kami masih terus menggalang para petani penghasil bahan pangan, juga para dokter dan paramedis, untuk ikut terlibat dalam penggunaan Votsalo." ❖

4 Martabat, Kesetiakawanan, Barang Bekas: Cara Lama dalam Matra Baru

Selain ketersohorannya sebagai salah satu situs arkeologi budaya serta sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat, Akadimia Platonos (tempat di mana Plato dulu menyelenggarakan *studium generale* nya yang sangat terkenal) sekarang juga mulai terkenal sebagai salah satu kawasan pemukiman yang membawa 'angin baru dan segar' di metropolitan Athena yang muram selama beberapa tahun akibat dilanda krisis ekonomi berkepanjangan.

Pada 2008, satu kelompok warga di kawasan itu membentuk satu panitia (komite) lokal untuk melindungi ruang-ruang publik terbuka dan situs-situs arkeologi di sana dari ancaman perluasan kawasan komersial modern. Sekarang, pada saat krisis ekonomi makin parah melanda seluruh negeri, kegiatan utama mereka berkembang dan tidak hanya terbatas lagi pada pelestarian situs-situs sejarah setempat. Mereka juga sudah melakukan 'aksi kesetiakawanan' yang menyediakan 'barang-barang bekas': buku-buku pelajaran, sepatu, mainan anak-anak, pakaian, dan banyak lagi, untuk siapa pun warga yang membutuhkan. Sesekali juga mereka menyediakan bahan pangan tertentu yang memang sedang langka ditemukan di pasar. Ruang-ruang terbuka dan situs-situs sejarah di kawasan itu pun segera menjadi 'ruang pertemuan terbuka warga' setiap hari untuk saling berbincang santai, membaca koran, nonton bareng, sambil minum-minum kopi yang juga disediakan secara bersama dan bergiliran.

Athina adalah seorang pakar ekonomi yang terlibat aktif sebagai salah seorang 'panitia sukarela' untuk menyelenggarakan pertemuan berkala mingguan para warga tersebut. "Kami bukan orang kaya yang dermawan," katanya. "Apa yang kami lakukan adalah menjaga martabat kami sebagai manusia melalui tindakan bersama dalam kesetiakawanan. Itulah sebab perkumpulan kami ini berkembang, semula hanya kegiatan-kegiatan pelestarian warisan budaya dan sejarah, sekarang melebar sampai ke kegiatan-



kegiatan pendidikan, pelestarian lingkungan, dan banyak lagi. Kami sangat memahami pentingnya ikatan kebersamaan warga (*community bonds*). Pernah ada seorang ibu pengangguran yang kena PHK, usianya sekitar 55-an tahun, mendatangi saya setahun yang lalu. Dia benar-benar putus asa, bahkan mengaku pada saya kalau dia ingin bunuh diri saja. Saya bukan pakar kejiwaan, tapi saya sarankan pada dia agar ikut aktif membantu kami dalam kerja-kerja kerelawanan ini melayani sesama warga. Sekarang, setelah setahun bersama kami, dia kembali menemukan harkat dirinya, kembali menjalani hidup ini dengan wajar dan bersemangat, merasa dirinya berharga dan ada gunanya.”

Lila, 27 tahun, putri Athina yang juga aktif membantu ibunya menyelenggarakan pertemuan mingguan warga, menggaris-bawahi pernyataan sang ibu: “Dalam keadaan krisis seperti sekarang, kita tak boleh duduk diam saja dan putus asa. Kita harus bertindak melakukan sesuatu. Bersama-sama, kita bisa melakukan banyak hal yang berguna.” ❖

5 ‘Dapur Umum’: Perlawanan dalam Semangat Che

Selama krisis ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat aneh: melarang penyelenggaraan ‘dapur umum’ yang mereka anggap akan makin memperparah kebangkrutan sistem pasar bebas di seluruh negeri. Tapi, banyak kelompok warga di seluruh negeri justru semakin memperbanyak jumlah ‘dapur umum’ yang melayani sesama warga. Dapur-dapur umum itu bukan hanya menyediakan makanan sehat dan bergizi, tapi juga... pendidikan politik! Salah satunya adalah Dapur Umum ‘El Che-f’ di kawasan Exarchia di tengah ibukota Athena. Dapur umum ini menyediakan makan siang murah (seperempat harga pasar umumnya) pada setiap hari Sabtu kepada semua warga. Setelah makan siang, warga boleh berbincang bebas di sana tentang apa saja, termasuk situasi politik mutakhir. Penyelenggara dapur umum akan mengundang narasumber ahli untuk menyampaikan analisisnya. Para narasumber pakar itu menyumbangkan informasi dan pengetahuannya secara gratis sebagai relawan.

“Kami adalah perkumpulan warga yang sangat sadar pada politik, dan mempraktikkan langsung tindakan kesetiakawanan adalah satu tindakan politik. Kami bukan kelompok dermawan murah hati. Konsep dapur umum kami justru bertentangan seratus persen dengan konsep sistem catu pangan oleh pemerintah,” jelas salah seorang koki ternama yang menjadi relawan juru masak di dapur umum itu. “Sebagai contoh paling nyata,” lanjutnya, “warga yang datang ke sini tahu persis bukan datang hanya untuk antrean panjang mendapat pangan murahan, tapi pangan yang bermutu tapi murah. Mereka juga tahu persis tidak hanya akan mendapatkan bahan pangan di sini, tapi sekaligus kesempatan untuk berbagi informasi, bahkan juga perasaan senasib, dengan sesama warga lainnya.” ❖

6 ‘Klimaka’ dan ‘Syniparxsi’: Melawan Pengucilan Sosial & Kehendak Bunuh Diri

Selama 2012, tahun puncak krisis ekonomi nasional, jumlah warga bunuh diri di seluruh Yunani melonjak sampai lebih dari 50% dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah inti salah satu laporan tahunan dari riset mutakhir oleh Laboratorium Kesehatan

Forensik dan Ilmu Keracunan (*Laboratory of Forensic Medicine and Toxicology*), Universitas Kapodistrian Nasional di Athena. “Warga yang melakukan tindakan bunuh diri,” kata Chara Spiliopoulou, Ketua Laboratorium tersebut, “umumnya adalah mereka yang tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan jiwa. Boleh dikata inilah salah satu dampak tak langsung dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung.”

Di ibu kota Athena, satu organisasi nonpemerintah (ORNOP) bernama 'Klimaka' (arti harfiahnya: ‘tangga’) dan satu perkumpulan relawan pakar kejiwaan bernama ‘Syniparxsi’ (Hidup Bersama), menyediakan pelayanan gratis kepada siapa pun warga yang membutuhkannya setiap saat. “Sejak 2008,” kata Aris dari Klimaka. “kami membuka saluran telekomunikasi 24 jam penuh selama 7 hari seminggu untuk melayani kasus-kasus bunuh diri. Kami sudah menerima ribuan panggilan telepon sejak itu. Resesi ekonomi dan pengangguran adalah faktor yang paling menyebabkan banyaknya kasus bunuh diri.”

Sampai sekarang, itulah satu-satunya layanan *hot-line* untuk kasus bunuh diri yang ada di seluruh Yunani. “Saluran *hot-line* Klimaka sudah terbukti sangat membantu mencegah semakin banyaknya kasus bunuh diri,” komentar Lanny Berman, Ketua Perhimpunan Internasional untuk (Pencegahan) Bunuh Diri. “Sangat penting bagi mereka yang berniat bunuh diri untuk bicara pada seseorang yang tidak mereka kenal, tapi mereka percaya.”



Sementara itu, Syniparxsi menyediakan layanan dukungan. Linda Karali, seorang pakar kesehatan jiwa, menjelaskan: “Kami menyediakan layanan dukungan gratis selama lima bulan penuh kepada warga yang menganggur akibat PHK, atau yang tunawisma, atau yang tidak punya lagi asuransi kesehatan, atau yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah. Kami adalah kumpulan para pakar kejiwaan, pakar kesehatan jiwa, dan para pekerja sosial berpengalaman yang merasa bertanggung jawab melayani sesama warga yang menderita. Biasanya, pelayanan kami mulai dari orang per orang, lalu kami mendorong para pasien untuk melakukannya dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan terorganisir, bekerjasama dengan para seniman atau pakar lain yang relevan dan bersedia mendukung sebagai relawan juga. Tujuan utama kami adalah melawan kecenderungan terjadinya pengucilan sosial (*social isolation*) di antara sesama warga, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang.”





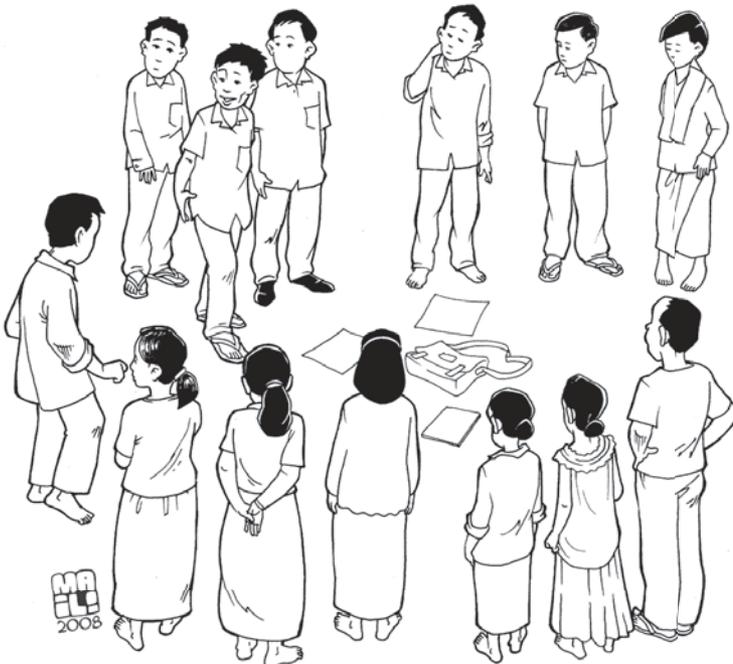
Ada banyak lagi bentuk gerakan bersama warga terjadi di seluruh Yunani selama masa krisis, termasuk beberapa gerakan yang bersifat utopis membentuk perkauman baru sama sekali. Misalnya, gerakan 'Nea Guinea' yang membangun permukiman-permukiman bersama (*colonia*) khusus, umumnya di luar atau di pinggiran kota-kota besar. Mereka berusaha membuat sendiri secara swadaya semua kebutuhan pokok mereka: pangan, energi dan bahan bakar, bahan bangunan, pakaian, sampai sistem layanan kesehatan. Costas, salah seorang penggagas dan perintis Nea Guinea sehari-hari bekerja sebagai salah seorang relawan insinyur di permukiman bersama di luar ibukota Athena, bertugas mengelola bengkel peralatan pembangkit energi alternatif, merancang konstruksi turbin tenaga angin, panel-panel tenaga surya, dan mesin-mesin generator hibrid berbiaya murah. Bengkel yang dipimpinnya sekaligus merupakan laboratorium praktik bagi para warga permukiman yang ingin belajar dan membangun sistem energi swadaya bagi keluarga dan tetangga terdekatnya.

Warga lain *colonium* itu, Fotini, mengatakan: "Kami tidak mengatakan setiap orang bisa 100% murni swadaya, apalagi di sekitar kota besar seperti Athena. Namun, di sini kami merasakan tumbuhnya satu taraf tinggi otonomi, terutama dalam hal produksi pangan atau pengadaan bahan-bahan pengobatan organik yang semua orang bisa mempelajari dan mempraktikkannya." Dia melanjutkan: "Nea Guinea memang masih merupakan percobaan, tapi kami sudah mulai melihat dampaknya. Misalnya, seorang gadis remaja datang ke sini belajar cara bertani organik di lahan terbatas, sekarang berhasil memengaruhi para penghuni apartemen di mana dia tinggal di dalam kota untuk berkebun organik secara kolektif di halaman mereka dan di atas atap gedung apartemennya."

Hampir mirip, adalah prakarsa 'Syntagma Square' dan 'Spithari' yang menjadi bagian dari jaringan nasional Gerakan Zeitgeist Yunani sebagai kelanjutan dari gerakan protes besar 2011 di alun-alun Syntagma di tengah kota Athena. "Sehabis demo

besar itu," kata Fotis, salah seorang penggerakannya, "kami segera menyadari bahwa kami semua punya nilai dan keyakinan yang sama. Jadi, segera kami lakukan tindakan nyata bersama: membangun satu masyarakat yang sepenuhnya kami kendalikan sendiri."

Lahirlah 'Spithari' (nama yang menggabungkan kata yang berarti 'percikan bunga api' dan 'pot tanah liat'), satu satuan-satuan permukiman yang tersebar di seputar pinggiran Athena, seperti mengempung



ibu kota negeri yang sedang dilanda krisis berat itu.

Para pewarta warga setempat bahkan menyebut koloni-koloni Spithari dan Nea Guinea mulai menampakkan diri sebagai bentuk dari Jaringan Desa Dunia Berwawasan Lingkungan (*Global Eco-village Network*) yang akan mengepung kota-kota besar modern dan kapitalistik di daratan Eropa. Meskipun sebagiannya masih merupakan eksperimen sosial dalam skala terbatas, namun, paling tidak, semua prakarsa lokal itu kini mampu menyediakan alternatif bagi pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh warga ketika mereka memang sangat membutuhkannya.

Para seniman juga meramaikan gerakan-gerakan sosial baru tersebut. Tiba-tiba saja, di berbagai sudut, termasuk di ibu kota Athena: di tembok-tembok gedung, di papan-papan besar reklame, di dinding-dinding bus dan kereta api, berbagai lukisan besar mural yang mengajak warga bergerak bersama menghadapi keadaan yang semakin memburuk. Tentu saja, juga protes dan kecaman tajam terhadap kebijakan pemerintah, sikap negara-negara Eropa yang dianggap sama sekali tidak membantu memperbaiki keadaan, dan campur tangan lembaga-lembaga multilateral yang juga hanya memperkeruh masalah. Menjelang perayaan Natal 2012, di beberapa pusat keramaian, muncul poster-poster ucapan selamat natal yang diplesetkan: "*Merry Crisis*"! Kartu-kartu pos ucapan selamat natal yang selama beberapa tahun nyaris punah digantikan oleh surat-surat dan pesan-pesan elektronik bergambar melalui internet, muncul kembali. Para petugas kantor pos kembali mendapatkan pekerjaan klasiknya, mengantar kartu-kartu natal bergambar lucu dan bernada sengak itu. ❖ (BETA PETTAWARANIE, 17/08/2014)



FINAL

ACARA-13

CONTOH NYATA: PEMETAAN SEBAGAI ALAT PENGORGANISASIAN

TUJUAN

- Peserta memahami strategi & taktik pengorganisasian rakyat dalam satu kerangka konsep pendekatan terpadu berdasarkan konteks makro dan mikro dari isu atau tema tertentu.
- Peserta mengenal salah satu media (pemetaan) dan cara pemanfaatannya sebagai alat pengorganisasian yang sudah terbukti efektif, terutama dalam hal penguasaan ruang kehidupan warga masyarakat lokal.

POKOK BAHASAN

- Kerangka terpadu strategi & taktik pengorganisasian rakyat berdasar konteks makro dan mikro.
- Pemetaan sebagai satu contoh alat efektif pengorganisasian.

WAKTU

- 4-6 jam efektif (2-3 satuan acara/session)

METODE & MEDIA

- Telaah kasus, pertunjukan video
- Diskusi kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Bahan bacaan, lembar kasus, film/video
- Papan tulis, kertas plano, spidol, kertas-kertas tempel (*metaplan*), kertas perekat (*lack ban*)
- Alat penayang (*LCD projector + laptop computer*)

PROSES (LANGKAH PELAKSANAAN)

1. Jelaskan secara singkat tujuan dan pokok bahasan acara ini.
2. Bagi mereka dalam dua atau tiga kelompok sama besar, lalu langsung bagikan Bahan Bacaan #14 (*Pemetaan Sebagai Alat Pengorganisasian*) kepada seluruh peserta dalam setiap kelompok.

3. Beri mereka waktu cukup lapang (sekitar 30-45 menit) untuk membaca dan menyimak bahan bacaan tersebut, karena bahannya cukup panjang dan banyak rincian yang perlu diperhatikan. Jelaskan bahwa selama masa membaca tersebut, jika ada yang kurang dimengerti dalam bahan bacaan tersebut, mereka boleh bertanya, lalu jelaskan singkat dan semudah mungkin. Sarankan pada mereka untuk membuat catatan-catatan penting yang diperlukan untuk dibahas bersama nanti.
4. Setelah selesai membaca, minta tiap kelompok membuat rangkuman pokok-pokok penting dari bahan bacaan tersebut:
 - **Apa dan bagaimana strategi dan taktik (langkah-langkah, proses, pola-pola pendekatan, metode, cara-cara, media) yang mereka gunakan untuk mewujudkan visi tersebut?**
 - **Bagaimana dan dengan cara apa mereka memulainya?**
 - **Bagaimana pentahapan dan perkembangannya?**
 - **Apakah strategi & taktik mereka itu memang sesuai (konsisten) dengan visinya? Apa visi pengorganisasian dalam kasus tersebut?**
 - **Mengapa mereka menempuh strategi dan taktik seperti itu?**
5. Untuk lebih mempertajam pemahaman peserta, tayangkan video dokumenter “Sambil Berjalan” atau “Bergerak dari Bawah” (masa tayang 24 menit). Jelaskan bahwa video ini merupakan visualisasi ringkas dari bahan bacaan tadi. Setelah menonton, ajukan lagi pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai pendalaman pokok bahasan.



Catatan

■ Video dokumenter “Sambil Berjalan” dan “Bergerak dari Bawah” tersedia dan dapat di-copy di perpustakaan digital PerDikAn, INSIST, Yogyakarta. Tetapi, jika Anda belum memiliki, Anda bisa menggantinya dengan video dokumenter sejenis yang tersedia di tempat Anda. Yang penting, video itu menggambarkan dengan jelas (meskipun secara garis

besar saja) strategi, taktik, dan metode yang digunakan dalam suatu proses pengorganisasian satu komunitas lokal dan memang fokus pada tema tersebut (bukan terutama pada isunya, tapi lebih pada proses komunitas setempat mengorganisir diri menghadapi isu tersebut).

6. Tutup acara ini dengan rangkuman umum tentang strategi dan taktik pengorganisasian berdasarkan konteks makro dan mikro dari isu atau tema utamanya serta konsistensinya dengan visi dasarnya. Lalu bagikan Bahan Bacaan #15 (*Petuah Sang Bijak [4]*) ❖

ROEM TOPATIMASANG

PEMETAAN SEBAGAI ALAT PENGORGANISASIAN

Naskah asli makalah ini dalam bahasa Inggris ditulis pertama kali sebagai makalah pada International Conference on “Representing Communities: History and Politics of Community-based Resource Management”, Department of Anthropology, University of Georgia, di Atlanta, USA, 1-3 June 1997. Dimuat dalam Brosius, Peter J., Anna Lowenhaupt Tsing, and Charles Zerner. eds. (2005), *Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management*. Walnut Creek: Altamira Press, pp. 363-390. Naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia ini, setelah beberapa perbaikan dan tambahan, dimuat dalam Ton Dietz (2000), *Pengakuan Hak atas Sumberdaya Alam; Kontur Geografi Politik Lingkungan*. Yogyakarta: INSISTPress, cetakan kedua, 2005; hal. 95-164.

Pada April 1992, ada 26 orang wakil dari masyarakat adat di Maluku dan Papua bagian selatan berkumpul di kota Ambon. Mereka saling membagi informasi tentang masalah-masalah utama yang mereka hadapi di tempat masing-masing. Selama empat hari pertemuan, pada hari terakhir mereka sepakat bahwa salah satu masalah pokok bersama adalah pencaplokan kawasan ulayat adat mereka oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta besar dari luar. Lalu, mereka pun merumuskan suatu rencana tindakan bersama yang terdiri dari sejumlah kegiatan (apa yang harus dan dapat dilakukan?), rencana jaringan kerjasama dan sekutu (siapa saja yang dapat diajak untuk mendukung?), serta cara dan proses kerjanya (bagaimana melaksanakan semua rencana itu?).

Rencana-rencana mereka, pada dasarnya, memilih cara-cara damai melalui perundingan dan musyawarah. Satu debat keras muncul karena beberapa peserta tidak percaya lagi pada cara-cara semacam itu yang mereka sebut ‘terlalu lunak’. Akhirnya, mereka sepakat untuk menambahkan satu catatan akhir sebagai berikut:

Kalau semua cara-cara damai itu tidak bisa lagi digunakan, maka kita harus: (1) membentuk organisasi-organisasi rakyat yang murni bertujuan mempertahankan tanah dan perairan kita; (2) menyebarluaskan informasi tentang kasus-kasus yang kita hadapi kepada berbagai pihak yang bersedia mendukung; dan (3) jika perlu, mengerahkan rakyat kita untuk melawan para perampok tanah dan perairan kita melalui unjuk rasa, blokade, dan lain-lain...¹

¹ Dikutip dari: “Pertemuan Informal Arafura: Rekoleksi Aktivistis se Maluku dan Irian Selatan,” dokumen laporan yang tidak diterbitkan, Ambon, 22-26 April 1992.



Kesimpulan itu memang masih sangat umum dan terkesan sebagai satu pernyataan yang diwarnai kebingungan atau bahkan perasaan putus asa. Kenyataannya, mereka memang sedang menghadapi masalah berat pencaplokan tanah dan perairan, beberapa di antaranya bahkan masih dalam proses perjuangan fisik mempertahankan hak-hak tersebut. Tetapi, seperti galibnya di banyak tempat, mereka selalu berada di pihak yang kalah jika berhadapan dengan para pencaplok dari luar yang jauh lebih kuat. Sebagai orang desa tradisional —sebagain besar adalah petani dan nelayan tanpa pendidikan formal lebih tinggi dari SMP— dan nisbi tidak punya saluran informasi ke dunia luar —beberapa di antaranya bahkan baru pertama kali keluar dari kampung atau pulau mereka— maka cukup mudah memahami mengapa rumusan kesimpulan mereka itu, meskipun sangat tegas, namun tampak terlalu sederhana.

Tetapi, kurang dari dua tahun kemudian, mereka membuktikan tidak hanya omong. Ketika pertemuan kembali dilakukan pada bulan Nopember 1993, lebih dari separuhnya sudah berhasil membentuk basis-basis organisasi rakyat di tempat masing-masing dan, dengan perangkat kelembagaan tersebut, mulai secara lebih sistematis mempertahankan hak-hak ulayat adat mereka, antara lain, dengan menggunakan teknik-teknik pemetaan.

Makalah ini akan menceritakan, secara ringkas, beberapa alasan mengapa mereka menggunakan teknik-teknik pemetaan tersebut, bagaimana mereka menggunakannya, untuk tujuan apa dan, yang terpenting, apa saja hasil dan dampaknya?

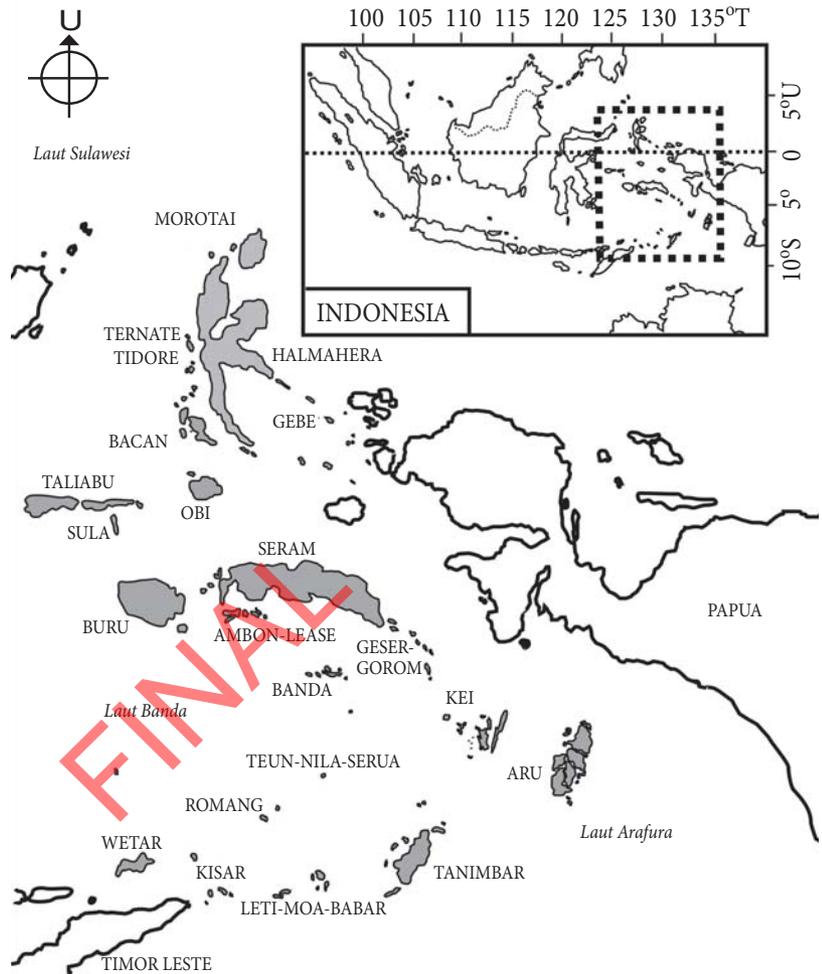
Karena makalah ini lebih merupakan rekaman pengalaman praktis —penulis, sebagai organisier dan fasilitator, adalah salah seorang yang terlibat langsung dalam seluruh proses tersebut— maka makalah ini pun ditulis dalam bahasa praktis berbentuk uraian kasus-kasus. Agar memperoleh gambaran awal mengenai latar belakang dan konteks permasalahannya, terutama bagi pembaca yang belum terlalu akrab dengan wilayah Maluku, makalah ini sengaja diawali dengan satu uraian singkat mengenai konsep tradisional setempat tentang pemilikan kawasan dan pengelolaan sumberdaya alam di dalamnya, kemudian satu tinjauan umum tentang sejarah dan politik pencaplokan tanah (serta perairan) di kepulauan tersebut dan, akhirnya, satu catatan akhir yang menjadi inti pokok pemikiran penulis tentang pembelaan hak-hak pengelolaan sumberdaya alam dan pemilikan kawasan masyarakat adat pada umumnya.

Latar: Konsep Kawasan Tradisional di Maluku

Kepulauan Maluku terletak di antara 125-135°BT dan antara 5°LU-10°LS, terdiri dari 1.027 pulau besar dan kecil, berpenghuni maupun kosong, yang menyebar sampai seluas 851.000 km², tetapi hanya 85.728 kilometer persegi (10,1%) berbentuk daratan, sementara 765.272 kilometer persegi (89,9%) sisanya adalah laut, termasuk laut terluas dan terdalam (hampir 10.000 meter) di Indonesia: Laut Banda! ((lihat: PETA-1, pada halaman berikutnya).

Sensus resmi tahun 1990 memperlihatkan jumlah penduduk kepulauan ini adalah 1,8 juta jiwa. Sebagian besar adalah nelayan yang bermukim di tepi pantai (64,4% desa-desa di Maluku adalah desa-desa pantai). Dibanding provinsi lain di Indonesia, tingkat kepadatan penduduknya memang masih jarang, rata-rata hanya 2 jiwa/km². Meskipun demikian,

PETA-1: KEPULAUAN MALUKU



tidak berarti bahwa masalah pertanahan tidak penting di Maluku. Bukan angka-angka statistik itu memang yang dapat menjelaskannya, tetapi konsep kepemilikan tanah (dan perairan) masyarakat adat Maluku serta proses sejarah yang menciptakan dan memengaruhi dinamika perkembangan konsep tersebut.

Sama seperti masyarakat adat lainnya di mana pun, orang-orang Maluku sangat terikat dengan tempat asal mereka. Jika bukan balada cinta kepada kerabat (kekasih, keluarga, terutama ibu) mereka, lagu-lagu rakyat Maluku selalu menyenandungkan satu tema utama: pujaan terhadap kampung halaman! Kampung halaman bukan semata-mata tempat kelahiran, tumbuh dewasa dan mati, tetapi juga

menjadi bagian sebatik dari ciri budaya, akar sejarah keberadaan dan nilai-nilai rohaniyah: suatu ruang kehidupan (*lebensraum*)! Satu syair tua dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, secara khas mengungkapkannya sebagai berikut:

“...Kita hidup di kampung halaman dimana kita mendapat pangan dari tanahnya
 Kita mendiami tempat kita dan selalu menjaga apa yang menjadi bagian kita
 Kita menanggung semua beban kampung kita dengan segala ketentuan adatnya
 Kita hidup sejujur mungkin dan berjalan tegak lurus ke depan
 Dengan demikian hukum adat akan menjamin kita
 Sehingga leluhur akan melindungi kita
 Dan Tuhan akan merahmati kita...”²

² Diterjemahkan secara bebas dari J.P. Rahail, *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Tanah & Laut Tradisional Kei*. Yayasan Sejati, Jakarta, 1995.





Bagi orang-orang pulau ini, kampung halaman memang bukan hanya tapak rumah, pekarangan dan ladang, tapi juga seluruh hutan, bukit, lembah, sungai, dan, tentu saja, laut sekelilingnya. Seluruh kawasan itu disebut *petuanan* (dari kata 'tuan', artinya 'pemilik'), sehingga kata *petuanan* selalu disebutkan dengan nama sang pemilik, misalnya, '*petuanan negeri* Ihamahu', maksudnya suatu kawasan yang dimiliki oleh penduduk *negeri* (desa) Ihamahu, satu desa di Pulau Saparua, Kepulauan Lease, Maluku Tengah. Dengan menyebut *negeri*, itu berarti bahwa suatu *petuanan*, darat maupun laut, adalah milik bersama seluruh penduduk dari suatu desa.

Dalam suatu *petuanan negeri*, memang ada bagian tanah yang dimiliki oleh marga (*fam*) tertentu —biasanya dalam bentuk tapak rumah dan pekarangannya serta lahan kebun— yang disebut sebagai 'tanah marga'. Selebihnya, yakni tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa marga pun —biasanya adalah hutan (*ewang*) primer maupun sekunder sebagai kawasan berburu atau kawasan meramu (*dusun*)— yang dengan sendirinya menjadi milik semua marga dalam desa tersebut, disebut sebagai 'tanah *negeri*'. Jadi, sebutan *negeri* selalu mengandung makna komunal dan *petuanan* selalu merupakan konsep kepemilikan bersama atas suatu kawasan komunal pula.

Di Kepulauan Lease, Maluku Tengah, sebagai contoh, suatu tanah marga adalah kumpulan atau himpunan dari semua tanah —dengan kata lain, tanah kolektif— milik keluarga pati anggota marga yang bersangkutan sebagai suatu keluarga besar (*extended family*), disebut 'tanah *dati*' atau 'tanah pusaka'. Namun, setiap keluarga pati, dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati dan diatur oleh para tetua dari marga tersebut, juga memiliki hak untuk menggunakan dan memanen hasil dari tanah keluarga pati lain anggota marga mereka. Bahkan, sampai pada tingkat tertentu, sepanjang hal itu memang disepakati dan diatur oleh para tetua Dewan Adat (*Saniri* atau *Seniri*), mereka juga memiliki hak yang sama pada tanah milik marga lain. Setelah generasi kedua dan ketiga, ketika anak-anak dan cucu-cucu mereka mulai banyak dan bersama-sama menggunakan lahan tersebut, maka status kepemilikannya pun berubah sebagai milik bersama dari marga yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak ada kepemilikan pribadi yang bersifat mutlak atas tanah, sementara pemilikan perseorangan marga atas tanah *dati* atau tanah pusaka pada hakekatnya adalah nisbi.

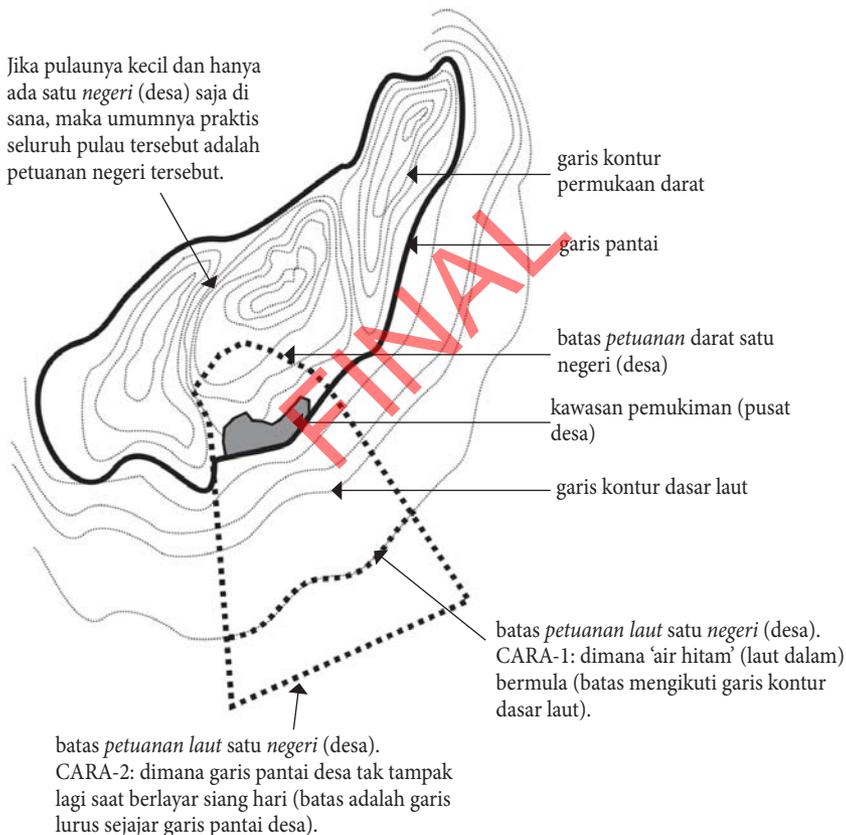
Asal muasal kepemilikan suatu *petuanan*, menurut hikayat setempat, adalah beragam dalam prosesnya di berbagai tempat atau pulau yang berbeda. Meskipun, ada satu pola umum yang sama. Kepemilikan itu biasanya diawali oleh pembukaan suatu lahan untuk rumah dan kebun, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hutan sekitarnya untuk perladangan daur ulang (*shifting cultivation*), berburu dan meramu hasil hutan. Mereka meletakkan satu tanda tertentu pada titik-titik terjauh yang mereka dapat capai dari pusat permukiman atau kampung. Jika belum ada orang lain menaruh tanda sebelumnya di tempat tersebut, maka titik-titik itu menjadi tapal batas dari kawasan *petuanan* mereka. Dengan menarik garis lurus yang menghubungkan semua titik-titik tersebut, suatu garis lengkap suatu *petuanan negeri* pun sudah tercipta.

Itu menyangkut *petuanan* darat. Proses yang sama juga terjadi untuk *petuanan* laut, tetapi dengan cara yang lebih sederhana, yakni dengan menarik garis lurus sejajar ke arah laut lepas dari dua titik ujung *petuanan* darat yang terdapat di tepi pantai. Di Desa



Watlaar, Pulau Kei Besar, batas kawasan *petuanan* di laut lepas ditentukan pada titik terjauh di mana mereka tidak lagi dapat melihat tepi pantai kampung atau *petuanan* darat mereka ketika mereka berlayar pada siang hari. Di tempat-tempat lain, misalnya, di desa-desa pantai di Pulau Halmahera, Maluku Utara, masyarakat adat setempat menentukan batas *petuanan* laut mereka dengan cara yang lebih sederhana lagi: di mana 'air hitam' (laut dalam) bermula. Jadi, di Watlaar dan Kepulauan Kei pada umumnya, garis batas luar *petuanan* laut akan tampak sebagai suatu garis lurus sejajar dengan garis pantai, sementara di Halmahera akan tampak sebagai garis lengkung atau berlekuk mengikuti garis kontur dasar laut (lebih jelas, lihat: PETA-2).

PETA-2:
KONSEP UMUM WILAYAH ULAYAT TRADISIONAL DI MALUKU



Apa pun cara dan bentuknya, di seluruh Maluku, *petuanan* laut adalah bagian sebatik dari keseluruhan *petuanan* negeri. Tetapi berbeda dari *petuanan* darat di mana ada beberapa bagian yang menjadi milik perseorangan dari marga-marga yang ada dalam desa itu, seluruh kawasan *petuanan* laut sebaliknya adalah mutlak merupakan kawasan komunal milik seluruh penduduk dari suatu desa. Tidak ada satu marga pun, apalagi satu keluarga pati atau seorang pribadi, yang boleh mengakui kepemilikannya atas bagian tertentu dari kawasan *petuanan* laut



desa mereka, bahkan termasuk tapak rumah mereka sendiri yang (kalau ada) kebetulan berada di atas pantai atau *meti* (lahan kering pada saat air surut). Sebagaimana galibnya penduduk desa pantai, mereka boleh saja mendirikan rumah di tempat itu —sebagai anggota masyarakat adat setempat yang memang berhak— tetapi sama sekali tidak memiliki lahan tersebut.

Singkatnya, konsep dasar pemilikan tanah (dan laut) tradisional di Maluku, pada hakikatnya, adalah suatu konsep pemilikan bersama penduduk setempat. Dengan kata lain, jika kita bicara tentang hak-hak wilayah tradisional masyarakat adat di Maluku, khususnya dalam kasus-kasus sengketa kawasan dengan pihak-pihak luar, maka konsep komunal *petuanan negeri* akan menjadi tema kuncinya. Sengketa atau pencaplokan kawasan antara berbagai marga dalam satu atau beberapa desa yang berbeda memang juga pernah terjadi dalam sejarah masyarakat setempat, kadangkala juga diwarnai oleh aliran darah. Tetapi, dalam kasus-kasus sengketa atau pencaplokan tanah atau kawasan milik suatu marga tertentu oleh pihak luar (artinya bukan oleh marga lain dari desa yang sama), maka akan selalu terjadi bahwa marga-marga lain sedesa akan membantu marga yang bersangkutan mempertahankan hak-hak mereka. Dalam kasus semacam ini, maka tanah marga tertentu tadi tidak lagi dilihat sebagai tanah milik satu marga itu saja, tetapi sebagai bagian sebatik dari tanah komunal mereka bersama, yakni *petuanan negeri*, secara keseluruhan. Inilah sebab mengapa orang-orang Maluku, jika menyebut tanda diri komunal atau kolektif mereka, tidak mengacu pada marga atau himpunan marga besar (*soa*) sendiri. Mereka selalu menyebut diri mereka sebagai ‘anak-anak *negeri*’, bukan ‘anak-anak marga/*soa*’. Hanya jika mereka merujuk pada tanda diri pribadi atau perseorangan, barulah mereka misalnya bertanya: “Dia itu orang (marga/*soa*) apa?”, bukan bertanya: “Apa *negeri* (desa)-nya?”

Berdasarkan konsep pemilikan kawasan secara komunal tersebut, masyarakat adat Maluku kemudian mengembangkan satu konsep khas tentang pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan *petuanan* mereka sesuai dengan pola-pola hubungan sosial dan kekerabatan yang juga khas setempat. Di Maluku Tengah, di mana struktur sosial nisbi lebih setara (egaliter) dengan satu sistem kepemimpinan dan pemerintahan desa yang hanya terbatas pada satu *negeri* saja, pengelolaan sumberdaya alam setempat pun nisbi lebih sederhana dibanding daerah lain di Maluku. Proses pengambilan keputusannya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih ringkas, misalnya, cukup hanya dengan mendengarkan pendapat dan saran-saran dari perwakilan semua marga atau *soa* yang ada.

Agak berbeda dengan di Maluku Utara —di mana hubungan sosial dan kekerabatan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan feodal Kesultanan Ternate dan Tidore— atau di Maluku Tenggara, khususnya Kepulauan Kei —di mana suatu pelapisan sosial cukup rumit masih berlaku atas dasar kelas (*kasta*) keningratan. Pengelolaan sumberdaya alam di kedua tempat terakhir ini menjadi lebih rumit karena melibatkan tidak hanya satu negeri atau desa saja, tetapi juga melibatkan proses-proses politik lokal dengan istana kedua Kesultanan (di Maluku Utara) atau struktur kekuasaan majemuk dari suatu persekutuan (federasi) beberapa *negeri* yang disebut *Ratschap* (di Kepulauan Kei). Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan lebih lamban dan, seringkali, menghasilkan beberapa ketegangan dan juga ketidakmerataan atau bahkan ketidakadilan



pembagian hasil antar mereka sendiri. Ini merupakan suatu masalah tersendiri yang harus dicermati secara arif dalam setiap upaya pembelaan hak-hak masyarakat adat di kedua tempat tersebut dan, untuk alasan yang sama, juga di mana pun di dunia ini.

Meskipun demikian, mereka semua masih membagi satu ciri yang sama dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam setempat. Kesamaan ini didasarkan pada prinsip manfaat bersama dan timbal balik (*reciprocity*) untuk menjaga keseimbangan sosial³ dan keselarasan dengan alam sekitar. Salah satu bentuk terpenting dari sistem tradisional pengelolaan sumberdaya alam tersebut adalah yang disebut *sasi* (dari kata 'saksi'), suatu ketentuan hukum adat yang melarang keras siapa pun untuk mengambil sesuatu dari alam sekitar, darat maupun laut, pada satu masa tertentu dalam rangka menjamin kelestariannya. Contoh, ada *sasi lola* (jenis kerang keras, *Trochus niloticus*) di Pulau Kei Besar, *sasi kima* (kerang raksasa, *Tridacna gigas*) di beberapa tempat di Pulau-pulau Kei Kecil, *sasi teripang* (*Holothuria* spp.) di Kepulauan Aru dan Tanimbar, dan *sasi lompa* (sejenis ikan sardin, *Thissina baelama*) di Pulau Haruku. *Sasi* juga dapat diberlakukan untuk satu bentang kawasan tertentu, artinya dilarang keras mengubah apa pun sumberdaya alam dalam kawasan tersebut selama masa tertentu pula. Misalnya, ada *sasi meti* (kawasan pantai air surut), *sasi ewang* (hutan) dan *sasi dusun sagu* (untuk menjaga kelestarian salah satu sumber bahan pangan pokok setempat). Di Haruku, cakupan kawasan *sasi* membentang luas sejak dari hutan hulu sungai hingga muara dan pantai (lihat: PETA-3, pada halaman berikutnya).

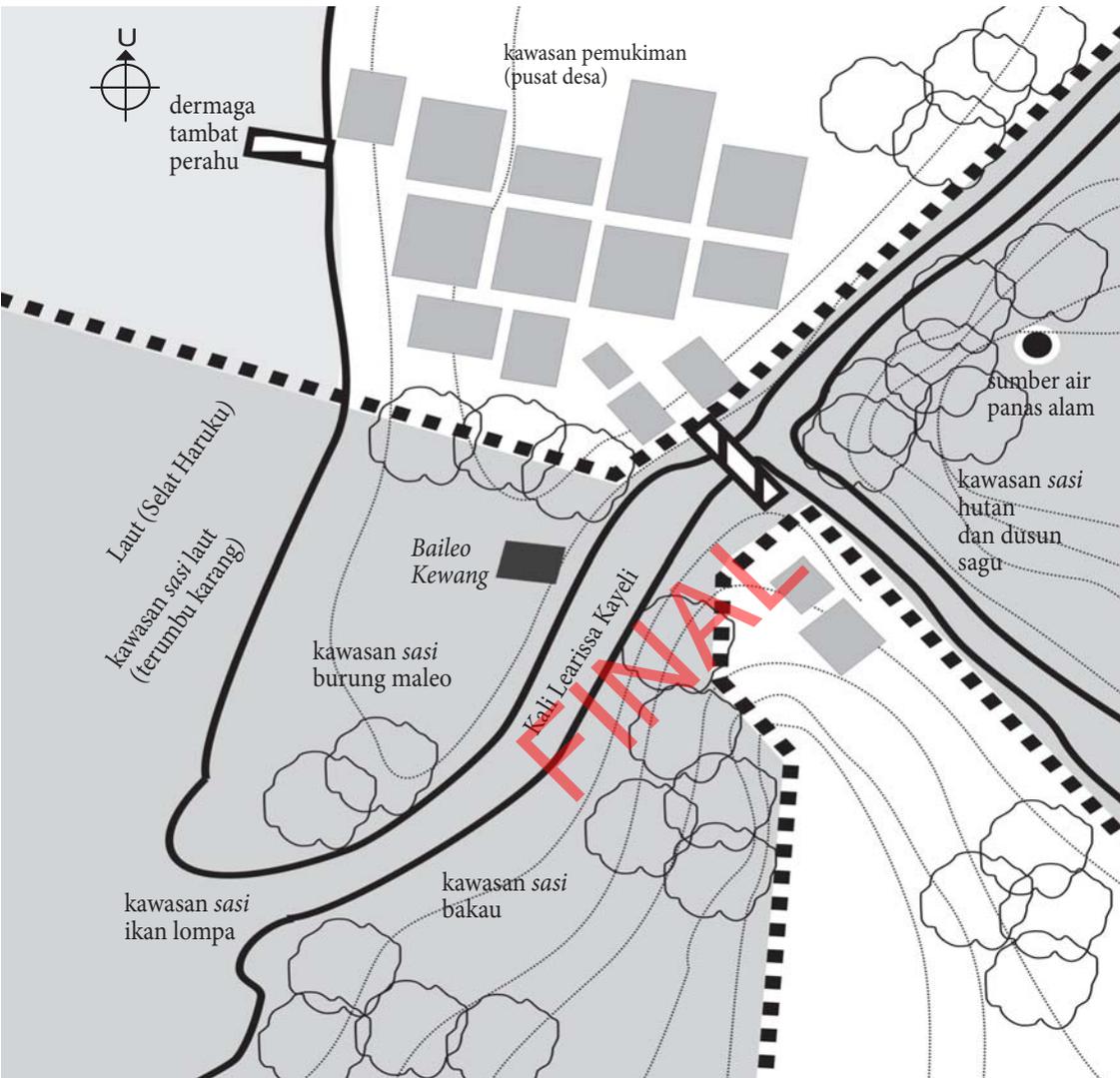
Di beberapa tempat lain, juga diberlakukan semacam '*sasi abadi*' untuk kawasan hutan primer yang dikeramatkan (*sacred forests, ancestral sites*), termasuk '*sasi abadi*' untuk beberapa jenis satwa liar yang dianggap suci, seperti semua jenis ular, biawak, dan tikus hutan di Pulau Nuhuta, Tanimbar Kei, Maluku Tenggara.

Belum banyak dokumen tertulis untuk menyimpulkan kapan tepatnya praktik pelestarian tradisional ini mulai dijalankan dan mengapa kemudian menjadi suatu praktik yang umum dilakukan di seluruh Maluku (dan juga di Papua). Hikayat setempat di Haruku menyebutkan bahwa nenek moyang mereka sudah memulai tradisi *sasi* sejak abad-XIV. Di beberapa tempat lain, hikayat setempat menyebutkan masa yang jauh lebih awal atau lebih belakangan. Namun, yang jelas saat ini adalah fakta bahwa *sasi* telah menjadi bagian sehati dari hukum atau peraturan-peraturan adat masyarakat di Maluku. Sebagai bagian dari hukum adat, yang diundangkan oleh Dewan Adat, maka *sasi* bukan hanya suatu sistem pengelolaan yang bersifat *profan*, tetapi juga suatu tradisi suci yang dianggap sebagai warisan keramat dari para leluhur. Matra suci atau keramat inilah yang secara efektif membuat *sasi* dipatuhi oleh masyarakat adat setempat.

Sebenarnya, hukuman terhadap para pelanggar ketentuan *sasi* tidak berat sama sekali. Setiap orang dengan mudah dapat membayar denda ringan dalam bentuk sejumlah kecil

³ Kecuali dalam pemaknaan hubungan yang selaras dengan alam sekitar, tentu saja, pengertian keseimbangan sosial antara beberapa masyarakat adat yang berbeda pola hubungan sosial dan kekerabatannya itu, juga berbeda dalam pemaknaan dan pelaksanaannya: ada yang memang nisbi lebih setara dan ada yang bahkan cenderung menghisap yang lain. Sekali lagi, ini merupakan satu tema tersendiri yang tidak dimaksud untuk dijadikan pokok bahasan dalam makalah singkat ini.

PETA-3:
KAWASAN SASI TERPADU DI HARUKU, LEASE, MALUKU TENGAH



uang (misalnya, hanya berkisar antara Rp2.500–10.000) atau dalam bentuk hukuman raga (misalnya, pukulan simbolis dengan rotan pada betis kaki; atau berdiri siap selama satu jam di bawah terik sinar matahari). Apa yang benar-benar memalukan adalah justru saat pelaksanaan hukuman tersebut yang disaksikan (*sasi!*) oleh seluruh penduduk desa. Ini sudah cukup untuk membuat si pelanggar dan keluarganya menanggung beban rasa malu sebagai ‘Si Pengacau’ atau ‘Pencuri’. Cap itu akan mereka wariskan kepada anak-cucu mereka. Pada 1988, di satu desa kecil terpencil di Pulau Seram, Maluku Tengah, seorang lelaki telah melanggar peraturan sasi dan dihukum oleh Dewan Adat dengan cara unik: berjalan keliling desa sambil membawa semua buah-buahan yang telah



diambilnya dari hutan yang sedang di-*sasi* saat itu, sambil berteriak ke setiap rumah: “Saya mencuri dan melanggar *sasi*! Saya janji tidak akan mengulanginya lagi!” Dalam suatu kehidupan komunal yang masih pekat, ‘hukuman sosial’ semacam ini benar-benar tak tertanggungkan dan, dalam banyak kasus, si pelanggar akhirnya meninggalkan desa selama masa tertentu atau bahkan tidak pernah lagi pulang sama sekali.

Sampai tingkat tertentu, contoh itu memperlihatkan bahwa hukum adat di Maluku sebenarnya sudah menerapkan satu dari kaidah asas hukum yang bersifat semesta: *in adimplendi non est adimplendum* (tidak ada kewajiban untuk melayani hak mereka yang justru melanggar hak-hak tersebut)! Termasuk dalam kaidah asas ini adalah penghapusan hak-hak si pelanggar untuk memperoleh bagian bagi-hasil dan manfaat dari sumberdaya alam dalam kawasan *petuanan* tradisional mereka.

Konteks: Sejarah & Politik Pencaplokan Kawasan di Maluku

Sama seperti masyarakat adat lainnya di seluruh dunia, pencaplokan kawasan tradisional mereka bukanlah barang baru sama sekali bagi masyarakat adat di Maluku. Hikayat-hikayat lokal secara jelas menceritakan banyak sengketa, bahkan perang, yang pernah terjadi antar mereka sendiri yang saling memperebutkan pemilikan atas suatu kawasan tertentu, darat maupun laut. Ada banyak pula alasan bagi terjadinya sengketa atau perang tersebut, tetapi, umumnya adalah bahwa si pemenang akan menyatakan kawasan yang mereka rebut atau taklukkan itu sebagai milik mereka, berpindah tangan dari pihak yang kalah. Ini memang gejala umum di mana saja. Apa yang kemudian menjadi unik di Maluku adalah fakta sejarah pula bahwa, di bawah syarat atau keadaan tertentu, sang pemenang atau penakluk justru tetap membolehkan pihak yang mereka kalahkan untuk tetap menikmati bagian hasil dari sumberdaya alam setempat atau, bahkan, menjadikan mereka tetap sebagai pengelola atas kawasan taklukan tersebut.

Pada abad-XIII, setelah menaklukkan wilayah tradisional orang Tobelo di jazirah utara dan tengah Pulau Halmahera, Sultan Ternate malah tetap membolehkan penduduk asli Tobelo untuk terus berburu, meramu, bercocok tanam, dan memanen hasil apa pun dalam kawasan taklukan tersebut. Sang Sultan hanya meminta mereka membayar pajak tahunan dalam jumlah tertentu dan mewajibkan mereka secara setia mendukung perbekalan tentara Sultan di masa perang. Pada kasus lain, para penakluk Kepulauan Kei —yakni para pendatang dari Pulau Luang dekat Timor⁴ yang, pada gilirannya,

⁴ Sumber-sumber tradisional setempat menyebut asal muasal mereka dari Bali yang mungkin bisa menjelaskan mengapa mereka memberlakukan sistem pelapisan kasta sosial. Tetapi, sumber-sumber kepustakaan ilmiah umumnya sepakat atau lebih cenderung menyimpulkan asal-muasal penakluk atau pendatang tersebut adalah dari pulau-pulau lain di Maluku, terutama Pulau Luang. Belum cukup dokumen tertulis untuk memastikan kapan persisnya penaklukan ini berlangsung. Beberapa orang tetua di Desa Letvuan, Kei Kecil —desa yang diidentifikasi sebagai permukiman pertama para penakluk atau pendatang tersebut, sehingga oleh masyarakat adat Kei sekarang dianggap sebagai desa pertama leluhur mereka— hanya menyebut ‘ratusan tahun yang lalu’, jauh sebelum para pendatang lainnya, orang-orang Seram dan Banda, pada abad XIV-XVI, juga berpindah secara masif ke Kei, antara lain untuk menghindari tindak kekerasan pemerintah kolonial Belanda saat itu.

membentuk suatu kelas penguasa baru (*Mel*) sebagai ‘Raja’ dan penguasa perang dalam tatanan sosial masyarakat adat Kei sampai saat ini—hanya mengambil sebagian dari tanah kawasan taklukan mereka untuk keperluan mereka sendiri, kemudian membiarkan sebagian lainnya tetap dimiliki dan dikelola oleh penduduk asli pemiliknya yang telah mereka taklukkan. Mereka inilah yang kemudian membentuk lapisan kedua dalam sistem pelapisan kasta baru yang diterapkan sang penakluk, yakni sebagai kasta tengah (*Ren*) yang, pada gilirannya bertindak sebagai ‘Tuan Tanah’, menjadi penasehat utama golongan *Mel* dalam semua urusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan hukum (jurisdiksi) adat *petuanan* darat dan laut setempat sebagai milik bersama mereka. Juga, bertindak sebagai penghubung antara golongan *Mel* dengan golongan jelata — biasanya adalah mereka yang dinistakan karena melanggar hukum-hukum adat— yang merupakan kasta terendah (*Ri*).

Secara umum, kehendak untuk saling membagi adalah salah satu pilar utama dari konsep pemilikan komunal atas kawasan *petuanan* darat dan laut di Maluku. Ada banyak contoh bagaimana orang-orang pulau ini secara gampang saja menghibahkan bagian tertentu dari tanah atau hasil alam mereka kepada orang luar, seringkali untuk alasan-alasan yang lebih bersifat rohaniah katimbang imbalan ragawi. Peraturan *sasi*, misalnya, meskipun merupakan suatu larangan yang sangat ketat, tetap saja masih memiliki perkecualian untuk melayani orang luar, terutama para musafir yang sedang kelaparan atau kehabisan bahan pangan, untuk boleh mengambil sesuatu dalam kawasan yang sedang di-*sasi*, dengan syarat untuk dimakan pada saat dan di tempat itu saja, tidak dibawa pulang untuk diperjual-belikan. Peristiwa *buka sasi* (upacara adat resmi pernyataan masa *sasi* berakhir dan pesta rakyat untuk memanen hasilnya) di seluruh Maluku selalu membolehkan, tanpa syarat dan biaya apa pun, orang luar untuk ikut memanen hasil dan membawanya pulang ke rumah masing-masing.

Pada abad-XVII, beberapa kelompok masyarakat adat di Pulau Kei Besar menghibahkan sebagian dari tanah mereka kepada para pengungsi dari Kepulauan Banda yang melarikan diri dari pembantaian massal oleh penguasa kolonial Belanda saat itu. Orang-orang Banda itu, kemudian membangun dan membentuk desa-desa khas mereka sendiri sebagai suatu *petuanan* baru yang kini berwujud sebagai desa-desa Banda Eli dan Banda Efruan di pesisir timur utara dan Banda Elat di pesisir barat-tengah. Desa-desa pendatang ini hidup berdampingan secara damai dengan ‘tuan rumah’ mereka sampai sekarang. Syarat yang harus mereka penuhi adalah kesediaan untuk menerima, menghormati dan mematuhi hukum adat asal setempat, meskipun mereka tetap memiliki kebebasan untuk juga terus memberlakukan hukum adat asal mereka hanya untuk kalangan mereka sendiri. Kenyataannya, mereka kini ‘diangkat’ penuh sebagai ‘anak-anak adat’ setempat dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan tuan rumah mereka. Di Desa Haruku di Kepulauan Lease, sebagai contoh lain, para pendatang kemudian disepakati untuk berhimpun dalam satu *soa* sendiri (*Soa Rumalesi*), diberi tempat permukiman sendiri di tepian desa dengan nama Kampung Sameth, kemudian diangkat sebagai warga adat penuh seperti marga-marga asal setempat, dengan hak-hak dan kewajiban yang sama, termasuk perwakilan tetap dalam Dewan Adat. Dalam berbagai kasus perselisihan antar warga, malah mereka inilah yang sering dijadikan





sebagai penengah dalam Dewan Adat karena dianggap nisbi tidak berpihak pada empat marga asal setempat lainnya.

Dari proses-proses sejarah dan sosial semacam itu, masyarakat adat di Maluku kemudian mengembangkan satu pola lain hubungan kekerabatan yang unik dalam bentuk pakta persaudaraan yang disebut *pela*, suatu pakta suci dalam pengertian sebagai ‘saudara yang sesungguhnya,’ antara lain, larangan keras melakukan hubungan pernikahan satu sama lain sebagai suatu dosa besar (*incest*). Akibatnya, penduduk dari satu atau beberapa desa tertentu menjadi saudara dari penduduk satu atau beberapa desa lainnya. Sebagai saudara, kedua pihak memiliki hak yang sama untuk memperoleh hasil dan manfaat dari *petuanan* yang lain dan, juga, kewajiban yang sama untuk mempertahankannya. Apa yang menarik adalah bahwa, dalam banyak kasus, *pela* biasanya adalah akibat dari suatu perjanjian pasca-perang antar dua atau beberapa desa. Artinya, selama berabad, orang-orang Maluku sebenarnya sudah melembagakan suatu bentuk yang memadai dari apa yang kini dikenal, dan masih terlalu sering gagal diwujudkan, sebagai alternatif penyelesaian sengketa kawasan (*alternative territorial disputes resolution*). Fakta ini juga sekaligus dapat menjelaskan mengapa banyak para pendatang dari luar sampai sekarang dapat hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat adat asal setempat. Di banyak tempat di kepulauan ini, sangat mudah menemukan banyak keturunan pendatang Bugis dan Buton dari Sulawesi, bahkan keturunan para pedagang Cina dan Arab, sekarang hidup sebagai bagian sebatik dari masyarakat adat setempat tanpa membentuk suatu lingkungan pemukiman yang sangat menyolok terpisah (*enclave*) dari desa-desa asal. Hal ini pula yang mungkin dapat menjelaskan mengapa orang-orang Maluku umumnya tidak menganggap perbedaan suku dan agama mereka sebagai sesuatu yang penting. *Pela* di antara para keturunan pendatang dengan penduduk asal setempat, atau antara desa-desa yang mayoritas Kristen dengan yang mayoritas Islam, adalah gejala umum di seluruh Maluku. Sampai sekarang, hanya inilah provinsi di Indonesia yang nyaris belum pernah mengalami kerusuhan SARA (suku, agama, ras, aliran) dalam skala besar-besaran seperti yang hampir terjadi setiap tahun di banyak propinsi lainnya.⁵ Sampai pada tingkat tertentu, salah satu kegagalan dari Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950-an adalah ketidakpekaan para pemimpinnya—segelintir cendekiawan elite Kristen dan sekelompok mantan serdadu kolonial Belanda— yang menghasut rakyat setempat dengan isu anti-Jawa dan anti-Islam. Mereka lupa bahwa tema itu justru sangat bertentangan dengan semangat asli dan murni dari tradisi *pela* serta melarikan diri dari kenyataan bahwa, di salah satu provinsi yang memang menjadi basis terkuat masyarakat Kristen ini, ternyata lebih dari

⁵ Dalam kamus politik Indonesia selama rezim Orde Baru 30 tahun terakhir, ini adalah isu sangat peka yang sangat rawan direkayasa dan diprovokasi oleh pihak penguasa dan militer untuk memancing alasan diambilnya tindakan-tindakan yang mengekang kebebasan dan aspirasi rakyat. Sebagai contoh, hanya beberapa bulan berselang (Januari-Maret 1997), paling sedikit tercatat tiga kasus kerusuhan besar, bahkan berdarah, antar etnis dan agama di Kalimantan Barat (antara orang Dayak lawan Madura) dan di Tasikmalaya, Jawa Barat, serta daerah tapal kuda Jawa Timur (yang memanfaatkan sentimen pertentangan Islam-Kristen).



separuh penduduknya (54% menurut sensus 1991) justru beragama Islam.⁶ Akhirnya, RMS memang menjadi satu gagasan yang tidak populer sampai saat ini, bahkan di jantung daerah pergolakan awalnya: Kepulauan Lease, Maluku Tengah!

Singkatnya, pola-pola tradisional pencaplokan kawasan di Maluku pada dasarnya memiliki suatu ‘kemampuan penyesuaian’ (*adaptive capacity*) yang cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan pertentangan yang menyusul sesudahnya. Tradisi ini lantas berubah mencolok ketika Maluku kemudian menjadi bagian dari suatu rezim ekonomi internasional, terutama karena kedudukannya sebagai penghasil utama pala (*Myristica fragrans*) dan cengkeh (*Eugenia aromatica*), yang secara sistematis dimulai oleh kolonialisme Eropa. Para penjajah Portugis dan Spanyol memulai penaklukan mereka di Maluku Utara dan Kepulauan Banda pada abad-XVI. Orang-orang Inggris dan Belanda yang datang menyusul kemudian dan, setelah saling berperang seru satu sama lain sekian lama, berhasil mendepak keluar para *conquistadores* (penakluk) dari Semenanjung Iberia itu. Akhirnya, pada paruh kedua abad-XVII, Belanda keluar sebagai pemenang akhir dan kemudian menjadi penguasa mutlak kepulauan rempah-rempah ini.

Maka, sejak saat itulah pola-pola tradisional pencaplokan kawasan –yang selalu menisakan sebagian kawasan yang ditaklukkan kepada para pemilik asal setempat serta membagi hasilnya sebagai milik bersama—berubah penuh. Di bawah penjajah Belanda, pencaplokan kawasan selalu juga berarti suatu penafian menyeluruh (*total annihilation*) kepemilikan penduduk asal setempat atas kawasan *petuanan* darat dan laut tradisional mereka. Jika mereka menolak atau memprotes, maka suatu mesin kekuasaan yang sangat digdaya –sistem hukum dan birokrasi kolonial—akan dipaksakan terhadap mereka yang, dalam banyak kasus, juga menggunakan kekuatan militer. Satu contoh ekstrim adalah Ekspedisi Hongi pada awal abad-XVIII: ratus ribuan pohon cengkeh milik penduduk setempat di luar Pulau Ambon –sebagai pusat bandar dari Perusahaan Dagang Hindia Timur (VOC)—dibakar habis oleh serdadu Belanda dalam rangka mempertahankan monopoli mereka atas perdagangan rempah-rempah dunia. Contoh ekstrim lainnya, sekitar 15.000 jiwa rakyat sipil Kepulauan Banda dibantai oleh tentara kolonial pada tahun 1621 karena mereka menolak berpindah dari kampung halaman mereka yang, menurut rencana VOC, akan dirubah menjadi perkebunan besar pala.

Kolonialisme sudah berakhir pada pertengahan abad-XX, tetapi nafsu pencaplokan kawasan yang serakah itu tetap berlangsung hingga kini. Pada tahun 1968, pemerintah nasional Indonesia menandatangani Perjanjian Laut Banda dengan Federasi Nasional

⁶ Mereka yang masih sering terjebak dalam stereotip sektarianisme keagamaan juga sering heran jika dikemukakan fakta bahwa Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang sangat Islam itu, ternyata, lebih dari 60% rakyatnya, terutama di jazirah Tobelo di Halmahera Utara, adalah pemeluk Kristen yang taat. Sultan Nashirullah al-Manshur bahkan memiliki nama baptis: Ben Acorala, sementara Sultan Hairun, ayah penguasa dan penakluk terbesar Ternate, Sultan Ba’abullah, pernah mendapat pendidikan khusus Jesuit di Goa, India, dan menjadi sahabat karib Santo Franxiscus Xaverius, penyebar pertama agama Katolik di Maluku. Untuk uraian lebih rinci, lihat Topatimasang, et.al. (eds) “Potret Orang-orang Kalah: Kumpulan Kasus Penyingkiran Orang-orang Asli Kepulauan Maluku”, dokumen tidak diterbitkan, Sejati, Jakarta, 1994.



Koperasi Perikanan Jepang yang, pada 1970-an, membawa ratusan armada tangkap ikan tuna menjarah kawasan *petuanan* laut tradisional penduduk setempat tanpa sepengetahuan mereka sama sekali. Pada 1975, perusahaan negara PT Aneka Tambang menggusur ratusan keluarga penduduk asli Pulau Gebe untuk memulai pertambangan nikel di pulau kecil itu. Tahun 1982, sesudah pelarangan penggunaan pukat harimau (*seabed trawl*) di perairan Jawa dan Sumatera oleh Keputusan Presiden RI No.39/1980, justru satu keputusan baru sesudahnya —Keputusan Presiden No.85/1982— secara sangat aneh malah mengizinkan beberapa perusahaan swasta besar —antara lain, PT Daya Guna Samudera (DGS) milik konglomerat Jayanti Group— menggunakan alat tangkap sejenis (dihaluskan namanya menjadi ‘pukat udang’) untuk beroperasi sampai pada kedalaman 10 meter di perairan sampai pada koordinat 130°BT. Memperhatikan penampang geologis pulau-pulau kecil di Maluku —sebagian besar adalah pulau-pulau karang (*atoll*) atau yang terbentuk dari evolusi pergerakan naik terumbu karang (*uplifted coral reefs*) atau bahkan gunung berapi dari dasar laut, dengan tebing-tebing pantai yang curam— kedalaman 10 meter itu jelas-jelas sudah berada dalam kawasan tangkap (*fishing ground*) tradisional penduduk setempat. Di banyak pulau, kedalaman 10 meter itu bahkan berarti persis di depan rumah penduduk yang di tepi pantai.

Selanjutnya, pada 1986, satu perusahaan patungan Indonesia-Belanda-Australia, PT Prima Lirang Mining, menduduki kawasan tradisional masyarakat adat Pulau Wetar. Tahun 1988, PT Alam Nusa Segar (ANS), perusahaan pembalakan hutan milik konglomerat terbesar Indonesia, Salim Group, mulai beroperasi dalam kawasan hutan ulayat masyarakat adat dari 18 desa di Pulau Yamdena, Tanimbar. Tahun 1990, perusahaan minyak asing, Texas Union, mencaplok tanah-tanah adat penduduk di bagian utara Pulau Kei Besar. Tahun 1996, suatu eksplorasi tambang tembaga dan emas oleh perusahaan negara, PT Aneka Tambang, dan perusahaan patungan Indonesia-Kanada, PT Ingold, menjarah kawasan ulayat masyarakat adat Pulau Haruku, Saparua, dan Nusa Laut.

Semua itu hanyalah beberapa contoh yang sudah sangat dikenal, belum lagi termasuk banyak kasus pembalakan hutan, pertambangan, dan penangkapan ikan besar-besaran lainnya di pulau-pulau Halmahera, Obi, Sula, Buru, Seram, Aru, dan pulau-pulau terpencil di Tenggara Jauh. Meskipun memiliki berbagai nama dan beroperasi di tempat yang berbeda-beda, para *la nueva conquistadores* (penakluk baru) ini memberlakukan cara kerja yang sama saja: tanpa pemberitahuan dan minta izin terlebih dahulu, apalagi kesepakatan, dengan masyarakat adat setempat! Jika penduduk asal itu protes, tanggapan balik dari pemerintah dan para perusahaan swasta tadi adalah balas mengancam dan menakut-nakuti mereka, jika perlu atau tidak jarang malah mengulang praktik kolonial Belanda: gunakan tentara! Bentrokan fisik pun tak terhindarkan, seringkali justru berdarah seperti dalam kasus Yamdena: 14 luka parah dan 42 orang, termasuk 4 orang tetua adat, ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses peradilan. Sampai sekarang pun, terutama di Kepulauan Aru, sudah menjadi pemandangan yang jamak menyaksikan aparat militer atau polisi menjaga tapak proyek perusahaan atau sekadar mengawal para pemilik atau pejabat perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di sana, persis seperti sekelompok kecil serdadu bayaran. Hanya beberapa bulan berselang, Agustus 1996, ketika penduduk Pulau Tanimbar Kei menolak operasi satu perusahaan pembiusan ikan (*cyanide fishing*,



untuk menangkap hidup-hidup ikan kerapu dan *maming* [*Napoleon wrasse*, *Cheilinus undulatus*]) dalam kawasan petuanan laut mereka, seorang petugas militer menjemput beberapa orang dari pulau kecil itu, membawanya ke Desa Debut di daratan besar Pulau Kei Kecil dan kemudian menyiksa mereka di sana. Baru-baru saja, April 1997, seorang pejabat pemerintah (camat), dikawal oleh petugas militer dan polisi setempat, datang ke Desa Haruku pada satu hari Minggu pagi ketika penduduk sedang melaksanakan ibadah di gereja dan, tepat sebelum doa dan lagu terakhir dikumandangkan oleh seluruh jemaat, sang pejabat langsung melakukan interupsi kepada pendeta, naik ke mimbar, mengambil alih mikrofon dan mulai berpidato panjang lebar menuduh orang-orang Haruku sebagai ‘orang-orang kampung tolol’, ‘antipemerintah’, ‘antipembangunan’, serta memfitnah para penganut Kristen yang saleh dan ughahari itu sebagai ‘komunis’, persis di dalam gereja.⁷

Walhasil, masalah pencaplokan kawasan di Maluku, dan di Indonesia pada umumnya, adalah suatu masalah pertentangan kepentingan antara rakyat *vis a vis* (berhadapan muka langsung dengan) negara. Rekaman sejarah jelas-jelas memperlihatkan bahwa, sejak zaman penjajahan sampai sekarang, pencaplokan kawasan tradisional masyarakat adat setempat adalah satu bagian saja dari perluasan (ekspansi) kekuasaan ekonomi dan politik dalam rangka menguasai penuh sumberdaya alam setempat. Penggerak utamanya tetap adalah kepentingan modal besar. Sekali sumberdaya alam setempat itu sudah dikuasai, maka perlu untuk menjaga agar penguasaan itu tetap langgeng, jika perlu dengan segala cara dan bentuk piranti penekanan dan penindasan, antara lain, menggunakan sistem hukum formal. Di masa lalu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan satu kaidah hukum yang disebut *beschickingrecht*, bukannya kaidah *domeinsrecht* yang justru lebih lazim dan berlaku semesta, yang berarti bahwa semua kawasan darat dan perairan dalam wilayah kekuasaan kolonial mereka adalah dengan sendirinya menjadi milik negara kolonial Belanda. Rakyat tempatan, karena itu, hanya memiliki hak untuk menggunakan, bukan memilikinya. Jika negara kemudian membutuhkan kawasan itu untuk apa yang mereka sebut sebagai ‘kepentingan atau kemaslahatan umum’, maka pemerintah akan membayar ganti rugi hanya untuk hasil-hasil bumi yang dipanen penduduk dari lahan tersebut —dalam banyak kasus, malah tanpa ganti rugi sama sekali— bukan ganti rugi atau pembayaran harga atas tanahnya itu sendiri. Kawasan tanah-tanah komunal, karena itu, pada dasarnya dianggap mutlak sebagai milik penuh negara.⁸

⁷ Ini adalah salah satu kasus yang sempat didokumentasikan urutan kejadian (kronologi) nya secara lengkap oleh penduduk dan pembantu pendeta setempat; selengkapnya dapat dibaca dalam “Kronologi Kasus Haruku”, dokumen yang tidak diterbitkan, Ambon, 1997. Beberapa bulan kemudian, seorang warga desa, Sem Latupapua, ditangkap, dipenjarakan, dan diadili di Pengadilan Negeri Ambon dengan tuduhan merusak dan mencuri barang-barang milik PT Aneka Tambang di lokasi galian. Kenyataannya, Latupapua justru membersihkan lumpur dan barang-barang bekas pekerjaan galian yang berserakan dan mengotori lahan kebunnya —di mana salah satu lubang galian PT Aneka Tambang berada— tanpa memberitahu dan meminta izin sebelumnya kepadanya sebagai pemilik lahan.

⁸ Terhadap tanah-tanah milik pribadi atau perseorangan —diakui resmi melalui pendaftaran, penerbitan sertifikat hak milik dan pembayaran pajak tanah tahunan— pemerintah menyatakan bersedia membayar ganti rugi yang, dalam banyak kasus, tetap menimbulkan sengketa baru akibat



Kaidah hukum kolonial ini, ironisnya, kemudian dicangkok ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 jelas-jelas berbunyi demikian:

Tanah, air dan udara dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ada perdebatan semantik panjang terhadap tafsir kata-kata ‘dikuasai’ dalam naskah konstitusi tersebut. Beberapa pihak mengatakan itu tidak berarti bahwa negara memiliki, tetapi hanya ‘memiliki mandat’ untuk menggunakan semua sumberdaya alam dalam wilayah kekuasaan negara nasional untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tetapi, debat yang nyaris tak berujung ini menjadi sama sekali tak bermakna apa-apa karena kenyataan bahwa, apa pun yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat, tetap saja pemerintah yang memiliki kekuasaan pamungkas mutlak untuk menafsirkan semua dokumen hukum resmi sesuai dengan kepentingan pemerintah sendiri. Dalam kenyataannya, bukan naskah konstitusi, tetapi hampir semua perangkat perundang-undangan dan peraturan yang berada di bawahnya —seperti peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang, keputusan atau instruksi presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan seterusnya— yang justru sangat menentukan dalam seluruh tatanan kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan sosial di negara otoriter bernama Indonesia ini, paling tidak, selama 30 tahun rezim militer Orde Baru. Contoh, pengakuan keberadaan tanah-tanah ulayat masyarakat adat yang disebut-sebut dalam naskah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960, lama-kelamaan hanyalah ‘isapan jempol politik’, karena banyak peraturan pemerintah yang terlaksana justru tidak mencoba menguraikan, bahkan cenderung menyembunyikan dan menafikan, keberadaan tanah-tanah ulayat masyarakat adat tersebut. Buktinya, semakin banyak tanah-tanah ulayat masyarakat adat di seluruh Indonesia yang, secara kasar maupun halus, telah diubah menjadi kawasan luas konsesi pembalakan hutan, perkebunan besar, pertambangan, dan sebagainya. Kasus terkenal Freeport —pencaplokan tanah adat masyarakat suku Amungme dan Komoro yang diubah menjadi salah satu kawasan pertambangan tembaga dan emas terbesar di dunia oleh perusahaan patungan Indonesia-Amerika, PT Freeport MacMoran Indonesia— hanyalah satu contoh terburuk dari banyak kasus serupa.

terlalu rendahnya nilai ganti rugi yang dibayarkan. Pada 1983, misalnya, pemerintah hanya membayar Rp 50/meter persegi —hanya cukup untuk beli satu batang rokok saat itu— kepada penduduk tempatan di lokasi proyek bendungan raksasa Kedung Ombo di Jawa Tengah yang dibiayai pembangunannya oleh Bank Dunia. Banyak kasus hangat yang serupa, sebelum dan sesudah kasus Kedung Ombo, akhirnya memaksa pemerintah menaikkan nilai ganti rugi tanah. Tetapi, kaidah *beschickingrecht* tetap diberlakukan yang menjadikan pemerintah tetap sebagai satu-satunya penguasa mutlak yang berhak memutuskan perubahan status kepemilikan dan penggunaan tanah, kapan dan di mana saja mereka perlukan. Sepuluh tahun sesudah kasus (skandal!) Kedung Ombo, pencaplokan tanah dan pengusuran penduduk tempatan secara paksa masih berlangsung di banyak tempat lain di seluruh Indonesia, termasuk kasus dimana campur tangan militer berperan menumpahkan darah rakyat setempat seperti pada kasus Nipah di Madura, 1993.

Piranti hukum hanyalah langkah awal untuk memberikan basis keabsahan *de jure*, sehingga rakyat tidak lagi punya alasan tandingan secara legal formal untuk mempertahankan hak-hak mereka. Inilah sebab mengapa, sepanjang sejarah sengketa kawasan di Indonesia, rakyat selalu tidak pernah memenangkan kasus mereka di ruang pengadilan resmi. Rakyat, kemudian, melakukan tindakan-tindakan ekstra hukum di luar ruang pengadilan yang umumnya berbentuk unjuk rasa protes. Sayangnya, dan memang selalu demikian, pemerintah pun sudah menyiapkan tindakan balasan setimpal dengan membuat semakin banyak peraturan hukum yang tegas-tegas mencegah, menghalangi, dan menindas semua bentuk gerakan protes massa tersebut. Pemerintah kolonial Belanda telah membuat banyak sekali perangkat peraturan untuk menjebak berbagai bentuk gerakan protes massa menentang kebijakan resmi pemerintah —sebagai suatu tindakan yang dicap menghina kedaulatan negara— dengan ancaman hukuman pidana seberat-beratnya, antara lain, pembuangan atau pengasingan (*exorbitante rechten*), penghinaan (*hatzaai artikelen*), atau bahkan dikelompokkan sebagai status darurat perang (*staat van oorlog en beleg*, SOB). Semua piranti hukum buatan zaman penjajahan ini pun masih terus digunakan oleh pemerintah nasional Indonesia sampai sekarang. Bahkan, dalam banyak kasus, lebih buruk lagi, karena diterapkan dengan berbagai bentuk rekayasa yang serba halus dan terselubung yang justru menghancurkan semua saluran demokrasi politik rakyat sampai ke akar-akarnya melalui kebijakan yang kemudian dikenal dengan nama ‘politik massa mengambang’ atau, tegasnya, depolitisasi rakyat secara tuntas! Salah satu yang paling menonjol adalah pemberlakuan Paket Lima Undang-Undang Politik yang membuat semua partai politik, organisasi massa, serta lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kehakiman mutlak berada di bawah kendali langsung dan ketat birokrasi pemerintahan dan kekuatan militer yang sangat monolitik.

Berkaitan dengan hak-hak kawasan masyarakat adat, lima undang-undang pranata politik itu kemudian didukung oleh satu undang-undang khusus No.5/1969 mengenai Pemerintahan Desa yang secara langsung mematikan semua fungsi tradisional otonom lembaga-lembaga masyarakat adat. Semua pranata sosial-politik tingkat desa dilebur paksa ke dalam satu wadah tunggal bernama Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang dipimpin langsung oleh kepala desa atau lurah yang juga berada langsung di bawah pengawasan dan perintah camat dan bupati. Meskipun seorang kepala desa/lurah dipilih langsung oleh rakyat desa setempat untuk masa kerja delapan tahun, tetapi semua calon yang akan ikut pemilihan harus dipilih dan disetujui terlebih dahulu oleh camat dan/atau bupati. Kepala desa/lurah yang terpilih nanti itupun harus bertanggung jawab kepada camat/bupati sebagai atasan langsungnya, bukan kepada rakyat yang memilihnya. Mengacu pada undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya, kepala desa/lurah dengan sendirinya menjadi Ketua LMD dengan hak prerogatif memilih dan mengangkat langsung semua pembantu dan anggota LMD. Maka, menjadilah dia sebagai ‘penguasa tunggal’ (*single potentate*) di desa tersebut. Jika sang kepala desa/lurah adalah juga tokoh atau kepala adat setempat, maka terpilihnya sebagai pemimpin politik gaya baru itu adalah hasil dari suatu proses kooptasi atau rekayasa (rekrutmen dan induksi) politik yang memaksanya kemudian wajib lebih patuh kepada atasan birokrasinya (camat/bupati) katimbang kepada warganya sendiri. Seperti yang terbukti dalam banyak





kasus, hanya dengan integritas pribadi yang kuat —dan jika ada dukungan luar yang memadai— yang bisa menjadikan seorang tokoh atau kepala adat yang telah berubah menjadi kepala desa/lurah mampu mewakili suara murni warganya dan membela hak-hak tradisional mereka, jika berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi pemerintah serta pengusaha swasta yang mencaplok kawasan *petuanan* mereka.

Melengkapi semua tatanan rekayasa politik tingkat desa ini, maka seorang petugas militer, biasanya berpangkat sersan, ditunjuk dan diangkat sebagai Bintara Pembina Desa (BABINSA), suatu jabatan kunci dalam doktrin ‘operasi kawasan (territorial)’ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang memang selalu minta diakui sebagai ‘tentara rakyat’, untuk langsung mengawasi semua keputusan dan tindakan politik kepala desa/lurah. Dalam praktiknya, petugas militer ini adalah justru penguasa nyata desa-desa yang berada dalam wewenang pengawasannya dan, dalam banyak kasus pencaplokan kawasan tradisional masyarakat adat setempat, seperti yang dicontohkan dalam kasus Tanimbar Kei dan Haruku tadi, sekaligus adalah pelaku utama penindasan dan pengancaman, bahkan juga tindak kekerasan penyiksaan ragawi, terhadap penduduk yang membangkang dan memprotes. Dalam kasus Maluku, semua pranata mesin politik campur militer yang ketat tersebut benar-benar ampuh mematikan semua fungsi tradisional dari lembaga-lembaga asli masyarakat adat setempat. Satu kelompok kecil tetua adat dari Maluku Tengah dan Tenggara, dalam suatu pertemuan di Ambon, September 1996, bersaksi bahwa:

...Undang-undang No.5/1969 benar-benar seperti palu mematikan terhadap kami, menghapuskan lembaga-lembaga tradisional adat kami, sehingga warga adat kami tidak punya lagi suatu organisasi yang merdeka untuk bersuara bebas mempertahankan hak-hak adat kami, atau bahkan sekadar untuk mengelola kegiatan dan hidup sehari-hari sesuai dengan hukum adat kami sendiri. Pemerintah bilang akan menghormati tradisi kami. Itu hanya omong kosong, janji-janji palsu!⁹

Strategi: Mengorganisir Kembali Masyarakat Adat

“Kalau seseorang menangkap seekor ikan hiu dan ingin melumpuhkannya, dia tidak terlalu perlu mewaspadaai giginya yang tajam menakutkan, tetapi cukup dengan mencekam kuat dan mematahkan sirip perut persis di bagian bawah lambungnya!” kata seorang pemburu tradisional ikan hiu (untuk mengambil dan menjual siripnya yang berharga cukup mahal) di Pulau Tarwa, Maluku Tenggara.

Dan, itulah yang setepatnya dilakukan oleh pemerintah, sejak zaman penjajahan sampai sekarang, untuk mengawasi dan mematahkan semua upaya masyarakat adat setempat menentang kebijakan pemerintah, termasuk upaya menentang pencaplokan

⁹ Dikutip dari catatan tanggapan tiga tetua adat: J.P. Rahail (Ketua Adat Wilayah Maur Ohoiwut, Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara); Berth Ririmasse (mantan Kepala Adat Desa Haruku, Kepulauan Lease, Maluku Tengah); dan Lodewijk Remiassa (Kepala Adat Desa Wotai, Waipea, Pulau Seram, Maluku Tengah); dalam naskah laporan lokakarya “Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat”, dokumen yang tidak diterbitkan, Ambon, 4-6 September 1996.



kawasan tradisional mereka oleh negara. Pemerintah memang tahu persis bahwa semua bentuk gerakan massa hanya dapat dilakukan oleh rakyat yang juga terorganisir dengan baik. Tatahan kehidupan kolektif atau komunal masyarakat adat tradisional, terutama jika lembaga-lembaga adat tradisional mereka yang otonom masih berfungsi dengan baik, menyediakan hampir semua prasyarat yang diperlukan sebagai basis dari berbagai bentuk gerakan massa yang terorganisir dengan baik, seringkali justru dengan kekuatan bertahan yang mengagumkan. Maka, untuk melumpuhkan mereka, cukup dengan melumpuhkan titik kekuatan mereka yang juga sekaligus titik kelemahan utamanya: lumpuhkan, kacaukan atau hapuskan sama sekali semua lembaga-lembaga tradisional mereka yang otonom! Dengan kata lain: disorganisasikan mereka!

Sampai pada kesimpulan ini, satu kelompok kecil pengorganisir masyarakat (*community organisers*) di Maluku kemudian memutuskan untuk mulai mengorganisir kembali masyarakat adat setempat yang sudah terlanjur mengalami disorganisasi tersebut. Mereka memulai pekerjaannya, pada 1988, di Desa Evu, satu desa kecil di pantai barat-tengah Pulau Kei Kecil. Mereka mulai menyelenggarakan serangkaian pertemuan berkala tetap mingguan dengan penduduk desa, mulai dengan membicarakan masalah-masalah nyata sehari-hari yang menjadi tema-tema kunci (*generative themes*) yang dimunculkan ke permukaan oleh penduduk desa itu sendiri sampai, pada suatu hari, beberapa tokoh masyarakat memunculkan satu masalah pertentangan antara penduduk dengan pemerintah setempat. Masalahnya adalah sengketa atas sebidang tanah yang mereka pernah hibahkan kepada pemerintah untuk membangun prasarana pengolahan dan penyaluran air bersih sepanjang 23 kilometer dari sumber mata air alam di hulu desa itu ke ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, Tual. Pemerintah melanggar persepakatan semula dengan membangun gedung instalasi sampai ke luar garis batas yang telah disepakati. Lalu, penduduk pun memutuskan untuk memblokir seluruh kawasan sumber mata-air dan melarang semua pegawai pemerintah (Perusahaan Air Minum, PAM) memasuki kawasan tersebut. Mereka kemudian mengajukan tuntutan tambahan: pemerintah harus menandatangani suatu pernyataan resmi tertulis tentang garis batas tanah yang dihibahkan, membuat sarana penampungan dan pembuangan limbah minyak pelumas mesin pompa yang mengotori aliran sungai kecil yang menjadi tempat mandi dan mencuci penduduk, serta memperbolehkan penduduk menyambung pipa khusus secara gratis ke beberapa tempat dalam kampung langsung dari pipa distribusi gardu induk PAM. Setelah perundingan yang sangat alot selama beberapa minggu, akhirnya, pemerintah menyerah dan menyatakan bersedia memenuhi persyaratan dan tuntutan yang diajukan penduduk.

'Kemenangan kecil' itu membuat penduduk dan pengorganisir mereka menjadi lebih yakin pada apa yang disebut sebagai 'kekuatan dari tindakan yang terorganisir'. Maka, pertemuan-pertemuan berkala tetap mingguan pun terus dilanjutkan secara lebih teratur sampai menghasilkan cukup banyak gagasan dan kegiatan lainnya. Pada 1990, para tetua setempat bersepakat untuk melembagakan semua kegiatan tersebut dalam satu bentuk organisasi yayasan bernama 'Nen Masil' —diambil dari nama perempuan pertama, menurut hikayat setempat, yang menemukan sumber mata air alam di desa tersebut. Mereka menghibahkan sebidang tanah di tepi jalan masuk desa untuk membangun



prasarana kantor, balai pertemuan, bengkel kecil, demplot, dan juga pondok-pondok penginapan. Beberapa tahun kemudian, tempat ini dengan semua prasarannya telah menjelma menjadi pusat utama informasi dan pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat adat dari pulau-pulau Kei Kecil, Kei Besar, Aru, dan Tanimbar. Suatu organisasi rakyat yang sesungguhnya —memang benar-benar didirikan, dikelola dan dikendalikan sendiri sepenuhnya oleh para penduduk setempat— telah lahir!

Pada tahun yang sama, satu perusahaan konsesi pembalakan hutan mulai beroperasi di Pulau Yamdena, pulau utama Kepulauan Tanimbar. Dua orang pengorganisir pun berangkat ke sana dan menghabiskan waktu selama setahun mengorganisir masyarakat adat setempat menentang konsesi tersebut. Ini benar-benar menjadi 'bukan perang main-mainan' bagi mereka, karena berhadapan langsung dengan konglomerat nomor wahid Indonesia, Liem Sioe Liong, yang melibatkan kawasan hutan primer seluas 64.000 hektare. Menggunakan strategi dan cara-cara yang sama di Kei Kecil sebelumnya, proses pengorganisasian di Yamdena pun berhasil mengerahkan masyarakat adat setempat dari 18 desa sekitar kawasan konsesi. Tiap desa lalu membentuk panitia kerja (komite aksi) mereka masing-masing yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Adat setempat yang, pada gilirannya, memberikan mandat kepada semua orang Yamdena perantauan di luar Kepulauan Tanimbar, terutama yang bermukim di beberapa kota besar di Jawa, untuk membentuk suatu jaringan kerja nasional dengan nama Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia (ICTI) yang berbasis di Jakarta. Dibantu oleh Jaringan Kerja Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI), mereka kemudian secara sistematis mengorganisir serangkaian aksi protes dan, bekerjasama dengan beberapa kelompok internasional seperti Gerakan Hutan-Basah Dunia (World Rainforest Movement, WRM) dan Turun ke Bumi (Down to Earth, DTE), mereka kemudian meluncurkan suatu kampanye dan lobi internasional menentang konsesi pembalakan hutan di Yamdena.

Sementara itu, di pedalaman Yamdena sendiri, para pengorganisir masyarakat adat setempat mulai memobilisasi penduduk untuk melakukan boikot dan blokade. Akhirnya, Menteri Kehutanan, pada 1993, mengumumkan keputusan dihentikannya pembalakan hutan oleh PT ANS. Menteri Kehutanan dan ICTI bersepakat diadakannya moratorium hutan Yamdena selama tiga tahun untuk menentukan rencana berikutnya yang lebih layak dan diterima oleh masyarakat adat setempat. Menteri Kehutanan juga sepakat untuk mempertimbangkan semua prasyarat yang diajukan masyarakat adat setempat melalui ICTI. Setelah itu, lewat masa moratorium, pada 1996, pemerintah memunculkan suatu rencana baru pengelolaan hutan Yamdena dalam bentuk hutan industri (bukan pembalakan) yang dikelola langsung oleh perusahaan hutan milik negara, INHUTANI, yang bekerjasama dengan satu perusahaan swasta, PT Mohtra Agung. Secara teknis, rencana baru ini sudah memenuhi beberapa prasyarat yang diajukan ICTI sebelumnya dan tampaknya juga mulai memerhatikan unsur-unsur pelestarian lingkungan hidup setempat. Sesuai dengan sifat alami hutan Yamdena yang pada dasarnya terbentuk dari struktur tanah karang berkapur, rencana baru ini memilih kayu jati (bukan jenis kayu eksotik seperti *eucalyptus* untuk bahan baku pabrik kertas yang selama ini menjadi kesukaan proyek-proyek besar hutan industri seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua) yang melibatkan penduduk setempat dalam



suatu skema wanatani rakyat (*social agroforestry*), termasuk pemberian bagian 2% dari saham (*equity share*) proyek kepada masyarakat adat setempat. Tetapi, lagi-lagi akibat tatanan politik pembangunan yang serba monolitik selama ini, rencana baru yang nisbi lebih baik itu akhirnya banyak diselewengkan tata cara pelaksanaannya, antara lain, menyangkut keabsahan perwakilan masyarakat adat setempat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembagian saham. Masih mengacu pada ketentuan-ketentuan baku yang kaku dari Undang-undang Pemerintahan Desa No.5/1969, pemerintah justru menunjuk beberapa anggota masyarakat adat setempat yang bekerja sebagai pegawai pemerintah atau di sektor kerah putih —bukannya para tetua Dewan Adat— sebagai perwakilan penduduk. ICTI pun mengajukan keberatan dan memperkarakannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Ambon. Hakim PTUN Ambon menolak gugatan tersebut yang mengakibatkan serangkaian perundingan dan lobi politik yang rumit dan panjang di luar ruang pengadilan masih berlangsung terus sampai saat makalah ini ditulis.

Namun, satu hal pasti, sengketa dan pertentangan baru ini pun memacetkan pelaksanaan rencana baru tadi. Sementara itu, lapis kedua pengorganisir masyarakat adat setempat (orang-orang desa sendiri) mulai terbentuk di Yamdena dan melanjutkan terus kerja-kerja pengorganisasian di tingkat basis sambil memberikan dukungan serta masukan informasi lapangan kepada pelaksana kegiatan advokasi (lobi dan kampanye) yang dikoordinasikan oleh ICTI di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang, antara lain, sempat berhasil mendesak Parlemen Eropa mengeluarkan pernyataan resmi, pada Maret 1997, yang mendukung tuntutan masyarakat adat Yamdena dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memerhatikan semua tuntutan tersebut. Sementara semua itu berlangsung, para organisir masyarakat di Yamdena bersepakat untuk mempertahankan keadaan *status quo* tersebut —pilihan terbaik di antara yang terburuk— paling tidak, sampai pemerintah benar-benar secara jujur dan taat asas memenuhi semua prasyarat yang sudah diajukan dan disepakati sebelumnya.

Perjuangan masyarakat adat Yamdena mempertahankan hak-hak mereka memang belum berakhir, tetapi sampai pada titik di mana konsesi pembalakan hutan dihentikan sendiri oleh pemerintah —kasus pertama di Indonesia di mana rakyat berhasil menang melawan satu perusahaan pembalakan hutan yang sangat digdaya— telah menjadi suatu catatan sejarah tersendiri. Sebagai suatu fakta, ini benar-benar merupakan suatu ‘kisah berhasil’ yang makin meyakinkan masyarakat adat setempat dan para pengorganisir mereka tentang anggapan-anggapan dasar dari kaidah asas, strategi, dan cara-cara pengorganisasian yang mereka jalankan. Pengalaman Yamdena itu memperkaya mereka dengan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana bekerja di bawah permukaan, menyelesaikan pertentangan dan dinamika internal dalam masyarakat, mengerahkan sumberdaya pendukung secara sistematis, berurusan dengan liku-liku permainan politik lokal dan, juga, mengkaitkan tindakan-tindakan setempat dengan suatu kampanye luas pada tingkat nasional dan internasional.

Kasus Yamdena itu juga menjadi suatu contoh bagus tentang bagaimana masyarakat adat setempat —orang-orang kampung yang serba ughari— menafikan (*demystifying*) banyak stereotip selama ini tentang ketidakmampuan masyarakat tradisional



membentuk, mengelola, dan mengembangkan suatu jaringan organisasi majemuk dengan kegiatan pada berbagai aras (*multi-level activities*), termasuk mengerahkan sumberdaya pembiayaan swadaya mereka sendiri melalui kerja-kerja kerelawanan dan pengumpulan dana kolektif, antara lain, untuk membiayai suatu penelitian akademis oleh satu tim pakar dan ilmuwan senior —dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Institut Pertanian Bogor— untuk menyusun suatu argumen ilmiah tandingan terhadap naskah resmi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibuat oleh pemerintah dan konsultan perusahaan yang menyatakan pembalakan hutan Yamdena adalah layak secara ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis. Setelah dipresentasikan dalam satu seminar terbuka di Jakarta, diorganisir oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hasil penelitian tandingan itu kemudian menjadi titik penentu yang memengaruhi pendapat umum, memaksa pemilik dan pimpinan PT ANS terpaksa menerima kenyataan harus berunding langsung dengan ICTI dan, akhirnya, mendesak Menteri Kehutanan untuk mencabut izin konsesi PT ANS dan menghentikan kegiatan pembalakan di Yamdena. Itu benar-benar suatu capaian yang sangat mengesankan yang bahkan belum pernah dicapai sekalipun oleh banyak ORNOP bernama besar yang masih, sebagian atau seluruhnya, tergantung pada sumber-sumber dana dari luar.

Kisah berhasil dari Yamdena ini mengilhami para pengorganisir masyarakat di tempat-tempat lain di Maluku untuk mengembangkan proses-proses yang sama. Mereka selalu menggunakan ‘Cerita dari Yamdena’ itu, ditambah dengan cerita kasus sebelumnya dari Kei Kecil, untuk memberikan semangat dan keberanian kepada kelompok-kelompok masyarakat adat lainnya di Maluku agar mengorganisir kembali diri mereka setelah sekian lama di-disorganisasikan oleh kekuatan-kekuatan luar. Maka, kerja-kerja pengorganisasian masyarakat adat yang serupa pun mulai berlangsung serentak di pulau-pulau Aru, Seram, Lease dan Kei Besar. Meskipun belum lagi mencapai suatu hasil yang mengesankan seperti di Yamdena, pengalaman-pengalaman baru yang dikumpulkan dari berbagai tempat yang berbeda itu —terutama dari Haruku dan Kei Besar— mulai pula menyediakan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana lembaga-lembaga adat tradisional mentransformasikan sistem pengetahuan dan praktik-praktik asli mereka ke dalam suatu kerangka kerja sistematis untuk pengorganisasian dan pemberdayaan diri mereka sendiri.

Di Haruku, lembaga *Kewang* (singkatan dari *Kapala Ewang* atau ‘Penguasa Hutan’), salah satu lembaga adat tradisional di bawah Dewan Adat Negeri yang terutama bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan hukum-hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan sekitar, telah mengembangkan berbagai cara kreatif yang secara arif menggabungkan praktik-praktik tradisional mereka dengan apa yang disebut sebagai ‘pendekatan ilmiah modern’. Mereka bekerjasama erat dengan beberapa ORNOP setempat, lembaga-lembaga penelitian dan pusat kajian universitas, untuk membantu mereka mengembangkan cara-cara yang lebih sistematis dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup, perlindungan terumbu karang, perintisan suatu kawasan lindung untuk burung langka maleo (*Eulopia wallacei*), percobaan berbagai teknik budidaya pertanian lestari, dan sebagainya. Semua kegiatan yang

dilakukan secara sukarela tersebut, dikoordinasikan di bawah satu yayasan bernama 'Learissa Kayeli' —diambil dari nama buaya legendaris yang, menurut hikayat setempat, membawa ikan-ikan *lompa* ke perairan Haruku— akhirnya tidak hanya melibatkan anggota Kewang saja (40 orang sebagai wakil tetap dari 5 himpunan marga/*soa* Desa Haruku), tetapi juga seluruh lapisan dan bagian penduduk desa. Selama lima tahun terakhir, komite-komite aksi telah dibentuk di kalangan perempuan, remaja, dan anak-anak yang, antara lain, menghasilkan suatu kelompok kerja bernama 'Kewang Kecil' (karena dikelola langsung oleh kaum remaja dan anak-anak) sebagai pelaku utama dari kegiatan pemulihan kembali ekosistem hutan bakau sepanjang aliran sungai dan muara Sungai Learissa Kayeli, sekaligus sebagai bagian dari pendidikan lingkungan bagi mereka sendiri sejak usia dini. *Baileo* (Balai) *Kewang* —pembangunannya dibantu oleh Jaringan ORNOP Jepang untuk Indonesia (JANNI)— yang terletak di tepian desa, sekarang berfungsi sebagai 'Balai Masyarakat' yang sesungguhnya dibanding dengan *Baileo Negeri* (Balai Desa) resmi di pusat kampung, terutama pada setiap Jumat petang saat *Kewang* menyelenggarakan pertemuan berkala tetap mingguan mereka untuk membahas berbagai masalah masyarakat dan merencanakan tindakan untuk mengatasinya. Perjuangan mutakhir masyarakat adat Haruku menentang perusahaan pertambangan emas dalam kawasan petuanan tradisional mereka, juga dimulai dan dikelola dari *Baileo Kewang* ini.

Tahun lalu, November 1996, *Baileo Kewang* mulai juga menyebarkan gagasan dan strategi gerakan mereka ke lembaga-lembaga adat di desa-desa dan pulau-pulau sekitar dengan mengundang lebih dari 20 Dewan Adat se Kepulauan Lease (Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut) untuk merumuskan suatu rancangan tindakan bersama dalam rangka menghidupkan kembali lembaga *Latupatti* (perserikatan atau federasi Dewan-Dewan Adat dari desa-desa dalam satu pulau) —peristiwa pertama selama 25 tahun setelah diberlakukannya UU No.5/1969 secara efektif pada 1971. Hanya waktulah nanti yang akan membuktikan apakah prakarsa ini akan dapat atau tidak tercatat sebagai tonggak sejarah bagi berfungsinya kembali persekutuan lembaga adat yang pernah dikooptasi dan dimanipulasikan (baca: di-disorganisasikan) oleh pemerintah tersebut.

Suatu proses pengorganisasian kembali yang mirip juga berlangsung di Kei Besar, di suatu wilayah adat bernama Maur Ohoiwut, persekutuan adat 10 desa induk dan 46 kampung dengan jumlah penduduk seluruhnya lebih dari 14.000 jiwa. Setelah serangkaian diskusi intensif sejak 1992 dengan Dewan-Dewan Adat setempat, akhirnya mereka semua sepakat meminta Ketua Adat Tertinggi (*Raja*) mereka, pada tahun 1994, untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa resmi —menurut UU No.5/1969— dari Watlaar, desa induk tempat kedudukan *Raja*, tetapi tetap menjalankan peran sebagai Ketua Adat (*Raja*) untuk semua desa dan kampung dalam wilayah Maur Ohoiwut. Dalam pengertian politik lokal maupun nasional, keputusan ini jelas merupakan 'pembangkangan' terhadap pemerintah. Inilah untuk pertama kalinya, paling tidak di Maluku, seorang Kepala Desa resmi secara terbuka menyatakan pengunduran dirinya dengan satu pernyataan keras: "...karena saya merasa, sebagai *Raja*, saya dapat secara penuh dan bebas melayani kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat adat saya sesuai dengan hukum adat kami, sesuatu yang terbukti tidak bisa saya





lakukan selama saya menjadi Kepala Desa resmi selama 25 tahun.”¹⁰ Mungkin karena mempertimbangkan integritas pribadi, kharisma ketokohan dan dukungan rakyatnya yang sangat kuat, hampir tidak ada reaksi apapun dari camat/bupati. Ini justru membuat masyarakat adat setempat, melalui Dewan-Dewan Adat mereka, melangkah lebih maju dengan menyusun suatu rencana strategis berjangka lima tahun secara lebih sistematis.

Sejak saat itu, pertemuan berkala tetap Dewan-Dewan Adat mulai memiliki agenda tetap dengan fokus pada tema-tema tertentu yang jelas. Bahkan, secara teknis, cara-cara pertemuan dan media yang digunakan semakin lama semakin partisipatif, tidak lagi berpusat hanya pada pemimpin pertemuan (*Raja*). Bahkan sang *Raja* sendiri mulai bertindak sebagai ‘fasilitator’ diskusi antarpeserta pertemuan, bukan lagi pembuat keputusan akhir. Rangkaian pertemuan semacam inilah yang kemudian membuat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Besar Adat (*Madiwun Matan Maur Ohoiwut* = MUMMO) —dihadiri oleh sekitar 200 delegasi yang mewakili seluruh desa, kampung, dan berbagai lapisan dan kalangan (tetua, perempuan, pemuda, remaja) dalam wilayah tersebut— juga mulai memiliki agenda dan tema-tema tertentu yang dipersiapkan dengan dukungan data dan informasi yang memadai. Perdebatan terbuka, kadangkala sangat tajam dan panas, kemudian menjadi pemandangan biasa dalam forum besar ini. Misalnya, satu agenda perdebatan panas sejak 1993, tentang pelibatan perempuan dalam proses musyawarah adat pada semua tingkatan, akhirnya memperoleh kata sepakat akhir pada sidang MUMMO 1995. Sidang sepakat membentuk satu delegasi tetap kaum perempuan dari semua desa yang secara khusus akan melakukan sidang terpisah beberapa hari sebelumnya untuk merumuskan masalah dan saran-saran mereka sendiri untuk disampaikan, diperdebatkan dan diputuskan dalam pleno MUMMO. Ini pun merupakan satu pencapaian sejarah tersendiri di suatu lingkungan masyarakat tradisional —mungkin yang pertama di lingkungan masyarakat adat di Indonesia— yang selama ini dikuasai oleh kaum lelaki.

Sementara itu, salah satu agenda tetap delegasi perempuan ini adalah kebutuhan peningkatan kemampuan mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam setempat dalam kawasan *petuanan* tradisional mereka, terutama pada daerah pantai air surut (*ruhan met soin* dan *met*, daerah khusus kaum perempuan dan anak-anak mengumpulkan kerang-kerangan sebagai sumber pendapatan tambahan) dan ladang tepi kampung (*ohoi murin* dan *rok*, daerah tradisional kaum perempuan mengumpulkan sayuran, buah-buahan dan tanaman obat-obatan). Salah satu usul mereka agar Dewan Adat memperhatikan pendapat mereka —sebagai pengguna utama— mengenai cara-cara pengelolaan lestari daerah pantai air surut, akhirnya disetujui oleh pleno MUMMO tahun 1996, tahun yang sama ketika pleno MUMMO juga mensyahkan suatu rancangan lengkap ‘Rencana Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Setempat’ yang mencoba menggabungkan sistem-sistem tradisional mereka dengan berbagai teknik ilmiah

¹⁰ Direkam dari pidato tanpa naskah oleh *Raja* Maur Ohoiwut, J.P. Rahail, pada hari pengunduran dirinya sebagai kepala desa resmi untuk Watlaar, di gereja Santo Antonius, Watlaar, Kei Besar, 14 Nopember 1994. Beberapa minggu kemudian, penduduk Watlaar sendiri akhirnya secara aklamasi memilih salah seorang putera *Raja* sebagai kepala desa resmi.

modern. Rencana ini sekaligus sebagai rancangan tandingan terhadap ‘Rencana Kawasan Suaka Alam Gunung Daab’ oleh pemerintah serta eksplorasi minyak bumi oleh Texas Union di wilayah tersebut.

Semua rangkaian proses pengorganisasian yang majemuk ini dikoordinasikan di bawah satu badan khusus berbentuk yayasan bernama ‘Maur Ohoiwut’ —menggunakan nama wilayah adat setempat— didirikan pada 1993, yang langsung bertanggung jawab kepada pleno MUMMO. Hanya karena masih kekurangan dana, informasi dan keahlian, menjadikan rancangan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Tetapi di luar masalah teknis ini, sekali lagi, satu lembaga adat tradisional membuktikan kemampuan mereka untuk menerima dan menyesuaikan pendekatan-pendekatan ‘manajemen modern’ menurut kebutuhan dan kemaslahatan mereka sendiri.

Beberapa contoh kasus di atas mengantar pada suatu kesimpulan bahwa kehadiran suatu organisasi kuat yang murni didirikan, dikelola, dan dikendalikan sendiri langsung oleh masyarakat adat setempat, yang dikembangkan sesuai dengan ritme dan tempo mereka dalam menyerap dan memahami sesuatu, adalah prasyarat bagi semua kegiatan dan tujuan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat adat setempat (*community based resources management*) serta upaya-upaya mempertahankan hak-hak tradisional mereka atas sumberdaya tersebut. Ketiadaan basis organisasi dan kelembagaan semacam itu akan membuat semua proses pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat adat setempat menjadi lebih sulit atau bahkan semu, sangat rentan untuk dikooptasi dan dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan luar yang lebih digdaya.

Pengalaman lainnya di Kepulauan Aru dan Seram menegaskan kesimpulan seperti ini. Kerja-kerja pengorganisasian masyarakat adat di Aru dilakukan di Pulau Wokam dan Kola, pusat industri budidaya kerang mutiara sejak beberapa abad lalu dan kini juga menjadi pusat operasi armada modern pukut harimau. Sebagian besar kawasan *petuanan* tradisional masyarakat adat setempat sudah disewakan, bahkan dijual, kepada perusahaan-perusahaan besar dari luar. Di Seram, berlangsung di kalangan masyarakat pendatang dari tiga pulau kecil gunung berapi di tengah Laut Banda (Teon, Nila, Serua) yang diungsikan secara paksa oleh pemerintah pada 1978 dengan alasan menghindari bencana gunung berapi di sana. Mereka hanya memperoleh hibah lahan sempit 2 hektare per kepala keluarga untuk rumah dan ladang pribadi, sama sekali tanpa kawasan lahan kolektif. Dengan kata lain, masyarakat adat di kedua tempat ini nyaris tidak memiliki lagi kawasan komunal *petuanan* negeri mereka sendiri yang membuat cara-cara hidup tradisional mereka juga mulai cerai-berai, dan lembaga-lembaga adat mereka pun mulai berangsur punah.¹¹ Setelah lima tahun, suatu basis baru kelembagaan organisasi masyarakat adat setempat baru dapat dibentuk pada 1996, tiga tahun tertinggal dibanding Tanimbar, Kei Besar, dan Haruku. Selama masa tersebut, hanya dapat digalang

¹¹ Bersama delapan kasus lainnya, uraian lengkap mengenai kasus kedua tempat ini juga dapat dibaca lebih rinci dalam suatu laporan pengamatan lapangan dari satu team pengorganisir masyarakat di Maluku, “Potret Orang-orang Kalah...”, *supra*, catatan kaki #8. Dokumen ini pada dasarnya merupakan dokumen pertama yang mendasari pengembangan konsep pengorganisasian masyarakat yang diuraikan secara garis-besar dalam makalah ini.





kurang dari 10 orang pengorganisir baru di Aru dan 6 orang di Seram, jauh lebih sedikit dibanding masing-masing 20 orang lebih di Tanimbar, Kei Besar, dan Haruku.

Pada 1994, semua pengorganisir setempat tersebut menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Tahunan pertama mereka di Ambon. Mereka sepakat untuk mendirikan satu kantor kecil di ibu kota Provinsi Maluku ini sebagai pusat koordinasi program dan jaringan kerja ke luar Maluku. Mereka menyebutnya 'Baileo Maluku' (atau secara singkat: 'Baileo' saja), secara harafiah berarti 'rumah suci', tetapi dalam hidup sehari-hari merupakan perwujudan suatu tempat berkumpul semua anggota masyarakat di mana mereka dapat bertemu satu sama lain membahas masalah-masalah yang mereka hadapi, merencanakan tindakan bersama, atau bahkan sekadar hanya untuk mengobrol saja. Tiap desa di Maluku memiliki *baileo* nya sendiri, biasanya dengan arsitektur yang unik dibanding bangunan lainnya sehingga menjadi marka-bumi (*landmark*) desa yang bersangkutan, selain gereja atau mesjid. Singkatnya, suatu 'balai umum'. Kantor Baileo di Ambon juga bertanggung jawab memfasilitasi semua organisasi masyarakat adat anggotanya dengan dukungan informasi, pendidikan, dan keahlian. Dengan kata lain, kantor kecil ini menjadi ujung tombak dari kegiatan-kegiatan advokasi hak-hak masyarakat adat di Maluku pada tingkat yang lebih tinggi. Selain pendirian beberapa lembaga pendukung baru seperti pusat-pusat pelatihan di beberapa tempat terpisah, koperasi kredit dan koperasi perumahan, pusat perdagangan antarpulau, Baileo juga telah membantu mereka mendirikan suatu lembaga khusus untuk pengkajian dan pelayanan bantuan hukum bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Semua lembaga pendukung tersebut bertanggung jawab langsung kepada forum Pertemuan Koordinasi Tahunan yang dihadiri oleh perwakilan semua organisasi masyarakat adat anggota jaringan Baileo Maluku. Setiap organisasi juga memiliki seorang wakil dalam kepengurusan semua lembaga pendukung tersebut. Sampai tingkat tertentu, beberapa lembaga itu, misalnya koperasi kredit dan perumahan di Kei Kecil, bahkan sudah dikelola langsung oleh anggota masyarakat adat setempat sendiri. Maka, kerja-kerja pengorganisasian yang sangat mendasar yang dimulai beberapa tahun lalu langsung di tengah masyarakat adat di kampung-kampung dan pulau-pulau yang saling terpisah, kini mulai menemukan wujudnya dalam satu jaringan pejal yang siap melangkah ke tahapan dan proses-proses politik yang lebih majemuk dan berjangkauan luas.

Alat: Pemetaan

Jelas, tidak ada satu pun 'resep serbaguna dan siap-pakai' dalam kerja-kerja pengorganisasian masyarakat di berbagai tempat dan keadaan yang berbeda. Segala sesuatu harus dipertimbangkan sesuai dengan ciri khas masyarakat setempat yang memang unik. Dalam semua proses pengorganisasian masyarakat adat di Maluku yang diceritakan tadi, telah digunakan banyak sekali ragam cara dan media (alat) yang memang penad (relevan) dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Kecuali dalam perumusan tujuan akhir (visi), kephahaman dasar dan kaidah-kaidah dasarnya, tidak ada satu 'cetak biru' atau 'rencana induk' tunggal dari semua proses pengorganisasian tersebut. Semua organisasi masyarakat adat anggota jaringan



Baileo menyampaikan gagasan dan usulan mereka dan, jika diperlukan, kantor Baileo di Ambon kemudian akan mencoba mencari dan menghubungi berbagai sumber informasi, keahlian, dan dana di mana saja untuk mendukungnya. Dengan cara kerja semacam inilah maka teknik-teknik pemetaan diperkenalkan kepada masyarakat adat setempat di Maluku.

Permintaan pertama para pengorganisir setempat untuk mempelajari teknik-teknik pemetaan disampaikan ke Baileo, pada awal 1993, dalam satu pertemuan berkala di Kepulauan Kei yang pada saat itu sedang menghadapi masalah sengketa batas tanah antara beberapa desa dan dengan pemerintah setempat. Peluangnya tiba ketika Baileo memperoleh informasi tentang acara 'Lokakarya Pemetaan Masyarakat' khusus untuk masyarakat adat Asia Tenggara di Thailand Utara. Setelah mengikuti lokakarya tersebut, Januari 1994, seorang ketua anggota Dewan Adat Desa Evu mengundang fasilitatornya, seorang perempuan geografer dari Kanada, untuk memandu lokakarya serupa di Maluku yang, kemudian, terselenggara di Kei Kecil pada Juni 1994. Dihadiri oleh 28 peserta, terdiri dari para pengorganisir lokal dan anggota Dewan-Dewan Adat dari beberapa kelompok masyarakat adat di Maluku Tengah dan Tenggara serta Irian Jaya dan Pulau Timor, lokakarya sembilan hari itu lebih merupakan suatu pelatihan keterampilan dasar membaca, memahami, menafsirkan, dan membuat peta baku menggunakan peralatan pokok seperti kompas. Sesuai dengan masalah sengketa batas tanah yang mereka hadapi, lokakarya juga memusatkan perhatian pada cara bagaimana memetakan garis batas dari satu kawasan. Satu tim khusus Baileo membantu merekam seluruh proses lokakarya dan mengolahnya menjadi satu panduan teknis sederhana dalam bentuk buku saku bergambar dan video singkat. Semua peserta membawa pulang buku saku dan video tersebut untuk mereka gunakan melatih orang-orang kampung di tempat masing-masing.

Sejak saat itulah, banyak kelompok masyarakat adat di Maluku mulai membuat peta batas kawasan petuanan mereka, umumnya dalam skala besar 1:10.000. Sebagian besar sudah memanfaatkannya untuk memecahkan sengketa batas dengan desa-desa bersebelahan. Bahkan, beberapa di antaranya mulai mengembangkan peta-peta dasar buatan mereka sendiri menjadi peta-peta tematis untuk berbagai keperluan seperti perencanaan tata guna lahan desa, tata letak perumahan kampung, pembangunan saluran air bersih dan sistem sanitasi dan —tetap masih dengan prakarsa sendiri— menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang sangat khas seperti pemantauan status hutan bakau sebagai sabuk hijau alami Teluk Hoat Varang yang menjadi *petuanan* bersama sepuluh desa di pantai barat-tengah Kei Kecil. Contoh terakhir ini menjadi lebih menarik karena hasil pemetaan status hutan bakau itu kemudian mereka bahas bersama dalam suatu pertemuan Dewan-dewan Adat setempat yang membuat mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa mereka harus mengambil tindakan tertentu untuk mencegah semakin menipisnya ketebalan hutan bakau sepanjang teluk dengan garis pantai 14 kilometer itu. Beberapa gagasan baru muncul, antara lain, seruan kepada semua penduduk sepuluh desa untuk membatasi penebangan bakau hanya pada beberapa jenis dan pada tempat-tempat tertentu saja.

Pada tahun 1995, Baileo memperoleh informasi baru tentang beberapa kelompok masyarakat adat di Thailand Utara yang menggunakan peta tiga-matra dalam bentuk



peraga bentang alam (*landscape model*) yang lebih menarik karena tampaknya yang menyerupai keadaan yang sebenarnya. Bekerjasama dengan satu jaringan kerja komunikasi kerakyatan regional Asia Tenggara (SEAPCP) yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, Baileo mengundang dua orang pengorganisir masyarakat adat Thailand tersebut ke Maluku. Suatu lokakarya lanjutan dilaksanakan di Kei Kecil, Mei 1995, yang masih dihadiri oleh sebagian besar peserta lokakarya pemetaan sebelumnya. Kali ini mereka memperkaya ketrampilan dasar yang sudah ada dengan cara-cara membaca peta topografi dan membuat peraga bentang alam tiga-matra sampai pada skala 1:5.000. Secara sengaja, lokakarya kali ini pun dipusatkan pada cara bagaimana menggunakan peta tiga-matra sebagai suatu alat (media) untuk memfasilitasi proses-proses pertemuan dan diskusi dalam masyarakat. Maka, bentuk peta tiga-matra itu kemudian menjadi salah satu alat peraga yang paling disukai dan memang efektif dalam banyak kegiatan pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan pertemuan masyarakat di tingkat desa/kampung. Seorang ibu rumah-tangga di Desa Ad, Kei Besar, misalnya, setelah mengikuti seluruh proses peragaan bentang alam *petuanan* desanya, dengan takjub menyatakan: "...Baru sekarang saya bisa melihat seluruh bagian *petuanan* desa saya dan jadi paham mengapa selama ini kami selalu gampang ditipu oleh orang-orang luar."¹²

Selanjutnya, beberapa orang pengorganisir mulai mengembangkan sendiri teknik-teknik pemetaan dan peraga itu, secara kreatif menggabungkannya dengan teknik-teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang mereka pernah pelajari sebelumnya. Misalnya, mereka menggunakan peraga bentang alam sebagai peraga contoh (*simulation kit*) sebelum melakukan kegiatan penelusuran (*transect*) kawasan yang sesungguhnya di lapangan. Satu kelompok nelayan setempat di pantai utara dan barat Kei Kecil, Oktober 1994, juga menggunakan teknik gabungan serupa untuk melakukan suatu pemantauan (*reconnaissance survey*) status terumbu karang dalam kawasan *petuanan* laut mereka. Mereka menemukan bahwa ternyata hanya sekitar 40-60% saja terumbu karang di kawasan itu yang masih nisbi baik. Kemudian, mereka bersama-sama merumuskan satu rencana tindakan untuk melindungi terumbu karang setempat menentang cara-cara penangkapan ikan yang merusak menggunakan peledak dan pembius (*dynamite and cyanide fishing*) yang mulai banyak digunakan beberapa perusahaan penangkap ikan di seluruh Maluku.¹³ Dibantu oleh dua perempuan pakar hayati kelautan (*marine biologist*) dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Pattimura, pada November 1995, satu kelompok penduduk dan pengorganisir perempuan juga mulai menggunakan teknik gabungan tadi untuk melakukan kegiatan penelusuran daerah pantai air surut

¹² Dikutip dari berkas laporan "Lokakarya Peragaan Bentang Alam untuk Pengorganisasian Masyarakat", dokumen yang tidak diterbitkan, Kei Besar, 12-18 Mei 1995.

¹³ Dari "Laporan Lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Laut" dokumen yang tidak diterbitkan, Ambon, Oktober 1994. Lihat juga "Meracuni Masa Depan", dalam selebaran dan lembar-fakta *Ikan*, Ambon, Nopember 1994; satu lembar kampanye pendapat umum yang disiapkan oleh Kelompok Kerja Perikanan Maluku, satu kelompok peneliti yang banyak membantu informasi bagi Baileo dan semua anggota jaringannya sejak 1993.



di pantai barat Kei Besar. Hasilnya, mereka mendesak Dewan-Dewan Adat setempat untuk memberlakukan satu peraturan ketat cara-cara melabuh sauh perahu (*mooring practices*), pengumpulan ikan umpan dan kerang-kerangan, serta pelarangan penggunaan akar beracun tuba di daerah yang menjadi sumber utama pendapatan tambahan mereka selama ini.¹⁴ Karena masih banyak keruwetan teknis yang belum terpecahkan, sayangnya, hanya usul ketiga (pelarangan tuba) yang akhirnya disepakati oleh sidang pleno MUMMO pada tahun berikutnya.¹⁵

Hasil kerja kreatif lainnya adalah dari *Raja* Maur Ohoiwut sendiri. Dia menggunakan teknik-teknik dasar pemetaan untuk menggambarkan sketsa pola tata guna darat dan laut tradisional Kei dan menuliskan uraian konsep hukum adat yang mendasarinya. Hasilnya adalah satu dokumen yang sistematis yang pernah ditulis pertama kalinya oleh seorang kepala adat sendiri, mungkin yang pertama di Indonesia, yang secara rinci dan padu menguraikan konsep sistem pengetahuan tradisional tentang satu tema khusus secara lengkap dengan analisis tajam mengenai konteks kekinian dan keakanannya: perubahan-perubahan yang dialami, tantangan-tantangan yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinannya di masa depan. Dokumen itu kemudian diterbitkan dengan kata pengantar khusus dari Menteri Negara Lingkungan Hidup (saat itu).¹⁶ Sebelumnya, Kepala Kewang Haruku juga menggunakan teknik peta sketsa untuk menggambarkan uraian naskahnya mengenai peraturan *sasi* dalam kawasan *petuanan* desanya yang kemudian juga diterbitkan dengan pengantar khusus dari mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup.¹⁷

Pelajaran lain dari hasil-hasil tersebut adalah bahwa pemetaan oleh masyarakat (*participatory community mapping*) dapat dan memang harus tidak hanya menghasilkan gambar-gambar peta, tetapi juga menghasilkan berbagai bentuk dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti-bukti sosial dan sejarah hak-hak kepemilikan masyarakat setempat atas kawasan tradisional mereka. Dengan sengaja memfasilitasi mereka menuliskannya oleh mereka sendiri dan dengan tetap mencantumkan hak ciptanya juga atas nama mereka sendiri —bukan ditulis dan diakui hakciptanya oleh para pakar peneliti atau penulis dari luar— akan merupakan sumbangan yang sangat berarti terhadap gagasan pembelaan dan pengembangan hak cipta intelektual masyarakat adat, menentang rezim hak cipta intelektual internasional yang wujud dan sangat hegemonik saat ini.

Sebenarnya, teknik-teknik pemetaan bukanlah sesuatu yang baru sama sekali bagi kebanyakan masyarakat tradisional. Sketsa-sketsa garis, bentuk, dan titik untuk menggambarkan suatu kawasan tertentu sudah digunakan selama berabad dalam

¹⁴ Dari “Laporan Lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Pantai oleh Kelompok Perempuan”, dokumen tidak diterbitkan, Ambon. Nopember 1995.

¹⁵ “Laporan Hasil MUMMO-IV”, dokumen tidak diterbitkan, Watlaar, November 1995.

¹⁶ *supra*, catatan kaki #2.

¹⁷ Eliza Kissya, *Sasi Aman Haru-ukui: Tradisi Kelola Lingkungan Lestari di Haruku*. Yayasan Sejati Jakarta, 1994.



beragam bentuk. Di Desa Ohoidertawun, di pantai utara-barat Pulau Kei Kecil, beberapa lukisan kuno pada dinding gua dan cadas karang sepanjang 2 kilometer memperlihatkan beberapa gambar sketsa dan denah sederhana. Lukisan serupa juga ditemukan pada dinding gua-gua granit sepanjang rawa bakau di pantai utara Pulau Seram bagian tengah dekat Desa Sawai. Teknik-teknik geomatik modern memang dapat diajarkan secara tepat guna kepada masyarakat tradisional dengan memanfaatkan dasar-dasar keterampilan purba umat manusia itu. Kegiatan pemetaan masyarakat adat di Maluku selama tiga tahun terakhir memperlihatkan semua itu mungkin, bahkan sampai pada tingkat penggunaan peralatan canggih seperti komputer dan GPS (*Geo-Positioning Satellite*).

Tahun 1996, difasilitasi oleh seorang mahasiswa geografi Universitas Hawaii yang sedang melakukan praktik kerja lapangannya di Kepulauan Kei, dua jenis peralatan canggih itu mulai diperkenalkan kepada para pengorganisir dan tetua adat setempat. Terbukti, mereka dengan mudah dapat memahaminya dan segera menggunakannya untuk memperbaiki peta-peta tapal batas dan tata guna *petuanan* mereka yang dulu mereka buat dengan peralatan lebih sederhana (kompas). Jadi, secara teknis, masyarakat tradisional mampu menggunakan cara-cara pemetaan dalam berbagai bentuk dan tingkatan serta memanfaatkannya juga untuk berbagai tujuan pada berbagai tahapan yang berbeda. Mereka menjadi sangat paham cara membuat peta jenis apa untuk tujuan yang berbeda pada tingkatan yang berjenjang pula. Dari pengalaman mereka sendiri, misalnya, mereka berkesimpulan bahwa teknik-teknik sketsa atau penelusuran sederhana dari pendekatan PRA cukup untuk tujuan penyelesaian sengketa batas setempat. Jika kasusnya sudah mengarah pada tuntutan memperoleh pengakuan hukum resmi dari pemerintah, apalagi jika ada kebutuhan untuk mendesakkan perubahan kebijakan dan peraturan tertentu, maka teknik-teknik yang lebih rumit dengan peralatan lebih canggih semacam komputer dan GPS mulai diperlukan. Dalam kasus-kasus pemetaan masyarakat adat di Maluku, kesadaran pada perlunya proses-proses politik pasca-pemetaan itu memang secara sengaja dirancang sebagai pendekatan pokoknya. Itulah pula sebab mengapa pada tahap-tahap awal kegiatan pemetaan masyarakat adat di Maluku sampai saat ini masih ditekankan pada pemanfaatannya sebagai salah satu alat atau media yang terbukti efektif untuk tujuan-tujuan pengorganisasian masyarakat setempat. Sampai sekarang, selain kasus Yamdena yang sempat mencapai tahap advokasi tingkat nasional dan internasional, baru tercatat beberapa kasus saja di mana pemetaan yang memang secara sengaja digunakan sebagai alat advokasi langsung, itu pun masih terbatas pada tingkat kabupaten dan provinsi.

Salah satunya adalah kasus sengketa batas tanah antara penduduk Kampung Dumar di Pulau Kei Dullah dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Pada November 1996, beberapa orang pengorganisir setempat memfasilitasi penduduk Dumar untuk memetakan batas-batas kawasan *petuanan* tradisional mereka dengan peralatan kompas, komputer, dan GPS. Mereka menghasilkan satu peta berskala 1:5.000 yang secara jelas memperlihatkan rincian tapal dan garis batas *petuanan* Dumar, termasuk garis batas lahan dalam *petuanan* itu yang mereka pernah hibahkan kepada Dinas Perikanan untuk membangun prasarana dermaga dan pendapa pelelangan ikan. Seperti biasa, Dinas Perikanan melanggar kesepakatan dengan cara 'mencuri jarak' melewati garis batas yang telah disepakati. Orang-orang Dumar pun menggunakan peta baru mereka untuk



berdebat dengan petugas Dinas Perikanan yang sekarang justru terheran-heran dan takjub menyaksikan orang-orang kampung itu dapat membuat dan menjelaskan satu peta teknis terbaku. Merasa kalah selangkah, para petugas Dinas Perikanan kemudian mencoba cara yang lazim: menakut-nakuti dengan peraturan hukum dan tekanan kekuasaan. Terlambat, karena orang-orang Dumar pun sudah memperkirakannya sejak awal. Melalui jaringan Baileo, mereka meminta dua orang pakar hukum senior dari Ambon datang ke Tual dan mendukung mereka. Akhirnya, Dinas Perikanan mengalah dan bersedia mematuhi kesepakatan awal.

Kasus lain adalah di Pulau Rhun, salah satu gugus utama dari Kepulauan Banda. Difasilitasi oleh seorang mahasiswa wanatani (*agroforestry*) dari Universitas Teknik Berlin, Jerman, yang sedang melakukan penelitian gelar doktoral nya di beberapa pulau kecil di Maluku, Dewan Adat Desa Rhun mulai belajar dan menerapkan teknik-teknik pemetaan dan PRA yang menghasilkan satu rancangan tata guna dan pengelolaan sistem perhutanan rakyat setempat yang kemudian mereka ajukan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dilengkapi dengan lampiran peta-peta, sketsa, dan data teknis yang rinci dan sangat sistematis, rancangan tertulis yang disusun oleh masyarakat adat setempat itu secara menyeluruh menguraikan konsep dasar, pendekatan, dan cara-cara praktis bagaimana sebaiknya menata sistem budidaya hutan secara lestari di satu pulau kecil, menggabungkan sistem pengetahuan dan praktik tradisional dengan teknik-teknik ilmiah modern. Mereka juga mencantumkan unsur-unsur pokok pelebagaan dan hukum dari seluruh rancangan tersebut, lengkap dengan gambaran proses-proses sosial dan politiknya.

Tuntutan utama mereka adalah pengakuan resmi pemerintah terhadap hak-hak pemilikan kawasan dan pengelolaan sumberdaya alam setempat. Itulah sebab mengapa mereka mengajukannya ke DPRD Maluku Tengah untuk memperoleh pengakuan tersebut, suatu prasyarat penting untuk membuat rancangan itu benar-benar dapat diterapkan secara murni oleh masyarakat adat setempat sendiri.¹⁸

Suatu proses politik dan hukum yang sangat rumit dan berbelit sampai sekarang masih berlangsung terus yang membuat rancangan masyarakat adat Pulau Rhun itu belum memperoleh jawaban jelas dan pasti dari pemerintah dan DPRD Maluku Tengah.

¹⁸ Lebih rinci dapat dilihat dalam dokumen "Tata Guna Tanah Kesepakatan (TGDK) Pulau Rhun: Usulan untuk Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah mengenai Pengembangan dengan Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup", dokumen tidak diterbitkan, Ambon, Oktober 1996. Terima kasih khusus kepada Stefan Stubenvoll, penyunting naskah dan fasilitator masyarakat adat Pulau Rhun, yang menyediakan bahan-bahan tersebut kepada penulis dan mengizinkannya dikutip dalam makalah ini. Hasil penelitian dan proses pemetaan dan pengorganisasian di Rhun dan juga pulau kecil Teor di antara Kepulauan Banda dan Kepulauan Kei, telah didokumentasikan lengkap dalam bentuk disertasi Stefan Stubenvoll (2003), "Traditional Agroforestry & Ecological, Social, And Economic Sustainability On Small Tropical Islands: A Dynamic Land-use System and its Potentials for Community-based Development in Tioor and Rhun, Central Maluku, Indonesia", disertasi doktoral di Technische Universitat, Berlin, Jerman.



Sampai tingkat tertentu, mengingat kerumitan jalur birokrasi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang sangat berkiblat pada kepentingan pasar dan modal besar, kemungkinan rancangan masyarakat adat Rhun itu pun tak akan pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah setempat. Sementara itu, pengembangan kegiatan serupa mulai meluas ke pulau-pulau kecil lainnya sampai ke Pulau Teor di dekat gugus Kepulauan Kei.

Simpulan: Pelajaran Penting

Ini hanyalah dua contoh kasus yang, memang, masih sangat bersifat terbatas dan dapat saja dianggap oleh beberapa kalangan sebagai ‘terlalu lokal’ (*myopic*). Mungkin memang contoh kasus itu tidak dapat dijadikan amsal untuk membuktikan efektivitas pemetaan oleh masyarakat adat lokal sebagai satu alat menentang kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih besar dan lebih kuat pada tingkat yang lebih tinggi. Barangkali, tetapi apa yang menarik dan jauh lebih penting adalah bahwa peta-peta yang dihasilkan oleh masyarakat adat setempat memang hanya akan efektif sebagai alat sampai pada tingkat tertentu dan hanya untuk tujuan-tujuan yang khas pula. Sekali tahapan dan tujuan itu tercapai atau telah dilalui dan, pada pihak lain, pusat-pusat kekuasaan menggunakan kekuatannya untuk menjegalnya, maka peta memang tidak memadai lagi. Inilah saat di mana perangkat hukum dan proses-proses politik mulai masuk gelanggang. Tanpa suatu dukungan proses-proses hukum dan agenda politik yang jelas segera setelah pemetaan, maka peta yang dihasilkan itu memang akan menjadi peta semata-mata. Hal ini sangat penting terutama di suatu negara dengan sistem hukum dan politik yang sangat serba terpusat seperti Indonesia. Seperti terlihat jelas pada kasus Yamdena, gagasan dan upaya pembelaan hak-hak kawasan tradisional masyarakat adat dan pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam setempat oleh masyarakat adat sendiri memang harus dirancang sebagai suatu rencana aksi strategis yang terpadu dan menyeluruh pada semua tingkatan, mulai dari ‘kerja-kerja bawah permukaan’ (*groundworks*) langsung di tengah masyarakat adat itu sendiri sampai pada ‘kerja-kerja garis depan’ (*frontlines*) di tingkat kebijakan, serta ‘kerja-kerja pendukung’ (*supporting*) yang menghubungkan kedua kerja utama tadi.

Gagasan pokok yang sebenarnya ingin diajukan di sini adalah adanya pengakuan hak-hak atas pemilikan kawasan tradisional dan pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya oleh masyarakat adat setempat. Tentu saja, upaya untuk mengedepankan dan membela hak-hak masyarakat adat setempat atas kawasan tradisional dan sumberdaya alam mereka, tidak boleh sampai terjebak ke dalam perangkat romantisme berlebihan. Sebagai suatu entitas budaya yang hidup dalam proses-proses sejarah, dinamika internal dari hak-hak tersebut juga memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan yang harus dan dapat lebih disempurnakan dan dikembangkan secara lebih arif. Antara lain, misalnya, bagaimana menjadikannya memiliki kesahihan sebagai suatu sistem (konsep maupun praktik) yang mampu menjawab tantangan-tantangan dari banyak masalah mutakhir saat ini dan di masa-masa mendatang: laju pertumbuhan penduduk yang membuat pertentangan kepentingan antar berbagai pihak semakin tajam dalam memperebutkan hak kepemilikan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam; semakin kuatnya tuntutan perlakuan yang setara dalam akses dan kontrol sumberdaya

alam antara lelaki dan perempuan; semakin kuatnya tuntutan ke arah suatu pola-pola produksi-distribusi-konsumsi (termasuk yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang banyak terdapat di kawasan-kawasan tradisional masyarakat adat) yang lebih adil dan merata tanpa preferensi ras, suku, agama, kelas sosial, dan aspek-aspek primordial lainnya; juga semakin kuatnya tuntutan ke arah demokratisasi semua lembaga-lembaga kemasyarakatan pada semua tingkatan (di mana lembaga-lembaga tradisional masyarakat adat sering dituduh dan, dalam kenyataannya, memang masih banyak yang mempertahankan struktur dan pola-pola hubungan yang bersifat paternalistik atau bahkan feodalistik); dan, tentu saja, tantangan nyata dari kecenderungan semakin nisbinya batas-batas kedaulatan negara nasional oleh apa yang disebut sebagai ‘proses globalisasi’ saat ini.

Berdasarkan pengalaman pengorganisasian masyarakat adat di Maluku selama beberapa tahun terakhir, satu kerangka kerja pokok (yang, tentu saja, masih tetap dan sangat terbuka untuk dicoba, diuji dan diperdebatkan lebih lanjut) dapat diusulkan sebagai berikut:

- Pertama dan terpenting, basis organisasi masyarakat adat setempat, terutama yang masih menjalankan sistem dan praktik-praktik tradisional pengelolaan sumberdaya alam mereka secara lestari, harus diperkuat kembali. Adalah lebih baik dan juga lebih bijak memulainya dari pranata kelembagaan yang sudah ada dan memang sangat mereka kenal katimbang memperkenalkan struktur baru yang masih sangat asing bagi mereka. Proses transformasi pranata tradisional ini harus berjalan sesuai dengan ritme dan tempo mereka sendiri dalam mencoba memahami dan menghadapi perkembangan mutakhir dunia luar. Satu unsur menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah pengembangan sumberdaya manusia setempat untuk mampu mengelola dan mengendalikan sendiri proses transformasi tersebut. Karena itu, pendekatan-pendekatan pendidikan kerakyatan (*popular education*) yang bersifat membebaskan menjadi salah satu faktor penentu.
- Setelah basis kelembagaan dan organisasinya mulai cukup kuat, maka pengembangan suatu konsep terpadu pengelolaan sumberdaya alam setempat mulai diperlukan. Salah satu cara terbaik untuk menghasilkan konsep semacam ini adalah melalui suatu skema uji coba selama masa tertentu yang langsung dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi setempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi. Skema program ini secara sengaja harus dirancang untuk menguji kelayakan teknis, ekonomis, hukum, politik, dan budaya dari sistem dan praktik-praktik tradisional setempat. Dalam tahapan inilah, uji coba penggabungan berbagai pendekatan dan teknik ilmiah modern yang penad —misalnya, teknik-teknik pemantauan sistematis, pemetaan dasar dan tematis, teknologi budidaya tepat-guna, manajemen usaha mikro, dan sebagainya— mutlak diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara dialogis, partisipatif, dan sekreatif mungkin. Suatu dokumen “Rencana Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari dan Terpadu” (*Integrated and Sustainable Community-based Resources Management Plan*) harus dihasilkan pada masa akhir uji coba. Dokumen ini sangat penting mengingat fakta bahwa salah satu kelemahan dari banyak penganjur otonomisasi pengelolaan sumberdaya alam setempat selama ini adalah tidak adanya suatu contoh atau model operasional yang memang





sudah teruji-cobakan di lapangan, termasuk tidak adanya dokumen tertulis yang sistematis sebagai usulan tandingan untuk meyakinkan para pembuat kebijakan resmi.

■ Akhirnya, dokumen rencana itu memang harus diajukan kepada para pembuat kebijakan pada semua tingkatan dan pada semua pihak yang memang potensial untuk mendukung gagasan, pendekatan, dan cara yang diusulkan di dalamnya. Semua alat dan media yang tepat guna harus dimanfaatkan pada tahap sangat menentukan ini. Pada tahap ini pulalah apa yang disebut sebagai dukungan hukum dan proses-proses politik menjadi sangat menentukan. Jika pengakuan hukum dan politik sudah diperoleh dan rencana tersebut sudah dapat dilaksanakan, maka tahapan penyebarluasannya —tentu saja, dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sepanjang tetap taat asas pada tujuan-tujuan awalnya— ke tempat-tempat lain pun segera harus dimulai, sehingga model yang tadinya bersifat khas setempat itu bisa menjadi satu model umum bagi perubahan-perubahan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi serta transformasi sosial pada skala yang lebih luas. Pada tahapan ini, daur proses dari awal pun dimulai lagi. ❖

Natsepa, 12/02/1997.

FINAL

RISALAH SUSUL (*POSTSCRIPT*): SATU DASAWARSA KEMUDIAN...



Pada pertengahan 1997, krisis ekonomi kawasan melanda negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Indonesia tercatat sebagai negara yang paling parah menderita akibatnya. Krisis tersebut datang bersamaan dengan krisis sosial politik dalam negeri yang mulai menanjak sejak 1996. Rangkaian unjuk rasa besar-besaran oleh para mahasiswa, aktivis ORNOP, petani, buruh, kaum perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat adat yang mulai terorganisir, terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Puncaknya adalah pada Mei 1998, ketika gabungan mahasiswa dan massa rakyat menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta. Akhirnya, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, mengakhiri masa pemerintahan kediktatoran militernya selama 32 tahun sejak 1966.

Pemilihan umum yang demokratis pun (yang pertama sejak 1955) dilaksanakan pada April 1999. Sistem politik, hukum, dan pemerintahan segera berubah, antara lain, yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumberdaya alam, otonomi lokal, dan hak-hak masyarakat adat. Mendahului pemilihan umum, pada bulan Januari 1999, DPR mengesahkan dua undang-undang baru yang bersejarah, yakni UU Nomor 22 dan 25/1999, tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Undang-undang yang pertama (No.22/1999) menggantikan UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang selama ini terkenal sangat mengekang dan menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Lalu, pada tahun 2000, MPR baru hasil pemilihan umum 1999 mengesahkan Amandemen Kedua dan Ketiga UUD 1945. Kemudian, pada tahun 2001, MPR mengesahkan Ketetapan (TAP) MPR nomor IX/2001. Semuanya secara tersurat dan tegas mengakui hak-hak masyarakat adat lokal untuk memiliki dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayah ulayat masing-masing berdasarkan sistem adat tradisional mereka.

Semua perubahan politik dan hukum yang penting tersebut menjadi tantangan dan peluang baru bagi masyarakat adat lokal, dan ORNOP-ORNOP yang mendampingi mereka selama ini, untuk melangkah lebih maju memperjuangkan hak-hak dan otonomi lokal masyarakat adat. Kelompok-kelompok masyarakat adat yang diorganisir oleh Jaringan Baileo Maluku selama ini, juga aktif terlibat menghadapi semua perubahan baru tersebut.



Tetapi, meskipun banyak perubahan penting telah terjadi, namun masih banyak pula para politisi dan pejabat militer yang selama ini korup tetap berusaha mempertahankan kekuasaan lama dan berusaha sedemikian rupa menggagalkan arus perubahan yang tengah terjadi. Mereka menciptakan keadaan tak menentu dan kekacauan di mana-mana, antara lain, dengan merekayasa pelibatan ratusan tentara desersi dan milisi terorganisir (preman) dalam kerusuhan sosial besar di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku. Di Maluku, Kerusuhan besar pertama meledak di Kota Ambon, Januari 1999, lalu dengan cepat menyebar ke pulau-pulau Lease, Seram, Banda, Buru. Halmahera, Aru, Kei, dan Tanimbar.

Rangkaian kerusuhan sosial itu sempat menciptakan kekacauan dan kekalutan di tengah masyarakat, tetapi tidak pada kelompok-kelompok masyarakat yang telah terorganisir dan mengorganisir kembali diri mereka secara sistematis selama ini. Sementara banyak kelompok masyarakat lainnya kebingungan menghadapi gelombang kerusuhan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat adat yang diorganisir oleh Jaringan Baileo Maluku di Kepulauan Kei, di bawah kepemimpinan Raja Wilayah Adat Maur Ohoiwut, almarhum J.P. Rahail, segera mengambil prakarsa mengorganisir proses-proses rekonsiliasi berdasarkan sistem adat tradisional mereka, yakni hukum adat *Larwul Ngabal* dan mekanisme rekonsiliasi adat *Ken Sa Faak*. Ratusan pengorganisir lokal Jaringan Baileo Maluku segera menjalankan peran baru mereka sebagai aktivis perdamaian dan relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Tim Relawan Kemanusiaan (TRK).¹⁹ Akhirnya, pada akhir 2000, mereka berhasil menciptakan perdamaian menetap di seluruh Kepulauan Kei. Ini menjadi sejarah rekonsiliasi lokal pertama yang berhasil di Indonesia, tanpa campur tangan pemerintah, aparat keamanan, ORNOP, dan organisasi internasional.²⁰

Proses-proses yang sama masih tetap dilanjutkan sampai saat ini di Aru, Tanimbar, Seram, Lease, dan Buru, sehingga kerusuhan sosial sejak dua tahun terakhir hanya terjadi secara sporadis terbatas di wilayah pulau (terutama kota) Ambon saja. Segera setelah perdamaian tercipta, kelompok-kelompok masyarakat adat lokal yang diorganisir oleh Jaringan Baileo Maluku pun mulai menanggapi secara sistematis arus perubahan sistem politik dan pemerintahan. Sekali lagi, kelompok-kelompok masyarakat lokal yang paling terorganisir di Kepulauan Kei berada di garis terdepan. Pada awal 2002, sebagai

¹⁹ Setelah perdamaian tercipta dan kerusuhan mereda, pada bulan Maret 2003, TRK Jaringan Baileo Maluku mengadakan musyawarah besar dan mengubah bentuk dan nama organisasi mereka menjadi Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (HUMANUM).

²⁰ Ada beberapa dokumen yang merekam pencapaian mengesankan ini, antara lain, lihat: Laksono, P.M. (2002), "We are All One: How Custom Overcame Religious Rivalry in Southeast Maluku", *Inside Indonesia*, April-June (juga dalam: www.insideindonesia.org). Lihat juga: Thorburn, Craig C. (2002), "Musibah: Entitlement, Violence and Reinventing Tradition in Kei Islands, Southeast Maluku"; makalah pada the 9th Biennial Conference of International Association for the Study of Common Property, Victoria Falls, Zimbabwe. Lihat pula: Laksono, P.M. dan Roem Topatimasang, eds. (2004), *Ken Sa Faak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*. Yogyakarta: INSIST Press & Nen Mas Il.



contoh, masyarakat adat di Desa Evu, Kei Kecil, Maluku Tenggara, melanjutkan tuntutan lama mereka atas penguasaan dan pemilikan sumber air alam di dalam wilayah ulayat tradisionalnya (lihat kembali kutipan kasus ini pada naskah utama di atas). Akhirnya, pemerintah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara memenuhi tuntutan mereka dan memerintahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Tenggara, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100 juta kepada penduduk, selain sewa tahunan tetap yang dibayarkan langsung ke Dewan Adat Desa Evu.

Desa tetangga sekaligus *pela* (saudara berdasarkan perjanjian adat) mereka, yakni Desa Debut, bahkan mencatat prestasi bersejarah yang lebih fenomenal dan sangat mendasar. Dipimpin oleh dua orang pengorganisir lokal dan fasilitator senior Jaringan Baileo Maluku, Alo Yamlean, yang terpilih sebagai Kepala Desa Debut pada akhir 2000, dan Karel Ohoiwutun, yang terpilih sebagai Sekretaris Desa pada waktu bersamaan, warga masyarakat adat Desa Debut akhirnya berhasil secara kreatif menerapkan UU 22/1999. Mereka berhasil mentransformasikan struktur pemerintahan adat tradisional (*Seniri*) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dipilih secara demokratis. Selain perwakilan marga-marga, BPD Debut juga memperoleh anggota baru perwakilan dari kaum perempuan, pemuda, lembaga agama, dan para pendatang (sisa-sisa pengungsi akibat kerusuhan 1999). Atas dasar asas *subsidiarity* (membawa proses pengambilan keputusan publik sampai ke tingkat terbawah yang paling mungkin), kepala desa di sana kini bertanggung jawab langsung ke BPD dalam suatu majelis terbuka yang dihadiri seluruh warga Debut, bersamaan dengan ketika BPD sendiri menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada seluruh warga. Dalam laporan ini juga disampaikan laporan keuangan yang telah di audit. Yayasan Nen Mas Il, salah satu organisasi anggota Jaringan Baileo Maluku yang berkedudukan di Kei Kecil, membantu mereka melakukan proses audit keuangan. Dan, dengan bekal keterampilan teknis pemetaan yang pernah mereka pelajari sebelumnya, warga dan aparat pemerintahan desa Debut menyusun dan menyelesaikan 24 peraturan desa (PERDES) sampai akhir 2001. Sejumlah PERDES itu, antara lain, mengatur secara sistematis rencana tata ruang desa, tata guna lahan, ketentuan pengelolaan sumberdaya alam di dalamnya, aturan retribusi dan pajak, sampai ke tata kelola dan tata kuasa pemerintahan desa yang transparan dan demokratis. Semua itu akhirnya membawa hasil nyata: pendapatan asli desa Debut melonjak fantastik, dari hanya Rp6 juta (sebetulnya hanya dari subsidi pemerintah) sebelum 2001, menjadi Rp94 juta pada akhir 2001, dan Rp126 juta pada akhir 2002, tanpa subsidi pemerintah lagi. Bahkan, pada awal 2003, warga desa Debut menyatakan siap menolak subsidi dari pemerintah jika ternyata itu digunakan sebagai alat politik untuk mengurangi otonomi lokal yang telah mulai mereka laksanakan sesuai dengan UU 22/1999.²¹

Kini, para pengorganisir lokal Jaringan Baileo Maluku, melalui program khusus 'Sekolah Rakyat Madiwun' (Bahasa Kei: *madiwun* = musyawarah) mulai menerapkan

²¹ Salah satu dokumen penting tentang Debut, lihat: Thorburn, Craig C. (2001), "Kei Islands PeaceBuilding Programme: Challenge and Opportunities for Programme Development", Evaluation Report to United Nations Development Program (UNDP), Jakarta, monografi tak diterbitkan.



proses-proses yang terjadi di Debut ke beberapa desa sekitarnya di pantai barat Kei Kecil. Hasil evaluasi Tim Assesmen dari Program Pembangunan PBB (UNDP) dan INSIST Yogyakarta, sepanjang Januari-Mei 2003, bahkan merekomendasikan agar pemerintah daerah disana menerapkan ‘Model Debut’ tersebut ke 400 desa lain di seluruh Maluku, yang menjadi sasaran bantuan dana UNDP untuk proses-proses rekonstruksi pasca-kerusuhan.²²❖

Tanjung Totu, 08/10/2006.

FINAL

²² UNDP and INSIST melaksanakan *assessment* lapangan di seluruh Maluku Tengah dan Tenggara, sepanjang Januari-Mei 2003, yang antara lain menyimpulkan ‘Model Debut’ sebagai salah satu rekomendasi terpentingnya. Lebih lengkap, lihat: INSIST and Partners (2003), “Conflict Analysis and Local Capacity Assessment for Maluku Remaking Program”, Report to UNDP, Yogyakarta, monografi tak diterbitkan. Studio Audio-visual Yayasan Nen Mas Il memproduksi satu video dokumenter khusus (18 menit): *Otonomi Desa, Cerita dari Debut* (dapat dipesan ke Seketariat Jaringan Baileo Maluku, Ambon). Ringkasannya dalam bentuk *slides presentation*, dapat di-copy di perpustakaan digital PerDikAn, INSIST, Yogyakarta.

PETUAH SANG BIJAK [4]



bahan baccaan #15

Paulo Freire, pendidik dan pemikir Brasilia yang banyak mengilhami gerakan sosial di Amerika Latin dan di benua-benua lain, pernah beberapa kali menghabiskan waktu cuti dan liburannya di Pusat Pendidikan Warga Dataran Tinggi (Highlanders Center) di kawasan Pegunungan Appalachia. Di sanalah Freire berjumpa dengan Myles Horton, seorang pendidik dan pendiri Highlanders Center yang sangat berpengaruh bagi banyak gerakan sosial modern di Amerika Serikat. Lalu dua orang itu mengisi waktu luang mereka dengan bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Salah satu bagian paling menarik adalah ketika Freire dan Horton membahas tentang konsep dan pendekatan dialogis dan dialektis terus-menerus sebagai landasan membangun kesadaran dan tatanan masyarakat baru. Mereka berdua sependapat bahwa proses dialogis dan dialektis itu berlangsung tanpa ujung, berlangsung bersamaan dengan tindakan nyata yang juga harus dialogis dan dialektis, berkembang dan mungkin juga berubah sesuai dengan kesadaran baru yang dihasilkannya. Mereka menyebutnya dalam satu ungkapan yang kemudian menjadi sangat populer, sering dikutip sebagai adagium filosofis oleh para pendidik dan pengorganisir rakyat:

“Kita membangun jalan
sambil berjalan”
(*We make the road by walking*)

Beberapa orang murid Freire dan Horton merekam perbincangan panjang dua tokoh itu, lalu menyuntingnya menjadi buku, dan menjadikan ungkapan tersebut sebagai judul buku.

Dikutip dari Myles Horton & Paulo Freire (1990), *We Make the Road by Walking: Conversation on Education and Social Change*, disunting oleh Brenda Bell, John Gaventa, dan John Marshall Peters. Pennsylvania: Temple University Press.



BAHAN BACAAN & TAYANGAN

Bahan-bahan atau sumber-sumber kepustakaan (cetak maupun audiovisual) tentang pengorganisasian rakyat, sebenarnya sudah cukup banyak tersedia, mulai dari rekaman pengalaman praktis di lapangan sampai ke hasil-hasil kajian akademis dan teoretis.

Beberapa di antaranya juga digunakan sebagai bahan bacaan atau lembar kasus dalam buku ini. Sayangnya, sebagian besar bahan-bahan tersebut masih dalam bahasa asing, masih sangat sedikit yang dalam bahasa Indonesia. Adapun yang berbahasa Indonesia, baik bahan-bahan tertulis maupun audiovisual, umumnya lebih menonjolkan isu (permasalahan) atau kasusnya, bukan rincian proses-proses pengorganisasiannya, terutama di tingkat komunitas basis.

Karena itu, berikut ini adalah satu ikhtisar singkat dari beberapa saja sumber dan bahan kepustakaan, hanya yang berbahasa Indonesia atau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terutama yang sedikit banyak memang berisi uraian tentang proses-proses dan contoh-contoh nyata praktik pengorganisasian, terutama di aras akar rumput. Pada setiap bahan tersebut kami sertakan keterangan singkat (*annotation*) agar Anda mudah membayangkan kemungkinan kegunaan dan penggunaannya dalam kerja-kerja pengorganisasian dan pendidikan rakyat di tempat Anda.



■ BUKU, JURNAL & LAPORAN

Crawshaw, Steve & John Jackson (2015), *Tindakan-tindakan Kecil Perlawanan: Bagaimana Keberanian, Ketegaran, dan Kecerdikan Dapat Mengubah Dunia*. Yogyakarta: INSISTPress (264 halaman).

Satu kumpulan lebih dari 80 kisah nyata perlawanan dan pengorganisasian rakyat di berbagai negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika yang diuraikan dengan gaya bahasa populer, mudah dipahami, dengan dukungan data dan hasil riset yang luar biasa melimpah. Beberapa di antara kisah nyata tersebut adalah pencipta sejarah yang sudah sangat dikenal, seperti gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, gerakan massa yang menumbangkan rezim diktator komunis di Eropa Timur, dan sebagainya. Beberapa cuplikannya dijadikan bahan bacan dalam buku ini.

Dietz, Ton (2000), *Pengakuan Hak atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Politik Lingkungan*. Yogyakarta: INSISTPress (188 halaman).

Walaupun ditulis sebagai suatu risalah riset akademis, namun buku ini menyajikan banyak sekali contoh kasus nyata di mana komunitas-komunitas lokal mengorganisir diri mereka menghadapi salah satu masalah besar yang berlangsung secara mendunia (global), yakni perebutan hak atas sumberdaya alam. Buku ini sekaligus mengkaji pandangan-pandangan gerakan sosial, terutama yang bergerak dalam isu lingkungan hidup, dengan satu uraian rinci contoh kasus pengorganisasian komunitas-komunitas lokal di Kepulauan Maluku yang menggunakan pemetaan sebagai alat pengorganisasian yang juga dijadikan salah satu bahan bacaan dalam panduan ini.

Embu, Eman J. & Amatus Woi (2003), *Tolak Bungan: Suara Teolog Pembebasan*. Maumere-Yogyakarta: Penerbit Ledalero & INSISTPress (214 halaman).

Buku tentang latar belakang dan proses perlawanan rakyat di Flores,. NTT, menentang industri keruk pertambangan yang merampas hak-hak ulayat mereka dan merusak ekosistem lokal. Meskipun lebih banyak menguraikan proses-proses advokasinya, tidak banyak tentang proses-proses pengorganisasian di tingkat komunitas basisnya, namun buku ini memberi penjelasan berharga tentang bagaimana keyakinan teologis dan penafsiran ajaran agama diterapkan sebagai dasar pemihakan dan titik-tolak kerja-kerja pengorganisasian rakyat yang ditulis oleh para imam (Katolik) progresif.

Flavier, Juan M. (1970), *Dokter Kampung: Pengalaman Seorang Penggerak Masyarakat*. Manila: New Days Publisher, Bab 2-3 (34 halaman, masih dalam bentuk berkas elektronik, belum dicetak dan diterbitkan).

Kumpulan cerita pengalaman nyata seorang dokter yang menjadi relawan penggerak masyarakat di satu desa miskin dan terpencil di Filipina pada 1960-an. Meskipun berlangsung pada dasawarsa 1960-1970, namun isi buku ini masih relevan sebagai contoh-contoh sikap, pikiran, dan perilaku seorang pengorganisir menghadapi dan berurusan dengan berbagai kejadian dan keadaan hidup sehari-hari yang berlangsung di masyarakat desa. Diuraikan dengan gaya bahasa bertutur yang ringan, sangat jelas, terkadang lucu dan mencengangkan.

Hadi, Sholikhul, Dony H. Cahyono, Yandi Nurhayandi, M. Nur Makkah, Ahmad Yakub, Gde Sugiarta, Indra Agustini, Abdi Hayat, Samson Atapary (2005), *Yang Mengakar, Yang Menjalar: Kisah-kisah Pengorganisasian Aktivistis Sekolah INVOLVEMENT*. Yogyakarta: INSISTPress (220 halaman).

Kumpulan tulisan cerita pengalaman nyata beberapa orang pengorganisir rakyat alumni Sekolah INVOLVEMENT (Indonesian Volunteers for Social Movement) Angkatan I (1999). Segera setelah menyelesaikan pendidikan kelas selama tiga bulan, selama sembilan bulan berikutnya mereka bermukim dan bekerja dengan berbagai komunitas basis (petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh perkotaan) di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Buku ini berguna untuk melihat bagaimana para pengorganisir muda dan pemula berkiprah di lapangan dengan segenap permasalahan dan nuansanya, terutama di suatu masa peralihan (transisi) yang masih penuh ketidakpastian gejolak politik, krisis ekonomi kawasan, kerusakan ekosistem, dan kerusuhan sosial besar-besaran.

Hope, Anne & Sally Timmel (1988), *Training for Transformation*. Gweru, Tanzania: Mambo Press, Volume I-IV (masing-masing sekitar 180 halaman, bahasa Inggris, sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara terpisah-pisah dan belum diterbitkan).

Satu panduan pelatihan dan pendidikan rakyat yang sudah sangat klasik di kalangan para pengorganisir rakyat akar rumput. Berisi banyak sekali petunjuk teknis bagaimana proses penyadaran dan pengorganisasian dilakukan di kalangan para petani dan buruh yang masih buta huruf sekali pun. Dilengkapi banyak gambar dan infografis yang sangat cerdas.

Rambe, Hanna (1983), *Seorang Lelaki di Waimital: Sebuah Pernyataan & Bandingan terhadap Beribu Slogan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan (216 halaman).

Kisah yang kian langka tentang seorang mahasiswa pertanian yang gelisah melihat keadaan, lalu memutuskan untuk tidak balik lagi ke kampus ketika menjalani praktik lapangannya di salah satu desa sangat terpencil di Pulau Seram, Maluku. Meskipun lebih banyak dalam kerangka kerja pengembangan masyarakat yang lebih altruistik, namun kisah nyata Mohammad Kasim asal Aceh ini memperlihatkan bagaimana keyakinan dan keteguhan luar biasa yang dibutuhkan oleh seorang pengorganisir rakyat, apalagi di masa yang masih sangat sulit, ketika prasarana masih sangat terkebelakang, keadaan politik yang masih sangat represif, kebijakan pembangunan yang masih sangat sentralistik, dan pandangan sosial yang nyaris tidak memandang sebelah mata pada kerja-kerja sosial tanpa gaji, tanpa pengakuan resmi, dan tanpa jaminan masa depan.

Sinaga, Marsen (2017), *Pengorganisasian Rakyat & Hal-hal Yang Belum Selesai*. Yogyakarta: INSISTPress & ARKOM (162 halaman).

Refleksi kritis penulis terhadap beberapa hal yang masih bermasalah (problematis), bahkan kontroversial, dalam dunia pergerakan sosial di Indonesia selama ini. Ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulis terlibat di beberapa organisasi gerakan sosial selama ini.

Sirimorok, Nurhady (2010), *Membangun Kesadaran Kritis: Kisah Pembelajaran Partisipatif Orang Muda*. Yogyakarta: INSISTPress (225 halaman).

Satu berkas lengkap tentang latar belakang konsep dan pemikiran, analisis konteks sosial dan politik, serta bentuk proses dan pelaksanaan dari satu gagasan pendidikan kritis bagi orang-orang muda melalui program 'Kemah Kaum Muda' (*Youth Camp*) pada 1990-an oleh Komunitas Inninawa di Sulawesi Selatan. Satu contoh bagus bagi para pengorganisir untuk menyelenggarakan suatu pendidikan rakyat yang dirancang dan dilaksanakan secara padu.

-----, Nurhady (2018), "Mengajak Orang Muda Mengusahakan Transformasi Desa: Sebuah Autoetnografi", *Wacana*, 36: 147-182. Yogyakarta: INSISTPress.

Satu analisis dan refleksi kritis tentang berbagai penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi orang-orang muda yang berminat menjadi pengorganisir rakyat di perdesaan yang diselenggarakan selama ini oleh berbagai organisasi di Indonesia. Menarik sebagai suatu gambaran tentang perkembangan gagasan, pemikiran, dan praksis pendidikan untuk melahirkan para pengorganisir rakyat dari sudut pandang seorang pengamat sekaligus pelaku yang terlibat langsung di dalamnya.

Srinivas, Mysore Narasimhachar (2018), "Hidup di Desa: Sumber Pemahaman bagi Ilmuwan Sosial", *Wacana*, 36: 183-197. Yogyakarta: INSISTPress.

Walaupun ditulis untuk para peneliti sosial, makalah ringkas ini berharga bagi pengorganisir untuk berkaca tentang pemikiran dan tindakan yang semestinya mereka lakukan, atau sebaliknya hindari, dalam kerja-kerja pengorganisasian di komunitas basis perdesaan. Karena, seorang pengorganisir rakyat pada dasarnya adalah juga seorang peneliti. Pada dasawarsa 1980-an, makalah ini menjadi salah satu 'bacaan wajib' dalam pelatihan dan pendidikan calon pengorganisir rakyat.

Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang (2003), *Mengorganisir Rakyat: Refleksi & Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta: INSISTPress (133 halaman).

Uraian pengalaman, sekaligus refleksi, dua orang pengorganisir senior selama lebih dari 20 tahun melakukan kerja-kerja pengorganisasian rakyat di delapan negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, dan Burma). Dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, cuplikan cerita nyata, foto-foto, dan grafis.

-----, Jo Hann & Roem Topatimasang (2015), *Melawan Keganjilan: Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Nasional Serikat PEKKA (206 halaman).

Tinjauan dan ulasan kritis tentang sejarah perkembangan satu organisasi berbasis keanggotaan yang unik di Indonesia. Selain menyajikan data dan informasi tentang beberapa keberhasilan mereka, juga menampilkan berbagai jebakan dan kegagalannya, termasuk beberapa kontroversi mendasar antara pemikiran dan tindakan. Salah satu contoh kasus tentang salah seorang pengorganisir mereka di komunitas basis di Halmahera, Maluku Utara, juga dijadikan contoh kasus dalam buku ini. Dilengkapi foto-foto dan infografis.

-----, Jo Hann (2018), *Berjalan di Atas Air*. Yogyakarta: INSISTPress. Terjemahan dari Jo Hann Tan, *Walking on Water*, sedang dalam proses penerjemahan dan percetakan dan akan segera diterbitkan oleh INSISTPress (186 halaman).

Rangkuman pengalaman penulis dalam proses-proses pengorganisasian di beberapa negara, terutama di Malaysia dan Indo Cina, dalam bentuk narasi-narasi ringkas, visualisasi gambar dan foto-foto. Buku ini lebih memusatkan perhatian pada proses-proses yang harus dilakukan seorang pengorganisir rakyat dalam memahami isu sosial, berurusan dengan pemerintah dan media massa, berjejaring dengan organisasi lain, bahkan juga berurusan dengan masalah-masalah pribadi atau keluarga.

Topatimasang, Roem, Mansour Fakh & Widjanarka E. Saksana (1988), *Menggeser Neraca Kekuatan: Panduan Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) (198 halaman).

Ditulis khusus untuk program-program pendidikan dasar bagi penggerak kelompok-kelompok konsumen, terutama pada dasawarsa 1980-1990. Meskipun demikian, beberapa bagian isinya, terutama beberapa lembar bahan bacaannya, bisa menjadi pustaka acuan yang relevan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dasar bagi para pengorganisir saat ini yang bergerak dalam berbagai isu lain gerakan sosial, terutama dalam beberapa isu yang sangat berkaitan, misalnya, isu pemenuhan hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan kaum perempuan, perbaikan pelayanan publik, dan sebagainya.

Tukan, Simon Suban & Mirisa Hasfaria (2018), *Membangun Kesadaran: Kisah-kisah Gerakan Tolak Tambang di Manggarai Raya dengan Memanfaatkan Pengetahuan Lokal*. Ruteng-Yogyakarta: JPIC SVD Ruteng & INSISTPress (52 halaman).

Meskipun tidak terlalu rinci menguraikan proses-proses pengorganisasian yang berlangsung di lapangan, buku ini menyediakan satu gambaran lengkap tentang bagaimana sistem pengetahuan lokal digunakan sebagai salah satu landas pijak pengorganisasian beberapa komunitas basis di satu daerah di Nusa Tenggara Timur menentang kehadiran perusahaan-perusahaan besar pertambangan.

Yayasan Mitra Aksi (2016), "Sekolah Danau Pauh: Laporan Visual Ringkas". Jambi: Pusat Data & Media Mitra Aksi, berkas tidak diterbitkan (20 halaman).

Sajian ringkas tentang konteks, gagasan, kurikulum, metodologi dan media, serta teknis penyelenggaraan satu proses pendidikan pengorganisir rakyat pemula di Jambi selama tiga bulan penuh. Satu berkas yang dilengkapi dengan foto-foto dan infografis yang dapat dijadikan bahan acuan dan pembandingan bagi mereka yang ingin menyelenggarakan proses pendidikan bagi pengorganisir rakyat pemula.

---- (2018), "Sekolah Pijoan: Laporan Visual Ringkas". Jambi: Pusat Data & Media Mitra Aksi, berkas tidak diterbitkan (30 halaman).

Sama seperti dokumen di atas, satu sajian ringkas tentang konteks, gagasan, kurikulum, metodologi dan media, serta teknis penyelenggaraan satu proses pendidikan pengorganisir rakyat pemula di Jambi selama tiga bulan penuh. Satu berkas yang dilengkapi dengan foto-foto dan infografis yang dapat dijadikan bahan acuan dan pembandingan bagi mereka yang ingin menyelenggarakan proses pendidikan bagi pengorganisir rakyat pemula.

■ INFOGRAFIS & VIDEO DOKUMENTER

Mahmudi, Ahmad (2011), "Menata Kembali Ruang Kehidupan". Solo: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) (43 keping gambar, bahasa Indonesia).

Sajian infografis tentang konsep, pendekatan, metodologi, dan proses-proses pelaksanaan satu praktik penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*, PAR) sekaligus pengorganisasian rakyat di kawasan perbukitan gersang di Pacitan, Jawa Timur. Satu contoh tentang bagaimana rakyat petani miskin tidak hanya mengubah keadaan ekonomi mereka menjadi lebih baik, tetapi sekaligus juga memulihkan kembali ekosistem lokal yang pernah rusak parah oleh pendekatan pembangunan salah kaprah, selain melahirkan pengetahuan baru tentang pendekatan kawasan dan ruang. Bahkan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, menjadikan proses-proses di Pacitan tersebut sebagai 'model nasional', khususnya untuk pengembangan daerah aliran sungai (DAS) berbasis data dan masyarakat tempatan.

Topatimasang, Roem (2006), “Sambil Berjalan”. Tual: Nen Masil & Baileo Maluku (berwarna, 24 menit, bahasa Indonesia).

Kompilasi perjalanan Jaringan Baileo Maluku selama sepuluh tahun melakukan proses-proses pendidikan dan pengorganisasian masyarakat lokal di Kepulauan Maluku. Menyajikan visi, prinsip-prinsip, strategi, metode dan media yang mereka gunakan dalam bentuk tuturan cerita (*story telling*). Salah satu dari sedikit sekali dokumen yang mengurai sangat rinci mulai dari konsep pemikiran, konteks makro dan mikro, sampai ke pendekatan, strategi, metodologi, dan langkah-langkah pengorganisasian di tingkat komunitas basis. Menjadi acuan banyak organisasi non pemerintah di Indonesia, terutama pada awal 1990 dan 2000-an. Video ini adalah perbaikan atau versi baru dari video sebelumnya yang lebih singkat, “Bergerak dari Bawah”.

■ FILM CERITA

Frankenheimer, John (1994), “The Burning Season” (Musim Bakar). HBO Pictures (berwarna, layar lebar, 123 menit, bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia).

Kisah nyata Fransisco (Chico) Mendes dan Serikat Buruh Karet di Brasil menentang perampasan tanah, penebangan hutan, dan perusakan lingkungan di wilayah Xhanpuri. Pemerintah dan pengusaha yang sangat kejam, sampai membakar hidup-hidup para petani pembangkang (yang mengilhami judul film), sebagai latar cerita. Di banyak organisasi gerakan sosial, film ini sempat dijadikan semacam ‘tontonan wajib’.

Gowariker, Ashutosh (2001), “Lagaan” (Pajak Bumi). Aamir Khan Films (berwarna, layar lebar, 224 menit, Bahasa Hindi dengan terjemahan Bahasa Indonesia).

Kisah pengorganisasian satu warga desa kecil di India menentang pajak bumi yang sangat mencekik oleh pemerintah penjajah Inggris. Menyajikan proses-proses pengorganisasian yang rumit dan hambatan-hambatan internal yang dihadapi para petani tersebut, termasuk ketidakpercayaan dan pengkhianatan di antara mereka sendiri, meskipun akhirnya mereka menang dalam pertandingan kriket yang dipersyaratkan oleh penguasa Inggris jika mereka ingin dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

-----, Ashutosh (2004), “Swades: We, the People” (Swadesi: Kami, Rakyat). UTV Motion Pictures (berwarna, layar lebar, 195 menit, Bahasa Hindi dengan terjemahan Bahasa Indonesia).

Satu penafsiran prinsip swadesi ajaran Gandhi dalam konteks masyarakat modern India di abad-XXI. Mengisahkan perubahan sikap seorang insiyur dan ilmuwan angkasa luar yang sudah mulai mapan bekerja di NASA, Amerika Serikat, sebagai pimpinan satu proyek besar. Kunjungan cutinya ke satu desa tradisional di India membuatnya tersadar bahwa pengetahuan dan teknologi canggih yang dikuasainya dapat membantu memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh warga desa itu, mulai dari masalah teknis (ketiadaan aliran listrik), masalah sosial yang lebih besar (pelayanan publik, korupsi, pendidikan dasar, pemilikan lahan), sampai ke masalah-masalah mendasar (pemberlakuan kasta, romantisme berlebihan memuja diri sendiri, dan kepedulian pada sesama warga yang tersingkirkan oleh sistem sosial).

Kurosawa, Akira (1946), “Waga Seishun Ni Kuinashi” (Tak Ada Penyesalan Masa Muda Kami). Toho Films & Columbia Pictures (hitam-putih, layar lebar, 110 menit, bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Indonesia).

Kisah fiksi berlatar peristiwa nyata pemecatan beberapa dosen dan pemberangusan gerakan mahasiswa di Kampus Universitas Kyoto pada 1933 oleh rezim militer fasis Jepang. Mengisahkan

bagaimana seorang pegiat gerakan mahasiswa memilih jalan memimpin gerakan bawah tanah menentang perang, dan bagaimana seorang remaja putri Profesor Yagihara dari kalangan kelas menengah atas memilih menjadi seorang petani dan pengorganisir rakyat perdesaaan.

-----, Akira (1948), “Yoidori Tenshi” (Malaikat Pemabuk). Toho Films & Columbia Pictures (hitam-putih, layar lebar, 102 menit, bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Indonesia).

Gambaran keadaan nyata porak-porandanya tatanan ekonomi dan sosial-politik Jepang pasca Perang Dunia II. Mengisahkan seorang dokter eksentrik memilih mengabdikan diri sebagai dokter gratis dan tinggal bersama kaum miskin kota di metropolitan Tokyo yang masih belum pulih dari kehancuran akibat perang, dan bagaimana seorang preman pasiennya akhirnya menyadari pentingnya peran sang dokter sebagai seorang pengorganisir untuk membangun nilai-nilai dan tatanan baru masyarakat mereka. Sarat dengan perdebatan filosofis dan ideologis.

-----, Akira (1954), “Shichinin no Samurai” (Tujuh Pendekar). Toho Films & Columbia Pictures (hitam-putih, layar lebar, 160 menit, bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Indonesia).

Salah satu karya paling monumental dan berpengaruh luas dari Kurosawa yang kemudian banyak diadaptasi ceritanya oleh film-film lain, seperti “The Magnificent Seven”. Mengisahkan tujuh *samurai* (pendekar) mengorganisir petani di satu desa di Jepang abad-XVI melawan gerombolan perampok dan penjahat. Film ini dengan sangat rinci menggambarkan strategi dan taktik pengorganisasian rakyat yang tertindas dan ketakutan.

-----, Akira (1962), “Tsubaki Sanjuro” (Sanjuro). Toho Films (hitam-putih, layar lebar, 96 menit, bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Indonesia).

Kisah sejarah abad-XVIII di satu daerah di Jepang, di mana seorang *samurai*, Tsubaki Sanjuro, mengorganisir sekelompok anak muda dan warga setempat menyusun strategi dan taktik untuk mengungkap kebobrokan dan korupsi para pejabat pemerintah setempat. Meskipun terjadi sekian abad lalu, proses-proses pengorganisasian yang dilakukan oleh Sanjuro dan kelompok anak-anak muda tersebut memperlihatkan banyak hal yang sangat relevan bagi pengorganisir rakyat masa kini, terutama dalam hal mendidik orang muda setempat untuk menjadi pengorganisir diri dan masyarakat sekitar mereka.